



**PEMERINTAH
KOTA BEKASI**



www.bekasikota.go.id



[@pemkot_bekasi](https://www.instagram.com/pemkot_bekasi)



[@pemkotbekasi](https://twitter.com/pemkotbekasi)

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH KOTA BEKASI TAHUN 2023



**PEMERINTAH
KOTA BEKASI**



 www.bekasikota.go.id

 [@pemkot_bekasi](https://www.instagram.com/pemkot_bekasi)

 [@pemkotbekasi](https://twitter.com/pemkotbekasi)

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi.

Penyusunan LKPJ merupakan tindaklanjut amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah : Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir (Pasal 19 ayat (1)).

Ruang lingkup LKPJ Kota Bekasi Tahun 2023 meliputi kebijakan pemerintah daerah seperti visi misi, strategi dan arah kebijakan daerah sebagaimana tertuang dalam perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018-2023, pengelolaan keuangan daerah secara makro termasuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Disisi lain, kami menyadari bahwa masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dan disempurnakan. Oleh karena itu melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini kami mengharapkan dapat memperoleh rekomendasi dari DPRD Kota Bekasi sebagai masukan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah pada tahun berjalan dan tahun berikutnya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak atas dukungan yang telah diberikan dalam rangka penyusunan LKPJ



Tahun 2023. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan memberkahi langkah-langkah serta upaya kita dalam mewujudkan Visi Kota Bekasi yang Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan untuk kebaikan kita bersama.

Aamiin Ya Rabbal Alamiin

Bekasi, 27 Maret 2024

Pj. WALI KOTA BEKASI,



R. GANI MUHAMAD





**PEMERINTAH
KOTA BEKASI**



 www.bekasikota.go.id

 [@pemkot_bekasi](https://www.instagram.com/pemkot_bekasi)

 [@pemkotbekasi](https://twitter.com/pemkotbekasi)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR vii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Dasar Hukum 1

1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah 5

1.2.1 Visi 5

1.2.2 Misi 7

1.3. Data Umum Daerah 15

1.3.1 Data Geografis Wilayah 15

1.3.2 Jumlah Penduduk 18

1.3.3 Pertumbuhan Penduduk 21

1.3.4 Jumlah PNS 23

1.3.5 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis
Pendapatan 27

1.3.6 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja..... 28

1.3.7 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis
Pembiayaan 29

BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH..... 31

2.1 Perubahan Kesatu Penjabaran APBD Kota Bekasi. 33

2.2 Perubahan Kedua Penjabaran APBD Kota Bekasi.. 40

2.3 Perubahan Ketiga Penjabaran APBD Kota Bekasi .. 44

2.4 Perubahan APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran
2023..... 50

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH 72

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan 74

3.1.1 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan
Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam
Perjanjian Kinerja 74



3.1.2	Capaian Kinerja Keluaran Masing – Masing Kegiatan Pada Setiap Urusan Pemerintahan	90
3.2	Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan	379
3.3	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya	394
BAB IV	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	415
4.1	Urusan Pemerintahan Yang ditugas-Pembantuan .	415
4.1.1	Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintahan Tingkat Atasnya	416
4.1.2	Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintah Dibawahnya	429
4.2	Hambatan/Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian	429
BAB V	PENUTUP	431
	LAMPIRAN – LAMPIRAN	439





**PEMERINTAH
KOTA BEKASI**



 www.bekasikota.go.id

 [@pemkot_bekasi](https://www.instagram.com/pemkot_bekasi)

 [@pemkotbekasi](https://twitter.com/pemkotbekasi)

DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Arsitektur Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kota Bekasi (2018-2023) 9

Tabel 1.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Kota Bekasi (2018-2023) 10

Tabel 1.3 Visi, Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan
Indikator Sasaran beserta Target Capaian
Pembangunan Kota Bekasi (2018-2023) 12

Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelurahan dan
Kecamatan Tahun 2023 19

Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Kota Bekasi Tahun 2015 – 2023 21

Tabel 1.6 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bekasi Tahun
2015 -2023 22

Tabel 1.7 Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat
Daerah..... 25

Tabel 1.8 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota
Bekasi Menurut Jenis Pendapatan Tahun
Anggaran 27

Tabel 1.9 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Bekasi
Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2023 28

Tabel 1.10 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota
Bekasi Tahun Anggaran 2023 30

Tabel 2.1 Ringkasan Perubahan Kesatu Penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2023 38

Tabel 2.2 Ringkasan Perubahan Kedua Penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2023 42

Tabel 2.3 Ringkasan Perubahan Ketiga Penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2023 48

Tabel 2.4 Ringkasan Perubahan APBD Kota Bekasi Tahun
Anggaran 2023 60

Tabel 2.5 Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2023 64

Tabel 2.6 Ringkasan Perubahan Kedua Penjabaran APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023 67

Tabel 2.7 Ringkasan Perbandingan Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 70

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023..... 72

Tabel 3.2 Hasil Capaian terhadap pelaksanaan Program..... 75

Tabel 3.3 Capaian Kinerja dan Analisis Keluaran Masing – Masing Kegiatan dengan Target Kinerja Program 92

Tabel 3.4 Peraturan Daerah Kota Bekasi yang Ditetapkan Tahun 2023 379

Tabel 3.5 Peraturan Wali Kota Bekasi yang Ditetapkan Tahun 2023 383

Tabel 3.6 Tindaklanjut Rekomendasi Terhadap Rekomendasi DPRD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023..... 395

Tabel 4.1 Target Kinerja Tugas Pembantuan Pemerintah Pusat Tahun 2023 418

Tabel 4.2 Realisasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat Tahun 2023..... 423

Tabel 5.1 Data Penghargaan/Prestasi Kinerja Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2023..... 432



**PEMERINTAH
KOTA BEKASI**



 www.bekasikota.go.id

 [@pemkot_bekasi](https://www.instagram.com/pemkot_bekasi)

 [@pemkotbekasi](https://twitter.com/pemkotbekasi)

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Batas Daerah Kota Bekasi 17

Gambar 1.2 Jumlah Penduduk Kota Bekasi Tahun
(2015-2023) 22

Gambar 1.3 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bekasi Tahun
(2015-2023) 23



**PEMERINTAH
KOTA BEKASI**



 www.bekasikota.go.id

 [@pemkot_bekasi](https://www.instagram.com/pemkot_bekasi)

 [@pemkotbekasi](https://twitter.com/pemkotbekasi)

BAB I PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. DASAR HUKUM

Kota Bekasi pada awalnya berstatus Kota Administratif sejak 20 April 1982 yang merupakan Ibukota dari Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Pusat Kota Bekasi. Pesatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan di Kota Administratif Bekasi memiliki konsekuensi terhadap peningkatan status Kota Administratif Bekasi



menjadi Daerah Otonom, dan secara resmi ditetapkan oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tanggal 16 Desember 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi dan perubahan status tersebut diresmikan pada tanggal 10 Maret 1997.

Pembentukan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi ini diikuti dengan Pembentukan DPRD dengan 45 anggota yang terpilih melalui Pemilihan Umum pada tanggal 11 Juli 1997. Berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 02 tahun 1998 tanggal 14 Februari 1998, diputuskan tanggal 10 Maret 1997 sebagai Hari Jadi Kota Bekasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 69 ayat (1) mengamanatkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai bentuk pelaporan hasil penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Kewajiban penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat adalah kerangka terbentuknya



hubungan *Check and Balance* antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD).

Adapun tata cara dan mekanisme penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam rangka melaksanakan amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 69 ayat (1) dan Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, Plt Wali Kota Bekasi selaku Kepala Daerah Kota Bekasi menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah berdasarkan aturan tersebut untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi sebagai bentuk Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan pembangunan Kota Bekasi selama tahun 2023.

Penyampaian LKPJ Kepala Daerah Tahun 2023 disampaikan kepada DPRD Kota Bekasi sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam rangka terbentuknya hubungan check and balance antara Kepala Daerah dengan DPRD dalam pembangunan Kota Bekasi selama tahun 2022.

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah :

1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;



5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi;
24. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
25. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
26. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
27. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
28. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
29. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun



- 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
30. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
31. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
32. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
33. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 72 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.2. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

1.2.1. VISI

Visi merupakan pandangan dan langkah-langkah ke depan menuju bagaimana mewujudkan Kota Bekasi sebagai kota yang maju secara konsisten, antisipatif, inovatif, dan produktif. Pandangan tersebut adalah suatu gambaran yang dituju tentang keadaan masa depan, bersihkan cita dan citra yang diwujudkan, melalui penggalan aspirasi dan persepsi masyarakat yang telah dilakukan serta dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen dan pemangku kepentingan di Kota Bekasi. Pernyataan Visi Kota Bekasi adalah:

“Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Insan”

Penetapan Visi tersebut disamping dilandasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014, juga mempertimbangkan berbagai aspirasi politik yang berkembang dikalangan pemangku kepentingan



(stakeholders) yang ada di Kota Bekasi. Visi tersebut menjadi arah pembangunan 5 (lima) tahun ke depan menuju kondisi ideal yang diinginkan.

Makna dari visi Pemerintahan Kota Bekasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bekasi yang **Cerdas** bahwa Kota Bekasi senantiasa memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung program-program kota menuju kota cerdas (*Smart City*), kota layak huni secara efisien dan berkesinambungan serta berwawasan lingkungan.
2. Bekasi yang **Kreatif** bahwa warga Kota Bekasi memiliki semangat untuk membangun wilayah dan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kreatif dan inovatif, mengingat kehidupan dan kemajuan masa depan masyarakat Kota Bekasi tidak dapat mengandalkan terhadap daya dukung sumber daya alam, dibutuhkan nilai, sikap, dan perilaku kreatif dan aparat, masyarakat, dan pelaku usaha dalam beraktivitas, berkehidupan dan berusaha.
3. Bekasi yang **Maju** mengandung arti bahwa pembangunan perekonomian masyarakat berkembang dengan baik dan mempunyai daya saing tinggi yang disertai dengan tumbuhnya investasi dan kapasitas ekonomi masyarakat, serta meningkatnya dukungan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan secara berkesinambungan.
4. Bekasi yang **Sejahtera**, mengandung arti bahwa suatu kondisi keadaan masyarakat Kota Bekasi yang cerdas, kreatif, dan maju dilengkapi dengan terpenuhinya kebutuhan dasar dan sekunder secara lahir dan bathin sehingga tercipta suasana kehidupan sosial kemasyarakatan yang aman dan damai.
5. Bekasi yang **Ihsan** mengandung arti bahwa dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan kesadaran berperilaku bagi warga kota dalam mentaati peraturan/perundangan yang berlaku. Makna ihsan bagi masyarakat luas



adalah meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan hidup beragama. Demikian pula warga Kota Bekasi senantiasa mengembangkan derajat keihsanannya melalui kedisiplinan dan ketertiban sosial dalam membangun ketahanan sosial masyarakat perkotaan.

1.2.2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah, dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Misi yang ditetapkan Pemerintah Kota Bekasi untuk mencapai Visi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai.
3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing.
4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif.
5. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

Misi Pertama adalah pengembangan tata Kelola pemerintahan dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kota Bekasi tahun 2018-2023 dilakukan melalui fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan, serta menempatkan aparatur sebagai pamong praja yang menjunjung tinggi integritas terhadap amanah, tugas, dan tanggung jawab berdasarkan 10 (sepuluh) prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu: 1) partisipasi masyarakat; 2) tegaknya supremasi hukum; 3) transparansi; 4) kesetaraan; 5) daya tanggap kepada



pemangku kepentingan (*stakeholders*); 6) berorientasi kepada visi; 7) akuntabilitas; 8) pengawasan; 9) efektivitas dan efisiensi; dan 10) profesionalisme. Pendekatan yang dilakukan untuk aktualisasi misi ini melalui penataan sistem, peningkatan kinerja, dan penguatan integritas aparatur.

Misi kedua bermakna bahwa pembangunan prasarana diarahkan untuk terpenuhinya kelengkapan dasar fisik lingkungan kota bagi kehidupan yang layak, sehat, aman, dan nyaman; terpenuhinya sarana perkotaan untuk mendukung penyelenggaraan dan pembangunan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi; serta terpenuhinya kelengkapan penunjang (utilitas) untuk pelayanan warga kota. Misi ini juga ditunjukkan untuk mengarahkan pembangunan prasarana dan sarana yang meningkat dan serasi; untuk memenuhi kehidupan warga kota dengan memperhatikan prinsip pengelolaan, pengendalian, dan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan kota yang maju, tumbuh, dan berkembang secara berkelanjutan.

Misi ketiga bermakna bahwa upaya untuk meningkatkan pelayanan pemerintah dan pembangunan perekonomian ditempuh melalui peningkatan kapasitas dan peluasan sektor usaha dan pengembangan pelaku usaha, pembangunan basis – basis industri kreatif, peningkatan investasi melalui penciptaan iklim usaha yang kompetitif dan inovatif, sehingga dapat membuka lapangan kerja dan usaha baru, yang pada akhirnya akan membentuk daya saing kota Bekasi menjadi lebih meningkat.

Misi keempat memiliki makna bahwa pembangunan dan layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya diarahkan untuk meningkatkan derajat kehidupan sosial masyarakat seiring dengan terbangunnya kehidupan keluarga sejahtera, terkelolanya persoalan dan dampak sosial perkotaan, meningkatkan partisipasi perempuan dan peran serta pemuda dalam pembangunan,



aktivitas olahraga pendidikan, rekreasi, dan prestasi serta aktualisasi budaya daerah sebagai fungsi sosial, normatif dan apresiasi.

Misi kelima bermakna bahwa di dalam era digital pembangunan Kota Bekasi dituntut untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan pelayanan kepada warga Bekasi secara cepat, tepat, dan transparan, serta melaksanakan percepatan program-program Kota Bekasi menuju kota cerdas (*Smart City*), kota layak huni secara efesien dan berkesinambungan serta berwawasan lingkungan.

Selanjutnya dengan memperhatikan penjelasan visi dan misi pembangunan Kota Bekasi 2018-2023, maka tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bekasi dirumuskan seperti terlihat pada **Tabel 1.1** sebagai berikut :

Tabel 1.1
Arsitektur Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bekasi (2018-2023)

VISI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, AJU, SEJAHTER DAN IHSAN						
MISI	Misi 1 : Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Misi 2 : Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai	Misi 3 : Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing	Misi 4 : Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif	Misi 5 : Membangun meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman	
TUJUAN	TUJUAN 1.1 Mewujudkan tata kelola pemerinthan yang profesional dan akuntabel	TUJUAN 2.1 Meningkatkan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum kota yang merata dan memenuhi standar pelayanan prima yang ramah, kreatif dan aksesibel	TUJUAN 3.1 Memperkuat struktur perekonomian kota dengan fokus pengembangan ekonomi kreatif	TUJUAN 4.1 Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas dan berakhlak mulia	TUJUAN 5.1 Mewujudkan Kota Bekasi yang tertib dan aman	TUJUAN 5.2 Mewujudkan Kota Bekasi yang nyaman
SASARAN	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	Terwujudnya Kota Bekasi yang sehat, aman, ramah dan aksesibel didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas yang merata dan memenuhi standar	- Meningkatnya Iklim Usaha dan Investasi - Menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka - Meningkatnya nilai PDRB sektor ekonomi kreatif - Menguatnya daya saing sektor perdagangan dan jasa - Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	- Terwujudnya masyarakat yang berpengetahuan tinggi, kreatif dan inovatif - Terwujudnya masyarakat Kota bekasi yang sehat - Meningkatnya kesejahteraan sosial dan keluarga - Meningkatnya partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	- Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh koheisi sosial yang kuat - Terwujudnya upaya dan kesiapsiagaan dalam mengurangi resiko bencana	Terwujudnya Daya Dukung Lingkungan Kota yang Berkelanjutan

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023

Dalam mencapai visi dan misi Kota Bekasi 2018-2023 perlu dijabarkan kembali dalam tujuan dan sasaran. Tujuan adalah rumusan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan Kota Bekasi. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan pembangunan dirumuskan dari penjelasan visi dan misi pembangunan Kota Bekasi periode 2018-2023 akan dijabarkan ke dalam standar kinerja yang harus dicapai pada sasaran pembangunan. Adapun untuk memudahkan melihat keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dapat di lihat pada **Tabel 1.2** dibawah:

Tabel 1.2
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Kota Bekasi 2018-2023

VISI-MISI	TUJUAN-SASARAN
	VISI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN
MISI 1:	MENINGKATKAN KAPASITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
1.1	Mewujudkan tata kelola pemerinthan yang profesional dan akuntabel
1.1.1	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah
MISI 2 :	MEMBANGUN, MENINGKATKAN DAN MENGEMBANGKAN PRASARANA DAN SARANA KOTA YANG MAJU DAN MEMADAI
2.1	Meningkatkan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum kota yang merata dan memenuhi standar pelayanan prima yang ramah, kreatif
2.1.1	Terwujudnya Kota Bekasi yang sehat. aman. ramah dan aksesibel didukung dengan prasarana. sarana. dan utilitas yang merata dan memenuhi standar
MISI 3 :	MENINGKATKAN PEREKONOMIAN BERBASIS POTENSI JASA KREATIF DAN PERDAGANGAN YANG BERDAYA SAING
3.1	Memperkuat struktur perekonomian kota dengan fokus pengembangan ekonomi kreatif
3.1.1	Meningkatnya Iklim Usaha dan Investasi
3.1.2	Menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka
3.1.3	Meningkatnya nilai PDRB sektor ekonomi kreatif
3.1.4	Menguatnya daya saing sektor perdagangan dan jasa
3.1.5	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat
MISI 4 :	MENINGKATKAN DAN MENGEMBANGKAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG BERPENEGTAHUAN, SEHAT, BERAKHLAK MULIA, KREATIF DAN INOVATIF
4.1	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas dan berakhlak mulia
4.1.1	Terwujudnya masyarakat yang berpengetahuan tinggi, kreatif dan inovatif
4.1.2	Terwujudnya masyarakat Kota Bekasi yang sehat
4.1.3	Meningkatnya kesejahteraan sosial dan keluarga
4.1.4	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan
MISI 5 :	MEMBANGUN, MENINGKATKAN DAN MENGEMBANGKAN KEHIDUPAN YANG AMAN DAN CERDAS, SERTA LINGKUNGAN HIDUP YANG NYAMAN
5.1	Mewujudkan Kota Bekasi yang tertib dan aman
5.1.1	Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung



VISI-MISI	TUJUAN-SASARAN
	VISI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN
	oleh kohesi sosial yang kuat
5.1.2	Terwujudnya upaya dan kesiapsiagaan dalam mengurangi risiko bencana
5.2	Mewujudkan Kota Bekasi yang nyaman
5.2.1	Terwujudnya Daya Dukung Lingkungan Kota yang Berkelanjutan

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023

Selanjutnya untuk mengukur tingkat pencapaian secara kualitatif maupun kuantitatif terhadap indikator kinerja, adapun target terhadap indikator kinerja sebagaimana **Tabel 1.3** berikut:

Tabel 1.3
Visi, Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran beserta Target Capaian Pembangunan Kota Bekasi 2018-2023

VISI-MISI	TUJUAN-SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET TAHUN KE -					KONDISI AKHIR	
					2019	2020	2021	2022	2023		
VISI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN											
MISI 1 : Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik											
1.1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	a	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	64.36	66.05	70.01	72.40	74.65	75.75	75.75
1.1.1	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	63,49	66.28	70.05	73.25	75.00	77.00	77.00
		2	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Nilai	3.25	3.33	3.37	3.40	3.43	3.47	3.47
		3	Nilai kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Opini BPK terhadap Laporan Keuangan)	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		4	Persentase Peningkatan PAD	%	11.10	21.53	11.67	16.91	10.00	10.01	10.01
		5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Nilai	78.42	80.98	82.87	84.80	86.77	88.80	88.80
MISI 2 : Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai											
2.1	Meningkatkan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum kota yang merata dan memenuhi standar pelayanan prima yang ramah, kreatif dan aksesibel	a	Indeks Infrastruktur wilayah	%	35.99	N/A	N/A	44.96	48.44	52.35	56.92
2.1.1	Terwujudnya Kota Bekasi yang sehat, aman, ramah dan aksesibel didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas yang merata dan memenuhi standar	1	Indeks Infrastruktur Ke-PU-an	%	19.96	N/A	N/A	20.18	20.38	20.57	20.94
		2	Indeks Sarana Prasarana Perhubungan	%	67.60	N/A	N/A	74.24	80.08	89.34	89.34
		3	Indeks Penataan Ruang	%	48.28	44.76	49.48	57.95	62.67	67.19	89.27
		4	Indeks Perumahan Permukiman Pertanian	%	24.15	36.65	45.03	52.25	58.70	64.09	64.09



VISI- MISI	TUJUAN-SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET TAHUN KE -					KONDISI AKHIR	
					2019	2020	2021	2022	2023		
MISI 3 : Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing											
3.1.	Memperkuat struktur perkonomian kota dengan fokus pengembangan ekonomi kreatif.	a	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5.86	5.86	0.08	3.17	4.25	5.32	5.32
3.1.1	Meningkatnya Iklim Usaha dan Investasi	1	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	%	Rp10,460,053, 504,800	10.00	10.00	4.00	4.00	4.00	4.00
3.1.2	Menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka	2	Angka Kemiskinan	%	4.11	3.81	8.58	5.70	4.72	4.01	4.01
		3	Gini Ratio	Nilai	0.35	0.35	0.35	0.35	0.34	0.34	0.34
		4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9.07	8.23	8.77	8.60	8.40	8.30	8.30
3.1.3	Meningkatnya nilai PDRB sektor ekonomi kreatif	5	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor ekonomi kreatif	%	N/A	7.64	9.43	11.63	14.35	17.70	17.70
3.1.4	Menguatnya daya saing sektor perdagangan dan jasa	6	Persentase peningkatan nilai sektor perdagangan dan jasa	%	Rp20,480,000, 000,000	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84
3.1.5	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	7	Peningkatan Pengeluaran perkapita	%	15,755.000	2.55	-10.00	3.00	3.00	3.00	3.00
		8	Laju Inflasi	%	4.23	3.89	2.00	2.92	3.21	3.53	3.53
MISI 4 : Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif.											
4.1	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas dan Berakhlak Mulia	a	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	81.04	81.59	81.59	82.31	82.67	83.04	83.04
4.1.1	Terwujudnya masyarakat yang berpengetahuan tinggi, kreatif dan inovatif	1	Indeks Pendidikan	Nilai	73.96	75.19	75.63	76.06	76.51	76.95	76.95
4.1.2	Terwujudnya masyarakat Kota bekasi yang sehat	2	Indeks Kesehatan	Nilai	84,45	84.50	84.50	84.55	84.60	84.65	84.65
4.1.3	Meningkatnya kesejahteraan sosial dan keluarga	3	Indeks pembangunan gender	Nilai	93.26	93.02	93.29	93.56	93.83	94.10	94.10
4.1.4	Meningkatnya partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	4	Jumlah Prestasi Pemuda Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional	Prestasi	N.A	10 TP, 2 TN	15 TP, 4 TN	20 TP, 6 TN	25 TP, 8 TN	30 TP, 10 TN, 1 TI	30 TP, 10 TN, 1 TI
MISI 5 : Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.											



VISI-MISI	TUJUAN-SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN		SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET TAHUN KE -					KONDISI AKHIR
						2019	2020	2021	2022	2023	
5.1	Mewujudkan Kota Bekasi yang tertib dan aman	a	Persentase penurunan jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban	%	45	7.20	5.96	4.94	4.09	3.39	3.39
		b	Indeks risiko bencana	Nilai	132	132	127	122	118	113	113
5.1.1	Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	1	Persentase penurunan jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban	%	45.00	7.20	5.96	4.94	4.09	3.39	3.39
		2	Prosentase kerjasama antar kelompok sara	%	0	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
5.1.2	Terwujudnya upaya dan kesiapsiagaan dalam mengurangi risiko bencana	3	Indeks risiko bencana	Nilai	132	132	127	122	118	113	113
		4	Indeks Penanggulangan Kebakaran	Nilai	56.24	59.13	64.03	68.28	73.43	78.68	78.68
5.2.	Mewujudkan Kota Bekasi yang nyaman	a	Indeks kualitas lingkungan hidup	Nilai	N/A	49.00	52.00	61.02	61.93	62.85	62.85
5.2.1	Terwujudnya Daya Dukung Lingkungan Kota yang Berkelanjutan	1	Indeks kualitas lingkungan hidup	Nilai	N/A	49.00	52.00	61.02	61.93	62.85	62.85

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023

Penyusunan Indikator Kinerja Utama Kota Bekasi dimaksudkan untuk memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan sasaran strategis yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

1.3. DATA UMUM DAERAH

1.3.1. DATA GEOGRAFIS WILAYAH

Secara letak astronomis, Kota Bekasi terletak antara $106^{\circ}48'28''$ – $107^{\circ}27'29''$ Bujur Timur dan $6^{\circ}10'6''$ – $6^{\circ}30'6''$ Lintang Selatan. Kota Bekasi merupakan daerah dataran dengan kemiringan antara 0 – 2% dan ketinggian antara 11 m – 81 m di atas permukaan air laut. Ketinggian kurang dari 25 m berada pada Kecamatan Medan Satria, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, dan Pondok gede. Sedangkan ketinggian antara 25 – 100 m di atas permukaan air laut berada di Kecamatan Bantar gebang, Pondok melati, dan Jatiasih. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan, wilayah administrasi Pemerintahan Kota Bekasi terbagi menjadi 12 kecamatan dengan 56 kelurahan.

Sebagai salah satu Kota Metropolitan di Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi memiliki luas yaitu 210,49 km², pada tahun 2020 Pemerintah Kota Bekasi bersama Badan Informasi Geospasial telah menyelesaikan Penegasan Batas Kelurahan pada 56 kelurahan dengan menggunakan Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi Akuisisi Tahun 2013-2015. Batas-batas wilayah administrasi yang mengelilingi wilayah Kota Bekasi adalah:

Sebelah Utara : Kabupaten Bekasi

Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor dan Kota Depok

Sebelah Barat : Provinsi DKI Jakarta

Sebelah Timur : Kabupaten Bekasi



Batas-batas Daerah Kota Bekasi dengan Kabupaten/Kota lainnya telah diselesaikan oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayah Kementerian Dalam Negeri bersama Biro Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Penegasan Batas Daerah dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2020 dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah sebagai berikut:

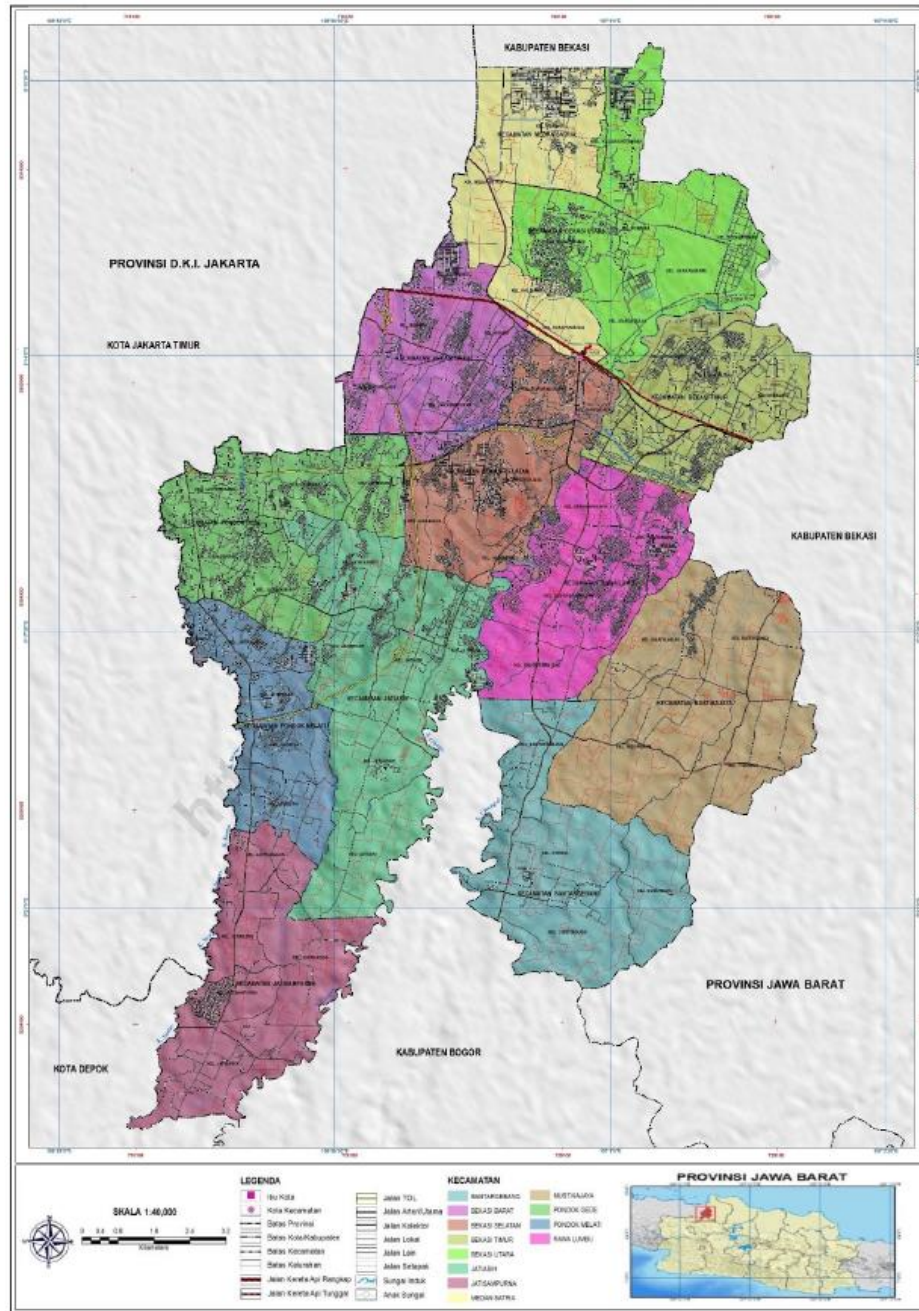
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Dan Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bekasi dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Bekasi dengan Kota Depok Provinsi Jawa Barat.

Keempat Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah tersebut dijadikan acuan Pemerintah Kota Bekasi untuk melakukan penegasan batas Kelurahan, maka pada tahun 2017 Pemerintah Kota Bekasi telah melakukan penegasan batas Kelurahan dengan diterbitkannya 10 Peraturan Wali Kota tentang Batas Kelurahan dan dilanjutkan pada tahun 2020 sebanyak 46 Peraturan Wali Kota tentang Batas Kelurahan dan 4 Peraturan Wali Kota



tentang Perubahan Batas Kelurahan. Adapun Peta Kota Bekasi sebagaimana terdapat dalam **Gambar 1.1** berikut:

Gambar 1.1
Peta Batas Daerah Kota Bekasi



Sumber : Kota Bekasi Dalam Angka 2023

Rendahnya ketinggian dan kemiringan wilayah di Kota Bekasi membuat beberapa kawasan sulit membuang air limpasan hujan dengan cepat. Hal ini memicu tingginya potensi genangan di beberapa Kecamatan khususnya ketika terjadi hujan lebat di Kota Bekasi. Wilayah yang berpotensi terjadi genangan air diantaranya meliputi,



Kecamatan Jatiasih (Kelurahan Jatirasa, Jatimekar dan Jatikramat), Kecamatan Bekasi Timur (Kelurahan Duren Jaya, Aren Jaya), Kecamatan Rawalumbu (Kelurahan Bojong Menteng, Pengasinan), Kecamatan Bekasi Selatan (Kelurahan Jakasetia, Pekayon Jaya, Marga Jaya), Kecamatan Bekasi Barat (Kelurahan Bintara Jaya, Kota Baru), dan Kecamatan Pondok Melati (Kelurahan Jatirahayu).

Kondisi fisik dasar Kota Bekasi secara umum tergolong ideal untuk pengembangan berbagai kegiatan perkotaan. Parameter yang dijadikan acuan adalah:

1. Kondisi topografi kawasan yang relatif datar sehingga memungkinkan pemanfaatan lahan kawasan secara optimal.
2. Kondisi geologi, memungkinkan optimalisasi daya dukung lahan, sehingga memberikan peluang untuk pengembangan berbagai kegiatan pembangunan fisik.
3. Kondisi hidrologi, ditunjang oleh keberadaan sungai/kali dan beberapa saluran irigasi sehingga memungkinkan aliran air permukaan (*run off*) diintegrasikan dengan jaringan drainase.
4. Kondisi iklim relatif tidak berpengaruh negatif terhadap pengembangan berbagai kegiatan perkotaan.

1.3.2. JUMLAH PENDUDUK

Jumlah penduduk Kota Bekasi senantiasa meningkat dari tahun ke tahunnya sebagaimana data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Tahun 2023 berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, diketahui bahwa jumlah penduduk Kota Bekasi Tahun 2023 sebanyak 2.513.669 (Dua juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus enam puluh sembilan) jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 1.257.169 (Satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus enam puluh sembilan) jiwa dan perempuan sebanyak 1.256.500 (Satu juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus) jiwa.



Adapun jumlah penduduk di Kota Bekasi yang dibagi berdasarkan jenis kelamin per kelurahan dan kecamatan dapat dilihat pada **Tabel 1.4** berikut:

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelurahan dan Kecamatan
Tahun 2023

No	Kecamatan/ Kelurahan	Jumlah Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
I.	Bekasi Timur	136.428	137.275	273.703
1	Bekasi Jaya	32.732	32.903	65.635
2	Margahayu	33.440	33.087	66.527
3	Duren Jaya	37.440	37.919	75.359
4	Aren Jaya	32.816	33.366	66.182
II.	Bekasi Barat	133.054	133.233	266.287
1	Bintara	31.585	31.390	62.975
2	Kranji	24.799	24.811	49.610
3	Kota Baru	22.469	22.394	44.863
4	Bintara Jaya	16.991	17.168	34.159
5	Jaka Sampurna	37.210	37.470	74.680
III.	Bekasi Utara	169.528	168.559	338.087
1	Kaliabang Tengah	47.453	46.930	94.383
2	Perwira	19.679	19.470	39.149
3	Harapan Baru	13.731	13.504	27.235
4	Teluk Pucung	35.142	34.840	69.982
5	Marga Mulya	12.219	11.989	24.208
6	Harapan Jaya	41.304	41.826	83.130
IV.	Bekasi Selatan	106.105	108.388	214.493
1	Pekayon Jaya	29.028	29.870	58.898
2	Marga Jaya	8.729	8.803	17.532
3	Jaka Mulya	18.138	18.352	36.490
4	Jaka Setia	21.487	22.030	43.517
5	Kayuringin Jaya	28.723	29.333	58.056
V.	Rawalumbu	111.408	110.990	222.398
1	Bojong Rawalumbu	39.766	39.149	78.915
2	Pengasinan	30.869	31.179	62.048
3	Sepanjang Jaya	18.351	18.474	36.825
4	Bojong Menteng	22.422	22.188	44.610
VI.	Medansatria	79.840	78.889	158.729
1	Medan Satria	14.273	13.841	28.114
2	Harapan Mulya	12.381	12.027	24.408
3	Pejuang	37.677	37.833	75.510
4	Kali Baru	15.509	15.188	30.697
VII.	Bantargebang	58.047	55.941	113.988
1	Bantargebang	17.404	16.801	34.205
2	Cikiwul	14.651	13.887	28.538

No	Kecamatan/ Kelurahan	Jumlah Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
3	Ciketingudik	12.964	12.429	25.393
4	Sumur Batu	13.028	12.824	25.852
VIII.	Pondokgede	113.443	113.980	227.423
1	Jatiwaringin	23.582	23.724	47.306
2	Jatibening	18.653	18.656	37.309
3	Jatimakmur	30.216	30.215	60.431
4	Jatibening Baru	18.868	18.995	37.863
5	Jaticempaka	22.124	22.390	44.514
IX.	Jatiasih	119.326	119.833	239.159
1	Jatimekar	20.089	20.179	40.268
2	Jatiasih	18.828	18.850	37.678
3	Jatikramat	22.680	22.894	45.574
4	Jatirasa	20.316	20.205	40.521
5	Jatiluhur	17.179	17.296	34.475
6	Jatisari	20.234	20.409	40.643
X.	Jatisampurna	56.912	57.196	114.108
1	Jatisampurna	15.229	15.398	30.627
2	Jatikarya	7.648	8.133	15.781
3	Jatiranggon	14.054	13.972	28.026
4	Jatirangga	9.208	9.108	18.316
5	Jatiraden	10.773	10.585	21.358
XI.	Mustikajaya	108.783	107.821	216.604
1	Padurenan	28.586	27.979	56.565
2	Cimuning	21.841	21.926	43.767
3	Mustikajaya	38.756	38.727	77.483
4	Mustikasari	19.600	19.189	38.789
XII.	Pondokmelati	64.295	64.395	128.690
1	Jatirahayu	28.702	28.845	57.547
2	Jatiwarna	11.425	11.583	23.008
3	Jatimelati	10.718	10.557	21.275
4	Jatimurni	13.450	13.410	26.860
Jumlah		1.257.169	1.256.500	2.513.669

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi (Data diolah, 2023)

Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara memiliki jumlah penduduk terbanyak, yakni 94.383 (Sembilan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tiga) jiwa dengan 47.453 jiwa penduduk laki-laki dan 46.930 jiwa perempuan. Sementara kelurahan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna dengan jumlah penduduk sebanyak 15.781 (Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu)

Jiwa, dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 7.648 jiwa dan 8.133 jiwa untuk penduduk perempuan. Perbedaan jumlah penduduk secara signifikan di Kota Bekasi berdasarkan kelurahan diakibatkan oleh perbedaan luas wilayah kelurahan dan tingkat perkembangan kelurahan tersebut, yang berdampak pada besaran jumlah RW, RT dan kepadatan penduduk.

1.3.3. PERTUMBUHAN PENDUDUK

Penduduk dalam suatu daerah merupakan subjek dan objek pembangunan, semakin bagus kualitas penduduk suatu daerah maka akan semakin baik pembangunan daerah tersebut. Pertambahan dan pertumbuhan penduduk baik secara alami maupun migrasi membawa pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan kota. Cepat lambatnya perkembangan dan pertumbuhan suatu kota pada umumnya ditentukan berdasarkan kecepatan pertumbuhan penduduknya. Kota Bekasi sebagai pusat kegiatan bisnis dan perdagangan, serta kegiatan jasa dan usaha lainnya menjadi daya tarik bagi pendatang untuk mencari kerja maupun bertempat tinggal, sehingga memiliki pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi.

Kota Bekasi termasuk kota yang jumlah penduduknya tergolong padat. Pada tahun 2015 jumlah Penduduk Kota Bekasi berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjumlah 2.384.413 jiwa, dan pada tahun 2023 jumlah penduduk Kota Bekasi telah mencapai 2.513.669 jiwa. Adapun jumlah penduduk Kota Bekasi Tahun 2015 sampai dengan 2023 sebagaimana pada **Tabel 1.5, Tabel 1.6, Gambar 1.2. dan Gambar 1.3** berikut :

Tabel 1.5
Jumlah Penduduk Kota Bekasi Tahun (2015 – 2023)

NO	TAHUN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	2	3	4	5
1	2015	1.216.260	1.168.153	2.384.413
2	2016	1.219.312	1.183.153	2.402.465
3	2017	1.221.623	1.193.468	2.415.091
4	2018	1.230.001	1.206.576	2.436.577

NO	TAHUN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	2	3	4	5
5	2019	1.235.490	1.213.340	2.448.830
6	2020	1.239.236	1.225.483	2.464.719
7	2021	1.238.339	1.230.109	2.468.448
8	2022	1.244.983	1.241.268	2.468.251
9	2023	1.257.169	1.256.500	2.513.696

Sumber : Disdukcapil Kota Bekasi (Data diolah, 2023)

Gambar 1.2.
Jumlah Penduduk Kota Bekasi Tahun (2015 – 2023)



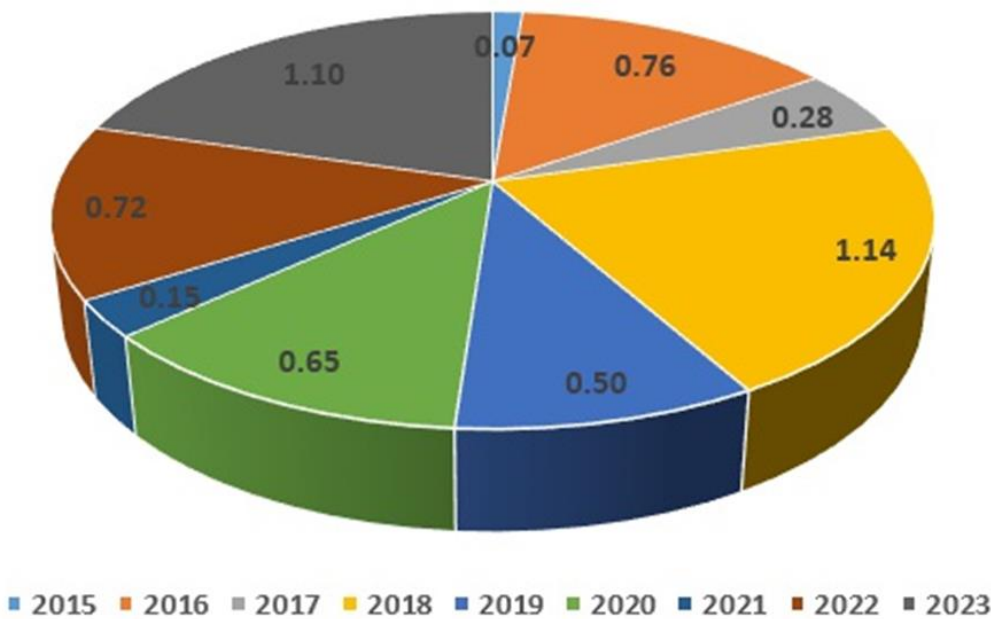
Sumber : Disdukcapil Kota Bekasi (Data diolah, 2023)

Tabel 1.6
Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bekasi Tahun (2015 – 2023)

NO	TAHUN	TOTAL PENDUDUK	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK
1	2	3	4
1	2015	2.384.413	0.07
2	2016	2.402.465	0.75
3	2017	2.415.091	0.52
4	2018	2.436.577	0.88
5	2019	2.448.830	0.50
6	2020	2.464.719	0.64
7	2021	2.468.448	0.15
8	2022	2.468.251	0.72
9	2023	2.513.696	1.09

Sumber : Disdukcapil Kota Bekasi (Data diolah, 2023)

Gambar 1.3
Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bekasi Tahun (2015 – 2023)



Sumber : Disdukcapil Kota Bekasi Tahun 2023 (diolah)

Berdasarkan perkembangan jumlah penduduk seperti terlihat pada **Tabel 1.5**, **Tabel 1.6**, **Gambar 1.2**. dan **Gambar 1.3**. dapat diketahui bahwa pertumbuhan penduduk di Kota Bekasi selama 8 tahun terakhir mengalami fluktuasi, dimana laju pertumbuhan penduduk terbesar berada pada tahun 2015-2016 dan laju pertumbuhan relatif kecil berada pada tahun 2019-2020. Laju pertumbuhan mengalami penurunan relatif besar terjadi pada tahun 2020-2021. Tahun 2023 laju pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan kembali mencapai 1.09.

1.3.4. JUMLAH PNS

Pemerintah Kota Bekasi memiliki Pegawai Sipil Negara yang tersebar di berbagai Perangkat Daerah. Pada tahun 2023 Perangkat Daerah Kota Bekasi berjumlah 44 (empat puluh empat) Perangkat Daerah, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi.

Adapun Perangkat Daerah yang ada di Kota Bekasi pada tahun 2023 terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
8. Badan Pendapatan Daerah;
9. Dinas Pendidikan;
10. Dinas Kesehatan;
11. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
12. Dinas Tata Ruang;
13. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
14. Dinas Pemadam Kebakaran;
15. Satuan Polisi Pamong Praja;
16. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
17. Dinas Sosial;
18. Dinas Perhubungan;
19. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
20. Dinas Ketenagakerjaan;
21. Dinas Lingkungan Hidup;
22. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
23. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
24. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
25. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;
26. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
27. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
28. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
29. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
30. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;



- 31. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- 32. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmadjid;
- 33. Kecamatan Bekasi Timur;
- 34. Kecamatan Bekasi Barat;
- 35. Kecamatan Bekasi Utara;
- 36. Kecamatan Bekasi Selatan;
- 37. Kecamatan Bantargebang;
- 38. Kecamatan Jatiasih;
- 39. Kecamatan Pondokgede;
- 40. Kecamatan Rawalumbu;
- 41. Kecamatan Medansatria;
- 42. Kecamatan Jatisampurna;
- 43. Kecamatan Mustikajaya;
- 44. Kecamatan Pondokmelati.

Untuk lebih jelas jumlah PNS berdasarkan Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Tabel 1.7.** berikut :

Tabel 1.7
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pada Perangkat Daerah

No	Unit Organisasi	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	2	3	4	5
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi	21	34	55
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi	26	11	37
3	Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi	123	83	206
4	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bekasi	29	10	39
5	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi	126	964	1090
6	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi	25	18	43
7	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi	17	9	26
8	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Bekasi	294	42	336
9	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi	17	11	28
10	Dinas Kesehatan Kota Bekasi	78	7	85
11	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan	5	20	25

No	Unit Organisasi	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	2	3	4	5
	Perikanan Kota Bekasi			
12	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Bekasi	41	20	61
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Bekasi	1186	2667	3853
14	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi	11	33	44
15	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Bekasi	101	19	120
16	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi	108	20	128
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi	55	27	82
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi	19	17	36
19	Dinas Pendidikan Kota Bekasi	19	26	45
20	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bekasi	199	6	205
21	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bekasi	44	51	95
22	Dinas Perhubungan Kota Bekasi	37	34	71
23	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bekasi	16	30	46
24	Dinas Sosial Kota Bekasi	100	35	135
25	Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	35	30	65
26	Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi	19	31	50
27	Inspektorat Daerah Kota Bekasi	62	23	85
28	Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi	56	44	100
29	Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi	37	12	49
30	Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi	40	17	57
31	Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi	38	17	55
32	Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi	28	21	49
33	Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi	50	26	76
34	Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi	55	18	73
35	Kecamatan Medansatria Kota Bekasi	46	15	61
36	Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi	24	18	42
37	Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi	33	12	45
38	Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi	35	10	45
39	Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi	40	12	52
40	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi	33	19	52
41	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	12	2	14
42	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi	178	382	560
43	Sekretariat Daerah Kota Bekasi	88	109	197
44	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi	30	22	52
JUMLAH		3636	5034	8670

Sumber : BKPSDM Kota Bekasi Tahun 2023

Berdasarkan data pada **Tabel 1.7.** tersebut Jumlah keseluruhan PNS di Kota Bekasi sebanyak 8.670 dengan Jumlah PNS Laki-Laki sebanyak 3.636 dan PNS Perempuan sebanyak 5.034. Perangkat Daerah yang memiliki PNS paling banyak adalah Dinas Pendidikan yaitu 3.853 orang PNS, sedangkan Jumlah PNS paling sedikit pada Pelaksana BPBD yaitu sebanyak 14 orang PNS.

1.3.5. REALISASI PENDAPATAN MENURUT JENIS PENDAPATAN

Anggaran pendapatan daerah Kota Bekasi Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 hingga Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 72 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Target Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 setelah perubahan sebesar Rp6.467.816.217.275,00 (*enam triliyun empat ratus enam puluh tujuh milyar delapan ratus enam belas juta dua ratus tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah*). Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan Kota Bekasi Tahun 2023 seperti ditunjukkan pada **Tabel 1.8** berikut :

Tabel 1.8
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bekasi
Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran

KODE REK	JENIS PENDAPATAN	TARGET ANGGARAN (APBD-P)	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN TARGET (%)
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN	6.467.816.217.275,00	6.141.461.290.655,00	94,95
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.997.679.830.479,00	2.729.779.692.051,00	91,06
1.1.1	Pajak Daerah	2.454.131.964.573,00	2.135.094.465.326,00	87,00
1.1.2	Retribusi Daerah	90.721.709.063,00	77.489.059.416,00	85,41
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	14.399.147.370,00	10.525.979.950,00	73,10
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	438.427.009.473,00	506.670.187.359,00	115,57

KODE REK	JENIS PENDAPATAN	TARGET ANGGARAN (APBD-P)	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN TARGET (%)
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.470.136.386.796,00	3.411.681.598.604,00	98,32
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi, Tahun 2023

Berdasarkan data dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kota Bekasi adalah sebesar Rp6.141.461.290.655,00 (*enam triliyun seratus empat puluh satu miliar empat ratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah*) atau 94,95% dari target yang telah ditentukan.

1.3.6. REALISASI BELANJA MENURUT JENIS BELANJA

Anggaran belanja daerah Kota Bekasi Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 hingga Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 72 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Target belanja daerah Kota Bekasi Tahun 2023 setelah perubahan sebesar Rp7.161.545.860.149,00 (*tujuh triliyun seratus enam puluh satu miliar lima ratus empat puluh lima juta delapan ratus enam ribu seratus empat puluh sembilan*). Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 seperti ditunjukkan pada **Tabel 1.9** berikut :

Tabel 1.9
Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Bekasi Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2023

KODE REK	JENIS BELANJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN TARGET (%)
1	2	3	4	5
2	BELANJA	7.161.545.860.149,00	6.361.452.063.828,00	88,83
2.1	BELANJA OPERASI	5.834.763.094.939,00	5.204.106.779.408,00	89,19
2.1.1	Belanja Pegawai	2.312.017.954.145,00	1.996.517.025.309,00	86,35
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.003.541.524.005,00	2.711.011.424.215,00	90,26

KODE REK	JENIS BELANJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN TARGET (%)
1	2	3	4	5
2.1.3	Bunga	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Subsidi	14.200.000.000,00	5.745.777.632,00	40,46
2.1.5	Hibah	351.168.406.789,00	339.386.797.252,00	96,65
2.1.6	Bantuan Sosial	153.835.210.000,00	151.445.755.000,00	98,45
2.2	BELANJA MODAL	1.285.407.290.423,00	1.153.113.147.375,00	89,71
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	41.375.474.787,00	4.232.137.045,00	10,23
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	41.375.474.787,00	4.232.137.045,00	10,23

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi, Tahun 2023

Berdasarkan data dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa realisasi belanja daerah Kota Bekasi tahun 2023 adalah sebesar Rp6.361.452.063.828,00 (*enam triliyun tiga ratus enam puluh satu miliar empat ratus lima puluh dua juta enam puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah*) atau 88,83% dari target yang telah ditentukan.

1.3.7. REALISASI PEMBIAYAAN MENURUT JENIS PEMBIAYAAN

Anggaran pembiayaan daerah Kota Bekasi Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 hingga Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 72 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Target Penerimaan Pembiayaan Kota Bekasi Tahun 2023 setelah perubahan sebesar Rp893.702.030.874,00 yang terdiri dari Penggunaan SILPA dan target pengeluaran pembiayaan sebesar Rp149.972.642.874,00 yang terdiri dari Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri, Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya dan Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dijabarkan pada **Tabel 1.10** berikut :

Tabel 1.10
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2023

NO	PEMBIAYAAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN TARGET (%)
1	2	3	4	5
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	893.702.030.874,00	893.702.721.045,00	100,00
3.1.1	Penggunaan SILPA	893.702.030.874,00	893.702.721.045,00	100,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	149.972.388.000,00	99.972.388.000,00	66,66
3.2.1	Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah	107.500.000.000,00	57.500.000.000,00	53,49
3.2.2	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00
3.2.4	Pembentukan Dana Cadangan	37.472.388.000,00	37.472.388.000,00	100,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi, Tahun 2023

Berdasarkan data dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp893.702.030.874,00 (*delapan ratus sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus dua juta tiga puluh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah*) dan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp99.972.388.000,00 (*sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*).



**PEMERINTAH
KOTA BEKASI**



 www.bekasikota.go.id

 [@pemkot_bekasi](https://www.instagram.com/pemkot_bekasi)

 [@pemkotbekasi](https://twitter.com/pemkotbekasi)

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

APBD pada hakikatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, DPRD dan Pemerintah Daerah harus selalu berupaya secara nyata dan terstruktur untuk menghasilkan suatu APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat atas dasar potensi masing-masing daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasikan kepentingan dan akuntabilitas publik. Suatu anggaran yang telah direncanakan dengan baik, sehingga baik tujuan maupun sasaran akan dapat tercapai secara berdayaguna dan berhasil guna.

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kota Bekasi, menggambarkan pencapaian realisasi anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah berdasarkan target yang telah ditetapkan pada dokumen APBD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Pemerintah Kota Bekasi melakukan tiga kali pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD, yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi sebagai berikut:



- a. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Tanggal 28 Maret 2023;
- b. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 10 April 2023; dan
- c. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 7 Juni 2023.

Pemerintah Kota Bekasi melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Bekasi melakukan perubahan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 17 November 2023 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 72 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 18 Desember 2023 .

Berikut ini diuraikan ringkasan perubahan APBD Kota Bekasi pada Tahun Anggaran 2023 dari mulai perubahan kesatu Penjabaran



APBD sampai dengan perubahan kedua penjabaran Perubahan APBD.

2.1. PERUBAHAN KESATU PENJABARAN APBD KOTA BEKASI

Dasar Perubahan Kesatu Penjabaran APBD Kota Bekasi adalah Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Tanggal 28 Maret 2023, adapun Perubahan Kesatu Penjabaran APBD sebagai berikut:

A. PENDAPATAN

Pada Pos Pendapatan terdapat penambahan sebesar Rp207.026.655.472,00 dari Rp5.799.481.642.839,00 menjadi Rp6.006.508.298.311,00 dengan rincian sebagai berikut:

I. Pendapatan Asli Daerah

Pada Pos Pendapatan Asli Daerah tidak terdapat perubahan.

II. Pendapatan Transfer

Terdapat penyesuaian belanja yang bersumber dari pendapatan transfer, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pada Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdapat penambahan sebesar Rp128.109.802.000,00 dari Rp1.876.106.756.000,00 menjadi Rp2.004.216.558.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) berupa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) bertambah sebesar Rp7.949.958.000,00, berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2022 tentang Perhitungan Pagu Alokasi Dan Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun Anggaran 2023 dan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 910/Kep.52-



Bappelitbangda/I/2023 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

- b) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bertambah sebesar Rp39.987.124.000,00, berdasarkan Surat Wali Kota Bekasi Nomor 906/8166/Bappelitbangda.AP4EP perihal Penetapan Rencana Kegiatan DAK Fisik TA 2023 di Kota Bekasi yang memuat dokumen Rencana Kegiatan DAK Fisik Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah disetujui oleh Kementerian/Lembaga setelah berkoordinasi dengan Bappenas pada aplikasi KRISNA.
- c) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik bertambah sebesar Rp80.172.720.000,00 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik bidang pendidikan bertambah sebesar Rp26.995.210.000,00, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 3/P/2023 Tentang Satuan Biaya, Penerima Dana dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Dana Bantuan Operasional Reguler dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Reguler Tahun Anggaran 2023.
 - 2) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik bidang kesehatan bertambah sebesar Rp35.963.517.000,00, berdasarkan Berita Acara Rencana Kegiatan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan TA 2023 BOK Dinas Kesehatan Kota Bekasi antara Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi dan Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan selaku Ketua Tim Kerja DAK Non Fisik dan Dana Transfer Lainnya.



- 3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik bidang Keluarga Berencana bertambah sebesar Rp16.399.423.000,00 berdasarkan Surat Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 5536/RC.05/J1/2022 hal Penyusunan Rencana Kegiatan (RK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Subbidang Keluarga Berencana dan BOKB TA 2023.
- 4) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi & UMKM bertambah sebesar Rp318.370.000,00 berdasarkan Surat Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Nomor B-883/SM/PW.05.03/X/2022 hal Penyampaian Penerima DAK Nonfisik PK2UMK TA 2023.
- 5) Dana Fasilitas Penanaman Modal bertambah sebesar Rp354.700.000,00, berdasarkan Surat Sekretaris Kementerian Investasi Nomor 41/A.3/B.1/2023 hal Penyampaian Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal.
- 6) Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian bertambah besar Rp141.500.000,00 berdasarkan Surat Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian Nomor B-1857/RC.240/A.1/10/2022 hal Dak Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian TA 2023.

2. Pendapatan Transfer antar Daerah

Pada Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah terdapat penambahan sebesar Rp78.916.853.472,00 dari Rp811.370.020.739,00 menjadi Rp890.286.874.211,00, dengan penjelasan sebagai berikut:

Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat bertambah sebesar Rp78.916.853.472,00, berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9077/KU.03.11.07/BPKAD hal Penyampaian Rincian Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi



Jawa Barat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.

B. BELANJA

Pada Pos Belanja terdapat penambahan belanja sebesar Rp207.026.655.472,00 dari Rp5.933.765.026.438,00 menjadi Rp6.140.791.681.910,00, dengan rincian sebagai berikut:

I. Belanja Operasi

Pada pos Belanja Operasi terdapat penambahan sebesar Rp143.898.997.122,00 dari Rp5.119.268.246.840,00 menjadi Rp5.263.167.243.962,00, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai bertambah sebesar Rp2.670.146.000,00 dari Rp2.300.472.385.344,00 menjadi Rp2.303.142.531.344,00 dikarenakan adanya penyesuaian belanja yang bersumber dari DAK Non Fisik Bidang Kesehatan;
2. Belanja Barang dan Jasa bertambah sebesar Rp112.962.498.122,00 dari Rp2.579.660.693.638,00 menjadi Rp 2.692.623.191.760,00 dikarenakan adanya penyesuaian belanja dari pendapatan transfer yang bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat meliputi DBHCHT, DAK Fisik dan DAK Non Fisik, serta Pendapatan Transfer Antar Daerah meliputi Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat;
3. Belanja Hibah bertambah sebesar Rp27.748.103.000,00 dari Rp230.735.167.858,00 menjadi Rp258.483.270.858,00 dikarenakan adanya penyesuaian belanja yang bersumber dari Pendapatan Transfer berupa DAK Non Fisik dan DAK Fisik;
4. Belanja Bantuan Sosial bertambah sebesar Rp518.250.000,00 dari Rp1.200.000.000,00 menjadi Rp1.718.250.000,00 yang dialokasikan untuk belanja bantuan sosial kepada individu yang bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yaitu DBHCHT.



II. Belanja Modal

Pada Pos Belanja Modal terdapat penambahan sebesar Rp63.127.658.350,00 dari Rp709.026.501.998,00 sehingga menjadi Rp772.154.160.348,00, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pada pos Belanja Modal Tanah tidak terdapat perubahan;
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin bertambah sebesar Rp26.514.225.738,00 dari Rp222.240.118.863,00 menjadi Rp248.754.344.601,00 dikarenakan penyesuaian belanja yang bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat meliputi DBHCHT, DAK Fisik dan DAK Non Fisik serta Pendapatan Transfer Antar Daerah yaitu Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat ;
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan bertambah sebesar Rp25.628.982.612,00 dari Rp224.141.754.602,00 menjadi Rp249.770.737.214,00 dikarenakan penyesuaian belanja yang bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat meliputi DBHCHT dan DAK Fisik serta Pendapatan Transfer Antar Daerah yaitu Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat ;
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi bertambah sebesar Rp10.885.450.000,00 dari Rp172.360.060.295,00 menjadi Rp183.245.510.295,00 dikarenakan penyesuaian belanja yang bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat meliputi DBHCHT dan DAK Fisik serta Pendapatan Transfer Antar Daerah meliputi Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat;
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya bertambah sebesar Rp99.000.000,00 dari Rp 2.845.368.238,00 menjadi Rp 2.944.368.238,00 dikarenakan penyesuaian belanja yang bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat meliputi DBHCHT, DAK Non Fisik dan DAK Fisik serta



Pendapatan Transfer Antar Daerah yaitu Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat.

III. Belanja Modal

Pada Pos Belanja Tak terduga tidak terdapat perubahan.

C. PEMBIAYAAN

Pada Pos pembiayaan tidak terdapat perubahan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka Struktur APBD berdasarkan klasifikasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Ringkasan Perubahan Kesatu Penjabaran APBD
Tahun Anggaran 2023

KODE	URAIAN	APBD TA. 2023 (Rp)	PERUBAHAN PENJABARAN APBD TA. 2023 (Rp)	BERTAMBAH /(BERKURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN	5.799.481.642.839,00	6.006.508.298.311,00	207.026.655.472,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.112.004.866.100,00	3.112.004.866.100,00	0,00
4.1.1	Pajak Daerah	2.454.131.964.573,00	2.454.131.964.573 ,00	0,00
4.1.2	Retribusi Daerah	90.721.709.063,00	90.721.709.063,00	0,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.399.147.370,00	14.399.147.370 ,00	0,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	552.752.045.094,00	552.752.045.094,00	0,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.687.476.776.739,00	2.894.503.432.211,00	207.026.655.472,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.876.106.756.000,00	2.004.216.558.000,00	128.109.802.000,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	811.370.020.739,00	890.286.874.211,00	78.916.853.472,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00
4.3.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
5	Belanja	5.933.765.026.438,00	6.140.791.681.910,00	207.026.655.472,00
5.1	Belanja Operasi	5.119.268.246.840,00	5.263.167.243.962,00	143.898.997.122,00
5.1.1	Belanja Pegawai	2.300.472.385.344,00	2.303.142.531.344,00	2.670.146.000,00

KODE	URAIAN	APBD TA. 2023 (Rp)	PERUBAHAN PENJABARAN APBD TA. 2023 (Rp)	BERTAMBAH /(BERKURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.579.660.693.638,00	2.692.623.191.760,00	112.962.498.122,00
5.1.3	Belanja Subsidi	7.200.000.000	7.200.000.000,00	0,00
5.1.4	Belanja Hibah	230.735.167.858,00	258.483.270.858,00	27.748.103.000,00
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.200.000.000,00	1.718.250.000,00	518.250.000,00
5.2	Belanja Modal	709.026.501.998,00	772.154.160.348,00	63.127.658.350,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	87.439.200.000,00	87.439.200.000,00	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	222.240.118.863,00	248.754.344.601,00	26.514.225.738,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	224.141.754.602,00	249.770.737.214,00	25.628.982.612,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	172.360.060.295,00	183.245.510.295,00	10.885.450.000,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.845.368.238,00	2.944.368.238,00	99.000.000,00
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	105.470.277.600,00	105.470.277.600,00	0,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	105.470.277.600,00	105.470.277.600,00	0,00
5.4	Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
	Surplus/ (Defisit)	(134.283.383.599,00)	(134.283.383.599,00)	0,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	134.283.383.599,00	134.283.383.599,00	0,00
6.1	Penerimaan Pembiayaan	186.783.383.599,00	186.783.383.599,00	0,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	186.783.383.599,00	186.783.383.599,00	0,00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya. Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	186.783.383.599,00	186.783.383.599,00	0,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	52.500.000.000,00	52.500.000.000,00	0,00
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	22.500.000.000,00	22.500.000.000,00	0,00
6,2,3	Pembayaran Cicilan	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN	APBD TA. 2023 (Rp)	PERUBAHAN PENJABARAN APBD TA. 2023 (Rp)	BERTAMBAH /(BERKURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	Pokok Utang yang Jatuh Tempo			
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya. Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	52.500.000.000,00	52.500.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	134.283.383.599,00	134.283.383.599,00	0,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00

Sumber : BPKAD Kota Bekasi Tahun 2023

2.2. PERUBAHAN KEDUA PENJABARAN APBD KOTA BEKASI

Dasar Perubahan Kedua Penjabaran APBD Kota Bekasi adalah Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 10 April 2023, adapun Perubahan Kedua Penjabaran APBD sebagai berikut:

A. PENDAPATAN

Pada Pos Pendapatan terdapat penambahan sebesar Rp356.446.480.500,00 dari Rp6.006.508.298.311,00 menjadi Rp6.362.954.778.811,00 dengan rincian sebagai berikut:

I. Pendapatan Asli Daerah

Pada Pos Pendapatan Asli Daerah tidak terdapat perubahan.

II. Pendapatan Transfer

Pada Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah terdapat penambahan sebesar Rp356.446.480.500,00, dari Rp890.286.874.211,00 menjadi Rp1.246.733.354.711,00, karena adanya penyesuaian Pendapatan Transfer Antar Daerah yaitu Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi DKI Jakarta, Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 259 Tahun 2023 tentang Penerima Bantuan Keuangan dalam Bentuk Uang yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

B. BELANJA

Pada Pos Belanja terdapat penambahan belanja sebesar Rp356.446.480.500,00 dari Rp6.140.791.681.910,00, menjadi Rp6.497.238.162.410,00, dengan rincian sebagai berikut:

I. Belanja Operasi

Pada pos Belanja Operasi terdapat penambahan sebesar Rp 221,833,679,385,00 dari Rp5.263.167.243.962,00 menjadi Rp5.485.000.923.347.00, secara umum dikarenakan adanya penyesuaian Belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi DKI Jakarta, dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai bertambah sebesar Rp1.116.315.000,00 dari Rp2.303.142.531.344,00 menjadi Rp2.304.258.846.344,00;
2. Belanja Barang dan Jasa bertambah sebesar Rp68.718.404.385,00 dari Rp2.692.623.191.760,00 menjadi Rp2.761.341.596.145.00;
3. Belanja Bantuan Sosial bertambah sebesar Rp151.998.960.000,00 dari Rp1.718.250.000,00 menjadi Rp153.717.210.000.00.

II. Belanja Modal

Pada Pos Belanja Modal terdapat penambahan sebesar Rp134.612.801.115,00 dari Rp772.154.160.348,00, sehingga menjadi Rp906.766.961.463.00, yang secara umum dikarenakan adanya penyesuaian Belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi DKI Jakarta, dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Modal Tanah bertambah sebesar Rp38.051.358.615,00 dari Rp87.439.200.000,00 menjadi Rp125.490.558.615.00.;



- 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin bertambah sebesar Rp42.737.655.500,00 dari Rp248.754.344.601,00 menjadi Rp291.492.000.101.00;
- 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan bertambah sebesar Rp10.861.433.000,00 dari Rp249.770.737.214,00 menjadi Rp260.632.170.214,00;
- 4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi bertambah sebesar Rp42.962.354.000,00 dari Rp183.245.510.295,00 menjadi Rp226.207.864.295.00.

III. Belanja Tidak Terduga

Pada Pos Belanja Tak terduga tidak terdapat perubahan.

C. PEMBIAYAAN

Pada pos penerimaan pembiayaan tidak terdapat perubahan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka Struktur APBD berdasarkan klasifikasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 10 April 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2
Ringkasan Perubahan Kedua Penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2023

KODE	URAIAN	PERUBAHAN 1 PENJABARAN APBD TA. 2023 (Rp)	PERUBAHAN 2 PENJABARAN APBD TA. 2023 (Rp)	BERTAMBAH /(BERKURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN	6.006.508.298.311,00	6.362.954.778.811,00	356.446.480.500,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.112.004.866.100,00	3.112.004.866.100,00	0,00
4.1.1	Pajak Daerah	2.454.131.964.573,00	2.454.131.964.573,00	0,00
4.1.2	Retribusi Daerah	90.721.709.063,00	90.721.709.063,00	0,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.399.147.370,00	14.399.147.370,00	0,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	552.752.045.094,00	552.752.045.094,00	0,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.894.503.432.211,00	3.250.949.912.711,00	356.446.480.500,00

KODE	URAIAN	PERUBAHAN 1 PENJABARAN APBD TA. 2023 (Rp)	PERUBAHAN 2 PENJABARAN APBD TA. 2023 (Rp)	BERTAMBAH /(BERKURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.004.216.558.000,00	2.004.216.558.000,00	0,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	890.286.874.211,00	1.246.733.354.711,00	356.446.480.500,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00
4.3.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
5	Belanja	6.140.791.681.910,00	6.497.238.162.410,00	356.446.480.500,00
5.1	Belanja Operasi	5.263.167.243.962,00	5.485.000.923.347,00	221.833.679.385,00
5.1.1	Belanja Pegawai	2.303.142.531.344,00	2.304.258.846.344,00	1.116.315.000,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.692.623.191.760,00	2.761.341.596.145,00	68.718.404.385,00
5.1.3	Belanja Subsidi	7.200.000.000,00	7.200.000.000,00	0,00
5.1.4	Belanja Hibah	258.483.270.858,00	258.483.270.858,00	0,00
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.718.250.000,00	153.717.210.000,00	151.998.960.000,00
5.2	Belanja Modal	772.154.160.348,00	906.766.961.463,00	134.612.801.115,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	87.439.200.000,00	125.490.558.615,00	38.051.358.615,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	248.754.344.601,00	291.492.000.101,00	42.737.655.500,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	249.770.737.214,00	260.632.170.214,00	10.861.433.000,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	183.245.510.295,00	226.207.864.295,00	42.962.354.000,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.944.368.238,00	2.944.368.238,00	0,00
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	105.470.277.600	105.470.277.600,00	0,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	105.470.277.600	105.470.277.600,00	0,00
5.4	Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
	Surplus/ (Defisit)	(134.283.383.599,00)	(134.283.383.599,00)	0,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	134.283.383.599,00	134.283.383.599,00	0,00
6.1	Penerimaan Pembiayaan	186.783.383.599,00	186.783.383.599,00	0,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	186.783.383.599,00	186.783.383.599,00	0,00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.1.3	Hasil Penjualan	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	PERUBAHAN 1 PENJABARAN APBD TA. 2023 (Rp)	PERUBAHAN 2 PENJABARAN APBD TA. 2023 (Rp)	BERTAMBAH /(BERKURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya. Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	186.783.383.599,00	186.783.383.599,00	0,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	52.500.000.000,00	52.500.000.000,00	0,00
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	22.500.000.000,00	22.500.000.000,00	0,00
6,2,3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00
6,2,4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6,2,5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya. Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	52.500.000.000,00	52.500.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	134.283.383.599,00	134.283.383.599,00	0,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00

Sumber : BPKAD Kota Bekasi Tahun 2023

2.3. PERUBAHAN KETIGA PENJABARAN APBD KOTA BEKASI

Dasar Perubahan Ketiga Penjabaran APBD Kota Bekasi adalah Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 7 Juni 2023 adapun Perubahan Ketiga Penjabaran APBD sebagai berikut:

A. PENDAPATAN

Pada Pos Pendapatan tidak terdapat perubahan.

B. BELANJA

Pada Pos Belanja terdapat penambahan belanja sebesar Rp106.602.597.687,00 dari Rp6.497.238.162.410,00 menjadi Rp6.603.840.760.097,00 dengan rincian sebagai berikut:

I. Belanja Operasi

Pada pos Belanja Operasi terdapat penambahan sebesar Rp61.880.507.140,00 dari Rp5.485.000.923.347,00 menjadi Rp5.546.881.430.487,00, secara umum dikarenakan adanya penyesuaian belanja yang bersumber dari penggunaan SiLPA, dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai bertambah sebesar Rp3.620.312.764,00 dari Rp2.304.258.846.344,00 menjadi Rp2.307.879.159.108,00, yang terdiri dari penyesuaian belanja yang bersumber dari penggunaan SiLPA JKN dan SiLPA DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru;
2. Belanja Barang dan Jasa bertambah sebesar Rp58.142.194.376,00 dari Rp2.761.341.596.145,00 menjadi Rp2.819.483.790.521,00 yang secara umum dikarenakan penyesuaian belanja yang bersumber dari penggunaan SiLPA JKN, SiLPA BOS, SiLPA Bantuan Keuangan Khusus Provinsi DKI Jakarta dan SiLPA DAK Non Fisik;
3. Belanja Bantuan Sosial bertambah sebesar Rp118.000.000,00 dari Rp153.717.210.000,00 menjadi Rp153.717.210.000,00 dikarenakan penyesuaian belanja yang bersumber dari penggunaan SiLPA Bantuan Provinsi DKI Jakarta berupa beasiswa kepada siswa tidak mampu di Kecamatan Bantargebang.



II. Belanja Modal

Pada Pos Belanja Modal terdapat penambahan sebesar Rp44.574.511.437,00 dari Rp906.766.961.463.00 sehingga menjadi Rp951.341.472.900,00, yang secara umum dikarenakan adanya penyesuaian belanja yang bersumber dari penggunaan SiLPA Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi DKI Jakarta, SiLPA JKN, SiLPA DAK Non Fisik, dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Modal Tanah bertambah sebesar Rp10.256.312.255,00 dari Rp125.490.558.615.00 menjadi Rp135.746.870.870,00.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin bertambah sebesar Rp24.376.983.452,00 dari Rp291.492.000.101.00 menjadi Rp315.868.983.553,00;
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan bertambah sebesar Rp10.861.433.000,00 dari Rp249.770.737.214,00 menjadi Rp260.632.170.214,00;
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi bertambah sebesar Rp8.580.463.730,00 dari Rp226.207.864.295.00 menjadi Rp234.788.328.025,00;
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya bertambah sebesar Rp7.078.000,00.

III. Belanja Tak Terduga

Pada Pos Belanja Tak terduga terdapat penambahan sebesar Rp147.579.110,00 dari Rp105.470.277.600,00 sehingga menjadi Rp105.617.856.710,00, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pengembalian Dana Kemitraan Bantuan Keuangan Khusus Provinsi DKI Jakarta ke Rekening Kas Umum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp145.559.110,00;
- 2) Pengembalian Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Jawa Barat TA 2022 sebesar Rp1.700.000,00 yang telah



dilakukan pada tanggal 24 Maret 2023 melalui SP2D Nomor 01397/SP2D/2023;

- 3) Pengembalian Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Jawa Barat TA 2022 sebesar Rp320.000,00 yang telah dilakukan pada tanggal 24 Maret 2023 melalui SP2D Nomor 01397/SP2D/2023.

C. PEMBIAYAAN

Pada pos penerimaan pembiayaan terdapat penambahan pada pos penerimaan pembiayaan sebesar Rp106.602.597.687,00 dari Rp134.283.383.599,00 menjadi Rp240.885.981.286,00, penambahan tersebut dikarenakan adanya penggunaan SiLPA dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Penambahan pada penghematan belanja sebesar Rp83.720.138.449,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) SiLPA DAK Non Fisik sebesar Rp10.482.756.553,00
 - b) Sisa Belanja Transfer sebesar Rp 73,237,381,896,00 terdiri dari SiLPA Bantuan Keuangan Khusus Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp73.235.361.896,00 dan SiLPA Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2.020.000,00
- 2) Penambahan pada sisa belanja lain sebesar Rp22.882.459.238,00 yang merupakan SiLPA Non RKUD yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD (JKN) sebesar Rp20.858.909.768,00 dan Sisa Dana BOS sebesar Rp2.023.549.470,00.

Berdasarkan penjelasan diatas maka Struktur APBD berdasarkan klasifikasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 10 April 2023 sebagaimana tabel berikut :



Tabel 2.3
Ringkasan Perubahan Ketiga Penjabaran APBD Kota Bekasi

KODE	URAIAN	PERUBAHAN 2 PENJABARAN APBD TA. 2023 (Rp)	PERUBAHAN 3 penjabaran APBD TA. 2023 (Rp)	BERTAMBAH /(BERKURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN	6.362.954.778.811,00	6.362.954.778.811,00	0,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.112.004.866.100,00	3.112.004.866.100,00	0,00
4.1.1	Pajak Daerah	2.454.131.964.573,00	2.454.131.964.573,00	0,00
4.1.2	Retribusi Daerah	90.721.709.063,00	90.721.709.063,00	0,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.399.147.370,00	14.399.147.370,00	0,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	552.752.045.094,00	552.752.045.094,00	0,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.250.949.912.711	3.250.949.912.711	0,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.004.216.558.000	2.004.216.558.000	0,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	1.246.733.354.711	1.246.733.354.711	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00
4.3.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	0,00	0,00	0,00
5	Belanja	6.497.238.162.410	6.603.840.760.097	106.602.597.687
5.1	Belanja Operasi	5.485.000.923.347	5.546.881.430.487	61.880.507.140
5.1.1	Belanja Pegawai	2.304.258.846.344	2.307.879.159.108	3.620.312.764
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.761.341.596.145	2.819.483.790.521	58.142.194.376
5.1.3	Belanja Subsidi	7.200.000.000	7.200.000.000	-
5.1.4	Belanja Hibah	258.483.270.858	258.483.270.858	-
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	153.717.210.000	153.835.210.000	118.000.000
5.2	Belanja Modal	906.766.961.463	951.341.472.900	44.574.511.437
5.2.1	Belanja Modal Tanah	125.490.558.615	135.746.870.870	10.256.312.255
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	291.492.000.101	315.868.983.553	24.376.983.452
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	260.632.170.214	261.985.844.214	1.353.674.000
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	226.207.864.295	234.788.328.025	8.580.463.730
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.944.368.238	2.951.446.238	7.078.000
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	105.470.277.600	105.617.856.710	147.579.110
5.3.1	Belanja Tidak	105.470.277.600	105.617.856.710	147.579.110

KODE	URAIAN	PERUBAHAN 2 PENJABARAN APBD TA. 2023 (Rp)	PERUBAHAN 3 penjabaran APBD TA. 2023 (Rp)	BERTAMBAH /(BERKURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	Terduga			
5.4	Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
	Surplus/ (Defisit)	(134.283.383.599)	(240.885.981.286)	(106.602.597.687)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	134.283.383.599	240.885.981.286	06.602.597.687
6.1	Penerimaan Pembiayaan	186.783.383.599	293.385.981.286	106.602.597.687
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	186.783.383.599	293.385.981.286	106.602.597.687
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya. Sesuai dengan Ketentuan Perundang- Undangan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	186.783.383.599	293.385.981.286	106.602.597.687
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	52.500.000.000	52.500.000.000	0,00
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000	30.000.000.000	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	22.500.000.000	22.500.000.000	0,00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya. Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	52.500.000.000	52.500.000.000	0,00
	Pembiayaan Netto	134.283.383.599	240.885.981.286	106.602.597.687
	Sisa Lebih/(Kurang)	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	PERUBAHAN 2 PENJABARAN APBD TA. 2023 (Rp)	PERUBAHAN 3 penjabaran APBD TA. 2023 (Rp)	BERTAMBAH /(BERKURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan			

Sumber : BPKAD Kota Bekasi Tahun 2023

2.4. PERUBAHAN APBD KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2023

Dasar Perubahan APBD Kota Bekasi Tahun anggaran 2023 adalah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 tanggal 27 Oktober 2023, adapun Perubahan APBD Tahun 2023 sebagai berikut:

A. PENDAPATAN

Pada Pos Pendapatan terdapat penambahan sebesar Rp652.091.488.382,00 dari Rp5.799.481.642.839,00 menjadi Rp6.451.573.131.221,00, dengan rincian sebagai berikut :

I. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan sebesar Rp114.325.035.621,00 atau 3,67% dari Rp3.112.004.866.100,00 menjadi Rp2.997.679.830.479,00 yang bersumber dari:

1. Pajak Daerah
- Pajak Daerah diproyeksikan tetap sebesar Rp2.454.131.964.573,00.
2. Retribusi Daerah
- Retribusi Daerah diproyeksikan tetap sebesar Rp90.721.709.063,00
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan diproyeksikan tetap sebesar Rp14.399.147.370,00

4. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah mengalami penurunan sebesar Rp114.325.035.621,00 atau (20,68%) dari Rp552.752.045.094,00 menjadi Rp438.427.009.473,00, yang disebabkan karena adanya penurunan pendapatan BLUD RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi dan BLUD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi.

II. Pendapatan Transfer

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami penambahan sebesar Rp17.797.288.397,00 atau 12,55% yang semula Rp141.844.018.000,00 menjadi Rp159.641.306.397,00

b) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) diproyeksikan tetap sebesar Rp1.222.256.920.000,00.

c) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik mengalami penambahan sebesar Rp39.987.124.000,00 atau 100% yang semula Rp0,00 menjadi Rp39.987.124.000,00.

d) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik mengalami penambahan sebesar Rp70.310.292.943,00 atau 13,73% yang semula Rp512.005.818.000,00 menjadi Rp582.316.110.943,00.

2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

a) Pendapatan Bagi Hasil



Pendapatan Bagi Hasil mengalami penambahan sebesar Rp190.444.866.737,00 atau 23,47% yang semula Rp811.370.020.739,00 menjadi Rp1.001.814.887.476,00 berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Jawa Barat.

b) Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan mengalami penambahan sebesar Rp435.505.632.926,00 atau 100% yang semula Rp0,00 menjadi Rp435.505.632.926,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Sebesar Rp79,059,152,426,00;
2. Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Sebesar Rp356.446.480.500,00.

B. BELANJA

I. Belanja Operasi

Pada pos Belanja Operasi terdapat pengurangan sebesar Rp697.544.790.265,00 dari Rp5.119.268.246.840,000 menjadi Rp5.816.813.037.105,00 dengan rincian :

1. Belanja Pegawai

- a. Belanja Pegawai mengalami penambahan sebesar Rp11.545.568.801,00 atau 0,50% yang semula Rp2.300.472.385.344,00 menjadi Rp2.312.017.954.145,00. Secara umum penyesuaian terhadap Belanja Pegawai dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Realisasi belanja pegawai bulan September Tahun 2023; dan
- 2) Pemutakhiran data Pegawai.



2. Belanja barang/jasa

Belanja Barang dan Jasa mengalami penambahan sebesar Rp405.930.772.533,00 atau 15,74% yang semula Rp2.579.660.693.638,00 menjadi Rp2.985.591.466.171,00. Secara umum penyesuaian terhadap Belanja Barang dan Jasa dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Adanya penyesuaian terhadap rencana belanja yang bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- b. Penggunaan SiLPA tahun 2022 baik SiLPA dengan sumber pendapatan transfer maupun yang bersumber dari PAD.

3. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi mengalami penambahan sebesar Rp7.000.000.000,00 atau 97,22% yang semula Rp7.200.000.000,00 menjadi Rp14.200.000.000,00 yang dipergunakan untuk subsidi operasional bus Trans Patriot yang dikelola oleh PD. Mitra Patriot Kota Bekasi. Dengan beroperasinya layanan kereta ringan Light Rail Transit (LRT) di wilayah Kota Bekasi, PD. Mitra Patriot Kota Bekasi akan melakukan penambahan koridor bus Trans Patriot sebagai moda transportasi penunjang. Koridor yang akan ditambahkan sesuai dengan stasiun Light Rail Transit (LRT) yaitu koridor Kemang Pratama–Summarecon dan Blue Mall–Grand Dhika.

4. Belanja Hibah

Belanja Hibah mengalami penambahan sebesar Rp120.433.238.931,00 atau 52,20% yang semula Rp230.735.167.858,00 menjadi Rp351.168.406.789,00. Sebagian besar Belanja Hibah berupa Hibah Uang Dana BOS SD swasta dan SMP swasta, Hibah Uang untuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD dan Sekolah Nonformal/Kesetaraan, dan Hibah Barang untuk penunjang



pelaksanaan belajar mengajar pada beberapa SD dan SMP. Selebihnya, Belanja Hibah diberikan kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum, seperti KONI, NPCI, RT/RW, KNPI, dan yayasan. Belanja Hibah juga diberikan kepada Pemerintah Pusat yaitu Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dan Kodim 0507 Bekasi. Belanja Hibah juga diberikan kepada KPUD dalam rangka tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Belanja Hibah juga berupa pemberian kenaikan bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Bekasi.

5. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial mengalami penambahan sebesar Rp152.635.210.000,00 atau 12.719,60% yang semula Rp1.200.000.000,00 menjadi Rp153.835.210.000,00. Penyesuaian Belanja Bantuan Sosial dikarenakan adanya penyesuaian terhadap belanja yang bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yaitu Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) berupa Bantuan Sosial Individu, Pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi DKI Jakarta berupa Bantuan Langsung Tunai kepada warga Kecamatan Bantargebang serta Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan di wilayah Kecamatan Bantargebang, dan penggunaan SiLPA Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta berupa beasiswa kepada siswa tidak mampu di Kecamatan Bantargebang.

6. Belanja Modal

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Belanja Modal mengalami penambahan sebesar Rp578.087.760.205,00 atau 81,53% yang semula Rp709.026.501.998,00 menjadi Rp1.287.114.262.203,00. Secara umum penambahan belanja modal dikarenakan adanya penyesuaian rencana belanja yang bersumber dari Pendapatan Transfer baik



Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat maupun Pendapatan Transfer Antar Daerah dan penggunaan SiLPA tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah mengalami penambahan sebesar Rp92.614.977.670,00 atau 105,92% yang semula Rp87.439.200.000,00 menjadi Rp180.054.177.670,00. Penambahan Belanja Modal Tanah diantaranya dipergunakan untuk pengadaan tanah lahan polder, lahan SMP, dan lahan Rusunawa serta lahan SDN sebagai amanat putusan kasasi dari Mahkamah Agung RI.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan Dan Mesin mengalami penambahan sebesar Rp211.109.954.504,00 atau 94,99% yang semula Rp222.240.118.863,00 menjadi Rp433.350.073.367,0000

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung Dan Bangunan mengalami penambahan sebesar Rp79.886.665.854,00 atau 35,64% yang semula Rp224.141.754.602,00 menjadi Rp304.028.420.456,00

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi mengalami penambahan sebesar Rp193.923.967.010,00 atau 112,51% yang semula Rp172.360.060.295,00 menjadi Rp366.284.027.305,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya mengalami penambahan sebesar Rp302.195.167,00 atau 10,62% yang semula Rp2.845.368.238,00 menjadi Rp3.147.563.405,00



f. Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya mengalami penambahan sebesar Rp250.000.000,00 atau 100% yang semula Rp0,00 menjadi Rp250.000.000,00.

7. Belanja Tidak Terduga

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Belanja Tidak Terduga mengalami pengurangan sebesar Rp14.094.802.813,00 atau 13,36% yang semula Rp91.375.474.787,00 menjadi Rp18.128.374.307,00. Rincian penyesuaian Belanja Tidak Terduga adalah sebagai berikut:

- a. Pengurangan anggaran Belanja Tidak Terduga dikarenakan penurunan proyeksi kebutuhan belanja untuk mengantisipasi kondisi tidak terduga sampai dengan akhir tahun seiring stabilitas kondisi daerah pasca Pandemi Covid-19 serta adanya kebutuhan untuk pemenuhan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan program kerja pada perangkat daerah;
- b. Penambahan anggaran Belanja Tidak Terduga dengan sumber penggunaan SiLPA tahun 2022 untuk Pengembalian Dana Kemitraan Bantuan Keuangan Khusus Provinsi DKI Jakarta ke Rekening Kas Umum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp145.559.110,00;
- c. Penambahan anggaran Belanja Tidak Terduga dengan sumber penggunaan SiLPA tahun 2022 untuk Pengembalian Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Jawa Barat TA 2022 sebesar Rp1.700.000,00 yang telah dilakukan pada tanggal 24 Maret 2023 melalui SP2D Nomor 01397/SP2D/2023;
- d. Penambahan anggaran Belanja Tidak Terduga dengan sumber penggunaan SiLPA tahun 2022 untuk Pengembalian Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Jawa Barat TA 2022 sebesar Rp320.000,00 yang telah



dilakukan pada tanggal 24 Maret 2023 melalui SP2D Nomor 01397/SP2D/2023;

- e. Penambahan anggaran Belanja Tidak Terduga dengan sumber penggunaan SiLPA tahun 2022 untuk Pengembalian dana BOSP sebesar Rp808.293.000,00 untuk pengembalian Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2020-2022.

C. PEMBIAYAAN

Anggaran pembiayaan Tahun 2023 mengalami perubahan baik pada penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mengalami penambahan yaitu pada pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022 dimana angka SiLPA disesuaikan dengan angka yang disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022 yang telah diperiksa oleh BPK-RI.

Pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2023 mengalami penambahan pada pos penyertaan modal daerah kepada BUMD, pos pembentukan dana cadangan dan pos pemberian pinjaman daerah.

Terdapat perbedaan yang cukup signifikan terhadap perubahan anggaran penerimaan pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2023. Pada APBD murni Tahun Anggaran 2023 SiLPA tahun anggaran sebelumnya dianggarkan sebesar Rp186.783.383.599,00. Adapun SiLPA yang tercantum dalam LKPD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022 Audited sebesar Rp893.702.030.874,00 sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP BPK-RI) Nomor 05A/LHP/XVIII.BDG/04/2023 tanggal 5 April 2023.

Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, dengan rincian sebagai berikut:



1. Pengeluaran Pembiayaan Daerah tahun 2023 semula sebesar Rp52.500.000.000,00 bertambah Rp97.472.388.000,00 sehingga menjadi Rp149.972.388.000,00. Penambahan pengeluaran pembiayaan ini digunakan untuk:

- a. Pembentukan Dana Cadangan

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dana cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari DAK, pinjaman daerah, penerimaan lainnya yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kota Bekasi pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 akan melakukan pembentukan dana cadangan untuk mendanai Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Hal ini sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 bahwa dalam hal Pemerintah Daerah akan melaksanakan pilkada serentak tahun 2024, dapat membentuk dana cadangan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembentukan Dana Cadangan semula dianggarkan sebesar Rp30.000.000.000,00 bertambah Rp7.472.388.000,00 sehingga menjadi Rp37.472.388.000,00.



b. Penyertaan Modal

- 1) Perumda Air Minum Tirta Patriot yang semula dianggarkan sebesar Rp8.500.000.000,00 bertambah sebesar Rp85.000.000.000,00 menjadi Rp93.500.000.000,00.
- 2) Akuisisi PDAM Bhagasasi secara bertahap sebesar Rp50.000.000.000,00 sebagaimana ditentukan dalam Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan Pemerintah Kota Bekasi Nomor: (HK.02.02/Kep.571-Rek/2022)/(255.A Tahun 2022) tentang Pengakhiran Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan Pemerintah Kota Bekasi Nomor: (503/08.11/PDAM/2002)/ (690/381-HOR/XII/2002) Tahun 2002 tentang Kepemilikan dan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Bekasi.
- 3) Sebesar Rp35.000.000.000,00 digunakan untuk pengadaan dan pemasangan pipa HDPE serta pengadaan dan pemasangan sambungan rumah dalam rangka menunjang pelaksanaan proyek strategis nasional SPAM Regional Jatiluhur 1.

c. Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp5.000.000.000,00 digunakan untuk mengganggarkan Pemberian Pinjaman Daerah berupa Dana Bergulir untuk Masyarakat. Dana tersebut merupakan investasi non permanen yang akan disalurkan melalui PT. Bank Syariah Patriot Bekasi (Perseroda) dengan metode executing yang diperuntukkan bagi usaha mikro dan koperasi di Kota Bekasi.

Berdasarkan pembahasan tersebut, Struktur APBD setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



Tahun Anggaran 2023 tanggal 27 Oktober 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Ringkasan Perubahan APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023

KODE	URAIAN	APBD TA. 2023 (Rp)	PERUBAHAN APBD TA. 2023 (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN	5.799.481.642.839,00	6.451.573.131.221,00	652.091.488.382,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.112.004.866.100,00	2.997.679.830.479,00	(114.325.035.621,00)
4.1.1	Pajak Daerah	2.454.131.964.573,00	2.454.131.964.573,00	0,00
4.1.2	Retribusi Daerah	90.721.709.063,00	90.721.709.063,00	0,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.399.147.370,00	14.399.147.370,00	0,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	552.752.045.094,00	438.427.009.473,00	(114.325.035.621,00)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.687.476.776.739,00	3.453.893.300.742,00	766.416.524.003,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.876.106.756.000,00	2.016.572.780.340,00	140.466.024.340,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	811.370.020.739,00	1.437.320.520.402,00	625.950.499.663,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00
4.3.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
5	Belanja	5.933.765.026.438,00	7.195.302.774.095,00	1.261.537.747.657,00
5.1	Belanja Operasi	5.119.268.246.840,00	5.816.813.037.105,00	697.544.790.265,00
5.1.1	Belanja Pegawai	2.300.472.385.344,00	2.312.017.954.145,00	11.545.568.801,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.579.660.693.638,00	2.985.591.466.171,00	405.930.772.533,00
5.1.3	Belanja Subsidi	7.200.000.000,00	14.200.000.000,00	7.000.000.000,00
5.1.4	Belanja Hibah	230.735.167.858,00	351.168.406.789,00	120.433.238.931,00
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.200.000.000,00	153.835.210.000,00	152.635.210.000,00
5.2	Belanja Modal	709.026.501.998,00	1.287.114.262.203,00	578.087.760.205,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	87.439.200.000,00	180.054.177.670,00	92.614.977.670,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	222.240.118.863,00	433.350.073.367,00	211.109.954.504,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	224.141.754.602,00	304.028.420.456,00	79.886.665.854,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	172.360.060.295,00	366.284.027.305,00	193.923.967.010,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.845.368.238,00	3.147.563.405,00	302.195.167,00
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	250.000.000	250.000.000,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	105.470.277.600,00	91.375.474.787,00	(14.094.802.813,00)
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	105.470.277.600,00	91.375.474.787,00	(14.094.802.813,00)
5.4	Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
	Surplus/ (Defisit)	(134.283.383.599,00)	(743.729.642.874,00)	(609.446.259.275,00)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	134.283.383.599,00	743.729.642.874,00	609.446.259.275,00
6.1	Penerimaan Pembiayaan	186.783.383.599,00	893.702.030.874,00	706.918.647.275,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	186.783.383.599,00	893.702.030.874,00	706.918.647.275,00



KODE	URAIAN	APBD TA. 2023 (Rp)	PERUBAHAN APBD TA. 2023 (Rp)	BERTAMBAH /(BERKURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	Anggaran Sebelumnya			
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya. Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	186.783.383.599,00	893.702.030.874,00	706.918.647.275,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	52.500.000.000,00	149.972.388.000,00	97.472.388.000,00
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000,00	37.472.388.000,00	7.472.388.000,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	22.500.000.000,00	107.500.000.000,00	85.000.000.000,00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
6.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya. Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	52.500.000.000,00	149.972.388.000,00	97.472.388.000,00
	Pembiayaan Netto	134.283.383.599,00	743.729.642.874,00	609.446.259.275,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00

Sumber : BPKAD Kota Bekasi Tahun 2023

2.5. PERUBAHAN PENJABARAN APBD KOTA BEKASI TAHUN
ANGGARAN 2023

Dasar perubahan penjabaran perubahan APBD tahun anggaran 2023 adalah Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 17 November 2023, adapun perubahan penjabaran perubahan APBD Tahun 2023 sebagai berikut:

A. PENDAPATAN

Pada pos Pendapatan terdapat penambahan sebesar Rp16.243.086.054,00 dari Rp6.451.573.131.221,00 menjadi Rp6.467.816.217.275,00, dengan rincian sebagai berikut:

I. Pendapatan Asli Daerah

Pada pos Pendapatan Asli Daerah tidak terdapat perubahan.

II. Pendapatan Transfer

Pada pos Pendapatan Transfer Antar Daerah terdapat penambahan sebesar Rp16.243.086.054 dari Rp3.453.893.300.742,00 menjadi Rp3.470.136.386.796,00, karena adanya penyesuaian Pendapatan Transfer Antar Daerah atas Bantuan Keuangan Keuangan bersifat Khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Surat Pj. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor: 9491/KU.01.06.07/BPKAD tanggal 9 November 2023 tentang Penyampaian Rincian Kegiatan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat

B. BELANJA

Pada Pos Belanja terdapat penambahan belanja sebesar Rp16.243.086.054,00 dari Rp5.816.813.037.105,00, menjadi Rp5.834.763.094.939,00, dengan rincian sebagai berikut:

I. Belanja Operasi

Pada pos Belanja Operasi terdapat penambahan sebesar Rp17.950.057.834,00 dari Rp5.263.167.243.962,00 menjadi Rp5.485.000.923.347.00, secara umum dikarenakan adanya penyesuaian belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan



Khusus dari Provinsi Jawa Barat, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai tidak terdapat perubahan;
- b. Belanja Barang dan jasa bertambah sebesar Rp17.950.057.834,00 dari Rp2.985.591.466.171,00 menjadi Rp3.003.541.524.005,00;
- c. Belanja Subsidi tidak terdapat perubahan;
- d. Belanja Hibah tidak terdapat perubahan;
- e. Belanja Bantuan sosial tidak terdapat perubahan

II. Belanja Modal

Pada Pos Belanja Modal berkurang sebesar Rp1.706.971.780,00 dari Rp1.287.114.262.203,00, sehingga menjadi Rp1.285.407.290.423,00, secara umum dikarenakan adanya penyesuaian belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi Jawa Barat Jawa Barat, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Modal Tanah tidak terdapat perubahan;
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin berkurang sebesar Rp436.600.300,00 dari Rp433.350.073.367,00 menjadi Rp 432.913.473.067,00;
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan berkurang sebesar Rp1.021.970.327,00 dari Rp304.028.420.456,00 menjadi Rp303.006.450.129,00;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi berkurang sebesar Rp248.401.153,00 dari Rp366.284.027.305,00 menjadi Rp366.035.626.152,00;
- e. Belanja Modal Aset Tetap lainnya tidak terdapat perubahan;
- f. Belanja Modal Aset Lainnya tidak terdapat perubahan.

III. Belanja Tidak Terduga

Pada Pos Belanja Tak terduga tidak terdapat perubahan



C. PEMBIAYAAN

Pada pos pembiayaan tidak terdapat perubahan. Penerimaan pembiayaan.

Berdasarkan pembahasan tersebut, Struktur APBD setelah pergeseran anggaran setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD Kota Bekasi Tahun
Anggaran 2023

KODE	URAIAN	PERUBAHAN APBD TA. 2023 (Rp)	PERUBAHAN ATAS PERUBAHAN APBD TA. 2023 (Rp)	BERTAMBAH /(BERKURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN	6.451.573.131.221,00	6.467.816.217.275,00	16.243.086.054,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.997.679.830.479,00	2.997.679.830.479,00	0,00
4.1.1	Pajak Daerah	2.454.131.964.573,00	2.454.131.964.573,00	0,00
4.1.2	Retribusi Daerah	90.721.709.063,00	90.721.709.063,00	0,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.399.147.370,00	14.399.147.370,00	0,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	438.427.009.473,00	438.427.009.473,00	0,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.453.893.300.742,00	3.470.136.386.796,00	16.243.086.054,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.016.572.780.340,00	2.016.572.780.340,00	0,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	1.437.320.520.402,00	1.453.563.606.456,00	16.243.086.054,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00
4.3.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	0,00	0,00	0,00
5	Belanja	7.195.302.774.095,00	7.211.545.860.149,00	16.243.086.054,00
5.1	Belanja Operasi	5.816.813.037.105,00	5.834.763.094.939,00	17.950.057.834,00
5.1.1	Belanja Pegawai	2.312.017.954.145,00	2.312.017.954.145,00	0,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.985.591.466.171,00	3.003.541.524.005,00	17.950.057.834,00
5.1.3	Belanja Subsidi	14.200.000.000,00	14.200.000.000,00	0,00
5.1.4	Belanja Hibah	351.168.406.789,00	351.168.406.789,00	0,00
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	153.835.210.000,00	153.835.210.000,00	0,00
5.2	Belanja Modal	1.287.114.262.203,00	1.285.407.290.423,00	(1.706.971.780,00)
5.2.1	Belanja Modal Tanah	180.054.177.670,00	180.054.177.670,00	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	433.350.073.367,00	432.913.473.067,00	(436.600.300,00)
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	304.028.420.456,00	303.006.450.129,00	(1.021.970.327,00)
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	366.284.027.305,00	366.035.626.152,00	(248.401.153,00)

KODE	URAIAN	PERUBAHAN APBD TA. 2023 (Rp)	PERUBAHAN ATAS PERUBAHAN APBD TA. 2023 (Rp)	BERTAMBAH /(BERKURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.147.563.405,00	3.147.563.405,00	0,00
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	91.375.474.787,00	91.375.474.787,00	0,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	91.375.474.787,00	91.375.474.787,00	0,00
5.4	Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
	Surplus/ (Defisit)	(743.729.642.874,00)	(743.729.642.874,00)	0,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	743.729.642.874,00	743.729.642.874,00	0,00
6.1	Penerimaan Pembiayaan	893.702.030.874,00	893.702.030.874,00	0,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	893.702.030.874,00	893.702.030.874,00	0,00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya. Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	893.702.030.874,00	893.702.030.874,00	0,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	149.972.388.000,00	149.972.388.000,00	0,00
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	37.472.388.000,00	37.472.388.000,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	107.500.000.000,00	107.500.000.000,00	0,00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
6.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya. Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	149.972.388.000,00	149.972.388.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	743.729.642.874,00	743.729.642.874,00	0,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00

Sumber : BPKAD Kota Bekasi Tahun 2023

2.6. PERUBAHAN KEDUA PENJABARAN APBD KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Dasar perubahan penjabaran perubahan APBD tahun anggaran 2023 adalah Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 72 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 67 Tahun

2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 18 Desember 2023, adapun perubahan penjabaran perubahan APBD Tahun 2023 sebagai berikut:

A. PENDAPATAN

Pada pos Pendapatan Asli Daerah tidak terdapat perubahan.

B. BELANJA

Pada Pos Belanja terdapat pergeseran alokasi anggaran belanja, dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Pada pos Belanja Operasi tidak terdapat perubahan

2. Belanja Modal

Pada Pos Belanja Modal tidak terdapat perubahan.

3. Belanja Tidak Terduga

Pada pos Belanja Tidak Terduga terdapat pengurangan sebesar Rp50.000.000.000,00 dari Rp91.375.474.787,00 sehingga menjadi Rp41.375.474.787,00, berdasarkan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 900.1/Kep.584-BPKAD/XII/2023 tentang Persetujuan Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Keperluan Mendesak dalam Rangka Pembayaran Aset dan Wilayah Layanan Perusahaan Umum Daerah Tirta Bhagasasi di Wilayah Kota Bekasi dari Pemerintah Kota Bekasi kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2023 .

4. Belanja Transfer

Pada pos Belanja Transfer terdapat penambahan sebesar Rp50.000.000.000,00 dari Rp00,00 menjadi Rp50.000.000.000,00, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Alokasi anggaran untuk mendanai keperluan mendesak berupa pembayaran aset dan wilayah layanan Perumda Tirta Bhagasasi Bekasi di wilayah Kota Bekasi dari Pemerintah Kota Bekasi kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 (tahap 1) dengan terlebih dahulu memformulasikan dalam DPA-SKPD pada



Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan;

- 2) Alokasi anggaran pada poin 1) dianggarkan pada kode rekening 5.4.02.02.01.0001 dengan uraian Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/ Kota;
- 3) Pemberian bantuan keuangan Umum ke Pemerintah Kabupaten Bekasi disalurkan melalui RKUD Kabupaten Bekasi.

C. PEMBIAYAAN

Pada pos pembiayaan tidak terdapat perubahan.Penerimaan pembiayaan.

Berdasarkan pembahasan tersebut, Struktur APBD setelah pergeseran anggaran setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 72 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Ringkasan Perubahan Kedua Penjabaran APBD Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2023

KODE	URAIAN	PERUBAHAN ATAS PERUBAHAN APBD TA. 2023 (Rp)	PERUBAHAN 2 ATAS PERUBAHAN APBD TA. 2023 (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN	6.467.816.217.275,00	6.467.816.217.275,00	0,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.997.679.830.479,00	2.997.679.830.479,00	0,00
4.1.1	Pajak Daerah	2.454.131.964.573,00	2.454.131.964.573,00	0,00
4.1.2	Retribusi Daerah	90.721.709.063,00	90.721.709.063,00	0,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.399.147.370,00	14.399.147.370,00	0,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	438.427.009.473,00	438.427.009.473,00	0,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.470.136.386.796,00	3.470.136.386.796,00	0,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.016.572.780.340,00	2.016.572.780.340,00	0,00

KODE	URAIAN	PERUBAHAN ATAS PERUBAHAN APBD TA. 2023 (Rp)	PERUBAHAN 2 ATAS PERUBAHAN APBD TA. 2023 (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	1.453.563.606.456,00	1.453.563.606.456,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00
4.3.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
5	Belanja	7.211.545.860.149,00	7.211.545.860.149,00	0,00
5.1	Belanja Operasi	5.834.763.094.939,00	5.834.763.094.939,00	0,00
5.1.1	Belanja Pegawai	2.312.017.954.145,00	2.312.017.954.145,00	0,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.003.541.524.005,00	3.003.541.524.005,00	0,00
5.1.3	Belanja Subsidi	14.200.000.000,00	14.200.000.000,00	0,00
5.1.4	Belanja Hibah	351.168.406.789,00	351.168.406.789,00	0,00
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	153.835.210.000,00	153.835.210.000,00	0,00
5.2	Belanja Modal	1.285.407.290.423,00	1.285.407.290.423,00	0,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	180.054.177.670,00	180.054.177.670,00	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	432.913.473.067,00	432.913.473.067,00	0,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	303.006.450.129,00	303.006.450.129,00	0,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	366.035.626.152,00	366.035.626.152,00	0,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.147.563.405,00	3.147.563.405,00	0,00
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	91.375.474.787,00	41.375.474.787,00	(50.000.000.000,00)
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	91.375.474.787,00	41.375.474.787,00	(50.000.000.000,00)
5.4	Belanja Transfer	0,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00
	Surplus/ (Defisit)	(743.729.642.874,00)	(743.729.642.874,00)	0,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	743.729.642.874,00	743.729.642.874,00	0,00
6.1	Penerimaan Pembiayaan	893.702.030.874,00	893.702.030.874,00	0,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	893.702.030.874,00	893.702.030.874,00	0,00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya. Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	893.702.030.874,00	893.702.030.874,00	0,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	149.972.388.000,00	149.972.388.000,00	0,00
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	37.472.388.000,00	37.472.388.000,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	107.500.000.000,00	107.500.000.000,00	0,00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00



KODE	URAIAN	PERUBAHAN ATAS PERUBAHAN APBD TA. 2023 (Rp)	PERUBAHAN 2 ATAS PERUBAHAN APBD TA. 2023 (Rp)	BERTAMBAH /(BERKURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
6.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya. Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	149.972.388.000,00	149.972.388.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	743.729.642.874,00	743.729.642.874,00	0,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00

Sumber : BPKAD Kota Bekasi Tahun 2023

Secara garis besar untuk melihat Ringkasan Perbandingan Perubahan Penjabaran dari Perubahan Kesatu hingga Perubahan APBD Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Ringkasan Perbandingan Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023

KODE	URAIAN	APBD TA 2023 (30 DES 2022)	PERUBAHAN PENJABARAN 1 (28 Mar 2023)	BERTAMBAH/ BERKURANG	PERUBAHAN PENJABARAN 2 (10 Apr 2023)	BERTAMBAH/ BERKURANG	PERUBAHAN PENJABARAN 3 (7 Juni 2023)	BERTAMBAH/ BERKURANG	PERUBAHAN APBD TA 2023 (25 OKT 2023)	BERTAMBAH/ BERKURANG	PERUBAHAN ATAS PERUBAHAN APBD TA 2023 (17 NOV 2023)	BERTAMBAH/ BERKURANG	PERUBAHAN 2 ATAS PERUBAHAN APBD TA 2023 (18 DES 2023)	BERTAMBAH/ BERKURANG
	1	2	3	4 = 3-2	5	6 =5-3	7	8=7-5	9	10=9-7	11	12=11-9	13	14=13-11
4	PENDAPATAN	5.799.481.642.839,00	6.006.508.298.311,00	207.026.655.472,00	6.362.954.778.811,00	356.446.480.500,00	6.362.954.778.811,00	0,00	6.451.573.131.221,00	88.618.352.410,00	6.467.816.217.275,00	16.243.086.054,00	6.467.816.217.275,00	0,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.112.004.866.100,00	3.112.004.866.100,00	0,00	3.112.004.866.100,00	0,00	3.112.004.866.100,00	0,00	2.997.679.830.479,00	(114.325.035.621,00)	2.997.679.830.479,00	0,00	2.997.679.830.479,00	0,00
4.1.1	Pajak Daerah	2.454.131.964.573,00	2.454.131.964.573,00	0,00	2.454.131.964.573,00	0,00	2.454.131.964.573,00	0,00	2.454.131.964.573,00	0,00	2.454.131.964.573,00	0,00	2.454.131.964.573,00	0,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	90.721.709.063,00	90.721.709.063,00	0,00	90.721.709.063,00	0,00	90.721.709.063,00	0,00	90.721.709.063,00	0,00	90.721.709.063,00	0,00	90.721.709.063,00	0,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.399.147.370,00	14.399.147.370,00	0,00	14.399.147.370,00	0,00	14.399.147.370,00	0,00	14.399.147.370,00	0,00	14.399.147.370,00	0,00	14.399.147.370,00	0,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	552.752.045.094,00	552.752.045.094,00	0,00	552.752.045.094,00	0,00	552.752.045.094,00	0,00	438.427.009.473,00	(114.325.035.621,00)	438.427.009.473,00	0,00	438.427.009.473,00	0,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.687.476.776.739,00	2.894.503.432.211,00	207.026.655.472,00	3.250.949.912.711,00	356.446.480.500,00	3.250.949.912.711,00	0,00	3.453.893.300.742,00	202.943.388.031,00	3.470.136.386.796,00	16.243.086.054,00	3.470.136.386.796,00	0,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.876.106.756.000,00	2.004.216.558.000,00	128.109.802.000,00	2.004.216.558.000,00	0,00	2.004.216.558.000,00	0,00	2.016.572.780.340,00	12.356.222.340,00	2.016.572.780.340,00	0,00	2.016.572.780.340,00	0,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	811.370.020.739,00	890.286.874.211,00	78.916.853.472,00	1.246.733.354.711,00	356.446.480.500,00	1.246.733.354.711,00	0,00	1.437.320.520.402,00	190.587.165.691,00	1.453.563.606.456,00	16.243.086.054,00	1.453.563.606.456,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja	5.933.765.026.438,00	6.140.791.681.910,00	207.026.655.472,00	6.497.238.162.410,00	356.446.480.500,00	6.603.840.760.097,00	106.602.597.687,00	7.195.302.774.095,00	591.462.013.998,00	7.211.545.860.149,00	16.243.086.054,00	7.211.545.860.149,00	0,00
5.1	Belanja Operasi	5.119.268.246.840,00	5.263.167.243.962,00	143.898.997.122,00	5.485.000.923.347,00	221.833.679.385,00	5.546.881.430.487,00	61.880.507.140,00	5.816.813.037.105,00	269.931.606.618,00	5.834.763.094.939,00	17.950.057.834,00	5.834.763.094.939,00	0,00
5.1.1	Belanja Pegawai	2.300.472.385.344,00	2.303.142.531.344,00	2.670.146.000,00	2.304.258.846.344,00	1.116.315.000,00	2.307.879.159.108,00	3.620.312.764,00	2.312.017.954.145,00	4.138.795.037,00	2.312.017.954.145,00	0,00	2.312.017.954.145,00	0,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.579.660.693.638,00	2.692.623.191.760,00	112.962.498.122,00	2.761.341.596.145,00	68.718.404.385,00	2.819.483.790.521,00	58.142.194.376,00	2.985.591.466.171,00	166.107.675.650,00	3.003.541.524.005,00	17.950.057.834,00	3.003.541.524.005,00	0,00
5.1.3	Belanja Subsidi	7.200.000.000,00	7.200.000.000,00	0,00	7.200.000.000,00	0,00	7.200.000.000,00	0,00	14.200.000.000,00	7.000.000.000,00	14.200.000.000,00	0,00	14.200.000.000,00	0,00
5.1.4	Belanja Hibah	230.735.167.858,00	258.483.270.858,00	27.748.103.000,00	258.483.270.858,00	0,00	258.483.270.858,00	0,00	351.168.406.789,00	92.685.135.931,00	351.168.406.789,00	0,00	351.168.406.789,00	0,00
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.200.000.000,00	1.718.250.000,00	518.250.000,00	153.717.210.000,00	151.998.960.000,00	153.835.210.000,00	118.000.000,00	153.835.210.000,00	0,00	153.835.210.000,00	0,00	153.835.210.000,00	0,00
5.2	Belanja Modal	709.026.501.998,00	772.154.160.348,00	63.127.658.350,00	906.766.961.463,00	134.612.801.115,00	951.341.472.900,00	44.574.511.437,00	1.287.114.262.203,00	335.772.789.303,00	1.285.407.290.423,00	(1.706.971.780,00)	1.285.407.290.423,00	0,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	87.439.200.000,00	87.439.200.000,00	0,00	125.490.558.615,00	38.051.358.615,00	135.746.870.870,00	10.256.312.255,00	180.054.177.670,00	44.307.306.800,00	180.054.177.670,00	0,00	180.054.177.670,00	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	222.240.118.863,00	248.754.344.601,00	26.514.225.738,00	291.492.000.101,00	42.737.655.500,00	315.868.983.553,00	24.376.983.452,00	433.350.073.367,00	117.481.089.814,00	432.913.473.067,00	(436.600.300,00)	432.913.473.067,00	0,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	224.141.754.602,00	249.770.737.214,00	25.628.982.612,00	260.632.170.214,00	10.861.433.000,00	261.985.844.214,00	1.353.674.000,00	304.028.420.456,00	42.042.576.242,00	303.006.450.129,00	(1.021.970.327,00)	303.006.450.129,00	0,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	172.360.060.295,00	183.245.510.295,00	10.885.450.000,00	226.207.864.295,00	42.962.354.000,00	234.788.328.025,00	8.580.463.730,00	366.284.027.305,00	131.495.699.280,00	366.035.626.152,00	(248.401.153,00)	366.035.626.152,00	0,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.845.368.238,00	2.944.368.238,00	99.000.000,00	2.944.368.238,00	0,00	2.951.446.238,00	7.078.000,00	3.147.563.405,00	196.117.167,00	3.147.563.405,00	0,00	3.147.563.405,00	0,00
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	105.470.277.600,00	105.470.277.600,00	0,00	105.470.277.600,00	0,00	105.617.856.710,00	147.579.110,00	91.375.474.78,00	(14.242.381.923,00)	91.375.474.787,00	0,00	41.375.474.787,00	(50.000.000.000,00)
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	105.470.277.600,00	105.470.277.600,00	0,00	105.470.277.600,00	0,00	105.617.856.710,00	147.579.110,00	91.375.474.787,00	(14.242.381.923,00)	91.375.474.787,00	0,00	41.375.474.787,00	(50.000.000.000,00)
5.4	Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000.000,00	(50.000.000.000,00)



KODE	URAIAN	APBD TA 2023 (30 DES 2022)	PERUBAHAN PENJABARAN 1 (28 Mar 2023)	BERTAMBAH/ BERKURANG	PERUBAHAN PENJABARAN 2 (10 Apr 2023)	BERTAMBAH/ BERKURANG	PERUBAHAN PENJABARAN 3 (7 Juni 2023)	BERTAMBAH/ BERKURANG	PERUBAHAN APBD TA 2023 (25 OKT 2023)	BERTAMBAH/ BERKURANG	PERUBAHAN ATAS PERUBAHAN APBD TA 2023 (17 NOV 2023)	BERTAMBAH/ BERKURANG	PERUBAHAN 2 ATAS PERUBAHAN APBD TA 2023 (18 DES 2023)	BERTAMBAH/ BERKURANG
	1	2	3	4 = 3-2	5	6 =5-3	7	8=7-5	9	10=9-7	11	12=11-9	13	14=13-11
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000.000,00	(50.000.000.000,00)
	Surplus/ (Defisit)	(134.283.383.599,00)	(134.283.383.599,00)	0,00	(134.283.383.599,00)	0,00	(240.885.981.286,00)	(106.602.597.687,00)	(743.729.642.874,00)	(502.843.661.588,00)	(743.729.642.874,00)	0,00	(743.729.642.874,00)	0,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	134.283.383.599,00	134.283.383.599,00	0,00	134.283.383.599,00	0,00	240.885.981.286,00	106.602.597.687,00	743.729.642.874,00	502.843.661.588,00	743.729.642.874,00	0,00	743.729.642.874,00	0,00
6.1	Penerimaan Pembiayaan	186.783.383.599,00	186.783.383.599,00	0,00	186.783.383.599,00	0,00	293.385.981.286,00	106.602.597.687,00	893.702.030.874,00	600.316.049.588,00	893.702.030.874,00	0,00	893.702.030.874,00	0,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	186.783.383.599,00	186.783.383.599,00	0,00	186.783.383.599,00	0,00	293.385.981.286,00	106.602.597.687,00	893.702.030.874,00	600.316.049.588,00	893.702.030.874,00	0,00	893.702.030.874,00	0,00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya. Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	186.783.383.599,00	186.783.383.599,00	0,00	186.783.383.599,00	0,00	293.385.981.286,00	106.602.597.687,00	893.702.030.874,00	600.316.049.588,00	893.702.030.874,00	0,00	893.702.030.874,00	0,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	52.500.000.000,00	52.500.000.000,00	0,00	52.500.000.000,00	0,00	52.500.000.000,00	0,00	149.972.388.000,00	97.472.388.000,00	149.972.388.000,00	0,00	149.972.388.000,00	0,00
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00	30.000.000.000,00	0,00	30.000.000.000,00	0,00	37.472.388.000,00	7.472.388.000,00	37.472.388.000,00	0,00	37.472.388.000,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	22.500.000.000,00	22.500.000.000,00	0,00	22.500.000.000,00	0,00	22.500.000.000,00	0,00	107.500.000.000,00	85.000.000.000,00	107.500.000.000,00	0,00	107.500.000.000,00	0,00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00	0,00
6.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya. Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	52.500.000.000,00	52.500.000.000,00	0,00	52.500.000.000,00	0,00	52.500.000.000,00	0,00	149.972.388.000,00	97.472.388.000,00	149.972.388.000,00	0,00	149.972.388.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	134.283.383.599,00	134.283.383.599,00	0,00	134.283.383.599,00	0,00	240.885.981.286,00	106.602.597.687,00	743.729.642.874,00	502.843.661.588,00	743.729.642.874,00	0,00	743.729.642.874,00	0,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : BPKAD Kota Bekasi Tahun 2023



**PEMERINTAH
KOTA BEKASI**



 www.bekasikota.go.id

 [@pemkot_bekasi](https://www.instagram.com/pemkot_bekasi)

 [@pemkotbekasi](https://twitter.com/pemkotbekasi)

BAB III

**HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Bekasi yang sudah dituangkan dalam RPJMD Perubahan Kota Bekasi Tahun 2018-2023 bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi-misi Kota Bekasi, IKU daerah merupakan indikator kinerja dampak (*impact*) untuk mengukur tujuan dan/atau sasaran RPJMD, adapun hasil capaian IKU pada tahun 2023 sebagaimana disajikan dalam **Tabel 3.1** berikut:

Tabel 3.1

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN /IMPACT/OUTCOME)	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN 2023(%)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	65,48	77,00	67,10	87,14	
2	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Nilai	N/A	3,47	3,17	91,35	
3	Nilai kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Opini BPK terhadap Laporan Keuangan)	Nilai	N/A	WTP	N/A	N/A	*
4	Persentase Peningkatan PAD	%	1,710	10,01	4,80	47,95	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Nilai	84,40	88,80	86,84	97,79	
6	Indeks Infrastruktur Ke-PU-an	%	25,75	20,57	51,24	249,12	
7	Indeks Sarana Prasarana Perhubungan	%	81,57	89,34	89,63	100,32	
8	Indeks Penataan Ruang	%	66,84	67,19	70,82	105,40	
9	Indeks Perumahan Permukiman Pertanahan	%	56,00	64,09	42,46	66,25	
10	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	%	63,27	4	-7,17	-179,25	
11	Angka Kemiskinan	%	4,43	4,01	4,10	97,80	
12	Gini Ratio	Nilai	0,44	0,34	0,44	77,27	
13	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,81	8,30	7,90	105,06	
14	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor ekonomi kreatif	%	N/A	17,70	N/A	N/A	**
15	Persentase peningkatan nilai sektor perdagangan dan jasa	%	9,40	8,84	3,85	43,55	
16	Peningkatan Pengeluaran perkapita	%	2,11	3,00	1,48	49,33	
17	Laju Inflasi	%	5,37	3,53	3,14	112,42	
18	Indeks Pendidikan	Nilai	77,33	76,95	78,09	101,48	
19	Indeks Kesehatan	Nilai	85,35	84,65	85,94	101,52	
20	Indeks pembangunan gender	Nilai	93,09	94,10	93,49	99,35	
21	Jumlah prestasi pemuda tingkat provinsi, nasional dan internasional	Prestasi	4 TP, 5 TN, 1 TI	30 TP,10 TN,1 TI	115TP, 78 TN, 3 TI	570%	
22	Persentase penurunan jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban	%	4,09	3,39	4,04	119,17	



NO	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN /IMPACT/OUTCOME)	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN 2023(%)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Prosentase kerjasama antar kelompok sara	%	100,00	100,00	100,00	100,00	
24	Indeks risiko bencana	Nilai	118,00	113,00	111,58	101,27	
25	Indeks Penanggulangan Kebakaran	Nilai	73,31	78,68	76,24	99,83	
26	Indeks kualitas lingkungan hidup	Nilai	46,63	62,85	45,81	72,89	

Sumber : Bappelitbangda Kota Bekasi dan Bagian Organisasi Setda Kota Bekasi 2023

Keterangan :

- * Menunggu hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD 2023
- ** Menunggu hasil penghitungan dari BPS RI

Terdapat beberapa Indikator Kinerja yang belum ada capaian kinerja (NA/Not Available). Sampai dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 2023 ini disusun, Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Opini BPK terhadap Laporan Keuangan) sudah diserahkan dan tinggal menunggu hasil Opini oleh BPK serta indikator yang belum dirilis dari Badan Pusat Statistik Kota Bekasi yaitu indikator Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Ekonomi Kreatif. Beberapa indikator kinerja seperti Indeks Infrastruktur Ke-PU-an, Indeks Sarana Prasarana Perhubungan, Indeks Penataan Ruang, Tingkat Pengangguran Terbuka, Laju Inflasi, Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, Jumlah Prestasi Pemuda Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional, Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban, Persentase Kerjasama Antar Kelompok SARA, dan Indeks Risiko Bencana melampaui target yakni masing-masing sebesar 249.12%, 100.32%, 105.40%, 105.06%, 112.42%, 101.48%, 101.52%, 570%, 119.17%, 100%, dan 101.27%. Kemudian ada beberapa Indikator Kinerja yang tidak mencapai target yakni Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), Persentase Peningkatan PAD, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik, Indeks Perumahan

Permukiman Pertanahan, Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi, Angka Kemiskinan, Gini Ratio, Persentase Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa, Peningkatan Pengeluaran Perkapita, Indeks Pembangunan Gender, Indeks Penanggulangan Kebakaran, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan capaian masing-masing sebesar 87.14%, 91.35%, 47.95%, 97.79%, 66.25%, -179.25%, 97.80%, 77.27%, 43.55%, 49.33%, 99.35%, 99.83%, dan 72.89%.

3.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan Kota Bekasi yang didalamnya memuat capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja setiap Perangkat Daerah serta capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/ urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dijelaskan sebagai berikut:

3.1.1. CAPAIAN KINERJA PROGRAM SESUAI DENGAN TARGET KINERJA YANG DITETAPKAN DALAM PERJANJIAN KINERJA :

Capaian terhadap pelaksanaan Program yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Perubahan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023 disajikan sebagaimana **Tabel 3.2** berikut:

Tabel 3.2
Hasil Capaian terhadap Pelaksanaan Program

NO	PROGRAM PEM BANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023	CAPAIAN 2023	PROSENTASE 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM					
		Persentase peningkatan pemahaman SAKIP Perangkat Daerah	%	75,00	75,00	100%
		Persentase Pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	%	100,00	100	100%
		Cakupan Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan	%	100,00	100	100%
		persentase keterlaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada Pemerintah Kota Bekasi	%	100,00	100	100%
		Presentase Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan	%	100,00	100	100%
		Presentase Ketersediaan gedung pemerintahan dalam kondisi baik	%	100,00	100	100%
2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Bidang Sosial dan Pemerintahan	%	60,00	64,00	107%
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	%	60,00	71,00	118%
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Bidang Inovasi dan Teknologi	%	60,00	75,00	125%
		Jumlah IPTEK dan Inovasi Daerah yang mendapatkan predikat	Jumlah	2,00	4,00	200%
3	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
		Persentase kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan	%	100,00	100,00	100%
4	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
		Persentase kesesuaian antara capaian target pembangunan daerah dengan indikator kinerja utama Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100,00	100,00	100%
		Persentase kesesuaian antara capaian target pembangunan daerah dengan indikator kinerja utama Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	100,00	100,00	100%
		Persentase kesesuaian antara capaian target pembangunan daerah dengan indikator kinerja utama Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100,00	100,00	100%
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
		Nilai SAKIP Inspektorat	Nilai	84,35	84,40	100%
		Persentase perangkat daerah dengan nilai AKIP BB keatas	%	100,00	77,27	77%



NO	PROGRAM PEM BANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023	CAPAIAN 2023	PROSENTASE 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase perangkat daerah dengan nilai mturitas SPIP minimal 3.01	%	41,00	41,00	100%
		Persentase Tindak Lanjut Temuan Eksternal	%	92,00	88,69	96%
		Persentase Tindak Lanjut Temuan Internal	%	80,00	77,80	97%
6	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
		Jumlah perangkat daerah dengan nilai evaluasi ZI Minimal 70	OPD	5,00	0	0%
		Jumlah Perangkat Daerah yang mampu mempertahankan predikat WBBM	OPD	1,00	0,00	0%
		Persentase perangkat daerah dengan nilai evaluasi persepsi korupsi minimal 3.71	%	100,00	100,00	100%
		Persentase perangkat daerah dengan penatausahaan aset salah saji yang tidak melebihi nilai material	%	100,00	100,00	100%
		Persentase perangkat daerah dengan nilai kesalahan pertanggungjawaban keuangan tidak melebihi nilai material	%	100,00	90,00	90%
		Level kapabilitas APIP Inspektorat 3 keatas	Level	3,00	3	100%
		Indeks Penerapan Manajaemen Resiko (MR)	Level	2,00	2,45	123%
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
		Optimalisasi Disiplin Aparatur	%	100,00	100,00	100%
		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100,00	100,00	100%
		Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100,00	100,00	100%
		Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100,00	100,00	100%
		Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100,00	100,00	100%
8	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
		Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan bidang pemerintahan	%	70,00	100	143%
		Persentase Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah yang diundangkan	%	100,00	100	100%
		Persentase peningkatan pemahaman IKK LPPD pada Perangkat Daerah	%	75,00	83,20	111%
		Presentase peningkatan profile kelurahan	%	25,00	25,00	100%
		Persentase Fasilitasi kegiatan keagamaan. hari besar Nasional dan hari besar lainnya	%	100,00	100,00	100%
		Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kesejahteraan Sosial	%	100,00	100	100%
		Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kerjasama Pemerintah Daerah	%	100,00	100	100%
		Persentase penyelesaian perkara yang dihadapi pemerintah daerah	%	100,00	105,26	105%



NO	PROGRAM PEM BANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023	CAPAIAN 2023	PROSENTASE 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7
9	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA					
		Optimalisasi peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Sekretariat DPRD	%	100,00	92	92%
		Optimalisasi Disiplin Aparatur Sekretariat DPRD	%	100,00	100,00	100%
		Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD	%	100,00	100	100%
		Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat DPRD	%	100,00	97,22	97%
		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD	%	100,00	100	100%
		Optimalisasi Kegiatan dan Layanan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD	%	100,00	100	100%
10	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
		Persentase Terpenuhinya Proses Penyusunan dan Penetapan APBD dan LAPBD	%	100,00	100	100%
		Persentase Terfasilitasinya Proses Penyusunan dan Penetapan PERDA	%	100,00	80	80%
		Persentase Terfasilitasinya informasi DPRD	%	100,00	100	100%
		Persentase Terfasilitasinya kegiatan DPRD	%	100,00	94,76	95%
11	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
		Mutu Pelayanan Administrasi Kepegaw aian Bernilai Baik	Nilai	Baik (83.39)	Baik (83,65)	100,31%
		Persentase Prestasi Kerja ASN bernilai Baik	%	94,00	98,56	105%
		Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	%	50,00	82,94	166%
12	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					
		Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengelolaan Arsip Secara Tertib	%	80,00	80,00	100%
13	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					
		Penambahan khasanah arsip statis pada depo arsip	Boks	30,00	30	100,00%
14	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
		Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif	%	100,00	100,00	100%
15	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
		Presentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat	%	100,00	100,00	100%
16	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
		Ketepatan Waktu Penetapan APBD	Grade	A	A	100%
		Persentase Kesesuaian DPA dengan Penjabaran APBD	%	100,00	100,00	100%



NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023	CAPAIAN 2023	PROSENTASE 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase Kesesuaian Pelaporan Keuangan Dengan SAP dan tepat waktu	%	100,00	0,00	0%
		Persentase Kesesuaian Pelaporan Penerbitan SP2D dengan SPM yang Diterima	%	100,00	100,00	100%
		Presentase OPD yang melaksanakan Administrasi Penatausahaan Keuangan dengan Tertib	%	100,00	100,00	100%
17	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
		Persentase Nilai Aset Antara LBMD Dengan LKPD	%	100,00	0,00	0%
		Jumlah Bidang tanah milik pemkot yang bersertifikat	Sertifikat	555,00	554	99,82%
18	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
		Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Pembangunan	%	100,00	100,00	100,00%
		Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Ekonomi	%	100,00	100,00	100,00%
		Persentase fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	%	100,00	100,00	100,00%
		Jumlah Bidang Usaha BUMD	Jumlah Bidang Usaha	5,00	5,00	100,00%
		Persentase Peningkatan Deviden BUMD	%	3,00	3,00	100,00%
19	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
		Persentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	%	0,80	0,80	100,00%
		Persentase Penerimaan PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	50,99	50,99	100,00%
		Persentase Kepatuhan Wajib Pajak	%	97,71	97,71	100,00%
		Nilai IKM	Nilai	79,25	79,25	100,00%
20	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					
		Indeks penyelenggaraan pengamanan informasi	Indeks	5,00	5,00	100%
21	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
		Indeks Pengelolaan sitem Layanan Publik Berbasis Digital	Indeks	4,96	4,97	100,20%
22	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
		Indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan pengaduan dan informasi publik	Indeks	4,38	4,47	102%
23	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					
		Indeks ketersediaan data sektoral berbasis digital	Indeks	5,00	5,00	100%
24	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
		Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat	%	100,00	100	100%
25	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
		Persentase penerbitan Perizinan Sesuai SOP pada Pelayanan Publik	%	100,00	106	160,20%



NO	PROGRAM PEM BANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023	CAPAIAN 2023	PROSENTASE 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7
		Jumlah Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Mall Pelayanan Publik	Jumlah	113,00	163	144,25%
26	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					
		Persentase Sistem Pelayanan Perizinan yang terintegrasi	%	100,00	100	100,00%
27	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH					
		Penerbitan Izin Membuka Tanah	%	20,00	0	0,00%
28	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
		cakupan kepemilikan KTP el	%	95,23	101,49	106,57%
		cakupan kepemilikan kartu keluarga	%	99,60	100	100,80%
		Cakupan Penerbitan KIA	%	95,00	46,68	49,14%
29	PROGRAM PENCATATAN SIPIL					
		Cakupan kepemilikan akte kelahiran	%	67,96	98,26	145%
		Cakupan Kepemilikan akte perkawinan	%	60,71	62,61	103%
		Cakupan kepemilikan akte kematian	%	64,32	0,00	0%
30	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
		persentase ketersediaan data catatan sipil dan administrasi kependudukan yang lengkap dan terbaru	%	100,00	100	100%
31	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					
		Pemutakhiran profil kependudukan	%	100,00	100	100%
32	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					
		Luasan Zona Buang Yang Terbangun	Ha	1,00	0	0%
33	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
		Persentase Jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	27,00	6,2	23%
		Operasionalisasi TPA/TPS 3R/SPA	Point	73,00	0,00	0%
		Persentase sampah yang terangkut ke TPA	%	62,00	54,12	87%
		Persentase Cakupan Area Pelayanan	%	100,00	100,00	100%
34	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					
		Persetase Drainase Dalam Kondisi Baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	68,89	68,95	100,09%
35	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
		Presentase Pembangunan Polder	%	74,29	17,00	23%
		Presentase Pemeliharaan Polder	%	7,34	1,26	17%
36	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					



NO	PROGRAM PEM BANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023	CAPAIAN 2023	PROSENTASE 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7
		Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi baik	Point	0,75	0,82	109%
		Persentase Jalan Kota Dalam Kondisi Baik (> 40km/jam)	%	98,60	116,07	118%
		Presentase Pembangunan Jembatan Baru	%	53,24	58	109%
		Persentase Pemeliharaan Jembatan	%	93,38	95,03	102%
		Persentase Jalan yang memiliki Trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1.5 m)	%	20,48	20,52	100%
37	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
		Persentase ruas jalan yang memenuhi kelancaran jalan	%	91,70	91,70	100%
		Persentase peningkatan fasilitas prasarana penunjang transportasi	%	100,00	100,00	100%
		Persentase penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas	%	11,70	11,70	100%
		Persentase peningkatan layanan angkutan umum massal	%	70,00	72,50	104%
		persentase kendaraan yang wajib uji yang melakukan uji kendaraan bermotor	%	80,00 (68.000 kendaraan n)	81,19 (68.589 Kendaraan)	101%
38	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
		Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW	%	80,00	79,18	98,98%
		Jumlah Rencana Pembangunan Infrastruktur Kota yang Sesuai dengan Tata Ruang Kota	Dokumen	1,00	1,00	100,00%
		Jumlah Rencana Penataan Kawasan Strategis Kota yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota	Dokumen	1,00	1,00	100,00%
		Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah atau kawasan perkotaan	%	19,12	60,07	314,17%
		Persentase Penyerahan 150 PSU pada tahun 2023	%	100,00	129,3	129,30%
		Persentase penataan dan pemeliharaan reklame	Buah	8,00	8	100,00%
39	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
		Cakupan luasan wilayah perumahan dan permukiman yang terlayani pengolahan air limbah domestik	%	20,94	20,78	99,24%
40	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
		Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni	%	66,79	84,67	127%
		Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang terjangkau	%	18,64	23,60	127%
		Persentase Penyediaan/ Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kota	%	100,00	100,00	100%
41	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					
		Persentase Luasan Permukiman kumuh dikawasan perkotaan	%	100,00	100	100%



NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023	CAPAIAN 2023	PROSENTASE 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7
42	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					
		Persentase peningkatan pembangunan PJU Baru	%	54,18	54,94	101%
		Presentase Pemeliharaan PJU	titik	11250,00	11150	99%
		Persentase Luasan Permukiman yang tertata	%	11,76	7,09	60%
43	PROGRAM PENYELESAIAN SENKETA TANAH GARAPAN					
		Persentase terfasilitasinya konflik perkara pertanahan milik pemkot	%	100,00		0%
44	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					
		Persentase Pemenuhan pengadaan tanah	%	100,00	19,38	19,38%
45	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
		Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	31,32	23,23	74,17%
46	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA. SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
		Cakupan Yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	40,23	38,28	95,15%
		Jumlah Ketersediaan Lahan Pemakaman Umum	Rasio	6,91	6,37	92,19%
47	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
		Persentase ketersediaan gedung kantor dalam kondisi baik dan berfungsi	%	100,00	27,66	27,66%
		Persentase dokumen teknis penataan bangunan gedung yang diterbitkan	%	90,00	90,39	100,43%
48	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
		Persentase Kenaikan Penanaman Modal berdasarkan LKPM	%	4,00	-17.20% Rp. 8.649.415. 178.243	-430%
49	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					
		Jumlah izin terbit dan izin terbit dengan pemenuhan komitmen pada DPMTSP	Jumlah	5,11	67,32	1336%
50	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
		Persentase Peningkatan Jumlah Perusahaan PMDN/PMA Yang Patuh Terhadap Kewajiban LKPM	%	28,00	287%	10,27%
51	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
		Prosentase Peningkatan Pendayagunaan data dan informasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(PPKS)	%	100,00	100	100,00%
52	PROGRAM PERENCANAAN					



NO	PROGRAM PEM BANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023	CAPAIAN 2023	PROSENTASE 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7
	TENAGA KERJA					
		Persentase Cakupan Ketersediaan dokumen	%	20,00	20,00	100,00%
53	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
		Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja	%	100,00	100,00	100,00%
		Persentase peningkatan kompetensi bagi pencari kerja	%	20,00	20,00	100,00%
54	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
		Persentase jumlah pencari kerja yang ditempatkan	%	62,09	76,4	123,05%
		Persentase Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) berizin	%	10,00		
55	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
		Persentase penanganan sengketa pengusaha dengan pekerja	%	100,00	100,00	100,00%
56	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH. USAHA KECIL. DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
		Persentase PKL yang Menempati Tempat yang telah Ditetapkan	%	10,00	11,00	110,00%
57	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
		Jumlah kawasan wisata yang ditata	Lokasi	1,00	1	100,00%
58	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
		Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	1.002.204	1.460.497	145,73%
59	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
		Jumlah SDM yang ditingkatkan kopetensinya sesuai dengan perkembangan dan Tren Kepariwisataaan	Orang	150,00	150	100,00%
60	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					
		Jumlah Benda. Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Situs	5,00	5	100,00%
61	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					
		Jumlah Penyelenggaraan event bekasi kreatif	Event	11,00	35	318,18%
62	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					
		Persentase Koperasi yang memiliki Izin Simpan Pinjam	%	8,17	19,95	244,19%
63	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
		Persentase peningkatan Skala Usaha Mikro menjadi usaha Kecil	%	1,00	1,00	100%
		Persentase jumlah pelaku UMKM kreatif	%	5,00	5,00	100%



NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023	CAPAIAN 2023	PROSENTASE 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7
64	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					
		Jumlah Koperasi yang Beroperasi sesuai dengan Peraturan Perkoperasian	unit	100,00	100	100%
65	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					
		Persentase Koperasi yang telah Tersertifikasi Kesehatannya	%	8,17	8,17	100%
66	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					
		Peningkatan Skala Usaha Koperasi	Koperasi	2,00	2,00	100%
67	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					
		Jumlah Pengurus Koperasi yang telah Mengikuti Pendidikan Perkoperasian	Orang	100,00	150,00	150%
68	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
		Persentase peningkatan fasilitas terhadap Industri kecil dan menengah	%	3,00	3,45	115%
69	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					
		Nilai ekspor Kota Bekasi	US Dollar	500.000.000	408.125.000	81,63%
70	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
		Jumlah pasar rakyat bersih yang berbasis modern	Unit	10,00	10,00	100,00%
71	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
		Persentase pertumbuhan alat UTTP yang ditera/tera ulang	%	6,00	25,59	426,50%
72	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
		Stabilisasi harga pangan	%	<5,00	5,7	87,72%
		Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)	%	88,00	91,8	104%
73	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
		Persentase Penanganan kerawanan pangan	%	86,80	86,80	100%
74	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
		Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	88,00	88,73	101%
75	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
		Produksi komoditas pertanian	Ton	33.515,00	30,942	92,00%
		Jumlah produksi peternakan	Ton	10.985,00	12,306	112,02%
		Jumlah produksi olahan Hasil peternakan	Ton	3.777,24	3,785	100,210%



NO	PROGRAM PEM BANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023	CAPAIAN 2023	PROSENTASE 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7
76	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
		Terkendalinya Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis	Kasus	tidak ada	0 Kasus (269 Tertanggul angi)	100%
		Unit Usaha Peternakan Kesehatan dan Produk hewan yang bersertifikat teknis	unit	90,00	80	89%
		Persentase produk PAH yang ASUH	%	46,00	46,19	100%
77	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
		Jumlah produksi ikan konsumsi	Ton	1.955,24	2.085,09	107%
		Jumlah Produksi Ikan Hias	ekor	25.110.22 1,00	25.359.07 5,00	100,99%
78	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
		Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan	Ton	92.036,18	93.876,90	102%
79	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					
		Laju inflasi kelompok pengeluaran bahan makanan	%	<4.00	1,96	5000%
80	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
		Persentase Perpustakaan Aktif	%	15,00	15,00	100,00%
		Persentase Pengunjung Perpustakaan	%	25,00	25,00	100,00%
81	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
		Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dalam Kondisi Baik	%	100,00	18,75	19%
		Persentase bangunan SMPN disetiap kelurahan dalam Kondisi Baik	%	100,00	100,00	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Kondisi Baik	%	100,00	100,00	100%
		APM SD	%	100,00	100,00	100%
		APM SMP	%	100,00	100,00	100%
		APM PAUD	%	61,43	61,43	100%
		Angka kelulusan pendidikan kesetaraan	%	100,00	100,00	100%
		SD Negeri Terakreditasi A	%	90,45	90,45	100%
		SMP Negeri Terakreditasi A	%	90,00	90,00	100%
		Capaian Perolehan Prestasi Tingkat Propinsi, Nasional, Internasional Jenjang Pendidikan Dasar	Jumlah	60,00	60,00	100%
82	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					
		Persentase pemenuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dasar	%	80,00	80,00	100%
		Cakupan Pelayanan Berbasis IT	%	40,00	40,00	100%
83	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					



NO	PROGRAM PEM BANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023	CAPAIAN 2023	PROSENTASE 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7
		Presentase pendidikan Dasar terakreditas B	%	90,45	90,45	100%
		PAUD Terakreditasi	%	25,00	25,00	100%
		Lembaga Pendidikan Non Formal Terakreditasi	%	38,04	38,04	100%
84	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
		Cakupan rumah tangga Ber-PHBS	%	65,00	65,15	100%
85	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
		Persentase Peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas pelayanan obsterti neonatal emergency dasar (Poned)	%	23,00	33,33	145%
		Persentase Ketersediaan gedung RS Type D pada tahun 2023 dalam kondisi baik dan berfungsi	%	100,00	100,00	100%
		persentase ketersediaan alat kesehatan dan non kesehatan di Puskesmas	%	60,00	68,5	114%
		persentase ketersediaan alat kesehatan dan non kesehatan di Rumah Sakit Type B	%	83,00	86,76	104,53%
		persentase ketersediaan alat kesehatan dan non kesehatan di Rumah Sakit Type D	%	60,00	75,58	125,97%
		Persentase Puskesmas Terakreditasi	%	84,61	95,83	113,26%
		persentase Rumah sakit Terakreditasi	%	100,00	97,92	97,92%
		terpenuhinya pemeliharaan 10 jenis sarana dan prasarana rumah sakit	%	12,00	12,00	100,00%
		Capaian IKM Pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Type B	Indeks	83,00	89,08	107,33%
		persentase ketersediaan obat dan BMHP sesuai kebutuhan puskesmas dan Rumah Sakit	%	100,00	100	100,00%
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	%	100,00	100	100,00%
		Persentase cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan	%	100,00	100	100,00%
		Prevalensi Balita Status Gizi Stunting	%	9,50	2,99	317,73%
		persentase Institusi dan fasilitas umum memenuhi syarat kesehatan	%	75,00	75,68	100,91%
		Ketersediaan Puskesmas di Kelurahan	Puskemas	56,00	53,00	94,64%
		Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100,00	100,00	100,00%
		Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100,00	100,00	100,00%
		Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100,00	100,00	100,00%
		Persentase balita yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100,00	84,97	84,97%
		Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100,00	88,27	88,27%
		Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100,00	27,96	27,96%



NO	PROGRAM PEM BANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023	CAPAIAN 2023	PROSENTASE 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100,00	92,7	92,70%
		Persentase Warga Negara penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100,00	70,26	70,26%
		Persentase Warga Negara penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100,00	100,13	100,13%
		Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100,00	83,63	83,63%
		Persentase Warga Negara penderita terduga Tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100,00	100,9	100,90%
		Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100,00	101	101,00%
86	PROGRAM SEDIAAN FARMASI. ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
		persentase jumlah sarana kefarmasian yang memenuhi standar kesehatan	%	95,00	100	105,26%
		persentase jumlah produk pangan industri rumah tangga(PIRT) berlabel yang memenuhi standar kesehatan	%	100,00	100	100,00%
87	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
		persentase ketersediaan SDM kesehatan di puskesmas dan RS	%	100,00	89,54	89,54%
88	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(PPKS) ditangani oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dikelola oleh masyarakat	%	9,00	9,00	100,00%
		Persentase Peningkatan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dikelola oleh masyarakat	%	100,00	100,00	100,00%
89	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
		Persentase penyandang disabilitas telantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti	%	100,00	100,00	100,00%
		Persentase anak telantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti	%	100,00	100,00	100,00%
		Persentase lanjut usia telantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti	%	100,00	100,00	100,00%
		Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti	%	100,00	100,00	100,00%
90	PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
		Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial	%	100,00	75,00	75,00%



NO	PROGRAM PEM BANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023	CAPAIAN 2023	PROSENTASE 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7
91	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
		Jumlah PPKS Aktif di Kecamatan	unit	8	12	150,00%
		Persentase Cakupan anggota poktan yang ber KB.	%	65,00	40,00	61,54%
92	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
		Persentase pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan Menikah	%	78,00	49,93	64,01%
93	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
		Presentase Cakupan Data Mikro Keluarga	%	85,00	85,00	100,00%
94	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
		Presentase Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	%	100,00	105,88	105,88%
95	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
		Persentase Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak	%	100,00	100,00	100,00%
96	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
		Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	49,90	46,94	94,07%
97	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK					
		Presentase Peningkatan Pemenuhan 5 Klaster KLA	%	79,00	68,57	86,80%
98	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
		Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	100,00	100	100%
		Persentase Komunitas Kreatif yang berperan dalam pembangunan	%	65,00	105,38	162%
99	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
		Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	20,00	22,01	110,1%
		Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang Representatif	%	70,00	72,17	103,1%
		Cakupan Pembinaan Olahraga	%	80,00	92,75	115,9%
		Persentase Pelatih Yang Bersertifikat	%	100,00	100	100,0%
100	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					
		Presentase Gugus Depan Aktif	%	70,00	96,29	137,6%
101	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
		Rasio perlindungan masyarakat tiap kelurahan	Rasio	1:13	1:13	100,00%
		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban. ketenteraman. keindahan)	%	100,00	100,00	100%



NO	PROGRAM PEM BANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023	CAPAIAN 2023	PROSENTASE 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase penegakan pelanggaran perda	%	100,00	100,00	100%
102	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
		Persentase wilayah tertib K3	%	100,00	100	100%
103	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					
		Persentase Pembinaan Politik Daerah	%	5,00	5,00	100%
104	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					
		Persentase jumlah organisasi kemasyarakatan yang dibina	%	100,00	100,00	100%
105	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI. SOSIAL DAN BUDAYA					
		Cakupan Masyarakat yang mendapat pembinaan peningkatan pengembangan ketahanan ekonomi. sosial. budaya	%	0,18	0,18	100%
106	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					
		Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	%	50,00	50,00	100%
107	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
		Persentase penanganan konflik yang disebabkan oleh suku. ras dan antar golongan	%	100,00	100,00	100%
108	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
		Persentase kemampuan aparaturnya dan masyarakat dalam menghadapi bencana	%	100,00	100,00	100%
		Presentase warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100,00	100,00	100%
		Persentase program penanggulangan bencana dalam dokumen perencanaan	%	100,00	100,00	100%
		persentase warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100,00	100,00	100,00%
		persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100,00	100,00	100,00%
109	PROGRAM PENCEGAHAN. PENANGGULANGAN. PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					
		Persentase layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran (BALAKR)	%	75,00	70,73	99,16%
		Persentase pencapaian layanan 150 publikasi pencegahan	%	15,70	15,70	100,00%



NO	PROGRAM PEM BANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023	CAPAIAN 2023	PROSENTASE 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7
		dan penanggulangan bahaya kebakaran				
		Persentase layanan pemeriksaan dan pengujian alat proteksi kebakaran	%	50,00	68,50	137,00%
		Persentase layanan pendataan dan inspeksi dan investigasi pasca kebakaran	%	100,00	100,00	100,00%
		Persentase layanan respon cepat (respon time) penanggulangan kejadian kebakaran	%	81,00	92,33	113,99%
		Persentase Layanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakran serta non kebakaran	%	100,00	100,00	100,00%
		Presentase penyediaan sarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan	%	53,00	44,00	83,02%
		Presentase penyediaan Prasarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan	%	100,00	66,67	66,67%
110	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
		Indeks kualitas air	Nilai	3 (IP=1-5)	36,93	13%
		Indeks kualitas udara	Nilai	84,60	65,65	77,60%
111	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					
		Persentase Usaha Kegiatan yang Memiliki TPS Limbah B3	%	65,00	54,00	83,08%
112	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
		Persentase pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan. izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	65,00	62,00	95,38%
113	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					
		Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca	Laporan	Ada	Tidak ada	0,00%
		Presentase Pembangunan Taman Baru	%	19,60	20,53	104,74%
		Presentase Pemeliharaan Taman	%	94,13	103,91	110,39%
114	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					
		Persentase Penanganan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat tentang Permasalahan Lingkungan	%	100,00	100,00	100,00%
115	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					



NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023	CAPAIAN 2023	PROSENTASE 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase institusi/kelompok masyarakat/lingkungan yang peduli lingkungan	%	70,00	70,00	100,00%
116	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					
		Prosentase Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	%	100,00	100,00	100,00%

Sumber : Bappelitbangda 2023

Pada tahun 2023 Pemerintah Kota Bekasi memiliki 116 (seratus enam belas) program dan terdapat indikator kinerja program yang melampaui target seperti Program Pengembangan Kesenian Tradisional dan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting. Selain Indikator Program yang melampaui target terdapat pula indikator yang belum dapat terealisasi capaiannya seperti Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

3.1.2. CAPAIAN KINERJA KELUARAN MASING-MASING KEGIATAN PADA SETIAP URUSAN PEMERINTAHAN

Pada Sub Bab ini menjelaskan mengenai Capaian kinerja keluaran masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan pada urusan pemerintahan sesuai target dalam dokumen anggaran serta capaian Program, kegiatan dan sub kegiatan terhadap target kinerja yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja berdasarkan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Pembagian urusan pemerintahan berdasarkan Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu meliputi Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Perumahan Rakyat, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Urusan Sosial. Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan seperti urusan Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya dijabarkan baik anggaran dan kinerjanya sebagaimana **Tabel 3.3** berikut:

Tabel 3.3

Capaian Kinerja Dan Analisis Keluaran Masing-Masing Kegiatan Dengan Target Kinerja Program

3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%	100	824.927.397.346,00	948.774.369.286,00		
				A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	100%	100	3.000.000,00	3.000.000,00		
		Dinas Pendidikan			1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,00 Laporan	2	3.000.000,00	3.000.000,00		
				B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	presentase capaian kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100	809.555.954.563,00	932.577.020.480,00		
		Dinas Pendidikan			1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.014,00 Orang/bulan	7.014,00	809.552.954.563,00	932.574.020.480,00		
		Dinas Pendidikan			2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,00 Laporan	1	3.000.000,00	3.000.000,00		
						Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,00%					
				C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%	100	0	30.000.000,00		
		Dinas Pendidikan			1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7,00 Orang	7	0	30.000.000,00		
						Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%					
				D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	100%	100	762.420.320,00	930.385.500,00		
		Dinas Pendidikan			1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,00 Paket	1	49.430.520,00	50.000.000,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Dinas Pendidikan				2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3,00 Paket	3	450.708.500,00	486.495.500,00	
		Dinas Pendidikan				3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2,00 Paket	2	131.090.000,00	133.960.000,00	
		Dinas Pendidikan				4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1,00 Dokumen	1	29.976.000,00	30.000.000,00	
		Dinas Pendidikan				5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1,00 Laporan	1	19.500.000,00	20.000.000,00	
		Dinas Pendidikan				6	Penyelenggaraan Dapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2,00 Laporan	2	71.794.800,00	199.930.000,00	
		Dinas Pendidikan				7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1,00 Dokumen	1	9.920.500,00	10.000.000,00	
							Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100,00%				
					E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	presentase capaian kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100	14.146.130.853,00	14.683.963.306,00		
		Dinas Pendidikan				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3,00 Laporan	3	536.150.240,00	900.000.000,00	
		Dinas Pendidikan				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14,00 Laporan	14	13.609.980.613,00	13.783.963.306,00	
							Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi		277,00 orang	277			
							Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100,00%				
					F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100	459.891.610,00	550.000.000,00		
		Dinas Pendidikan				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2,00 Unit	2	72.378.250,00	100.000.000,00	
		Dinas Pendidikan				2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12,00 Unit	12	113.940.436,00	125.000.000,00	
		Dinas Pendidikan				3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150,00 Unit	150	74.920.000,00	75.000.000,00	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Dinas Pendidikan				4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1,00 Unit	1	198.652.924,00	250.000.000,00	untuk kegiatan pemeliharaan rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya terdapat perubahan rab dan proses ielang masih berjalan di Ipse	kegiatan sudah terealisasi sesuai perubahan RAB
			Terwujudnya masyarakat yang berpengetahuan tinggi, kreatif dan inovat	II	Program Pengelolaan Pendidikan			Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dalam Kondisi Baik	83,33%	95,16	757.279.302.643,00	801.463.585.883,00		
				A	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			presentase capaian pengelolaan pendidikan sekolah dasar	100%	95,83	444.931.202.536,00	464.289.786.844,00		
		Dinas Pendidikan			1		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang uks yang terbangun	3,00 ruang	3	321.237.200,00	322.368.000,00		
		Dinas Pendidikan			2		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah yang terbangun	2,00 ruang	2	487.294.700,00	488.334.000,00		
		Dinas Pendidikan			3		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang dibangun	6,00 unit	6	896.374.800,00	899.652.000,00		
		Dinas Pendidikan			4		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	1,00 Ruang	0	0	54.000.000,00	rehab ruang kelas tidak di serap	kegiatan dilanjutkan pada tahun berikutnya
		Dinas Pendidikan			5		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	229,00 Paket	229	19.527.016.400,00	19.924.555.000,00		
		Dinas Pendidikan			6		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	10,00 Paket	10	40.408.427.775,00	40.949.510.000,00		
		Dinas Pendidikan			7		Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	200,00 Unit	200	20.274.602.000,00	20.476.063.172,00		
		Dinas Pendidikan			8		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik .	980,00 Peserta Didik	980	2.281.359.200,00	2.288.000.000,00		
		Dinas Pendidikan			9		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Alat praktik dan peraga siswa yang tersedia	8,00 paket	8	918.520.000,00	1.000.000.000,00		
		Dinas Pendidikan			10		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah guru SD Swasta yang mendapatkan program pengembangan karir	1.969,00 Guru	1.969,00	21.387.831.982,00	24.257.412.828,00		
								Jumlah Peserta Didik SD Swasta se Kota Bekasi yang Mengusulkan Bosda Hibah	40.428,00 Peserta Didik	40.428,00				
								Jumlah Peserta didik yang melaksanakan program AKM di Sekolah Dasar	226.832,00 Peserta Didik	226.832,00				
								Jumlah siswa Sekolah Negeri yang Mendapat Bantuan Pendidikan Berbasis BOSDA	148.381,00 Peserta Didik	148.381,00				
		Dinas Pendidikan			11		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Satuan Pendidikan Dasar Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	10,00 Sekolah	10	153.941.500,00	156.114.550,00		
		Dinas Pendidikan			12		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Pelaksanaan FLS2N SD tingkat Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat	120,00 Peserta Didik	120	420.764.500,00	751.200.000,00		
								Jumlah Pelaksanaan O2SN SD tingkat Kota Bekasi dan Terwakilinya Tim KOSN Kota Bekasi dalam KOSN tingkat Provinsi Jawa Barat	200,00 Peserta Didik	200				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
								Jumlah Pelaksanaan OSN SD tingkat Kota Bekasi dan Terwakilinya Tim KSN Kota Bekasi dalam KSN tingkat Provinsi Jawa Barat	72,00 Peserta Didik	72				
								Jumlah Seleksi Polisi Cilik Tingkat Kota Bekasi	240,00 Peserta Didik	240				
								Jumlah Seleksi siswa SD Berprestasi tingkat Kota Bekasi dan terwakilinya Kota Bekasi di tingkat Provinsi Jawa Barat	72,00 Peserta Didik	72				
		Dinas Pendidikan				13	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.917,00 Orang	1.917,00	134.294.356.737,00	143.406.138.691,00		
		Dinas Pendidikan				14	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	335,00 Orang	335	791.333.000,00	952.707.700,00		
		Dinas Pendidikan				15	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar Negeri yang Mengelola Dana BOS	356,00 SDN	356	202.512.779.742,00	208.107.908.453,00		
								Jumlah Sekolah Dasar Swasta yang Mengelola Dana BOS	251,00 SDS	251				
		Dinas Pendidikan				16	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang laboratorium SD yang terbangun	1,00 Ruang	1	255.363.000,00	255.822.450,00		
								APM SMP	96,16%					
					B	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			100%	88,89	264.411.054.006,00	286.565.573.533,00		
		Dinas Pendidikan				1	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	2,00 Ruang	2	420.943.200,00	461.468.000,00		
		Dinas Pendidikan				2	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium IPA Beserta Parabolnya	1,00 Ruang	0	0	1.219.416.000,00	tidak diserap karna masalah perencanaan	kegiatan dilanjutkan pada tahun berikutnya
								Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Parabolnya	1,00 Ruang	0				kegiatan dilanjutkan pada tahun berikutnya
		Dinas Pendidikan				3	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana dan Prasarana Utilitas Sekolah yang Terbangun	3,00 Ruang	3	351.088.500,00	457.281.000,00		
							Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	4,00 Paket	4	11.926.458.600,00	12.628.145.000,00		
		Dinas Pendidikan				4	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	1,00 Paket	1	504.910.500,00	536.812.500,00		
							Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	4,00 Paket	4	20.597.257.600,00	20.801.137.200,00		
		Dinas Pendidikan				5	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	56,00 Unit	56	16.436.953.800,00	16.618.400.000,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Dinas Pendidikan				6	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	56,00 Unit	56	413.700.000,00	560.000.000,00	
		Dinas Pendidikan				7	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik .	5.500,00 Peserta Didik	5.500,00	3.653.400.000,00	10.212.000.000,00	
		Dinas Pendidikan				8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	60,00 Paket	60	4.044.665.000,00	4.152.423.000,00	
		Dinas Pendidikan				9	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	79.937,00 Peserta Didik	79.937,00	34.859.477.445,00	43.122.589.000,00	
		Dinas Pendidikan				10	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	7,00 Sekolah	7	69.211.300,00	108.700.000,00	
							Presentase Capaian Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		100%				
		Dinas Pendidikan				11	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0,00 Peserta Didik	0	641.048.500,00	800.000.000,00	
							Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1.750,00 Peserta Didik	1.750,00				
								100%					
		Dinas Pendidikan				12	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.088,00 Orang	1.088,00	64.345.783.598,00	66.991.536.220,00	
		Dinas Pendidikan				13	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	310,00 Orang	310	396.164.000,00	475.905.100,00	
		Dinas Pendidikan				14	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri yang Mengelola Dana BOS	56,00 Satuan Pendidikan	56	105.749.991.963,00	107.419.760.513,00	
							Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta yang Mengelola Dana BOS	211,00 Satuan Pendidikan	211				
							Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Kondisi Baik	80,00%					
					C	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Presentase Capaian Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100%	100	39.969.627.007,00	41.434.209.106,00		
		Dinas Pendidikan				1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	0,00 Ruang	0	0	0	
							Pembangunan Ruang UKS	0,00 TK	0				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Dinas Pendidikan				2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana Dan Prasarana Utilitas PAUD Yang Telah Dibangun	2,00 Unit	2	156.456.000,00	436.065.200,00	
		Dinas Pendidikan				3	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	5,00 Sekolah	5	123.672.956,00	124.338.000,00	
		Dinas Pendidikan				4	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	347,00 Unit	347	267.474.500,00	354.054.000,00	
		Dinas Pendidikan				5	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	106,00 Buah	106	517.400.000,00	600.236.000,00	
		Dinas Pendidikan				6	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Terpenuhinya Beasiswa bagi siswa berprestasi dan bantuan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu	600,00 siswa	600	1.473.785.200,00	1.500.000.000,00	
		Dinas Pendidikan				7	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	2,00 Paket	2	59.150.000,00	93.497.800,00	
		Dinas Pendidikan				8	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	969,00 Peserta Didik	969	11.505.054.034,00	11.726.601.000,00	
		Dinas Pendidikan				9	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD Yang Siap Di Evaluasi Dan melaksanakan Rekomendasi	2,00 Satuan Pendidikan	2	26.310.000,00	26.510.000,00	
		Dinas Pendidikan				10	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Presentase Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26,00 Orang	26	1.273.995.547,00	1.277.647.106,00	
		Dinas Pendidikan				11	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1.069,00 Satuan Pendidikan	1.069,00	953.022.000,00	1.371.010.000,00	
		Dinas Pendidikan				12	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD Swasta Yang Mengelola Dana BOP Reguler	925,00 Lembaga	925	23.613.306.770,00	23.924.250.000,00	
							Jumlah PAUD Yang Mengelola Dana BOP Kinerja		19,00 Lembaga	19			
							Jumlah TK Negeri Yang Mengelola Dana BOP Reguler		10,00 Lembaga	10			
							Angka kelulusan pendidikan kesetaraan	100,00%					
					D	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Persentase Capaian Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	100%	100	7.967.419.094,00	9.174.016.400,00		
		Dinas Pendidikan				1	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	11,00 Unit	11	6.260.000,00	6.260.000,00	
		Dinas Pendidikan				2	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	1,00 Paket	1	196.980.000,00	198.110.000,00	
		Dinas Pendidikan				3	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	178,00 Peserta Didik	178	478.900.000,00	480.000.000,00	
		Dinas Pendidikan				4	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	297,00 Peserta Didik	297	1.247.300.717,00	2.356.211.400,00	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Dinas Pendidikan				5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	210,00 Orang	210	496.210.000,00	519.675.000,00		
		Dinas Pendidikan				6	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP Reguler	39,00 Lembaga	39	5.541.768.377,00	5.613.760.000,00		
								Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP Kinerja	5,00 Lembaga	5				
			Terwujudnya masyarakat yang berpengetahuan tinggi, kreatif dan inovatif	III	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan			Cakupan Pelayanan Berbasis IT	30,00%	100	2.004.836.086,00	2.655.000.000,00		
					A	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			100%	100	2.004.836.086,00	2.655.000.000,00		
		Dinas Pendidikan				1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7,00 Dokumen	7	1.506.573.710,00	2.155.000.000,00		
		Dinas Pendidikan				2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Presentase Pemenuhan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan PadaSatuan Pendidikan Dasar	85,00%	85	498.262.376,00	500.000.000,00		
								Cakupan Pelayanan Berbasis IT	60,00%	60				
			Terwujudnya masyarakat yang berpengetahuan tinggi, kreatif dan inovatif	IV	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan			Presentase pendidikan Dasar terakreditas B	90,40%	100	271.473.700,00	441.225.000,00		
					A	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			100%	100	110.890.000,00	150.000.000,00		
		Dinas Pendidikan				1	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1,00 Dokumen	1	110.890.000,00	150.000.000,00		
								Lembaga Pendidikan Non Formal Terakreditasi	36,11%					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
					B	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan Satuan Pendidikan PAUD dan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat	100%	100	160.583.700,00	291.225.000,00		
		Dinas Pendidikan				1	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1,00 Dokumen	1	160.583.700,00	291.225.000,00		
2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Disperkimtan	Terwujudnya masyarakat yang berpengetahuan tinggi, kreatif dan inovatif	V	Program Pengelolaan Pendidikan			Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dalam Kondisi Baik	83,33%	100	72.905.931.334,00	69.159.292.722,00		
					A	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Presentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dalam kondisi baik	100%	100	30.373.465.549,00	28.787.280.663,00		
		Disperkimtan				1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Terbangun	1,00 unit	1	5.000.000.000,00	4.736.100.000,00		
		Disperkimtan				2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	48,00 Ruang	48	21.751.154.549,00	20.743.819.398,00		
		Disperkimtan				3	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah terbangun	9,00 unit	9	2.907.311.000,00	2.652.986.819,00		
		Disperkimtan				4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	1,00 unit	1	715.000.000,00	654.374.446,00		
								Persentase bangunan SMPN disetiap kelurahan dalam Kondisi Baik	76,19%					
					B	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Presentase Bangunan SMPN disetiap Kelurahan dalam kondisi baik	100%	100	41.000.265.785,00	38.954.251.990,00		
		Disperkimtan				1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	5,00 Unit	5	29.860.935.625,00	28.382.704.768,00		
		Disperkimtan				2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	5,00 RKB	5	8.981.330.160,00	8.765.378.411,00		
		Disperkimtan				3	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	6,00 Unit	6	2.158.000.000,00	1.806.168.811,00		
								Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Kondisi Baik	80,00%					
					C	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Presentase Jumlah Gedung atau Ruang Kelas/Guru PAUD Yang Telah Dibangun	100%	100	1.532.200.000,00	1.417.760.069,00		
		Disperkimtan				1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung atau Ruang Kelas/Guru PAUD Yang Telah Dibangun	2,00 Unit	2	1.532.200.000,00	1.417.760.069,00		

2. Urusan Kesehatan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00%	88,24	223.159.541.750,00	196.963.394.413,00		
				A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan	100%	0	0	0		
		Dinas Kesehatan		1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00 Laporan	0	0	0		
				B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang tersusun	100%	100	211.940.565.000,00	186.704.101.437,00		
		Dinas Kesehatan		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13.412,00 Orang/bulan	13.412,00	211.937.565.000,00	186.701.247.517,00		
		Dinas Kesehatan		2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1,00 Laporan	1	3.000.000,00	2.853.920,00		
						Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%					
				C	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi Umum	100%	100	652.810.400,00	644.489.306,00		
		Dinas Kesehatan		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / Penerangan bangunan kantor yang disediakan	2,00 paket	2	20.000.000,00	19.865.050,00		
		Dinas Kesehatan		2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1,00 Paket	1	217.810.400,00	215.329.000,00		
		Dinas Kesehatan		3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1,00 Paket	1	100.000.000,00	99.518.000,00		
		Dinas Kesehatan		4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4,00 Dokumen	4	35.000.000,00	31.287.000,00		
		Dinas Kesehatan		5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4,00 Laporan	4	20.000.000,00	19.879.000,00		
		Dinas Kesehatan		6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4,00 Laporan	4	250.000.000,00	248.963.256,00		
		Dinas Kesehatan		7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4,00 Dokumen	4	10.000.000,00	9.648.000,00		
				D	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang	100%	100	9.203.610.350,00	8.720.319.522,00		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Dinas Kesehatan			1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4,00 Laporan	4	553.000.000,00	528.234.117,00		
		Dinas Kesehatan			2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3,00 Laporan	3	8.650.610.350,00	8.192.085.405,00		
							Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%					
				E	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis pemeliharaan barang	100%	100	930.556.000,00	894.484.148,00		
		Dinas Kesehatan			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6,00 Unit	6	100.000.000,00	83.963.576,00		
		Dinas Kesehatan			2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6,00 Unit	6	180.000.000,00	170.698.772,00		
		Dinas Kesehatan			3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	106,00 Unit	106	50.000.000,00	49.745.000,00		
		Dinas Kesehatan			4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1,00 Unit	1	600.556.000,00	590.076.800,00		
					5		Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00%					
				F	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pelayanan BLUD Meningkat	100%	0	432.000.000,00	0		
		Dinas Kesehatan			1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	jumlah dokumen yang dihasilkan	4,00 dokumen RSuD	0	432.000.000,00	0	Aturan pemberian honor BLUD belum ada	Tahun berikutnya Kegiatan dialihkan untuk peningkatan BLUD bukan untuk Honor
							jumlah dokumen yang dihasilkan 49 puskesmas	49,00 dokumen puskesmas	0				
			Terwujudnya masyarakat Kota Bekasi yang sehat	II	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		persentase ketersediaan alat kesehatan dan non kesehatan di Puskesmas	60,00%	80,59	538.441.923.244,00	472.538.035.091,00		
				A	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Ketersediaan Puskesmas di Kelurahan	100%	93,43	149.549.551.450,00	122.989.738.237,00		
		Dinas Kesehatan			1	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	2,00 Unit	2	12.000.000.000,00	11.560.979.650,00		
							Presentase Ketersediaan Alat Kesehatan dan Non Kesehatan di Puskesmas	100%					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Dinas Kesehatan				2	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1,00 unit	0,04	600.000.000,00	22.578.510,00	Jadwal bersamaan	Pembangunan PSC diusulkan Tahun berikutnya dengan menggunakan sumber pendanaan yang memungkinkan
								persentase ketersediaan alat kesehatan dan non kesehatan di Rumah Sakit Type D	60,00%					
								presentase ketersediaan alat kesehatan dan Non Kesehatan di rumah sakit Type D	100%					
		UPTD RSUD Pondok Gede				3	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	11,00 Unit	11	2.316.338.000,00	2.162.743.448,00		
								persentasi ketersediaan alat kesehatan dan Non Kesehatan di rumah sakit Type D	100%					
		UPTD RSUD Teluk Pucung				4	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	5,00 Unit	5	68.530.000,00	0	Perubahan pada Sub Kegiatan	Penempatan Kegiatan akan disesuaikan dengan sub kegiatannya
								persentase ketersediaan obat dan BMHP sesuai kebutuhan puskesmas dan Rumah Sakit	100,00%					
								presentase institusi dan fasilitas umum memenuhi syarat kesehatan	100%					
		UPTD Instalasi Farmasi				5	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	4,00 Unit	4	3.947.117.000,00	3.697.905.000,00		
								persentase ketersediaan alat kesehatan dan non kesehatan di Rumah Sakit Type D	60,00%					
								Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100%					
		UPTD RSUD Pondok Gede				6	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	2,00 Unit	2	404.529.162,00	78.483.000,00	Kesalahan kode rekeing	Pemilihan Kode rekening akan menyesuaikan jenis barang nya

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
								<i>persentasi ketersediaan alat kesehatan dan Non Kesehatan di rumah sakit Type D</i>	100%					
		UPTD RSUD Jati Sampurna				7	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1,00 Unit	1	2.662.754.300,00	2.645.007.487,00		
								persentase ketersediaan alat kesehatan dan non kesehatan di Puskesmas	60,00%					
								Ketersediaan Puskesmas di Kelurahan	100%					
		Dinas Kesehatan				8	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1.842,00 Unit	1.842,00	16.030.727.500,00	15.411.660.000,00		
								persentase ketersediaan alat kesehatan dan non kesehatan di Rumah Sakit Type D	60,00%					
								Persentase cakupan pelayanan kesehatan rujukan	100%					
		UPTD RSUD Bantar Gebang				9	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	130,00 Unit	130	1.771.389.080,00	1.361.746.115,00	Anggaran SILPA masih tercatat	akan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang di laksanakan
								Tersedianya Mobil Operasional (Pick Up)	1,00 Unit	1				
								Tersedianya Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	23,00 Unit	22				
								Tersedianya Alat Kantor Lainnya	3,00 Unit	3				
								Tersedianya Alat Reproduksi (Penggandaan)	1,00 Unit	1				
								Tersedianya Alat Kantor Lainnya (Home Use)	29,00 Unit	29				
								Tersedianya Mebel	25,00 Unit	25				
								Tersedianya Alat Pendingin	9,00 Unit	9				
								Tersedianya Alat Pemadam Kebakaran	2,00 Unit	2				
								Tersedianya Alat Komunikasi Lainnya	5,00 Unit	5				
								Tersedianya Alat Kedokteran Umum	6,00 Unit	6				
								Tersedianya Laboratorium Lingkungan	1,00 Unit	1				
								presentase ketersediaan alat kesehatan dan Non Kesehatan di rumah sakit Type D	100%					
		UPTD RSUD Pondok Gede				10	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah	1,00 UNIT	1	437.000.000,00	437.000.000,00		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		UPTD RSUD Jati Sampurna				11	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	11,00 Unit	11	213.000.000,00	198.000.000,00		
								persentase ketersediaan obat dan BMHP sesuai kebutuhan puskesmas dan Rumah Sakit	100,00%					
								presentase institusi dan fasilitas umum memenuhi syarat kesehatan	100%					
		UPTD Instalasi Farmasi				12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2,00 Unit	2	500.000.000,00	486.000.000,00		
								persentase ketersediaan alat kesehatan dan non kesehatan di Rumah Sakit Type D	60,00%					
								Persentase cakupan pelayanan kesehatan rujukan	100%					
		UPTD RSUD Bantar Gebang				13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	2,00 Unit	2	1.319.357.089,00	723.179.000,00	Anggaran SILPA masih tercatat	akan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang di laksanakan
								Tersedianya Instalasi Air Kotor Lainnya	1,00 Unit	1				
								Tersedianya Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	15,00 Unit	15				
								persentasi ketersediaan alat kesehatan dan Non Kesehatan di rumah sakit Type D	100%					
		UPTD RSUD Jati Sampurna				14	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	1,00 Unit	1	407.449.848,00	398.136.425,00		
								persentasi ketersediaan alat kesehatan dan Non Kesehatan di rumah sakit Type D	100%					
		UPTD RSUD Teluk Pucung				15	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	4,00 Unit	4	3.116.926.668,00	3.025.266.400,00		
								persentase ketersediaan alat kesehatan dan non kesehatan di Puskesmas	60,00%					
								Ketersediaan Puskesmas di Kelurahan	100%					
		Dinas Kesehatan				16	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	741,00 Unit	620	28.704.024.437,00	23.777.471.396,00		
								persentase ketersediaan alat kesehatan dan non kesehatan di Rumah Sakit	60,00%					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
								Type D						
								Persentase cakupan pelayanan kesehatan rujukan	100%					
		UPTD RSUD Bantar Gebang				17	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Suku Cadang Alat Kedokteran	25,00 Unit	25	6.449.237.325,00	3.940.438.566,00	Anggaran SILPA masih tercatat	akan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang di laksanakan
								Tersedianya Alat Kedokteran Umum	19,00 Unit	19				
								Tersedianya Alat Kedokteran Bedah	21,00 Unit	19				
								Tersedianya Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	3,00 Unit	2				
								Tersedianya Alat Kesehatan Umum Lainnya	6,00 Unit	4				
								Tersedianya Belanja Modal Alat Pendingin	1,00 Unit	1				
								Tersedianya Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	3,00 Unit	3				
								Tersedianya Alat Kedokteran Anak	1,00 Unit	1				
								Tersedianya Alat Kedokteran Lainnya	3,00 Unit	3				
								Tersedianya Alat Laboratorium Umum	1,00 Unit	1				
								presentase ketersediaan alat kesehatan dan Non Kesehatan di rumah sakit Type D	100%					
		UPTD RSUD Pondok Gede				18	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	24,00 unit	24	16.054.699.700,00	11.139.118.118,00	User tidak bersedia menggunakan barang TKDN	akan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang di laksanakan
		UPTD RSUD Jati Sampurna				19	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	72,00 Unit	72	12.508.906.668,00	12.133.389.383,00		
		UPTD RSUD Pondok Gede				20	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	75,00 Unit	74	16.054.699.700,00	11.139.118.118,00		
								persentasi ketersediaan alat kesehatan dan Non Kesehatan di rumah sakit Type D	100%					
		UPTD RSUD Teluk Pucung				21	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan Penunjang/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	42,00 unit	42	6.727.600.038,00	6.521.336.200,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
							Cakupan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	100,00%					
							Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Di Puskesmas	100%					
		UPTD Labkesda			22	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	8,00 Unit	8	412.567.464,00	388.189.977,00		
							Persentase ketersediaan obat dan BMHP sesuai kebutuhan puskesmas dan rumah sakit	100%					
		UPTD RSUD Medan Satria			23	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1,00 Paket	0	0	0	RSUD Medan Satria Tidak jadi di bangun	Tidak akan dialokasikan kembali
							persentase ketersediaan alat kesehatan dan non kesehatan di Rumah Sakit Type D	60,00%					
							Persentase cakupan pelayanan kesehatan rujukan	100%					
		UPTD RSUD Bantar Gebang			24	Pengadaan Obat, Vaksin	Tersedianya Obat-Obatan	54,00 Paket	51	3.680.154.652,00	1.958.513.146,00	Anggaran SILPA masih tercatat	akan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang di laksanakan
							Tersedianya Obat-Obatan	1,00 Tahun	1				
							Tersedianya Obat-Obatan	18,00 Paket	18				
							presentase ketersediaan obat dan BMHP sesuai kebutuhan puskesmas dan Rumah sakit	100%					
		UPTD RSUD Teluk Pucung			25	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	4,00 Paket	4	987.186.806,00	789.244.936,00	Ada Barang yang tidak tersedia	akan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang di laksanakan
							presentase ketersediaan obat dan BMHP sesuai kebutuhan puskesmas dan Rumah sakit	100%					
		UPTD RSUD Pondok Gede			26	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang di sediakan	1,00 Paket	1	1.000.000.000,00	941.968.798,00		
		UPTD RSUD Jati Sampurna			27	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1,00 Paket	1	1.500.000.000,00	1.496.096.050,00		
							persentase ketersediaan obat dan BMHP sesuai kebutuhan puskesmas dan Rumah Sakit	100,00%					
							presentase institusi dan fasilitas umum memenuhi syarat kesehatan	100%					
		UPTD Instalasi Farmasi			28	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1,00 Tahun	1	6.100.000.000,00	6.098.981.285,00		
								0					



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
							<i>Persentase ketersediaan obat dan BMHP sesuai kebutuhan puskesmas dan rumah sakit</i>	100%					
		UPTD RSUD Medan Satria			29	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1,00 Paket	0	0	0	RSUD Medan Satria tidak jadi dibangun	Tidak akan dialokasikan kembali
							<i>persentase ketersediaan alat kesehatan dan non kesehatan di Puskesmas</i>	60,00%					
							<i>Ketersediaan Puskesmas di Kelurahan</i>	100%					
		Dinas Kesehatan			30	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah habis pakai yang disediakan	48,00 Paket	48	8.915.650.000,00	1.997.218.665,00	Perubahan target sasaran BHP	pengandaan BHP berikutnya akan menyesuaikan dengan sasaran yang terbaru dengan perhitungan yang tepat
							<i>persentase ketersediaan alat kesehatan dan non kesehatan di Rumah Sakit Type D</i>	60,00%					
							<i>Persentase cakupan pelayanan kesehatan rujukan</i>	100%					
		UPTD RSUD Bantar Gebang			31	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Tersedianya Bahan Kimia	2,00 Paket	2	3.288.107.763,00	2.496.399.211,00	Anggaran SILPA masih tercatat	akan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang di laksanakan
							Tersedianya Bahan-bahan lainnya	1,00 Paket	1				
							Tersedianya Suku Cadang Alat Kedokteran	2,00 Paket	2				
							Tersedianya Suku Cadang Alat Laboratorium	2,00 Paket	2				
							Tersedianya Obat-obatan lainnya	1,00 Paket	1				
							Tersedianya Pakaian Penyelamatan	2,00 Paket	2				
							Tersedianya Kaporit Padat/Tablet	10,00 kg	10				
							Tersedianya Tawas	10,00 kg	10				
							Tersedianya Plastik Medis	135,00 Pak	135				
							Tersedianya Pembuatan dan pengadaan Dokumen Lelang	1,00 Paket	1				
							Tersedianya - Jerigen Plastik	121,00 Buah	121				
							Tersedianya Kantong Plastik Hitam kecil	24,00 Pak	24				
							Tersedianya Kantong Plastik Kuning	220,00 Pak	220				
							Tersedianya Plastik Sampah Besar	205,00 buah	205				
							Tali Tampar	21,00 Meter	21				
							<i>presentase ketersediaan obat dan BMHP sesuai kebutuhan puskesmas dan Rumah sakit</i>	100%					
		UPTD RSUD Teluk Pucung			32	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang di sediakan	4,00 Paket	4	946.778.750,00	913.592.698,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
							<i>presentase ketersediaan obat dan BMHP sesuai kebutuhan puskesmas dan Rumah sakit</i>	100%						
		UPTD RSUD Pondok Gede				33	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	3,00 Paket	2,81	1.000.000.000,00	904.608.679,00		
		UPTD RSUD Jati Sampurna				34	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	2,00 Paket	2	1.400.000.000,00	1.369.263.503,00		
							<i>persentase ketersediaan obat dan BMHP sesuai kebutuhan puskesmas dan Rumah Sakit</i>	100,00%						
							<i>presentase institusi dan fasilitas umum memenuhi syarat kesehatan</i>	100%						
		UPTD Instalasi Farmasi				35	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1,00 Tahun	1	1.000.000.000,00	951.831.653,00		
							<i>persentase ketersediaan alat kesehatan dan non kesehatan di Rumah Sakit Type D</i>	60,00%						
							<i>Persentase cakupan pelayanan kesehatan rujukan</i>	100%						
		UPTD RSUD Bantar Gebang				36	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Efisiensi Belanja	1,00 Tahun	0	672.000,00	0	Anggaran SILPA masih tercatat	Anggaran SILPA di kembalikan ke Kas Daerah
							<i>presentase ketersediaan alat kesehatan dan Non Kesehatan di rumah sakit Type D</i>	100%						
		UPTD RSUD Pondok Gede				37	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	21,00 Unit	21	1.836.097.200,00	1.724.524.036,00		
								Tersedianya Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	12,00 Bulan	12				
							<i>Terpenuhinya pemeliharaan 10 jenis sarana dan prasarana rumah sakit</i>	100%						
		UPTD RSUD Teluk Pucung				38	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	4,00 Unit	4	1.242.750.000,00	1.238.866.902,00		
							<i>Cakupan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas</i>	100,00%						
						B	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas</i>	100%	79,38	387.621.965.794,00	348.474.764.649,00		
		UPTD Puskesmas Aren Jaya				1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.070,00 Orang	1.029,00	32.400.000,00	32.400.000,00		
		UPTD Puskesmas Bantargebang				2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.222,00 Orang	321	30.600.300,00	30.600.000,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		UPTD Puskesmas Mustikajaya			3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standart	1.583,00 orang	1.029,00	63.600.000,00	63.520.000,00		
		UPTD Puskesmas Bintara			4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.304,00 Orang	837	29.300.000,00	29.300.000,00		
		UPTD Puskesmas Bintarajaya			5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil mendapatkan Kesehatan Sesuai Standar	794,00 Orang	747	31.501.400,00	31.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Bojong Rawalumbu			6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.463,00 Orang	1.463,00	40.270.000,00	40.221.000,00		
		UPTD Puskesmas Durenjaya			7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.189,00 Orang	1.189,00	52.400.000,00	52.400.000,00		
		UPTD Puskesmas Jakamulya			8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	666,00 orang	546	31.300.130,00	31.300.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatiasih			9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2.779,00 orang	1.390,00	130.400.129,00	98.600.000,00	kegiatan UKGM karna keterbatasan SDM	akan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang di laksanakan
		UPTD Puskesmas Jatiluhur			10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	1.353,00 Orang	1.150,00	80.100.000,00	80.100.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatimakmur			11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.281,00 Orang	558	30.000.120,00	26.600.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatirahayu			12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.298,00 orang	1.153,00	18.045.415,00	18.045.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatisampurna			13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan	1.824,00 Orang	1.692,00	23.400.000,00	23.400.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatiwarna			14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.319,00 orang	1.319,00	11.000.000,00	9.200.000,00		
		UPTD Puskesmas Kaliabang Tengah			15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.789,00 Orang	1.411,00	22.100.110,00	22.100.000,00		
		UPTD Puskesmas Kotabaru			16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	821,00 Orang	767	54.500.030,00	51.775.000,00		
		UPTD Puskesmas Karangitri			17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.060,00 Orang	1.017,00	19.975.010,00	19.875.000,00		
		UPTD Puskesmas Kranji			18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	789,00 orang	780	89.400.000,00	89.300.000,00		
		UPTD Puskesmas Margamulya			19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	410,00 Orang	307	49.700.080,00	49.400.000,00		
		UPTD Puskesmas Pengasinan			20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.928,00 orang	1.568,00	15.800.000,00	15.800.000,00		
		UPTD Puskesmas Perumnas II			21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.003,00 Orang	955	17.800.000,00	17.800.000,00		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		UPTD Puskesmas Rawatembaga				22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	1.254,00 Orang	1.254,00	16.775.000,00	16.775.000,00		
		UPTD Puskesmas Seroja				23	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.551,00 orang	1.360,00	15.400.000,00	15.400.000,00		
		UPTD Puskesmas Teluk Pucung				24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.122,00 orang	1.122,00	14.600.000,00	14.600.000,00		
		UPTD Puskesmas Bekasi Jaya				25	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil mendapatkan Kesehatan Sesuai Standar	960,00 Orang	920	29.100.000,00	29.100.000,00		
		UPTD Puskesmas Harapan baru				26	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	721,00 Orang	646	6.800.000,00	6.400.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatiranggon				27	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	610,00 orang	530	21.200.000,00	21.200.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatibening Baru				28	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	876,00 Orang	601	62.200.000,00	62.200.000,00		
		UPTD Puskesmas Kali Baru				29	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	524,00 Orang	458	49.000.000,00	49.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Mustika Sari				30	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	799,00 Orang	772	18.400.000,00	18.400.000,00		
		UPTD Puskesmas Perwira				31	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	701,00 Orang	701	29.600.000,00	29.600.000,00		
		UPTD Puskesmas Sumur Batu				32	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	274,00 orang	274	39.400.000,00	39.400.000,00		
		UPTD Puskesmas Pondok Gede				33	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.047,00 Orang	1.429,00	10.200.000,00	7.800.000,00	Ada kegiatan yang bersamaan	akan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang di laksanakan
		UPTD Puskesmas Bojongmenteng				34	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart	950,00 Orang	653	33.700.000,00	32.600.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatibening				35	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai Stantard	820,00 orang	514	55.800.000,00	49.600.000,00		
		UPTD Puskesmas Margajaya				36	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	266,00 orang	244	22.500.000,00	22.500.000,00		
		UPTD Puskesmas Pejuang				37	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.567,00 Orang	1.346,00	46.400.000,00	46.400.000,00		
		UPTD Puskesmas Pekayonjaya				38	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.156,00 Orang	830	20.820.067,00	20.620.000,00		
		UPTD Puskesmas Ciketing Udik				39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	523,00 Orang	460	14.000.000,00	14.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Cimuning				40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar	867,00 orang	608	33.700.000,00	33.700.000,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		UPTD Puskesmas Jaka Setia			41	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	688,00 Orang	559	9.000.100,00	9.000.000,00		
							Persentase ibu hamil yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%					
		UPTD Puskesmas Padurenan			42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.027,00 orang	1.027,00	43.700.000,00	43.700.000,00		
							Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00%					
							Jumlah Jenis layanan UKP dan UKM	100%					
		Dinas Kesehatan			43	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil mendapatkan Kesehatan Sesuai Standar	47.248,00 Orang	38.943,00	150.000.000,00	121.898.300,00		
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0,00 Orang	0				
		Dinas Kesehatan			44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	45.099,00 Orang	37.435,00	106.529.000,00	105.360.550,00		
		Dinas Kesehatan			45	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	42.953,00 orang	36.625,00	111.358.000,00	102.517.000,00		
							Cakupan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	100,00%					
							Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas	100%					
		UPTD Puskesmas Aren Jaya			46	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.405,00 Orang	3.509,00	5.500.000,00	5.500.000,00		
		UPTD Puskesmas Bantargebang			47	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standart	3.755,00 Orang	1.329,00	9.900.000,00	9.900.000,00		
		UPTD Puskesmas Mustikajaya			48	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita Yang Mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standart	3.883,00 orang	2.581,00	1.300.000,00	1.300.000,00		
		UPTD Puskesmas Bintara			49	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.429,00 Orang	3.263,00	58.201.820,00	58.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Bintarajaya			50	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.795,00 Orang	1.795,00	68.500.000,00	66.800.000,00		
		UPTD Puskesmas Bojong Rawalumbu			51	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.149,00 Orang	3.751,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Durenjaya			52	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.891,00 Orang	3.105,00	95.001.102,00	95.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Jakamulya			53	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.895,00 Orang	1.895,00	41.900.000,00	41.800.000,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		UPTD Puskesmas Jatiasih				54	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8.861,00 orang	4.430,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatiluhur				55	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan Pelayanan kesehatan sesuai standar	3.807,00 Orang	3.807,00	55.000.148,00	55.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatimakmur				56	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.238,00 Orang	1.581,00	10.920.103,00	7.700.000,00	Jadwal bersamaan	akan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang di laksanakan
		UPTD Puskesmas Jatirahayu				57	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.848,00 Orang	2.714,00	61.440.000,00	61.440.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatisampurna				58	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4.693,00 Orang	4.693,00	300.000,00	300.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatiwarna				59	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.511,00 orang	3.154,00	2.500.000,00	2.500.000,00		
		UPTD Puskesmas Kaliabang Tengah				60	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5.280,00 Orang	4.190,00	83.300.180,00	83.300.000,00		
		UPTD Puskesmas Kotabaru				61	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2.574,00 Orang	1.287,00	61.900.560,00	61.200.000,00		
		UPTD Puskesmas Karangitri				62	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.585,00 Orang	3.343,00	11.920.174,00	11.860.000,00		
		UPTD Puskesmas Kranji				63	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.871,00 Orang	2.300,00	61.600.000,00	60.900.000,00		
		UPTD Puskesmas Margamulya				64	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.258,00 Orang	983	37.600.000,00	37.300.000,00		
		UPTD Puskesmas Pengasinan				65	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5.567,00 Orang	4.401,00	75.600.900,00	75.600.000,00		
		UPTD Puskesmas Perumnas II				66	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3.179,00 orang	2.845,00	102.620.173,00	102.520.000,00		
		UPTD Puskesmas Rawatembaga				67	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	3.993,00 Orang	3.619,00	77.640.224,00	77.640.000,00		
		UPTD Puskesmas Seroja				68	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4.740,00 orang	4.252,00	53.400.000,00	53.400.000,00		
		UPTD Puskesmas Teluk Pucung				69	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3.811,00 orang	3.811,00	12.300.000,00	12.300.000,00		
		UPTD Puskesmas Bekasi Jaya				70	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.596,00 Orang	3.596,00	56.000.000,00	55.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Harapan baru				71	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.168,00 Orang	1.168,00	50.081.430,00	49.880.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatiranggon				72	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.444,00 orang	1.178,00	59.300.000,00	58.300.000,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		UPTD Puskesmas Jatibening Baru				73	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.967,00 Orang	1.673,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Kali Baru				74	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.784,00 Orang	1.784,00	25.200.000,00	25.200.000,00		
		UPTD Puskesmas Mustika Sari				75	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	2.773,00 Orang	2.773,00	54.060.436,00	54.060.000,00		
		UPTD Puskesmas Perwira				76	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2.302,00 Orang	1.742,00	46.800.000,00	46.800.000,00		
		UPTD Puskesmas Sumur Batu				77	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.847,00 orang	1.151,00	57.120.480,00	56.720.000,00		
		UPTD Puskesmas Pondok Gede				78	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.679,00 Orang	4.679,00	90.100.000,00	85.700.000,00		
		UPTD Puskesmas Bojongmenteng				79	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart	2.554,00 Orang	1.606,00	41.300.000,00	40.800.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatibening				80	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard	1.974,00 Orang	1.618,00	8.400.000,00	8.400.000,00		
		UPTD Puskesmas Margajaya				81	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.105,00 orang	838	40.700.000,00	40.700.000,00		
		UPTD Puskesmas Pejuang				82	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6.818,00 Orang	3.887,00	4.300.000,00	3.300.000,00	Tidak ada rujukan balita gizi buruk ke RS	akan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang di laksanakan
		UPTD Puskesmas Pekayonjaya				83	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.970,00 Orang	1.490,00	46.100.000,00	45.100.000,00		
		UPTD Puskesmas Ciketing Udik				84	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.413,00 Orang	1.413,00	29.000.000,00	28.800.000,00		
		UPTD Puskesmas Cimuning				85	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.337,00 Orang	1.837,00	21.900.000,00	20.800.000,00		
		UPTD Puskesmas Jaka Setia				86	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.192,00 Orang	969	40.500.000,00	40.500.000,00		
								Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	625,00 Orang	425				
								Persentase Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%					
		UPTD Puskesmas Padurenan				87	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3.226,00 orang	3.226,00	45.900.000,00	45.900.000,00		
								Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00%					
								Jumlah Jenis layanan UKP dan UKM	100%					



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Dinas Kesehatan				88	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	136.745,00 Orang	121.394,00	100.000.000,00	67.170.000,00	Efisiensi Anggaran	akan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang di laksanakan
								Cakupan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	100,00%					
								Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas	100%					
		UPTD Puskesmas Aren Jaya				89	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9.585,00 Orang	9.585,00	39.600.000,00	36.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Bantargebang				90	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10.535,00 Orang	5.223,00	14.400.100,00	14.400.000,00		
		UPTD Puskesmas Mustikajaya				91	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan sesuai Standart	12.547,00 orang	10.251,00	4.400.000,00	4.400.000,00		
		UPTD Puskesmas Bintara				92	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9.252,00 Orang	6.345,00	19.500.000,00	19.500.000,00		
		UPTD Puskesmas Bintarajaya				93	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5.092,00 Orang	5.092,00	12.500.000,00	12.200.000,00		
		UPTD Puskesmas Bojong Rawalumbu				94	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.068,00 Orang	11.068,00	6.000.000,00	6.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Durenjaya				95	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.340,00 Orang	6.910,00	22.100.000,00	22.100.000,00		
		UPTD Puskesmas Jakamulya				96	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5.256,00 Orang	2.796,00	16.000.000,00	16.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatiasih				97	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	25.092,00 orang	12.546,00	28.900.000,00	22.800.000,00	sekolah banyak yg merger dan tutup dan keterbatasan SDM dokter gigi	akan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang di laksanakan
		UPTD Puskesmas Jatiluhur				98	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	11.975,00 Orang	11.975,00	22.400.000,00	22.400.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatimakmur				99	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8.987,00 Orang	7.467,00	18.000.000,00	17.200.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatirahayu				100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8.592,00 Orang	6.078,00	8.400.000,00	8.000.000,00		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		UPTD Puskesmas Jatisampurna			101	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12.853,00 Orang	11.093,00	30.100.000,00	29.400.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatiwarna			102	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10.474,00 orang	10.474,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Terkendala Kegiatan Sekolah	akan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang di laksanakan
		UPTD Puskesmas Kaliabang Tengah			103	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13.045,00 Orang	12.166,00	8.100.000,00	8.100.000,00		
		UPTD Puskesmas Kotabaru			104	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6.310,00 Orang	5.603,00	15.900.000,00	15.800.000,00		
		UPTD Puskesmas Karangitri			105	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9.684,00 orang	8.932,00	9.700.000,00	9.700.000,00		
		UPTD Puskesmas Kranji			106	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7.976,00 orang	7.654,00	2.800.000,00	2.800.000,00		
		UPTD Puskesmas Margamulya			107	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.500,00 Orang	3.302,00	12.600.000,00	10.500.000,00		
		UPTD Puskesmas Pekayonjaya			108	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8.476,00 Orang	5.543,00	30.100.000,00	28.300.000,00		
		UPTD Puskesmas Pengasinan			109	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	14.253,00 Orang	14.084,00	11.800.000,00	11.800.000,00		
		UPTD Puskesmas Perumnas II			110	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlahanak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8.970,00 orang	8.039,00	16.200.000,00	16.200.000,00		
		UPTD Puskesmas Rawatembaga			111	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	11.519,00 Orang	6.755,00	21.900.000,00	21.900.000,00		
		UPTD Puskesmas Seroja			112	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12.881,00 orang	8.588,00	16.000.000,00	16.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Teluk Pucung			113	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	9.992,00 orang	9.992,00	6.200.000,00	6.200.000,00		
		UPTD Puskesmas Bekasi Jaya			114	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10.254,00 Orang	10.254,00	14.400.000,00	14.400.000,00		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		UPTD Puskesmas Harapan baru				115	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.532,00 orang	2.609,00	19.600.000,00	19.600.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatiranggon				116	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.442,00 orang	4.442,00	7.800.000,00	7.800.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatibening Baru				117	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5.465,00 Orang	5.465,00	37.300.000,00	37.300.000,00		
		UPTD Puskesmas Kali Baru				118	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.851,00 Orang	3.065,00	18.400.000,00	18.400.000,00		
		UPTD Puskesmas Mustika Sari				119	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	5.892,00 orang	5.892,00	18.000.000,00	18.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Perwira				120	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5.950,00 Orang	5.950,00	24.000.000,00	17.100.000,00		
		UPTD Puskesmas Sumur Batu				121	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.044,00 orang	2.715,00	10.200.000,00	10.200.000,00		
		UPTD Puskesmas Pondok Gede				122	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14.034,00 Orang	13.950,00	2.400.000,00	2.400.000,00		
		UPTD Puskesmas Bojongmenteng				123	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart	7.148,00 Orang	5.789,00	13.700.000,00	12.900.000,00		
		UPTD Puskesmas Margajaya				124	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.878,00 orang	1.488,00	5.600.000,00	5.600.000,00		
		UPTD Puskesmas Pejuang				125	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18.964,00 Orang	10.296,00	31.600.000,00	31.600.000,00		
		UPTD Puskesmas Ciketing Udik				126	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.945,00 Orang	3.657,00	16.700.000,00	16.700.000,00		
		UPTD Puskesmas Cimuning				127	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7.502,00 Orang	7.502,00	26.600.000,00	25.800.000,00		
		UPTD Puskesmas Jaka Setia				128	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6.359,00 Orang	6.359,00	15.400.000,00	14.600.000,00		
								Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan	100%					



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
							<i>layanan kesehatan</i>						
		UPTD Puskesmas Padurenan				129	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	9.424,00 orang	8.167,00	21.800.000,00	21.800.000,00		
							Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00%					
							Jumlah Jenis layanan UKP dan UKM	100%					
		Dinas Kesehatan				130	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	380.656,00 orang	336.145,00	2.100.000.000,00	1.852.933.500,00		
							Cakupan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	100,00%					
							Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas	100%					
		UPTD Puskesmas Aren Jaya				131	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	42.880,00 Orang	31.185,00	2.200.000,00	2.200.000,00		
		UPTD Puskesmas Bantargebang				132	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	23.424,00 Orang	9.310,00	3.400.000,00	3.400.000,00		
		UPTD Puskesmas Mustikajaya				133	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standart	52.583,00 orang	9.560,00	2.200.000,00	1.600.000,00	Jadwal bersamaan	akan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang di laksanakan
		UPTD Puskesmas Bintara				134	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	42.223,00 Orang	15.473,00	3.200.000,00	3.200.000,00		
		UPTD Puskesmas Bintarajaya				135	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	22.165,00 Orang	5.920,00	3.300.000,00	3.300.000,00		
		UPTD Puskesmas Bojong Rawalumbu				136	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55.301,00 Orang	9.410,00	6.200.000,00	6.200.000,00		
		UPTD Puskesmas Jakamulya				137	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Anak Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	24.026,00 Orang	10.400,00	5.900.000,00	5.900.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatiasih				138	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5.277,00 orang	2.638,00	600.000,00	600.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatiluhur				139	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	48.631,00 Orang	5.224,00	4.900.000,00	4.900.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatimakmur				140	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	40.338,00 Orang	3.092,00	21.800.000,00	21.600.000,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		UPTD Puskesmas Jatirahayu				141	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	37.939,00 Orang	6.581,00	6.000.000,00	6.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatiwarna				142	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	47.784,00 orang	5.033,00	11.200.000,00	11.200.000,00		
		UPTD Puskesmas Kaliabang Tengah				143	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	65.894,00 Orang	16.327,00	9.200.000,00	8.700.000,00		
		UPTD Puskesmas Kotabaru				144	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	29.536,00 Orang	14.768,00	4.100.000,00	3.900.000,00		
		UPTD Puskesmas Karangitri				145	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesua Standar	41.695,00 orang	41.695,00	600.000,00	600.000,00		
		UPTD Puskesmas Kranji				146	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33.456,00 orang	33.456,00	6.000.000,00	6.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Margamulya				147	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16.555,00 Orang	1.170,00	10.800.000,00	7.600.000,00	Jadwal bersamaan	akan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang di laksanakan
		UPTD Puskesmas Pekayonjaya				148	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	39.550,00 Orang	8.114,00	2.400.756,00	2.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Pengasinan				149	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	66.898,00 Orang	45.489,00	3.500.000,00	3.500.000,00		
		UPTD Puskesmas Perumnas II				150	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	38.592,00 orang	3.440,00	3.100.000,00	3.100.000,00		
		UPTD Puskesmas Rawatembaga				151	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	50.226,00 Orang	7.289,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Seroja				152	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapakan pelayanan kesehatan sesuai standar	54.790,00 orang	4.930,00	400.000,00	200.000,00	Tidak ada Kasus	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya
		UPTD Puskesmas Teluk Pucung				153	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	46.579,00 orang	1.598,00	1.800.000,00	1.800.000,00		
		UPTD Puskesmas Bekasi Jaya				154	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	42.839,00 Orang	42.839,00	9.000.000,00	9.000.000,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		UPTD Puskesmas Harapan baru			155	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18.915,00 Orang	5.280,00	3.200.000,00	3.200.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatiranggon			156	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18.744,00 orang	1.794,00	6.000.000,00	4.200.000,00	Tidak Ada Kasus	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya
		UPTD Puskesmas Jatibening Baru			157	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25.228,00 Orang	1.924,00	24.100.000,00	24.100.000,00		
		UPTD Puskesmas Kali Baru			158	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20.827,00 Orang	6.936,00	3.300.000,00	2.700.000,00		
		UPTD Puskesmas Mustika Sari			159	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	25.790,00 orang	20.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00		
		UPTD Puskesmas Perwira			160	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumah Penduduk Usia Produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	26.454,00 Orang	15.463,00	3.300.000,00	2.900.000,00		
		UPTD Puskesmas Sumur Batu			161	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	15.144,00 orang	1.895,00	4.800.000,00	4.800.000,00		
		UPTD Puskesmas Pondok Gede			162	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	61.524,00 Orang	15.002,00	6.700.000,00	6.700.000,00		
		UPTD Puskesmas Bojongmenteng			163	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart	31.879,00 Orang	2.923,00	12.600.000,00	12.600.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatibening			164	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatlkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard	25.216,00 orang	1.122,00	17.200.000,00	13.300.000,00	Jadwal bersamaan	akan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang di laksanakan
		UPTD Puskesmas Margajaya			165	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.939,00 orang	726	600.000,00	200.000,00	Jadwal bersamaan	Akan dilakukan evaluasi terkait MOU dengan KUA
		UPTD Puskesmas Pejuang			166	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	52.219,00 Orang	36.558,00	800.000,00	800.000,00		
		UPTD Puskesmas Ciketing Udik			167	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16.805,00 Orang	2.818,00	10.000.000,00	10.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Cimuning			168	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	28.442,00 Orang	8.782,00	13.800.000,00	13.800.000,00		
		UPTD Puskesmas			169	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan	28.818,00 Orang	8.481,00	17.500.020,00	17.500.000,00		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Jaka Setia					Produktif	Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					
								<i>Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan</i>	100%				
		UPTD Puskesmas Padurenan				170	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	35.868,00 orang	7.182,00	6.200.000,00	6.200.000,00	
								<i>Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan</i>	100,00%				
								<i>Jumlah Jenis layanan UKP dan UKM</i>	100%				
		Dinas Kesehatan				171	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.680.894,00 Orang	230.294,00	3.188.707.000,00	3.116.453.300,00	
								<i>Cakupan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas</i>	100,00%				
								<i>Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas</i>	100%				
		UPTD Puskesmas Aren Jaya				172	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8.146,00 Orang	7.227,00	15.800.000,00	15.800.000,00	
		UPTD Puskesmas Bantargebang				173	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.978,00 Orang	1.807,00	17.800.700,00	17.800.000,00	
		UPTD Puskesmas Mustikajaya				174	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart	4.712,00 orang	4.712,00	24.000.000,00	24.000.000,00	
		UPTD Puskesmas Bintarajaya				175	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.809,00 Orang	3.659,00	1.600.000,00	1.580.000,00	
		UPTD Puskesmas Bojong Rawalumbu				176	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6.858,00 Orang	6.858,00	21.000.060,00	21.000.000,00	
		UPTD Puskesmas Jakamulya				177	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Anak Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.746,00 Orang	3.290,00	12.800.000,00	12.800.000,00	
		UPTD Puskesmas Jatiasih				178	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	14.832,00 orang	8.244,00	22.000.000,00	22.000.000,00	
		UPTD Puskesmas Jatimakmur				179	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6.419,00 Orang	3.240,00	14.100.054,00	13.977.500,00	
		UPTD Puskesmas Jatiarahayu				180	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7.231,00 Orang	6.610,00	32.900.120,00	32.900.000,00	
		UPTD Puskesmas Jatiwarna				181	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6.694,00 orang	6.694,00	3.000.000,00	3.000.000,00	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		UPTD Puskesmas Kaliabang Tengah				182	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7.729,00 Orang	8.491,00	12.000.000,00	12.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Kotabaru				183	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5.532,00 Orang	4.519,00	7.500.000,00	7.500.000,00		
		UPTD Puskesmas Karangitri				184	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6.640,00 orang	6.640,00	5.900.000,00	5.900.000,00		
		UPTD Puskesmas Kranji				185	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang mendapatkan Pelayanan kesehatan sesuai standar	4.636,00 orang	4.636,00	2.400.000,00	2.400.000,00		
		UPTD Puskesmas Margamulya				186	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.187,00 Orang	2.000,00	12.000.120,00	5.300.000,00	belum ada MOU	akan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang di laksanakan
		UPTD Puskesmas Pekayonjaya				187	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6.282,00 Orang	4.841,00	8.400.000,00	8.400.000,00		
		UPTD Puskesmas Pengasinan				188	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9.336,00 Orang	9.336,00	27.000.012,00	27.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Perumnas II				189	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6.662,00 orang	4.891,00	22.820.077,00	22.817.450,00		
		UPTD Puskesmas Rawatembaga				190	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	8.140,00 Orang	6.433,00	7.500.000,00	7.500.000,00		
		UPTD Puskesmas Seroja				191	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapakan pelayanan kesehatan sesuai standar	8.543,00 orang	7.330,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Teluk Pucung				192	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	7.434,00 orang	6.783,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Bekasi Jaya				193	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6.892,00 Orang	5.169,00	4.000.000,00	4.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Harapan baru				194	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.601,00 Orang	1.601,00	3.400.078,00	3.400.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatiranggon				195	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.041,00 orang	2.041,00	4.400.060,00	4.400.000,00		
		UPTD Puskesmas Kali Baru				196	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.860,00 Orang	2.349,00	21.400.260,00	21.400.000,00		
		UPTD Puskesmas Mustika Sari				197	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	2.454,00 orang	2.191,00	10.000.000,00	10.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Perwira				198	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2.736,00 Orang	2.736,00	34.500.660,00	31.500.000,00		
		UPTD Puskesmas Sumur Batu				199	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.378,00 orang	944	7.200.000,00	7.200.000,00		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		UPTD Puskesmas Pondok Gede				200	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10.000,00 Orang	9.936,00	15.720.270,00	15.720.000,00	
		UPTD Puskesmas Bojongmenteng				201	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Pada Usia Lanjut Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart	2.214,00 Orang	2.214,00	16.340.127,00	16.340.000,00	
		UPTD Puskesmas Jatibening				202	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	4.219,00 Orang	3.870,00	3.000.000,00	2.600.000,00	
		UPTD Puskesmas Margajaya				203	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.417,00 orang	1.417,00	19.600.520,00	19.420.000,00	
		UPTD Puskesmas Pejjuang				204	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	11.139,00 Orang	7.776,00	18.000.000,00	18.000.000,00	
		UPTD Puskesmas Ciketing Udik				205	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.086,00 Orang	940	12.800.128,00	12.520.000,00	
		UPTD Puskesmas Cimuning				206	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.271,00 Orang	2.248,00	2.600.000,00	2.600.000,00	
		UPTD Puskesmas Jaka Setia				207	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.682,00 Orang	4.682,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
								Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%				
		UPTD Puskesmas Padurenan				208	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3.172,00 orang	3.172,00	9.600.000,00	9.600.000,00	
								Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00%				
								Jumlah Jenis layanan UKP dan UKM	100%				
		Dinas Kesehatan				209	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	229.471,00 Orang	222.257,00	804.000.000,00	792.018.000,00	
								TERSEDIAANYA BUKU KESEHATAN LANJUT USIA	3.040,00 BUAH	2.855,00			
								TERSELENGARANYA PANDUAN PRAKTIS UNTUK CARGIVER INFORMAL PADA PERAWATAN JANGKA PANJANG BAGI LANSIA	47 PUSKESMAS	47			
								Presentase Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100,00%	91			
		Dinas Kesehatan				210	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	536.813,00 Orang	96.808,00	79.825.900,00	73.220.940,00	
		Dinas Kesehatan				211	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	54.661,00 orang	32.769,00	100.000.000,00	97.707.000,00	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
							Cakupan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	100,00%					
							Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas	100%					
		UPTD Puskesmas Aren Jaya				212	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	92,00 Orang	85	5.000.000,00	5.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Bantargebang				213	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	10,00 Orang	10	2.000.000,00	2.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Mustikajaya				214	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	104,00 orang	90	2.400.000,00	2.400.000,00		
		UPTD Puskesmas Bintara				215	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	88,00 Orang	50	4.000.000,00	4.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Bintarajaya				216	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	47,00 Orang	47	3.000.000,00	3.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Bojong Rawalumbu				217	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	110,00 Orang	104	3.000.000,00	3.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Durenjaya				218	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	105,00 Orang	56	3.600.000,00	3.600.000,00		
		UPTD Puskesmas Jakamulya				219	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	50,00 Orang	48	800.000,00	800.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatiasih				220	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	108,00 orang	108	6.000.000,00	6.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatiluhur				221	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	99,00 Orang	51	3.800.000,00	3.800.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatimakmur				222	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	84,00 Orang	73	600.000,00	600.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatirahayu				223	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	80,00 Orang	37	6.000.000,00	3.600.000,00	Jadwal bersamaan	akan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang di laksanakan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		UPTD Puskesmas Jatisampurna				224	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	94,00 Orang	52	8.000.000,00	8.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatiwarna				225	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	97,00 orang	91	6.000.000,00	3.700.000,00	Jumlah kasus sedikit	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya
		UPTD Puskesmas Kaliabang Tengah				226	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	131,00 Orang	74	3.600.000,00	3.600.000,00		
		UPTD Puskesmas Kotabaru				227	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	63,00 Orang	47	2.000.000,00	1.800.000,00		
		UPTD Puskesmas Karangkitri				228	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	93,00 orang	93	1.000.000,00	1.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Kranji				229	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	70,00 orang	70	2.000.000,00	2.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Margamulya				230	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	33,00 Orang	33	2.000.000,00	1.800.000,00		
		UPTD Puskesmas Pekayonjaya				231	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	81,00 Orang	39	4.000.000,00	4.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Pengasinan				232	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	137,00 Orang	137	600.000,00	600.000,00		
		UPTD Puskesmas Perumnas II				233	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang dengan gangguan jiwa bera yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	82,00 orang	61	2.000.000,00	2.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Rawatembaga				234	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai Standar	105,00 Orang	54	1.000.000,00	1.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Seroja				235	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapakan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	115,00 orang	87	6.000.000,00	6.000.000,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		UPTD Puskesmas Teluk Pucung				236	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	97,00 orang	69	1.800.000,00	1.800.000,00		
		UPTD Puskesmas Bekasi Jaya				237	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	91,00 Orang	91	3.300.000,00	3.300.000,00		
		UPTD Puskesmas Harapan baru				238	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	37,00 Orang	9	1.400.000,00	1.400.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatiranggon				239	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	38,00 orang	38	3.600.000,00	3.600.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatibening Baru				240	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	53,00 Orang	16	1.000.000,00	1.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Kali Baru				241	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	43,00 Orang	43	9.000.000,00	9.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Mustika Sari				242	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	51,00 orang	51	4.000.000,00	4.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Perwira				243	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah warga negara gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.027,00 Orang	48	5.200.000,00	5.100.000,00		
		UPTD Puskesmas Sumur Batu				244	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	32,00 orang	14	2.400.000,00	2.400.000,00		
		UPTD Puskesmas Pondok Gede				245	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	128,00 Orang	128	3.000.000,00	3.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Bojongmenteng				246	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Penduduk dengan Gangguan Jiwa Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart	62,00 Orang	62	20.000.000,00	20.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatibening				247	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	52,00 Orang	19	3.000.000,00	3.000.000,00		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		UPTD Puskesmas Margajaya				248	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	25,00 orang	25	1.000.000,00	1.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Pejuang				249	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	104,00 Orang	69	800.000,00	800.000,00		
		UPTD Puskesmas Ciketing Udik				250	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	33,00 Orang	21	6.000.000,00	4.200.000,00	antara pemegang prog dan KUA sulit koordinasi	akan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang di laksanakan
		UPTD Puskesmas Cimuning				251	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	54,00 orang	51	8.000.000,00	8.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Jaka Setia				252	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	867,00 Orang	177	4.000.000,00	4.000.000,00		
							Persentase warga negara gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100%						
		UPTD Puskesmas Padurenan				253	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	74,00 orang	74	8.000.000,00	8.000.000,00		
							Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00%						
							Jumlah Jenis layanan UKP dan UKM	100%						
		Dinas Kesehatan				254	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	3.456,00 Orang	2.803,00	129.013.622,00	126.820.900,00		
							Cakupan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	100,00%						
							Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas	100%						
		UPTD Puskesmas Aren Jaya				255	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.062,00 Orang	869	4.400.000,00	4.400.000,00		
		UPTD Puskesmas Bantargebang				256	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	541,00 Orang	541	4.600.000,00	4.600.000,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		UPTD Puskesmas Mustikajaya			257	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart	1.205,00 orang	1.205,00	3.600.000,00	3.600.000,00		
		UPTD Puskesmas Bintara			258	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.011,00 Orang	727	2.500.000,00	2.500.000,00		
		UPTD Puskesmas Bintarajaya			259	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	547,00 Orang	347	11.000.000,00	11.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Bojong Rawalumbu			260	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.269,00 Orang	1.270,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Durenjaya			261	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.207,00 Orang	620	4.000.000,00	4.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Jakamulya			262	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	573,00 Orang	573	4.150.031,00	3.900.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatiasih			263	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	749,00 orang	374	200.000,00	200.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatiluhur			264	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	1.138,00 Orang	667	1.000.000,00	1.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatimakmur			265	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Prang Terduga TBC Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	968,00 Orang	632	3.800.000,00	3.800.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatirahayu			266	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberculosis Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	928,00 Orang	928	4.300.000,00	4.200.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatisampurna			267	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.082,00 Orang	757	7.200.000,00	7.200.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatiwarna			268	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.121,00 orang	879	4.000.000,00	3.400.000,00		
		UPTD Puskesmas Kaliabang Tengah			269	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.509,00 Orang	1.057,00	6.100.000,00	6.100.000,00		
		UPTD Puskesmas Kotabaru			270	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	724,00 Orang	362	4.300.000,00	2.000.000,00	Jadwal bersamaan	akan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang di laksanakan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		UPTD Puskesmas Karangkitri				271	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang yang Terduga Tuberculosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.078,00 Orang	561	1.300.000,00	1.300.000,00		
		UPTD Puskesmas Kranji				272	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita Tuberculosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	806,00 orang	806	4.400.000,00	4.400.000,00		
		UPTD Puskesmas Margamulya				273	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberculosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	386,00 Orang	212	2.700.000,00	2.700.000,00		
		UPTD Puskesmas Pekayonjaya				274	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberculosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	940,00 Orang	702	2.000.000,00	2.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Pengasinan				275	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberculosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.579,00 Orang	1.325,00	2.200.000,00	2.200.000,00		
		UPTD Puskesmas Perumnas II				276	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberculosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	944,00 orang	944	4.240.020,00	4.240.000,00		
		UPTD Puskesmas Rawatembaga				277	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberculosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	1.214,00 Orang	1.214,00	4.000.000,00	4.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Seroja				278	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapakan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.331,00 orang	990	8.000.000,00	8.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Teluk Pucung				279	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	1.115,00 orang	969	2.000.000,00	2.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Bekasi Jaya				280	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberculosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.045,00 Orang	1.045,00	6.300.000,00	6.300.000,00		
		UPTD Puskesmas Harapan baru				281	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberculosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	427,00 Orang	189	4.200.000,00	4.200.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatiranggon				282	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberculosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	437,00 orang	210	3.400.000,00	3.400.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatibening Baru				283	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberculosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	608,00 Orang	511	13.000.000,00	13.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Kali Baru				284	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberculosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	498,00 Orang	492	14.000.000,00	14.000.000,00		
		UPTD Puskesmas				285	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang	jumlah orang terduga tuberkulosis yang	288,00 orang	200	10.400.000,00	10.400.000,00		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Mustika Sari					Terduga Tuberkulosis	mendapatkan pelayanan sesuai standar					
		UPTD Puskesmas Perwira				286	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	616,00 Orang	616	10.100.000,00	9.900.000,00	
		UPTD Puskesmas Sumur Batu				287	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	373,00 orang	76	10.300.000,00	10.300.000,00	
		UPTD Puskesmas Pondok Gede				288	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.482,00 Orang	861	9.000.000,00	9.000.000,00	
		UPTD Puskesmas Bojongmenteng				289	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Penduduk Terduga Tuberkulosis Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart	720,00 Orang	650	8.000.000,00	8.000.000,00	
		UPTD Puskesmas Jatibening				290	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	601,00 Orang	475	2.000.000,00	2.000.000,00	
		UPTD Puskesmas Margajaya				291	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	285,00 orang	285	3.500.000,00	3.500.000,00	
		UPTD Puskesmas Pejuang				292	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	1.203,00 Orang	954	1.400.000,00	1.200.000,00	
		UPTD Puskesmas Ciketing Udik				293	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	382,00 Orang	219	10.300.000,00	10.300.000,00	
		UPTD Puskesmas Cimuning				294	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	666,00 Orang	666	5.500.000,00	5.500.000,00	
		UPTD Puskesmas Jaka Setia				295	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	689,00 Orang	689	2.000.000,00	2.000.000,00	
								Persentase warga negara penderita terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%				
		UPTD Puskesmas Padurenan				296	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	jumlah orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	849,00 orang	849	7.300.000,00	7.300.000,00	
								Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00%				
								Jumlah Jenis layanan UKP dan UKM	100%				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Dinas Kesehatan			297	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	39.843,00 Orang	39.843,00	2.674.528.000,00	98.169.500,00	Aturan Kemnkes untuk tidak mencairkan TCM	Alokasi anggaran TCM yang tidak di serap di kembalikan ke kementerian kesehatan
							Cakupan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	100,00%					
							Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas	100%					
		UPTD Puskesmas Aren Jaya			298	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.528,00 Orang	945	1.600.000,00	1.600.000,00		
		UPTD Puskesmas Bojong Rawalumbu			299	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.825,00 Orang	3.180,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Jakamulya			300	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	824,00 Orang	824	4.400.000,00	4.200.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatisih			301	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.789,00 orang	1.192,00	2.800.000,00	2.800.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatiluhur			302	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang mendapatkan Pelayanan sesuai standar	1.635,00 Orang	1.293,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatirahayu			303	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.335,00 Orang	1.001,00	1.200.000,00	1.200.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatisampurna			304	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.428,00 Orang	1.353,00	4.800.000,00	4.800.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatiwarna			305	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.613,00 orang	932	10.400.000,00	3.200.000,00	kendala teknis terkait persetujuan orang tua di sekolah	akan dilakukan perhitungan terkait kebutuhan reagen dapat tercukup
		UPTD Puskesmas Kranji			306	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	1.159,00 orang	1.159,00	9.600.000,00	9.600.000,00		
		UPTD Puskesmas Margamulya			307	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	555,00 Orang	555	9.900.000,00	2.700.000,00		
		UPTD Puskesmas Pekayonjaya			308	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.351,00 Orang	898	4.000.000,00	4.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Pengasinan			309	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV Yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2.271,00 Orang	2.425,00	1.000.000,00	1.000.000,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		UPTD Puskesmas Perumnas II			310	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Kesehatan	1.358,00 orang	1.191,00	1.900.000,00	1.600.000,00		
		UPTD Puskesmas Rawatembaga			311	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	1.745,00 Orang	1.233,00	9.000.000,00	9.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Seroja			312	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.914,00 orang	1.558,00	5.200.000,00	5.200.000,00		
		UPTD Puskesmas Teluk Pucung			313	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	1.604,00 orang	735	800.000,00	800.000,00		
		UPTD Puskesmas Bekasi Jaya			314	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.503,00 Orang	1.503,00	1.300.000,00	1.300.000,00		
		UPTD Puskesmas Harapan baru			315	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	614,00 Orang	614	4.800.000,00	4.800.000,00		
		UPTD Puskesmas Mustika Sari			316	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	jumlah orang terduga HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	854,00 orang	741	5.000.000,00	5.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Perwira			317	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	885,00 Orang	885	6.900.000,00	6.900.000,00		
		UPTD Puskesmas Sumur Batu			318	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	536,00 orang	488	9.600.000,00	9.600.000,00		
		UPTD Puskesmas Pondok Gede			319	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang yang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2.131,00 Orang	2.131,00	15.000.000,00	15.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Bojongmenteng			320	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Penduduk Dengan Risiko Terinfeksi HIV Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart	1.035,00 Orang	800	3.200.000,00	3.200.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatibening			321	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	864,00 Orang	207	1.000.000,00	1.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Margajaya			322	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	410,00 orang	410	200.000,00	200.000,00		
		UPTD Puskesmas Pejuang			323	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	1.729,00 Orang	1.024,00	1.600.000,00	1.600.000,00		
		UPTD Puskesmas Cimuning			324	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan	957,00 orang	957	11.200.000,00	11.200.000,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
							Sesuai Standar						
		UPTD Puskesmas Jaka Setia			325	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	991,00 Orang	701	2.000.000,00	2.000.000,00		
							<i>Persentase warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan</i>	<i>100%</i>					
		UPTD Puskesmas Padurenan			326	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	jumlah orang terduga HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.220,00 orang	1.120,00	4.500.000,00	4.500.000,00		
							<i>Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan</i>	<i>100,00%</i>					
							<i>Jumlah Jenis layanan UKP dan UKM</i>	<i>100%</i>					
		Dinas Kesehatan			327	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	62.356,00 Orang	62.356,00	880.472.000,00	698.165.400,00	efisiensi anggaran	akan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang di laksanakan
							<i>Cakupan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas</i>	<i>100,00%</i>					
							<i>Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas</i>	<i>100%</i>					
		UPTD Puskesmas Bintara			328	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	4,00 Dokumen	4	400.000,00	0	Tidak ada kejadian bencana	kejadian bencana merupakankejadian tidak terduga sehingga Pagu anggaran akan di sesuaikan
		UPTD Puskesmas Bintarajaya			329	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	4,00 Dokumen	4	400.000,00	400.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatimakmur			330	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan /atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1,00 Dokumen	1	200.000,00	0	Tidak ada kejadian bencana	kejadian bencana merupakan kejadian tidak terduga sehingga Pagu anggaran akan di sesuaikan
		UPTD Puskesmas Kaliabang Tengah			331	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	4,00 Dokumen	4	300.000,00	0	Tidak ada kejadian bencana	kejadian bencana merupakan kejadian tidak terduga sehingga Pagu anggaran akan di sesuaikan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		UPTD Puskesmas Kotabaru				332	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana	4,00 Dokumen	4	1.800.000,00	0	Tidak ada kejadian bencana	kejadian bencana merupakan kejadian tidak terduga sehingga Pagu anggaran akan di sesuaikan
		UPTD Puskesmas Karangitri				333	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penduduk terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan /atau Berpotensi Bencana	4,00 Dokumen	4	600.000,00	0	Tidak ada kejadian bencana	kejadian bencana merupakan kejadian tidak terduga sehingga Pagu anggaran akan di sesuaikan
		UPTD Puskesmas Jatiranggon				334	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1,00 dokumen	1	400.000,00	0	Tidak ada kejadian bencana	kejadian bencana merupakan kejadian tidak terduga sehingga Pagu anggaran akan di sesuaikan
		UPTD Puskesmas Cimuning				335	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	4,00 Dokumen	4	1.400.000,00	0	Tidak ada kejadian bencana	kejadian bencana merupakan kejadian tidak terduga sehingga Pagu anggaran akan di sesuaikan
								Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00%					
								Jumlah Jenis layanan UKP dan UKM	100%					
		Dinas Kesehatan				336	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	4,00 Dokumen	4	449.489.600,00	371.034.180,00		
								Cakupan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	100,00%					
								Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas	100%					
		UPTD Puskesmas Aren Jaya				337	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4,00 Dokumen	4	15.900.262,00	14.800.000,00		
		UPTD Puskesmas Bantargebang				338	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4,00 Dokumen	4	6.700.000,00	6.700.000,00		
		UPTD Puskesmas Mustikajaya				339	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4,00 dokumen	4	18.320.000,00	18.182.000,00		
		UPTD Puskesmas Bintara				340	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4,00 Dokumen	4	5.800.000,00	5.640.000,00		
		UPTD Puskesmas Bintarajaya				341	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4,00 Dokumen	4	8.560.000,00	8.482.000,00		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		UPTD Puskesmas Bojong Rawalumbu			342	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4,00 Dokumen	4	42.420.060,00	41.860.000,00		
		UPTD Puskesmas Durenjaya			343	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4,00 Dokumen	4	13.778.000,00	13.775.000,00		
		UPTD Puskesmas Jakamulya			344	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4,00 Dokumen	4	15.110.008,00	15.060.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatiluhur			345	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan kesehatan Gizi Masyarakat	4,00 Dokumen	4	10.004.047,00	10.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatimakmur			346	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4,00 Dokumen	4	50.000.280,00	46.994.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatirahayu			347	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4,00 Dokumen	4	34.645.000,00	32.545.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatisampurna			348	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4,00 Dokumen	4	19.365.120,00	19.069.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatiwarna			349	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4,00 dokumen	4	13.360.000,00	9.100.000,00	Jadwal bersamaan	akan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang di laksanakan
		UPTD Puskesmas Kaliabang Tengah			350	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4,00 Dokumen	4	29.760.000,00	29.760.000,00		
		UPTD Puskesmas Kotabaru			351	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengobatan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4,00 Dokumern	4	20.880.050,00	16.400.000,00	Jadwal bersamaan	akan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang di laksanakan
		UPTD Puskesmas Karangitri			352	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4,00 Dokumen	4	15.840.000,00	15.306.000,00		
		UPTD Puskesmas Kranji			353	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	4,00 Dokumen	4	49.910.460,00	48.622.000,00		
		UPTD Puskesmas Margamulya			354	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4,00 Dokumen	4	36.500.640,00	36.500.000,00		
		UPTD Puskesmas Pekayonjaya			355	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4,00 Dokumen	4	36.420.104,00	36.020.000,00		
		UPTD Puskesmas Pengasinan			356	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4,00 Dokumen	4	19.950.000,00	19.950.000,00		
		UPTD Puskesmas Perumnas II			357	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Sesuai Standar	4,00 dokumen	4	19.170.817,00	19.149.500,00		
		UPTD Puskesmas Rawatembaga			358	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4,00 Dokumen	4	21.833.032,00	21.825.000,00		
		UPTD Puskesmas Seroja			359	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	4,00 Dokumen	4	31.400.076,00	31.200.000,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		UPTD Puskesmas Teluk Pucung				360	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	4,00 dokumen	4	11.010.143,00	10.892.000,00	
		UPTD Puskesmas Bekasi Jaya				361	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4,00 Dokumen	4	5.900.000,00	5.600.000,00	
		UPTD Puskesmas Harapan baru				362	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4,00 Dokumen	4	24.620.052,00	24.620.000,00	
		UPTD Puskesmas Jatiranggon				363	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4,00 dokumen	4	21.380.132,00	20.680.000,00	
		UPTD Puskesmas Jatibening Baru				364	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4,00 Dokumen	4	22.200.000,00	22.050.000,00	
		UPTD Puskesmas Kali Baru				365	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4,00 Dokumen	4	36.120.060,00	36.120.000,00	
		UPTD Puskesmas Mustika Sari				366	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	4,00 dokumen	4	35.850.000,00	35.814.000,00	
		UPTD Puskesmas Perwira				367	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	4,00 Dokumen	4	18.400.000,00	16.800.000,00	
		UPTD Puskesmas Sumur Batu				368	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	4,00 dokumen	4	31.400.000,00	31.400.000,00	
		UPTD Puskesmas Pondok Gede				369	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4,00 Dokumen	4	46.800.000,00	46.200.000,00	
		UPTD Puskesmas Bojongmenteng				370	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4,00 Dokumen	4	28.100.058,00	25.300.000,00	
		UPTD Puskesmas Jatibening				371	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4,00 Dokumen	4	48.901.440,00	44.400.000,00	
		UPTD Puskesmas Margajaya				372	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4,00 dokumen	4	16.200.000,00	16.170.000,00	
		UPTD Puskesmas Pejulang				373	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	4,00 Dokumen	4	28.510.136,00	28.186.000,00	
		UPTD Puskesmas Ciketing Udik				374	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4,00 Dokumen	4	76.078.629,00	73.717.000,00	
		UPTD Puskesmas Cimuning				375	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4,00 dokumen	4	94.700.240,00	93.080.000,00	
		UPTD Puskesmas Jaka Setia				376	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4,00 Dokumen	4	19.210.045,00	18.220.000,00	
								Prevalensi balita status gizi stunting	100%				
		UPTD Puskesmas Padurenan				377	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	4,00 dokumen	4	39.140.124,00	39.140.000,00	
								Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan	100,00%				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
							kesehatan						
							Jumlah Jenis layanan UKP dan UKM	100%					
		Dinas Kesehatan				378	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4,00 Dokumen	4	17.576.060.000,00	13.956.515.920,00	efisiensi anggaran	akan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang di laksanakan
							Cakupan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	100,00%					
							Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas	100%					
		UPTD Puskesmas Aren Jaya				379	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4,00 Dokumen	4	3.000.126,00	3.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Bantargebang				380	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4,00 Dokumen	4	7.300.034,00	6.300.000,00		
		UPTD Puskesmas Mustikajaya				381	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4,00 Dokumen	4	1.200.000,00	1.200.000,00		
		UPTD Puskesmas Bintara				382	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4,00 Dokumen	4	10.100.000,00	10.020.000,00		
		UPTD Puskesmas Bintarajaya				383	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4,00 Dokumen	4	6.000.000,00	5.970.000,00		
		UPTD Puskesmas Bojong Rawalumbu				384	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4,00 Dokumen	4	11.440.040,00	11.440.000,00		
		UPTD Puskesmas Durenjaya				385	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4,00 Dokumen	4	1.900.000,00	1.900.000,00		
		UPTD Puskesmas Jakamulya				386	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4,00 Dokumen	4	9.600.092,00	9.600.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatiasih				387	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4,00 Dokumen	4	12.600.200,00	10.200.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatiluhur				388	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4,00 Dokumen	4	800.000,00	800.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatimakmur				389	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4,00 Dokumen	4	47.200.160,00	16.930.000,00	Jadwal bersamaan	Akan dilakukan penyesuaian kegiatan sehingga dapat lebih maksimal
		UPTD Puskesmas Jatirahayu				390	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4,00 Dokumen	4	4.240.144,00	4.240.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatiwarna				391	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4,00 dokumen	4	4.840.056,00	4.578.500,00		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		UPTD Puskesmas Kaliabang Tengah			392	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4,00 Dokumen	4	7.100.000,00	6.800.000,00		
		UPTD Puskesmas Kotabaru			393	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4,00 Dokumen	4	10.380.000,00	4.800.000,00	anggaran tersedia setelah kegiatan dilaksanakan	akan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang di laksanakan
		UPTD Puskesmas Karangkitri			394	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4,00 Dokumen	4	7.000.000,00	6.760.000,00		
		UPTD Puskesmas Kranji			395	Pengelolaan Pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	4,00 dokumen	4	3.200.074,00	3.150.000,00		
		UPTD Puskesmas Margamulya			396	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4,00 Dokumen	4	7.660.056,00	1.700.000,00	kegiatan K3 hanya dilakukan 2 kali dalam 1 tahun	Akan di evaluasi apakah kegiatan K3 perlu dianggarkan lebih dari 2 kali
		UPTD Puskesmas Pekayonjaya			397	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4,00 Dokumen	4	11.320.186,00	11.120.000,00		
		UPTD Puskesmas Pengasinan			398	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengeloaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4,00 Dokumen	4	3.900.000,00	3.900.000,00		
		UPTD Puskesmas Perumnas II			399	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Sesuai Standar	4,00 dokumen	4	5.020.000,00	5.015.950,00		
		UPTD Puskesmas Rawatembaga			400	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4,00 Dokumen	4	7.280.000,00	7.280.000,00		
		UPTD Puskesmas Seroja			401	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	4,00 Dokumen	4	14.920.278,00	13.520.000,00		
		UPTD Puskesmas Teluk Pucung			402	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	4,00 dokumen	4	8.600.000,00	8.600.000,00		
		UPTD Puskesmas Bekasi Jaya			403	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4,00 Dokumen	4	200.000,00	200.000,00		
		UPTD Puskesmas Harapan baru			404	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4,00 Dokumen	3	6.600.000,00	5.200.000,00	jumlah peserta lebih kecil dari yang di rencanana	akan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang di laksanakan
		UPTD Puskesmas Jatiranggon			405	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4,00 dokumen	4	37.700.000,00	37.700.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatibening Baru			406	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4,00 Dokumen	4	3.400.000,00	3.400.000,00		
		UPTD Puskesmas Kali Baru			407	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4,00 Dokumen	4	11.800.028,00	11.400.000,00		
		UPTD Puskesmas Mustika Sari			408	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	4,00 dokumen	4	6.160.010,00	4.000.000,00	Permintaan tidak sesuai di ekatalog, jadi tidak dapat diserap	akan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang di laksanakan
		UPTD Puskesmas Padurenan			409	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	4,00 dokumen	4	6.800.000,00	6.800.000,00		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		UPTD Puskesmas Perwira				410	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayan kesehatan kerja dan olahraga	4,00 Dokumen	4	37.000.264,00	26.400.000,00	sasaran tempat kerja tidak ada	akan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang di laksanakan
		UPTD Puskesmas Sumur Batu				411	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	4,00 dokumen	4	6.960.134,00	6.960.000,00		
		UPTD Puskesmas Pondok Gede				412	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4,00 Dokumen	4	400.000,00	400.000,00		
		UPTD Puskesmas Bojongmenteng				413	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4,00 Dokumen	4	12.000.000,00	8.000.000,00	efisiensi anggaran	akan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang di laksanakan
		UPTD Puskesmas Jatibening				414	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4,00 Dokumen	4	3.800.004,00	3.800.000,00		
		UPTD Puskesmas Margajaya				415	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4,00 dokumen	4	8.600.000,00	4.777.500,00	efisiensi anggaran	akan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang di laksanakan
		UPTD Puskesmas Pejjuang				416	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4,00 Dokumen	4	27.680.402,00	25.716.000,00		
		UPTD Puskesmas Ciketing Udik				417	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4,00 Dokumen	4	22.400.319,00	22.085.000,00		
		UPTD Puskesmas Cimuning				418	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4,00 Dokumen	4	7.700.280,00	6.500.000,00		
		UPTD Puskesmas Jaka Setia				419	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4,00 Dokumen	4	3.000.000,00	3.000.000,00		
								Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00%					
								Jumlah Jenis layanan UKP dan UKM	100%					
		Dinas Kesehatan				420	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4,00 Dokumen	4	224.430.000,00	201.978.200,00		
								Cakupan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	100,00%					
								Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas	100%					
		UPTD Puskesmas Aren Jaya				421	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4,00 Dokumen	4	3.000.000,00	3.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Bantargebang				422	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4,00 Dokumen	4	12.900.000,00	12.900.000,00		
		UPTD Puskesmas Mustikajaya				423	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4,00 Dokumen	4	5.900.000,00	5.900.000,00		
		UPTD Puskesmas Bintara				424	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4,00 Dokumen	4	8.600.000,00	8.600.000,00		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		UPTD Puskesmas Bintarajaya			425	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4,00 Dokumen	4	13.400.000,00	13.400.000,00		
		UPTD Puskesmas Bojong Rawalumbu			426	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4,00 Dokumen	4	3.200.000,00	3.200.000,00		
		UPTD Puskesmas Durenjaya			427	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4,00 Dokumen	4	12.000.000,00	12.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Jakamulya			428	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4,00 Dokumen	4	14.600.000,00	14.600.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatiasih			429	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	4,00 Dokumen	4	2.700.000,00	2.100.000,00	efisiensi anggaran	akan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang di laksanakan
		UPTD Puskesmas Jatiluhur			430	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4,00 Dokumen	4	8.500.000,00	8.500.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatimakmur			431	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4,00 Dokumen	4	6.500.000,00	6.500.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatirahayu			432	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4,00 Dokumen	4	16.000.000,00	16.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatisampurna			433	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4,00 Dokumen	4	7.000.000,00	7.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatiwarna			434	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4,00 dokumen	4	9.000.000,00	9.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Kaliabang Tengah			435	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4,00 Dokumen	4	10.300.000,00	10.300.000,00		
		UPTD Puskesmas Kotabaru			436	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4,00 Dokumen	4	13.500.000,00	13.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Karangitri			437	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4,00 Dokumen	4	4.000.000,00	4.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Kranji			438	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4,00 dokumen	4	7.600.000,00	7.600.000,00		
		UPTD Puskesmas Margamulya			439	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4,00 Dokumen	4	14.600.000,00	14.400.000,00		
		UPTD Puskesmas Pekayonjaya			440	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4,00 Dokumen	4	13.792.350,00	12.532.000,00		
		UPTD Puskesmas Pengasinan			441	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4,00 Dokumen	4	4.600.000,00	4.600.000,00		
		UPTD Puskesmas Perumnas II			442	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Sesuai Standar	4,00 dokumen	4	11.700.000,00	11.700.000,00		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		UPTD Puskesmas Rawatembaga			443	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4,00 Dokumen	4	3.500.000,00	3.500.000,00		
		UPTD Puskesmas Seroja			444	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	4,00 Dokumen	4	15.200.000,00	15.200.000,00		
		UPTD Puskesmas Teluk Pucung			445	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	4,00 dokumen	4	13.400.000,00	13.400.000,00		
		UPTD Puskesmas Bekasi Jaya			446	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4,00 Dokumen	4	3.400.000,00	3.200.000,00		
		UPTD Puskesmas Harapan baru			447	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4,00 Dokumen	4	6.200.000,00	6.200.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatiranggon			448	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4,00 dokumen	4	12.000.000,00	12.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatibening Baru			449	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4,00 Dokumen	4	14.600.000,00	14.600.000,00		
		UPTD Puskesmas Kali Baru			450	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4,00 Dokumen	4	7.600.000,00	7.600.000,00		
		UPTD Puskesmas Mustika Sari			451	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	4,00 dokumen	4	9.400.000,00	9.400.000,00		
		UPTD Puskesmas Padurenan			452	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	4,00 dokumen	4	3.000.000,00	3.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Perwira			453	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	4,00 Dokumen	4	5.600.000,00	5.600.000,00		
		UPTD Puskesmas Sumur Batu			454	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	4,00 dokumen	4	16.900.000,00	15.900.000,00		
		UPTD Puskesmas Pondok Gede			455	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4,00 Dokumen	4	11.600.000,00	11.200.000,00		
		UPTD Puskesmas Bojongmenteng			456	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4,00 Dokumen	4	12.100.000,00	11.500.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatibening			457	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4,00 dokumen	4	1.400.000,00	1.300.000,00		
		UPTD Puskesmas Margajaya			458	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4,00 dokumen	4	5.700.000,00	5.700.000,00		
		UPTD Puskesmas Pejuang			459	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	4,00 Dokumen	4	12.100.048,00	11.920.000,00		
		UPTD Puskesmas Ciketing Udik			460	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4,00 Dokumen	4	14.765.207,00	14.765.000,00		
		UPTD Puskesmas Cimuning			461	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4,00 dokumen	4	8.400.000,00	8.400.000,00		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		UPTD Puskesmas Jaka Setia			462	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4,00 Dokumen	4	12.200.000,00	12.200.000,00		
							Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00%					
							Jumlah Jenis layanan UKP dan UKM	100%					
		Dinas Kesehatan			463	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4,00 Dokumen	4	818.436.000,00	773.343.000,00		
							Cakupan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	100,00%					
							Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas	100%					
		UPTD Puskesmas Bantargebang			464	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4,00 Dokumen	4	14.834.464,00	14.800.000,00		
		UPTD Puskesmas Bintara			465	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4,00 Dokumen	4	19.200.247,00	18.965.000,00		
		UPTD Puskesmas Bintarajaya			466	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4,00 Dokumen	4	13.600.352,00	13.345.000,00		
		UPTD Puskesmas Bojong Rawalumbu			467	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4,00 Dokumen	4	6.000.000,00	6.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatiluhur			468	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4,00 Dokumen	4	9.300.000,00	9.300.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatimakmur			469	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4,00 Dokumen	4	13.170.240,00	13.014.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatihayuh			470	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4,00 Dokumen	4	6.600.000,00	6.600.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatisampurna			471	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4,00 Dokumen	4	13.430.142,00	12.906.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatiwarna			472	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4,00 dokumen	4	6.000.000,00	6.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Kaliabang Tengah			473	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4,00 Dokumen	4	5.702.176,00	5.700.000,00		
		UPTD Puskesmas Kotabaru			474	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4,00 Dokumen	4	4.000.439,00	3.920.000,00		
		UPTD Puskesmas Kranji			475	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4,00 dokumen	4	4.200.000,00	4.156.000,00		
		UPTD Puskesmas Margamulya			476	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4,00 Dokumen	4	4.600.106,00	3.000.000,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		UPTD Puskesmas Pengasinan			477	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4,00 Dokumen	4	9.560.226,00	9.560.000,00		
		UPTD Puskesmas Perumnas II			478	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi kesehatan	4,00 dokumen	4	15.400.000,00	12.373.500,00		
		UPTD Puskesmas Rawatembaga			479	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4,00 Dokumen	4	16.760.412,00	16.760.000,00		
		UPTD Puskesmas Seroja			480	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	4,00 Dokumen	4	15.020.000,00	14.800.000,00		
		UPTD Puskesmas Teluk Pucung			481	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	4,00 dokumen	4	1.260.046,00	1.212.000,00		
		UPTD Puskesmas Bekasi Jaya			482	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4,00 Dokumen	4	9.500.000,00	9.500.000,00		
		UPTD Puskesmas Harapan baru			483	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4,00 Dokumen	4	7.100.416,00	7.100.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatiranggon			484	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4,00 dokumen	4	4.000.351,00	2.000.000,00	efisiensi anggaran	akan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang di laksanakan
		UPTD Puskesmas Jatibening Baru			485	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4,00 Dokumen	4	26.600.523,00	25.812.500,00		
		UPTD Puskesmas Kali Baru			486	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4,00 Dokumen	4	38.600.392,00	38.600.000,00		
		UPTD Puskesmas Mustika Sari			487	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	4,00 dokumen	4	5.690.035,00	5.671.000,00		
		UPTD Puskesmas Padurenan			488	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	4,00 dokumen	4	2.700.024,00	2.700.000,00		
		UPTD Puskesmas Perwira			489	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	4,00 Dokumen	4	2.400.036,00	2.400.000,00		
		UPTD Puskesmas Sumur Batu			490	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	4,00 dokumen	4	26.610.255,00	26.610.000,00		
		UPTD Puskesmas Pondok Gede			491	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4,00 Dokumen	4	8.333.032,00	8.280.000,00		
		UPTD Puskesmas Margajaya			492	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4,00 dokumen	4	19.740.474,00	19.591.000,00		
		UPTD Puskesmas Pejuang			493	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	4,00 Dokumen	4	4.820.000,00	4.744.000,00		
		UPTD Puskesmas Cimuning			494	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4,00 Dokumen	4	8.964.064,00	8.902.000,00		
		UPTD Puskesmas Jaka Setia			495	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4,00 Dokumen	4	20.118.388,00	8.205.000,00	efisiensi anggaran	Akan di perhatikan kembali untuk penempatan kode rekening dan pagu per rekening



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
							Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00%					
							Jumlah Jenis layanan UKP dan UKM	100%					
		Dinas Kesehatan				496	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4,00 Dokumen	4	61.040.000,00	59.680.000,00		
							Cakupan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	100,00%					
							Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas	100%					
		UPTD Puskesmas Aren Jaya				497	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4,00 Dokumen	4	1.000.000,00	200.000,00	hanya ada 1 kasus	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya
		UPTD Puskesmas Bantargebang				498	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4,00 Dokumen	4	17.201.250,00	14.700.000,00		
		UPTD Puskesmas Mustikajaya				499	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4,00 Dokumen	4	48.400.000,00	8.300.000,00	tidak ada kasus	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya
		UPTD Puskesmas Bintara				500	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4,00 Dokumen	4	11.000.000,00	8.200.000,00	Tidak ditemukan kasus baru	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya
		UPTD Puskesmas Bintarajaya				501	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4,00 Dokumen	4	3.000.000,00	2.700.000,00		
		UPTD Puskesmas Bojong Rawalumbu				502	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4,00 Dokumen	4	3.400.000,00	1.400.000,00	Sesuai dengan kasus yang ada	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya
		UPTD Puskesmas Durenjaya				503	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4,00 Dokumen	4	7.400.000,00	4.900.000,00	tidak ada kasus	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya
		UPTD Puskesmas Jakamulya				504	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4,00 Dokumen	4	33.400.000,00	14.200.000,00	tidak ada kasus	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya
		UPTD Puskesmas Jatisih				505	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4,00 Dokumen	4	25.200.000,00	0	tidak ada kasus	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya
		UPTD Puskesmas Jatiluhur				506	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4,00 Dokumen	4	5.400.000,00	5.400.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatimakmur				507	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4,00 Dokumen	4	6.000.000,00	1.300.000,00	tidak ada kasus	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya
		UPTD Puskesmas Jatirahayu				508	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4,00 Dokumen	4	13.800.000,00	6.200.000,00	tidak ada kasus	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya
		UPTD Puskesmas Jatisampurna				509	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4,00 Dokumen	4	1.600.000,00	1.200.000,00	Tidak ada kasus	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya
		UPTD Puskesmas Jatiwarna				510	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4,00 dokumen	4	16.400.000,00	4.400.000,00	Tergantung kasus	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		UPTD Puskesmas Kaliabang Tengah				511	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4,00 Dokumen	4	500.000,00	500.000,00		
		UPTD Puskesmas Kotabaru				512	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4,00 Dokumen	4	9.700.000,00	1.600.000,00	Tergantung kasus	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya
		UPTD Puskesmas Karangkitri				513	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Surveilans Kesehatan	4,00 Dokumen	4	15.700.000,00	13.500.000,00		
		UPTD Puskesmas Kranji				514	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4,00 dokumen	4	13.500.000,00	13.300.000,00		
		UPTD Puskesmas Margamulya				515	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4,00 Dokumen	4	12.300.000,00	3.000.000,00	Tergantung kasus	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya
		UPTD Puskesmas Pekayonjaya				516	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4,00 Dokumen	4	8.600.000,00	8.100.000,00		
		UPTD Puskesmas Pengasinan				517	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4,00 Dokumen	4	2.600.000,00	2.600.000,00		
		UPTD Puskesmas Perumnas II				518	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Sesuai Standar	4,00 Dokumen	4	33.100.000,00	8.900.000,00	Tergantung kasus	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya
		UPTD Puskesmas Rawatembaga				519	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4,00 Dokumen	4	8.700.000,00	2.500.000,00	Tergantung kasus	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya
		UPTD Puskesmas Seroja				520	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	4,00 Dokumen	4	12.300.000,00	4.100.000,00	Tergantung kasus	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya
		UPTD Puskesmas Teluk Pucung				521	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	4,00 dokumen	4	4.900.000,00	4.200.000,00		
		UPTD Puskesmas Bekasi Jaya				522	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4,00 Dokumen	4	18.400.000,00	4.900.000,00	Tergantung kasus	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya
		UPTD Puskesmas Harapan baru				523	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4,00 Dokumen	4	24.300.000,00	2.200.000,00	Tergantung kasus	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya
		UPTD Puskesmas Jatiranggon				524	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4,00 dokumen	4	6.800.000,00	200.000,00	Tergantung kasus	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya
		UPTD Puskesmas Jatibening Baru				525	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4,00 Dokumen	4	3.400.000,00	2.200.000,00	Tergantung kasus	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya
		UPTD Puskesmas Kali Baru				526	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4,00 Dokumen	4	5.900.000,00	5.600.000,00		
		UPTD Puskesmas Mustika Sari				527	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	4,00 dokumen	4	6.459.008,00	5.800.000,00		
		UPTD Puskesmas Padurenan				528	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	4,00 dokumen	4	5.400.000,00	1.000.000,00	Tergantung kasus	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya
		UPTD Puskesmas Perwira				529	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan survailans kesehatan	4,00 Dokumen	4	11.600.000,00	2.400.000,00	Tergantung kasus	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		UPTD Puskesmas Sumur Batu			530	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	4,00 dokumen	4	3.900.000,00	3.700.000,00		
		UPTD Puskesmas Pondok Gede			531	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4,00 Dokumen	4	5.200.000,00	3.300.000,00	Tergantung kasus	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya
		UPTD Puskesmas Bojongmenteng			532	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4,00 Dokumen	4	13.600.000,00	4.800.000,00	Tergantung kasus	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya
		UPTD Puskesmas Jatibening			533	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4,00 dokumen	4	1.600.000,00	1.400.000,00		
		UPTD Puskesmas Margajaya			534	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4,00 dokumen	4	13.100.000,00	3.600.000,00	Tergantung kasus	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya
		UPTD Puskesmas Pejuang			535	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4,00 Dokumen	4	15.200.000,00	5.200.000,00	Tergantung kasus	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya
		UPTD Puskesmas Ciketing Udik			536	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4,00 Dokumen	4	3.500.000,00	3.200.000,00		
		UPTD Puskesmas Cimuning			537	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4,00 dokumen	4	1.500.000,00	1.100.000,00	Tergantung kasus	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya
		UPTD Puskesmas Jaka Setia			538	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4,00 Dokumen	4	7.700.000,00	6.700.000,00		
							Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00%					
							Jumlah Jenis layanan UKP dan UKM	100%					
		Dinas Kesehatan			539	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4,00 Dokumen	4	112.000.000,00	104.432.400,00		
		Dinas Kesehatan			540	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	3.456,00 Orang	2.803,00	65.314.000,00	63.670.000,00	Realisasi s.d November 2023	
							Cakupan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	100,00%					
							Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas	100%					
		UPTD Puskesmas Bantargebang			541	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Orang yang menerima pelayanan kesehatan	8,00 Orang	8	1.200.000,00	1.200.000,00		
		UPTD Puskesmas Mustikajaya			542	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	104,00 orang	0	1.400.000,00	1.400.000,00		
		UPTD Puskesmas Bintara			543	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	600,00 Orang	600	1.300.000,00	1.300.000,00		
		UPTD Puskesmas Bintarajaya			544	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	300,00 Orang	26	800.000,00	800.000,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		UPTD Puskesmas Bojong Rawalumbu				545	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	110,00 Orang	99	11.000.000,00	11.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Durenjaya				546	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	105,00 Orang	57	3.000.000,00	3.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Jakamulya				547	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	8,00 Orang	8	1.600.000,00	1.600.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatiluhur				548	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna Napza yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	99,00 Orang	99	4.200.000,00	4.200.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatimakmur				549	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	84,00 Orang	0	24.000.000,00	24.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatirahayu				550	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	80,00 Orang	0	2.400.000,00	2.400.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatisampurna				551	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	94,00 Orang	0	600.000,00	600.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatiwarna				552	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	97,00 orang	0	1.200.000,00	1.200.000,00		
		UPTD Puskesmas Kaliabang Tengah				553	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	20,00 Orang	20	2.000.000,00	2.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Kotabaru				554	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	5,00 Orang	0	4.800.000,00	3.400.000,00	Jadwal bersamaan	akan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang di laksanakan
		UPTD Puskesmas Karangkitri				555	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	8,00 orang	2	800.000,00	800.000,00		
		UPTD Puskesmas Kranji				556	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	70,00 orang	70	1.000.000,00	1.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Margamulya				557	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	33,00 Orang	28	1.000.000,00	800.000,00		
		UPTD Puskesmas Pekayonjaya				558	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendaptkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14.000,00 Orang	0	2.400.000,00	2.400.000,00		
		UPTD Puskesmas Pengasinan				559	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	1,00 Orang	1	300.000,00	300.000,00		
		UPTD Puskesmas Perumnas II				560	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalaguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	9,00 Orang	6	900.000,00	900.000,00		
		UPTD Puskesmas Rawatembaga				561	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	11,00 Orang	2	1.100.000,00	1.100.000,00		
		UPTD Puskesmas Seroja				562	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah penyalahguna NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan	115,00 orang	0	4.000.000,00	4.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Teluk Pucung				563	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah penyalahguna NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan	10,00 orang	10	1.000.000,00	1.000.000,00		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		UPTD Puskesmas Bekasi Jaya				564	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	91,00 Orang	91	1.000.000,00	1.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatiranggon				565	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	49,00 orang	0	400.000,00	400.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatibening Baru				566	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	53,00 Orang	0	1.000.000,00	1.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Kali Baru				567	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	8,00 Orang	0	800.000,00	800.000,00		
		UPTD Puskesmas Mustika Sari				568	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa dan penyalahgunaan Napza	51,00 orang	45	7.200.000,00	7.200.000,00		
		UPTD Puskesmas Perwira				569	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan	53,00 Orang	51	2.600.000,00	2.600.000,00		
		UPTD Puskesmas Sumur Batu				570	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	jumlah penyalahguna Napza yang mendapatkan pelayanan kesehatn sesuai standar	4,00 orang	0	800.000,00	800.000,00		
		UPTD Puskesmas Pondok Gede				571	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	49,00 Orang	49	4.900.000,00	4.900.000,00		
		UPTD Puskesmas Aren Jaya				572	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Pengguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	20,00 Orang	16	2.000.000,00	2.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Bojongmenteng				573	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart	62,00 Orang	0	4.700.000,00	4.700.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatibening				574	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	721,00 Orang	0	1.000.000,00	1.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Margajaya				575	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	25,00 orang	25	700.000,00	700.000,00		
		UPTD Puskesmas Ciketing Udik				576	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	11,00 Orang	11	2.200.000,00	2.200.000,00		
		UPTD Puskesmas Cimuning				577	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	54,00 Orang	37	5.200.000,00	5.200.000,00		
		UPTD Puskesmas Jaka Setia				578	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	20,00 Orang	5	4.000.000,00	4.000.000,00		
								Persentase warga negara dengan gangguan jiwa dan napza yang mendapatkan layanan kesehatan	100%					
		UPTD Puskesmas Padurenan				579	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa dan penyalahgunaan Napza	20,00 orang	20	8.000.000,00	2.300.000,00	Jumlah panti berkurang	Akan dilakukan pendataan ulang terkait jumlah panti
								Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00%					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
							Jumlah Jenis layanan UKP dan UKM	100%					
		Dinas Kesehatan			580	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	4,00 Dokumen	4	216.630.000,00	191.054.000,00		
							Cakupan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	100,00%					
							Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas	100%					
		UPTD Puskesmas Aren Jaya			581	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4,00 Dokumen	4	141.400.000,00	132.300.000,00		
		UPTD Puskesmas Bantargebang			582	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4,00 Dokumen	4	57.700.000,00	55.700.000,00		
		UPTD Puskesmas Mustikajaya			583	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4,00 Dokumen	4	60.900.000,00	55.800.000,00		
		UPTD Puskesmas Bintara			584	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4,00 Dokumen	4	85.542.604,00	85.235.000,00		
		UPTD Puskesmas Bintarajaya			585	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4,00 Dokumen	4	70.300.000,00	68.800.000,00		
		UPTD Puskesmas Bojong Rawalumbu			586	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4,00 Dokumen	4	117.798.000,00	114.998.000,00		
		UPTD Puskesmas Durenjaya			587	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4,00 Dokumen	4	44.800.000,00	44.400.000,00		
		UPTD Puskesmas Jakamulya			588	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4,00 Dokumen	4	91.840.804,00	90.740.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatiasih			589	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit menular dan tidak menular	4,00 Dokumen	4	48.600.000,00	42.400.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatiluhur			590	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4,00 Dokumen	4	66.200.000,00	66.200.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatimakmur			591	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4,00 Dokumen	4	51.300.000,00	48.600.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatirahayu			592	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4,00 Dokumen	4	48.638.396,00	45.938.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatisampurna			593	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4,00 Dokumen	4	126.300.000,00	126.200.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatiwarna			594	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4,00 dokumen	4	184.800.000,00	171.700.000,00		
		UPTD Puskesmas Kaliabang Tengah			595	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4,00 Dokumen	4	73.940.030,00	55.280.000,00	tergantung jumlah kasus	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		UPTD Puskesmas Kotabaru				596	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4,00 Dokumen	4	85.220.216,00	70.520.000,00	
		UPTD Puskesmas Karangkitri				597	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4,00 Dokumen	4	150.800.000,00	149.800.000,00	
		UPTD Puskesmas Kranji				598	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4,00 dokumen	4	32.000.000,00	30.500.000,00	
		UPTD Puskesmas Margamulya				599	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4,00 Dokumen	4	54.200.000,00	47.700.000,00	
		UPTD Puskesmas Pekayonjaya				600	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4,00 Dokumen	4	56.830.160,00	46.600.000,00	
		UPTD Puskesmas Pengasinan				601	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4,00 Dokumen	4	92.100.000,00	91.500.000,00	
		UPTD Puskesmas Perumnas II				602	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	4,00 dokumen	4	50.780.133,00	46.080.000,00	
		UPTD Puskesmas Rawatembaga				603	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4,00 Dokumen	4	67.300.200,00	67.300.000,00	
		UPTD Puskesmas Seroja				604	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	4,00 Dokumen	4	79.900.022,00	78.800.000,00	
		UPTD Puskesmas Teluk Pucung				605	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	4,00 dokumen	4	194.214.000,00	194.114.000,00	
		UPTD Puskesmas Bekasi Jaya				606	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4,00 Dokumen	4	72.300.000,00	72.300.000,00	
		UPTD Puskesmas Harapan baru				607	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4,00 Dokumen	4	128.617.500,00	127.717.000,00	
		UPTD Puskesmas Jatiranggon				608	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4,00 dokumen	4	83.400.000,00	81.600.000,00	
		UPTD Puskesmas Jatibening Baru				609	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4,00 Dokumen	4	114.000.000,00	113.400.000,00	
		UPTD Puskesmas Kali Baru				610	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4,00 Dokumen	4	67.800.000,00	67.600.000,00	
		UPTD Puskesmas Mustika Sari				611	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	4,00 dokumen	4	94.301.500,00	93.100.000,00	
		UPTD Puskesmas Padurenan				612	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	4,00 dokumen	4	98.540.460,00	91.040.000,00	
		UPTD Puskesmas Perwira				613	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	4,00 Dokumen	4	108.300.000,00	105.000.000,00	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		UPTD Puskesmas Sumur Batu			614	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	4,00 dokumen	4	80.201.152,00	79.400.000,00		
		UPTD Puskesmas Pondok Gede			615	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4,00 Dokumen	4	73.000.000,00	70.100.000,00		
		UPTD Puskesmas Bojongmenteng			616	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4,00 Dokumen	4	74.000.000,00	58.500.000,00	tergantung jumlah kasus	akan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang di laksanakan
		UPTD Puskesmas Jatibening			617	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4,00 Dokumen	4	93.470.398,00	90.570.000,00		
		UPTD Puskesmas Margajaya			618	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4,00 dokumen	4	38.700.000,00	36.100.000,00		
		UPTD Puskesmas Pejjuang			619	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	4,00 Dokumen	4	66.300.000,00	65.900.000,00		
		UPTD Puskesmas Ciketing Udik			620	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4,00 Dokumen	4	89.800.000,00	88.800.000,00		
		UPTD Puskesmas Cimuning			621	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4,00 dokumen	4	97.060.026,00	88.660.000,00		
		UPTD Puskesmas Jaka Setia			622	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4,00 Dokumen	4	123.800.000,00	121.100.000,00		
							Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00%					
							Jumlah Jenis layanan UKP dan UKM	100%					
		Dinas Kesehatan			663	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4,00 Dokumen	4	2.182.994.000,00	1.833.002.062,00		
		Dinas Kesehatan			664	Pengelolaan Jaminan esehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4,00 Dokumen	4	178.998.095.980,00	161.056.808.505,00		
							Cakupan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	100,00%					
							Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas	100%					
		UPTD Puskesmas Aren Jaya			665	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	4,00 Paket	4	1.100.000,00	1.100.000,00		
		UPTD Puskesmas Mustikajaya			666	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	4,00 paket	0	24.000.000,00	13.500.000,00	tergantung jumlah kasus	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya
		UPTD Puskesmas Bintara			667	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang	15,00 Paket	2	1.500.000,00	900.000,00	tergantung jumlah kasus	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
							Rujukan/Nasional	Didistribusikan						
		UPTD Puskesmas Bintarajaya				668	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	30,00 Paket	30	3.000.000,00	2.800.000,00		
		UPTD Puskesmas Bojong Rawalumbu				669	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	4,00 Paket	0	5.000.000,00	5.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Jakamulya				670	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	4,00 Paket	4	5.900.000,00	1.600.000,00	Sebagian tidak terserap karena tidak ada sampel covid	akan di lakukan perhitungan estimasinkasus covid karena bukan kejadian pandemi lagi
		UPTD Puskesmas Jatiluhur				671	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/ Nasional yang di distribusikan	4,00 Paket	4	1.500.000,00	1.500.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatimakmur				672	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan /Nasional yang Di distribusikan	4,00 paket	0	5.000.000,00	300.000,00	tergantung jumlah kasus	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya
		UPTD Puskesmas Jatirahayu				673	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	4,00 Paket	4	5.200.000,00	1.700.000,00	tergantung jumlah kasus	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya
		UPTD Puskesmas Jatiwarna				674	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	80,00 paket	0	8.000.000,00	5.500.000,00	tergantung jumlah kasus	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya
		UPTD Puskesmas Kaliabang Tengah				675	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang di Distribusikan	35,00 Paket	35	3.500.000,00	3.500.000,00		
		UPTD Puskesmas Kotabaru				676	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen penyakit potensial kejadian luar biasa (KLB) ke laboratorium rujukan / nasionalyang didistribusi	10,00 Paket	10	1.000.000,00	1.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Karangitri				677	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Dokumen Hasil Pengambilan Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	4,00 Paket	4	5.000.000,00	1.600.000,00	tergantung jumlah kasus	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya
		UPTD Puskesmas Kranji				678	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	4,00 paket	4	3.000.000,00	2.100.000,00	tergantung jumlah kasus	akan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang di laksanakan



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
							Rujukan/Nasional							
		UPTD Puskesmas Margamulya				679	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan / Nasional yang di distribusikan	15,00 Paket	0	1.500.000,00	0	tergantung jumlah kasus	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya
		UPTD Puskesmas Pekayonjaya				680	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Specimen	100,00 Paket	0	10.000.000,00	2.300.000,00	tergantung jumlah kasus	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya
		UPTD Puskesmas Pengasinan				681	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	4,00 Paket	4	500.000,00	500.000,00		
		UPTD Puskesmas Perumnas II				682	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	75,00 paket	9	7.500.000,00	1.100.000,00	tergantung jumlah kasus	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya
		UPTD Puskesmas Seroja				683	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) sesuai standar	4,00 Paket	0	3.000.000,00	1.600.000,00	tergantung jumlah kasus	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya
		UPTD Puskesmas Teluk Pucung				684	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah spesimen penyakit potensial kejadian luar biasa (KLB) ke laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan	4,00 paket	3	700.000,00	700.000,00		
		UPTD Puskesmas Bekasi Jaya				685	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	4,00 Paket	4	8.250.000,00	1.000.000,00	tergantung jumlah kasus	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya
		UPTD Puskesmas Harapan baru				686	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	4,00 Paket	4	7.000.000,00	700.000,00	tergantung jumlah kasus	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya
		UPTD Puskesmas Jatiranggon				687	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang di Distribusikan	4,00 paket	0	5.000.000,00	2.100.000,00	tergantung jumlah kasus	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya
		UPTD Puskesmas Jatibening Baru				688	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	4,00 Paket	2	7.600.000,00	6.600.000,00		
		UPTD Puskesmas Kali Baru				689	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan	20,00 Paket	0	2.000.000,00	2.000.000,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		UPTD Puskesmas Mustika Sari				690	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Terdistribusinya spesimen penyakit potensial kejadian luar biasa (KLB) ke laboratorium	30,00 paket	30	16.000.000,00	16.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Perwira				691	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah spesimen penyakit potensial kejadian luar biasa	4,00 Paket	2	2.400.000,00	1.000.000,00	tergantung jumlah kasus	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya
		UPTD Puskesmas Sumur Batu				692	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	jumlah spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke laboratorium rujukan/nasional yang di distribusikan	5,00 paket	0	500.000,00	0	tergantung jumlah kasus	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya
		UPTD Puskesmas Pondok Gede				693	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	4,00 Paket	4	500.000,00	500.000,00		
		UPTD Puskesmas Bojongmenteng				694	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standart	4,00 paket	4	4.400.000,00	4.400.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatibening				695	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit KLB yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	4,00 Paket	0	500.000,00	500.000,00		
		UPTD Puskesmas Margajaya				696	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensi Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	4,00 Paket	4	6.000.000,00	2.200.000,00	tergantung jumlah kasus	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya
		UPTD Puskesmas Cimuning				697	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	4,00 paket	2	1.100.000,00	1.100.000,00		
		UPTD Puskesmas Jaka Setia				698	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan / Nasional yang Didistribusikan	4,00 Paket	3	5.000.000,00	2.900.000,00	tergantung jumlah kasus	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya
								<i>Terdistribusinya spesimen penyakit potensial kejadian luar biasa (KLB) ke labotarium rujukan/ nasional</i>	100%					
		UPTD Puskesmas Padurenan				670	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Terdistribusinya spesimen penyakit potensial kejadian luar biasa (KLB) ke labotarium	30,00 paket	4	3.000.000,00	400.000,00	tergantung jumlah kasus	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya
								Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00%					



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
							<i>Jumlah Jenis layanan UKP dan UKM</i>	100%					
		Dinas Kesehatan			671	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	4,00 Dokumen	4	291.664.000,00	227.548.000,00	efisiensi anggaran	akan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang di laksanakan
								0					
							<i>Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas</i>	100%					
		UPTD RSUD Medan Satria			672	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	4,00 Dokumen	1	0	0	RSUD Medan Satria Tidak jadi di bangun	Tidak akan dialokasikan kembali
							<i>Persentase cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan</i>	100,00%					
							<i>Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas</i>	100%					
		UPTD RSUD Bantar Gebang			673	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	4,00 Dokumen	4	18.135.026.436,00	15.425.480.955,00		
		UPTD RSUD Pondok Gede			674	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	4,00 Dokumen	4	18.072.431.756,00	16.886.651.731,00		
		UPTD RSUD Jati Sampurna			675	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	4,00 Dokumen	4	20.433.188.799,00	19.692.867.683,00		
		UPTD RSUD Teluk Pucung			676	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	4,00 Dokumen	4	8.305.504.847,00	7.496.407.083,00		
							<i>Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas</i>	100%					
		UPTD Puskesmas Jati Murni				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4,00 Dokumen	1	0	0	Puskesmas Jati Murni operasionalnya belum berjalan	Pagu anggaran akan dialokasikan tahun berikutnya setelah Puskesmas beroperasi
		UPTD Puskesmas Jati Melati				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4,00 Dokumen	1	0	0	Puskesmas Jati Melati operasionalnya belum berjalan	Pagu anggaran akan dialokasikan tahun berikutnya setelah Puskesmas beroperasi
							<i>Cakupan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas</i>	100,00%					
							<i>Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas</i>	100%					
		UPTD Puskesmas Aren Jaya			677	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4,00 Dokumen	4	2.469.877.738,00	2.398.272.602,00		
		UPTD Puskesmas Bantargebang			678	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4,00 Dokumen	4	2.497.620.779,00	2.478.309.661,00		
		UPTD Puskesmas Mustikajaya			679	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4,00 Dokumen	4	4.533.966.403,00	4.421.133.151,00		
		UPTD Puskesmas Bintara			680	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4,00 Dokumen	4	2.182.638.203,00	2.114.267.788,00		
		UPTD Puskesmas Bintarajaya			681	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4,00 Dokumen	4	2.488.248.768,00	2.442.817.077,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		UPTD Puskesmas Bojong Rawalumbu				682	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4,00 Dokumen	4	2.558.575.026,00	2.468.761.814,00	
		UPTD Puskesmas Bojongmenteng				683	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4,00 Dokumen	4	1.972.195.689,00	1.930.779.041,00	
		UPTD Puskesmas Durenjaya				684	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4,00 Dokumen	4	2.158.886.264,00	2.070.146.296,00	
		UPTD Puskesmas Jakamulya				685	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4,00 Dokumen	4	1.668.526.405,00	1.536.894.685,00	
		UPTD Puskesmas Jatiasih				686	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	4,00 dokumen	4	5.557.449.141,00	5.146.977.109,00	
		UPTD Puskesmas Jatibening				687	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4,00 Dokumen	4	2.275.736.392,00	2.102.872.993,00	
		UPTD Puskesmas Jatiluhur				688	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4,00 Dokumen	4	2.337.714.010,00	2.292.791.412,00	
		UPTD Puskesmas Jatimakmur				689	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4,00 Dokumen	4	2.088.424.508,00	1.837.582.645,00	
		UPTD Puskesmas Jatirahayu				690	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4,00 Dokumen	4	2.830.970.719,00	2.603.864.541,00	
		UPTD Puskesmas Jatisampurna				691	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4,00 Dokumen	4	3.647.599.217,00	3.339.187.755,00	
		UPTD Puskesmas Jatiwarna				692	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4,00 Dokumen	4	2.053.727.920,00	1.921.030.579,00	
		UPTD Puskesmas Kaliabang Tengah				693	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4,00 Dokumen	4	3.133.872.288,00	2.608.105.423,00	
		UPTD Puskesmas Kotabaru				694	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4,00 Dokumen	4	1.894.891.707,00	1.843.930.228,00	
		UPTD Puskesmas Karangkitri				695	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4,00 Dokumen	4	2.295.340.600,00	2.206.883.608,00	
		UPTD Puskesmas Kranji				696	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4,00 Dokumen	4	1.733.743.141,00	1.687.123.741,00	
		UPTD Puskesmas Margajaya				697	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4,00 Dokumen	4	1.221.810.415,00	1.156.605.287,00	
		UPTD Puskesmas Margamulya				698	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4,00 Dokumen	4	1.789.835.555,00	1.652.275.078,00	
		UPTD Puskesmas Pejuang				699	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	4,00 Dokumen	4	3.477.384.065,00	3.363.047.229,00	
		UPTD Puskesmas Pekayonjaya				700	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4,00 Dokumen	4	2.661.373.021,00	2.457.233.765,00	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		UPTD Puskesmas Pengasinan				701	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4,00 Dokumen	4	1.735.154.818,00	1.633.548.789,00		
		UPTD Puskesmas Perumnas II				702	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4,00 Dokumen	4	1.576.151.853,00	1.463.936.120,00		
		UPTD Puskesmas Rawatembaga				703	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4,00 Dokumen	4	2.313.546.930,00	2.250.359.985,00		
		UPTD Puskesmas Seroja				704	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4,00 Dokumen	4	2.114.870.589,00	2.047.509.656,00		
		UPTD Puskesmas Teluk Pucung				705	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4,00 Dokumen	4	2.434.743.204,00	2.128.753.941,00		
		UPTD Puskesmas Bekasi Jaya				706	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4,00 Dokumen	4	2.403.969.387,00	2.209.687.137,00		
		UPTD Puskesmas Ciketing Udik				707	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4,00 Dokumen	4	858.138.650,00	785.746.158,00		
		UPTD Puskesmas Cimuning				708	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4,00 Dokumen	4	796.808.000,00	706.937.074,00		
		UPTD Puskesmas Harapan baru				709	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4,00 Dokumen	4	712.151.000,00	639.958.648,00		
		UPTD Puskesmas Jaka Setia				710	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4,00 Dokumen	4	1.001.283.260,00	877.041.549,00		
		UPTD Puskesmas Jatiranggon				711	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4,00 Dokumen	4	1.338.931.054,00	1.029.483.924,00	masih menggunakan TPP Non BLUD	akan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang di laksanakan
		UPTD Puskesmas Jatibening Baru				712	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4,00 Dokumen	4	745.575.000,00	701.576.613,00		
		UPTD Puskesmas Kali Baru				713	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4,00 Dokumen	4	1.338.772.415,00	998.774.920,00	efisiensi anggaran	akan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang di laksanakan
		UPTD Puskesmas Mustika Sari				714	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4,00 Dokumen	4	702.874.001,00	644.975.257,00		
		UPTD Puskesmas Padurenan				715	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4,00 Dokumen	4	1.611.125.048,00	1.188.543.111,00	efisiensi anggaran	akan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang di laksanakan
		UPTD Puskesmas Perwira				716	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4,00 Dokumen	4	1.329.924.336,00	1.239.483.992,00		
		UPTD Puskesmas Sumur Batu				717	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4,00 Dokumen	4	691.731.300,00	634.773.276,00		
		UPTD Puskesmas Cikiwul				718	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	4,00 dokumen	4	500.000.000,00	473.345.771,00		
		UPTD Puskesmas Pondok Gede				719	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4,00 Dokumen	4	7.644.166.035,00	6.577.091.234,00		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		UPTD Puskesmas Jatikarya				720	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4,00 Dokumen	4	600.000.000,00	589.289.388,00		
		UPTD Puskesmas Harapan Mulya				721	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4,00 Dokumen	4	620.000.000,00	610.173.010,00		
		UPTD Puskesmas Medan Satria				722	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4,00 Dokumen	4	600.000.000,00	579.331.851,00		
		UPTD Puskesmas Jatikramat				723	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4,00 Dokumen	4	600.000.000,00	575.522.069,00		
		UPTD Puskesmas Jati Mekar				724	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4,00 Dokumen	4	600.000.000,00	576.469.231,00		
		UPTD Labkesda				725	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4,00 Dokumen	4	1.800.000.000,00	1.584.802.184,00		
		UPTD Instalasi Farmasi				726	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4,00 Dokumen	4	1.000.000.000,00	837.154.744,00		
		UPTD Puskesmas Aren Jaya				727	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Insvestigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4,00 Laporan	4	1.000.000,00	1.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Bantargebang				728	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlahh Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Di Harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)	4,00 Laporan	4	3.000.000,00	600.000,00	tergantung jumlah kasus	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya
		UPTD Puskesmas Mustikajaya				729	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4,00 Laporan	4	1.000.000,00	1.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Bintara				730	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4,00 Laporan	4	600.000,00	400.000,00	Tidak ada kasus baru	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya
		UPTD Puskesmas Bintarajaya				731	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4,00 Laporan	4	500.000,00	100.000,00	Tidak ada kasus baru	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya
		UPTD Puskesmas Bojong Rawalumbu				732	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4,00 Laporan	4	400.000,00	0	Tidak Ada kasus KIPI	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya
		UPTD Puskesmas Durenjaya				733	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4,00 Laporan	4	400.000,00	0	Tidak Ada kasus KIPI	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		UPTD Puskesmas Jakamulya				734	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4,00 Laporan	4	300.000,00	0	Tidak Ada kasus KIPI	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya
		UPTD Puskesmas Jatibening				735	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4,00 laporan	4	400.000,00	0	Tidak Ada kasus KIPI	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya
		UPTD Puskesmas Jatiluhur				736	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan pemberian Obat Massal)	4,00 Laporan	4	500.000,00	500.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatimakmur				737	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iktan Pasca Imuisasi dan Pemberian Obat Massal)	4,00 Laporan	4	200.000,00	0	Tidak Ada kasus KIPI	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya
		UPTD Puskesmas Jatirahayu				738	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4,00 Laporan	4	300.000,00	0	Tidak Ada kasus KIPI	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya
		UPTD Puskesmas Jatisampurna				739	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah laporan hasil Investigasi awal Kejadian Tak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat)	4,00 Laporan	4	600.000,00	0	Tidak Ada kasus KIPI	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya
		UPTD Puskesmas Jatiwarna				740	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4,00 laporan	4	400.000,00	400.000,00		
		UPTD Puskesmas Kaliabang Tengah				741	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4,00 Laporan	4	600.000,00	200.000,00	tidak ada pelaporan kasus KIPI yang lain di wilayah Puskesmas Kaliabang Tengah	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya
		UPTD Puskesmas Kotabaru				742	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4,00 Laporan	4	500.000,00	100.000,00	Tidak ada kejadian kipi yang dilaporkan	perkiraan kasus akan di hitung kembali
		UPTD Puskesmas Karangitri				743	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4,00 Laporan	4	400.000,00	400.000,00		
		UPTD Puskesmas Kranji				744	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah laporan hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4,00 laporan	4	600.000,00	600.000,00		
		UPTD Puskesmas Margamulya				745	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan	4,00 Laporan	4	3.000.000,00	3.000.000,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
							Obat Massal)	Pemberian Obat Massal)						
		UPTD Puskesmas Pekayonjaya				746	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4,00 Laporan	4	400.000,00	200.000,00	Tidak ada Kasus	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya
		UPTD Puskesmas Pengasinan				747	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal mendapat tindak lanjut	4,00 Laporan	1	400.000,00	400.000,00		
		UPTD Puskesmas Perumnas II				748	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Sesuai Standar	4,00 laporan	4	200.000,00	0	Tidak Ada kasus KIPI	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya
		UPTD Puskesmas Rawatembaga				749	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4,00 Laporan	4	200.000,00	0	Tidak Ada kasus KIPI	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya
		UPTD Puskesmas Seroja				750	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah laporan hasil investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	4,00 Laporan	4	200.000,00	200.000,00		
		UPTD Puskesmas Teluk Pucung				751	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah laporan hasil investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	4,00 laporan	4	100.000,00	0	Tidak Ada kasus KIPI	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya
		UPTD Puskesmas Bekasi Jaya				752	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4,00 Laporan	4	600.000,00	600.000,00		
		UPTD Puskesmas Harapan baru				753	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4,00 Laporan	4	400.000,00	400.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatiranggon				754	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4,00 laporan	4	1.500.000,00	200.000,00	kasus hanya 1	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya
		UPTD Puskesmas Jatibening Baru				755	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4,00 Laporan	4	4.600.000,00	4.600.000,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		UPTD Puskesmas Kali Baru				756	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4,00 Laporan	4	300.000,00	300.000,00		
		UPTD Puskesmas Mustika Sari				757	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	jumlah laporan hasil investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	4,00 laporan	0	900.000,00	0	Tidak Ada kasus KIPI	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya
		UPTD Puskesmas Padurenan				758	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	jumlah laporan hasil investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	4,00 laporan	4	2.000.000,00	1.200.000,00	Sudah tidak ditemukan kasus	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya
		UPTD Puskesmas Perwira				759	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah laporan hasil investigasi awal kejadian tidak di harapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dn pemberian obat massal)	4,00 Laporan	4	500.000,00	500.000,00		
		UPTD Puskesmas Sumur Batu				760	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	jumlah laporan hasil investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikut imunisasi dan pemberian obat massal)	4,00 laporan	4	500.000,00	500.000,00		
		UPTD Puskesmas Pondok Gede				761	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4,00 Laporan	4	600.000,00	0	Tidak Ada kasus KIPI	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya
		UPTD Puskesmas Bojongmenteng				762	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4,00 Laporan	4	400.000,00	0	Tidak Ada kasus KIPI	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya
		UPTD Puskesmas Margajaya				763	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4,00 laporan	4	1.800.000,00	1.800.000,00		
		UPTD Puskesmas Pejuang				764	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)	4,00 Laporan	4	800.000,00	0	Tidak Ada kasus KIPI	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya
		UPTD Puskesmas Ciketing Udik				765	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah laporan hasil Investigasi awal Kejadian Tak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat)	4,00 Laporan	4	1.000.000,00	1.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Cimuning				766	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4,00 Laporan	4	300.000,00	0	Tidak Ada kasus KIPI	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya
		UPTD Puskesmas Jaka Setia				767	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan	4,00 Laporan	4	300.000,00	100.000,00	Tidak ada lagi kasus KIPI	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
							Obat Massal)	Pemberian Obat Massal)					
		UPTD Puskesmas Aren Jaya				768	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.062,00 Orang	868	3.300.000,00	3.300.000,00	
		UPTD Puskesmas Bantargebang				769	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang dengan tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standart	20,00 Orang	10	4.000.000,00	4.000.000,00	
		UPTD Puskesmas Mustikajaya				770	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.205,00 orang	804	1.200.000,00	1.200.000,00	
		UPTD Puskesmas Bintara				771	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	20,00 Orang	15	2.000.000,00	2.000.000,00	
		UPTD Puskesmas Bintarajaya				772	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10,00 Orang	10	2.000.000,00	2.000.000,00	
		UPTD Puskesmas Bojong Rawalumbu				773	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	15,00 Orang	15	1.500.000,00	1.500.000,00	
		UPTD Puskesmas Durenjaya				774	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.207,00 Orang	232	2.500.000,00	2.500.000,00	
		UPTD Puskesmas Jakamulya				775	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	12,00 Orang	12	1.200.000,00	1.200.000,00	
		UPTD Puskesmas Jatisih				776	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	91,00 orang	91	4.000.000,00	4.000.000,00	
		UPTD Puskesmas Jatibening				777	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang dengan Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Palayanan Sesuai Standar	601,00 Orang	0	500.000,00	500.000,00	
		UPTD Puskesmas Jatimakmur				778	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang dengan tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	30,00 Orang	0	3.000.000,00	3.000.000,00	
		UPTD Puskesmas Jatirahayu				779	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberculosis Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15,00 Orang	0	1.500.000,00	1.500.000,00	
		UPTD Puskesmas Jatisampurna				780	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	108,00 Orang	15	21.600.000,00	21.600.000,00	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		UPTD Puskesmas Jatiwarna				781	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.121,00 orang	0	4.000.000,00	2.300.000,00	Pasien menolak untuk dilakukan kegiatan kunjungan rumah karena ditakutkan stigma dari lingkungan sekitar	akan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang di laksanakan
		UPTD Puskesmas Kaliabang Tengah				782	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20,00 Orang	15	2.000.000,00	2.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Kotabaru				783	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	51,00 Orang	20	2.700.000,00	2.600.000,00		
		UPTD Puskesmas Karangitri				784	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberculosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.078,00 orang	353	1.000.000,00	1.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Kranji				785	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	25,00 orang	25	2.500.000,00	2.500.000,00		
		UPTD Puskesmas Margamulya				786	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	386,00 Orang	170	2.400.000,00	2.400.000,00		
		UPTD Puskesmas Pekayonjaya				787	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	60,00 Orang	0	9.000.000,00	9.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Pengasinan				788	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai standar	1,00 Orang	1	600.000,00	600.000,00		
		UPTD Puskesmas Perumnas II				789	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20,00 orang	11	2.000.000,00	2.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Rawatembaga				790	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang dengan Tuberculosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	20,00 Orang	16	2.000.000,00	2.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Seroja				791	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.331,00 orang	0	7.600.000,00	7.600.000,00		
		UPTD Puskesmas Teluk Pucung				792	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	66,00 orang	50	6.600.000,00	6.600.000,00		
		UPTD Puskesmas Bekasi Jaya				793	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.045,00 Orang	1.045,00	2.800.000,00	2.800.000,00		
		UPTD Puskesmas Harapan baru				794	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan tuberkulosis	12,00 Orang	12	2.400.000,00	2.400.000,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		UPTD Puskesmas Jatiranggon				795	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	36,00 orang	0	600.000,00	600.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatibening Baru				796	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	608,00 Orang	82	13.000.000,00	13.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Kali Baru				797	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	44,00 Orang	11	8.800.000,00	8.800.000,00		
		UPTD Puskesmas Mustika Sari				798	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	jumlah orang penderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	288,00 orang	200	10.000.000,00	10.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Perwira				799	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	26,00 Orang	26	2.600.000,00	2.600.000,00		
		UPTD Puskesmas Sumur Batu				800	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	jumlah orang dengan tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	48,00 orang	12	9.600.000,00	9.600.000,00		
		UPTD Puskesmas Pondok Gede				801	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	125,00 Orang	71	12.500.000,00	5.400.000,00	tergantung jumlah kasus	akan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang di laksanakan
		UPTD Puskesmas Bojongmenteng				802	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standart	40,00 orang	0	4.000.000,00	3.900.000,00		
		UPTD Puskesmas Margajaya				803	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	27,00 orang	27	2.700.000,00	2.700.000,00		
		UPTD Puskesmas Pejuang				804	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	6,00 Orang	4	600.000,00	600.000,00		
		UPTD Puskesmas Ciketing Udik				805	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	35,00 Orang	20	14.000.000,00	8.200.000,00	Obat tidak tersedia	akan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang di laksanakan
		UPTD Puskesmas Cimuning				806	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	50,00 orang	15	5.000.000,00	5.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Jaka Setia				807	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	20,00 Orang	4	2.000.000,00	2.000.000,00		
								Persentase warga negara penderita tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		UPTD Puskesmas Padurenan			808	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	jumlah orang penderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	50,00 orang	50	5.000.000,00	5.000.000,00		
							Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas	100%					
		UPTD Puskesmas Aren Jaya			809	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	4,00 Orang	4	200.000,00	0	Tidak Ada kasus malaria	Kota Bekasi Bukan Endemis Malaria Kan di Hitung kembali perkiraan kasusnya
		UPTD Puskesmas Bantargebang			810	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	8,00 Orang	4	1.800.000,00	1.600.000,00		
		UPTD Puskesmas Mustikajaya			811	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	2,00 orang	0	200.000,00	0	Tidak Ada kasus malaria	Kota Bekasi Bukan Endemis Malaria Kan di Hitung kembali perkiraan kasusnya
		UPTD Puskesmas Bintara			812	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	2,00 Orang	0	200.000,00	0	Tidak Ada kasus malaria	Kota Bekasi Bukan Endemis Malaria Kan di Hitung kembali perkiraan kasusnya
		UPTD Puskesmas Bintarajaya			813	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	3,00 Orang	0	300.000,00	0	Tidak Ada kasus malaria	Kota Bekasi Bukan Endemis Malaria Kan di Hitung kembali perkiraan kasusnya
		UPTD Puskesmas Bojong Rawalumbu			814	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	2,00 Orang	0	200.000,00	0	Tidak Ada kasus malaria	Kota Bekasi Bukan Endemis Malaria Kan di Hitung kembali perkiraan kasusnya
		UPTD Puskesmas Durenjaya			815	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Malaria Sesuai Standar	2,00 Orang	0	200.000,00	0	Tidak Ada kasus malaria	Kota Bekasi Bukan Endemis Malaria Kan di Hitung kembali perkiraan kasusnya
		UPTD Puskesmas Jakamulya			816	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	2,00 Orang	0	200.000,00	0	Tidak Ada kasus malaria	Kota Bekasi Bukan Endemis Malaria Kan di Hitung kembali perkiraan kasusnya
		UPTD Puskesmas Jatiasih			817	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah Kesehatan Malaria yang mendapatkan pengelolaan Kesehatan Sesuai Standar	4,00 Dokumen	4	12.600.000,00	6.800.000,00	tergantung jumlah kasus	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya
		UPTD Puskesmas Jatibening			818	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Malaria	1,00 orang	0	300.000,00	100.000,00	Tidak ada kasus	Estimasi Kasus akan dihitung kembali di tahun berikut nya
		UPTD Puskesmas Jatiluhur			819	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Malaria	2,00 Orang	2	200.000,00	200.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatimakmur			820	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Malaria	2,00 Orang	0	400.000,00	0	Tidak Ada kasus malaria	Kota Bekasi Bukan Endemis Malaria Kan di Hitung kembali perkiraan kasusnya
		UPTD Puskesmas Jatirahayu			821	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Malaria	2,00 Orang	0	300.000,00	0	Tidak Ada kasus malaria	Kota Bekasi Bukan Endemis Malaria Kan di Hitung kembali perkiraan kasusnya
		UPTD Puskesmas Jatisampurna			822	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	18,00 Orang	12	1.800.000,00	1.600.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatiwarna			823	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	2,00 orang	0	200.000,00	0	Tidak Ada kasus malaria	Kota Bekasi Bukan Endemis Malaria Kan di Hitung kembali perkiraan kasusnya
		UPTD Puskesmas			824	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan	2,00 Orang	0	200.000,00	0	Tidak Ada kasus malaria	Kota Bekasi Bukan Endemis Malaria Kan di Hitung kembali

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Kaliabang Tengah					Kesehatan Malaria						perkiraan kasusnya
		UPTD Puskesmas Kotabaru			825	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1,00 Orang	0	100.000,00	0	Tidak Ada kasus malaria	Kota Bekasi Bukan Endemis Malaria Kan di Hitung kembali perkiraan kasusnya
		UPTD Puskesmas Karangitri			826	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Malaria	2,00 orang	0	200.000,00	0	Tidak Ada kasus malaria	Kota Bekasi Bukan Endemis Malaria Kan di Hitung kembali perkiraan kasusnya
		UPTD Puskesmas Kranji			827	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1,00 orang	0	200.000,00	0	Tidak Ada kasus malaria	Kota Bekasi Bukan Endemis Malaria Kan di Hitung kembali perkiraan kasusnya
		UPTD Puskesmas Margamulya			828	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	20,00 Orang	0	2.300.000,00	0	Tidak Ada kasus malaria	Kota Bekasi Bukan Endemis Malaria Kan di Hitung kembali perkiraan kasusnya
		UPTD Puskesmas Pekayonjaya			829	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Malaria Sesuai Standar	1,00 Orang	0	200.000,00	0	Tidak Ada kasus malaria	Kota Bekasi Bukan Endemis Malaria Kan di Hitung kembali perkiraan kasusnya
		UPTD Puskesmas Pengasinan			830	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Malaria	1,00 Orang	0	400.000,00	0	Tidak Ada kasus malaria	Kota Bekasi Bukan Endemis Malaria Kan di Hitung kembali perkiraan kasusnya
		UPTD Puskesmas Perumnas II			831	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	JumlahOrang Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Malaria	3,00 orang	0	300.000,00	0	Tidak Ada kasus malaria	Kota Bekasi Bukan Endemis Malaria Kan di Hitung kembali perkiraan kasusnya
		UPTD Puskesmas Rawatembaga			832	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Malaria	2,00 Orang	0	200.000,00	0	Tidak Ada kasus malaria	Kota Bekasi Bukan Endemis Malaria Kan di Hitung kembali perkiraan kasusnya
		UPTD Puskesmas Seroja			833	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanna kesehatan malaria	2,00 orang	0	200.000,00	0	Tidak Ada kasus malaria	Kota Bekasi Bukan Endemis Malaria Kan di Hitung kembali perkiraan kasusnya
		UPTD Puskesmas Teluk Pucung			834	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	2,00 orang	0	200.000,00	0	Tidak Ada kasus malaria	Kota Bekasi Bukan Endemis Malaria Kan di Hitung kembali perkiraan kasusnya
		UPTD Puskesmas Bekasi Jaya			835	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	2,00 Orang	2	200.000,00	0	Tidak Ada kasus malaria	Kota Bekasi Bukan Endemis Malaria Kan di Hitung kembali perkiraan kasusnya
		UPTD Puskesmas Harapan baru			836	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	2,00 Orang	0	200.000,00	0	Tidak Ada kasus malaria	Kota Bekasi Bukan Endemis Malaria Kan di Hitung kembali perkiraan kasusnya
		UPTD Puskesmas Jatiranggon			837	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1,00 orang	0	400.000,00	0	Tidak Ada kasus malaria	Kota Bekasi Bukan Endemis Malaria Kan di Hitung kembali perkiraan kasusnya
		UPTD Puskesmas Jatibening Baru			838	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Malaria	2,00 Orang	0	2.400.000,00	2.200.000,00		
		UPTD Puskesmas Kali Baru			839	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1,00 Orang	0	200.000,00	0	Tidak Ada kasus malaria	Kota Bekasi Bukan Endemis Malaria Kan di Hitung kembali perkiraan kasusnya
		UPTD Puskesmas Perwira			840	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	2,00 Orang	0	200.000,00	0	Tidak Ada kasus malaria	Kota Bekasi Bukan Endemis Malaria Kan di Hitung kembali perkiraan kasusnya
		UPTD Puskesmas Sumur Batu			841	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	jumlah lokasi yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	3,00 orang	0	300.000,00	300.000,00		
		UPTD Puskesmas Pondok Gede			842	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Malaria	2,00 Orang	0	200.000,00	0	Tidak Ada kasus malaria	Kota Bekasi Bukan Endemis Malaria Kan di Hitung kembali perkiraan kasusnya

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		UPTD Puskesmas Bojongmenteng			843	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah Orang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Malaria	2,00 orang	0	200.000,00	0	Tidak Ada kasus malaria	Kota Bekasi Bukan Endemis Malaria Kan di Hitung kembali perkiraan kasusnya
		UPTD Puskesmas Margajaya			844	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	3,00 orang	3	300.000,00	0	Tidak Ada kasus malaria	Kota Bekasi Bukan Endemis Malaria Kan di Hitung kembali perkiraan kasusnya
		UPTD Puskesmas Pejuang			845	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	2,00 Orang	0	200.000,00	0	Tidak Ada kasus malaria	Kota Bekasi Bukan Endemis Malaria Kan di Hitung kembali perkiraan kasusnya
		UPTD Puskesmas Ciketing Udik			846	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	2,00 Orang	0	200.000,00	0	Tidak Ada kasus malaria	Kota Bekasi Bukan Endemis Malaria Kan di Hitung kembali perkiraan kasusnya
		UPTD Puskesmas Cimuning			847	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	2,00 Orang	0	200.000,00	0	Tidak Ada kasus malaria	Kota Bekasi Bukan Endemis Malaria Kan di Hitung kembali perkiraan kasusnya
		UPTD Puskesmas Jaka Setia			848	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	2,00 Orang	0	200.000,00	0	Tidak Ada kasus malaria	Kota Bekasi Bukan Endemis Malaria Kan di Hitung kembali perkiraan kasusnya
							<i>Persentase warga negara dengan malaria yang mendapatkan layanan kesehatan</i>	<i>100%</i>					
		UPTD Puskesmas Padurenan			849	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	3,00 orang	0	400.000,00	0	Tidak Ada kasus malaria	Kota Bekasi Bukan Endemis Malaria Kan di Hitung kembali perkiraan kasusnya
							<i>persentase Rumah sakit Terakreditasi</i>	<i>100,00%</i>					
					C	<i>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah jenis layanan dalam rangka Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	<i>1.270.406.000,00</i>	<i>1.073.532.205,00</i>		
		Dinas Kesehatan			1	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	19,00 Unit	19	988.881.000,00	797.240.000,00		
		Dinas Kesehatan			2	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	4,00 Dokumen	4	281.525.000,00	276.292.205,00		
			Terwujudnya masyarakat Kota bekasi yang sehat	III		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	persentase ketersediaan SDM kesehatan di puskesmas dan RS	100,00%	88,26	51.337.625.730,00	49.739.228.133,00		
					A	<i>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumah jenis layanan Sumberdaya Manusia Kesehatan</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	<i>49.654.260.030,00</i>	<i>48.916.083.073,00</i>		
		Dinas Kesehatan			1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	13.428,00 Orang/Bulan	13.428,00	49.616.740.030,00	48.879.532.073,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
							<i>Prosentasi dokumen perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM kesehatan sesuai standart</i>	100%					
		UPTD Instalasi Farmasi			2	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	1,00 Dokumen	1	32.520.000,00	31.716.000,00		
							<i>persentase ketersediaan SDM kesehatan di puskesmas dan RS</i>	100,00%					
							<i>Jumah jenis layanan Sumberdaya Manusia Kesehatan</i>	100%					
		Dinas Kesehatan			3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4,00 Dokumen	4	5.000.000,00	4.835.000,00		
					B	<i>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah jenis layanan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>	100%	53,02	1.683.365.700,00	823.145.060,00		
		Dinas Kesehatan			1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	215,00 Orang	114	1.683.365.700,00	823.145.060,00	perbedaan metode pelatihan	akan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang di laksanakan
			Terwujudnya masyarakat Kota bekasi yang sehat	IV		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	<i>persentase jumlah sarana kefarmasian yang memenuhi standar kesehatan</i>	93,00%	100	458.660.000,00	420.470.750,00		
					A	<i>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</i>	<i>persentase pemberian izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal</i>	100%	100	63.730.000,00	63.168.000,00		
		Dinas Kesehatan			1	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Adanya peningkatan kepatuhan fasilitas pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar persyaratan	150,00 Sarana	150	63.730.000,00	63.168.000,00		
							<i>persentase jumlah produk pangan industri rumah tangga (PIRT) berlabel yang memenuhi standar kesehatan</i>	100,00%					
					B	<i>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</i>	<i>Persentase jumlah produk pangan industri rumah tangga (PIRT) berlabel yang memenuhi standar kesehatan</i>	100%	100	143.330.000,00	134.985.600,00		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Dinas Kesehatan				1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terselenggaranya BIMTEK kemandirian pangan untuk pelaku usaha Industri Rumah Tangga (IRTP)	100,00 Orang	100	143.330.000,00	134.985.600,00		
								Terlaksananya pengawasan pre market dalam rangka pemenuhan komitmen Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) untuk pelaku usaha Industri Rumah Tangga Pangan	100,00 Orang	100				
								Terlaksananya pendampingan pemenuhan CAPA ke sarana IRTP	30,00 Sarana	30				
								Terlaksananya pengkajian ulang SPP-IRT	2,00 kali	2				
					C	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		Jumlah jenis Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	100%	100	251.600.000,00	222.317.150,00		
		Dinas Kesehatan				1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	99,00 unit	99	251.600.000,00	222.317.150,00		
			Terwujudnya masyarakat Kota bekasi yang sehat	V	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			Cakupan rumah tangga Ber-PHBS	64,00%	97,81	13.869.164.300,00	13.711.686.710,00		
					A	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah jenis Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	100%	100	12.058.236.000,00	11.968.031.800,00		
		Dinas Kesehatan				1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1,00 Dokumen	1	12.058.236.000,00	11.968.031.800,00		
								Tersedianya Pengadaan Ambulance Jenazah	38,00 Unit	38				
								Terlatihnya Kader Keamanan Pangan di Kota Bekasi	30,00 Orang	30				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
							Terlaksananya sosialisasi keamanan pangan oleh Kader Keamanan Pangan	150,00 Orang	150					
							Tersedianya Kelengkapan Posyandu	2,00 Paket	2					
					B	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	100%	100	350.000.000,00	317.355.000,00		
		Dinas Kesehatan				1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	4,00 Dokumen	4	350.000.000,00	317.355.000,00		
					C	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	100%	97,46	1.460.928.300,00	1.426.299.910,00		
		UPTD Puskesmas Bantargebang				1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4,00 Dokumen	4	32.000.960,00	32.000.000,00		
		UPTD Puskesmas Mustikajaya				2	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Bimbingan Tekhnis dan Supervisi	4,00 Dokumen	4	22.600.000,00	15.500.000,00	masih sedikit jumlah kader terlatih	akan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang di laksanakan
		UPTD Puskesmas Bintarajaya				3	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4,00 Dokumen	4	8.190.000,00	8.190.000,00		
		UPTD Puskesmas Bojong Rawalumbu				4	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4,00 Dokumen	4	11.890.630,00	11.890.000,00		
		UPTD Puskesmas Bojongmenteng				5	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Sumber Daya yang mendapatkan bimbingan tekhnis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya	166,00 orang	6	11.400.000,00	8.800.000,00	Jadwal bersamaan	akan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang di laksanakan
		UPTD Puskesmas Durenjaya				6	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4,00 Dokumen	4	18.480.000,00	18.480.000,00		
		UPTD Puskesmas Jakamulya				7	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4,00 Dokumen	4	16.300.000,00	16.300.000,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		UPTD Puskesmas Jatibening				8	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan Advokasi, Kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	4,00 Dokumen	4	24.002.392,00	22.600.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatiluhur				9	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan dan Bersumber daya Masyarakat (UKBM)	4,00 Dokumen	4	19.129.502,00	19.129.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatimakmur				10	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4,00 Dokumen	4	20.820.000,00	20.820.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatisampurna				11	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)	4,00 Dokumen	4	41.250.000,00	41.250.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatiwarna				12	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen hasil Bimbingan teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	4,00 dokumen	4	6.000.000,00	3.660.000,00	Jadwal bersamaan	akan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang di laksanakan
		UPTD Puskesmas Kaliabang Tengah				13	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4,00 Dokumen	4	9.300.060,00	9.300.000,00		
		UPTD Puskesmas Kotabaru				14	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4,00 Dokumen	4	8.960.000,00	8.960.000,00		
		UPTD Puskesmas Karangitri				15	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan SUPervisi Pengembangan dan Pelaksanan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	4,00 Dokumen	4	21.780.000,00	21.780.000,00		
		UPTD Puskesmas Kranji				16	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4,00 dokumen	4	20.245.542,00	20.243.000,00		
		UPTD Puskesmas Margamulya				17	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4,00 Dokumen	4	8.220.000,00	7.860.000,00		
		UPTD Puskesmas Pekayonjaya				18	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4,00 Dokumen	4	14.650.000,00	14.220.000,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		UPTD Puskesmas Pengasinan				19	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4,00 Dokumen	4	49.375.182,00	49.319.000,00		
		UPTD Puskesmas Rawatembaga				20	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4,00 Dokumen	4	23.940.000,00	23.940.000,00		
		UPTD Puskesmas Seroja				21	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Besumber Daya Masyarakat (UKBM)	4,00 Dokumen	4	4.900.000,00	4.900.000,00		
		UPTD Puskesmas Bekasi Jaya				22	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4,00 Dokumen	4	34.002.000,00	34.002.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatiranggon				23	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4,00 dokumen	4	69.800.000,00	69.200.000,00		
		UPTD Puskesmas Jatibening Baru				24	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4,00 Dokumen	4	11.200.238,00	11.200.000,00		
		UPTD Puskesmas Kali Baru				25	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4,00 Dokumen	4	36.960.000,00	36.960.000,00		
		UPTD Puskesmas Mustika Sari				26	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Tercapainya pelayanan kesehatan sesuai standar	4,00 dokumen	4	27.920.000,00	27.920.000,00		
		UPTD Puskesmas Perwira				27	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM)	4,00 Dokumen	4	9.200.000,00	9.200.000,00		
		UPTD Puskesmas Sumur Batu				28	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat	4,00 dokumen	4	24.728.912,00	24.728.000,00		
		UPTD Puskesmas Margajaya				29	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4,00 dokumen	4	73.514.722,00	73.214.000,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		UPTD Puskesmas Pejuang				30	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)	4,00 Dokumen	4	22.865.000,00	22.865.000,00		
		UPTD Puskesmas Ciketing Udik				31	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)	4,00 Dokumen	4	21.567.000,00	19.827.000,00		
		UPTD Puskesmas Cimuning				32	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi,kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4,00 Dokumen	4	14.440.000,00	14.440.000,00		
		UPTD Puskesmas Jaka Setia				33	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskemas	4,00 Dokumen	4	79.392.000,00	79.392.000,00		
								Cakupan rumah tangga Ber-PHBS	64,00%					
								Jumlah Jenis Layanan UKP dan UKP	100%					
		Dinas Kesehatan				34	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)	4,00 Dokumen	4	564.714.300,00	548.642.910,00		
		UPTD Puskesmas Bintara				35	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4,00 Dokumen	4	12.991.440,00	12.990.000,00		
		UPTD Puskesmas Perumnas II				36	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4,00 Dokumen	4	13.078.168,00	11.758.000,00		
		UPTD Puskesmas Teluk Pucung				37	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)	4,00 dokumen	4	2.100.000,00	2.100.000,00		
		UPTD Puskesmas Harapan baru				38	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4,00 Dokumen	4	49.020.252,00	48.720.000,00		
2	RSUD	Rumah Sakit Umum Daerah	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	VI	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00%	99,95	89.583.223.100,00	85.401.815.007,00		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
					A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	99,9	89.122.895.000,00	84.944.020.007,00		
		Rumah Sakit Umum Daerah			1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16.110,00 Orang/Bulan	16.094,00	89.122.895.000,00	84.944.020.007,00	Realisasi kegiatan triwulan 4 berdasarkan Jumlah ASN RSUD CAM yang dibayarkan Gajinya dan tunjangan ASN di triwulan IV 2023	Realisasi pembayaran Gaji dan tunjangan ASN tidak sesuai target yang telah ditentukan dikarenakan terdapat pegawai ASN yang purna bakti dan pindah
							Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%					
					B	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpenuhinya sumber daya listrik yang di butuhkan	100%	100	460.328.100,00	457.795.000,00		
		Rumah Sakit Umum Daerah			1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1,00 laporan	1	460.328.100,00	457.795.000,00		
			Terwujudnya masyarakat Kota bekasi yang sehat	VII		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	terpenuhinya pemeliharaan 10 jenis sarana dan prasarana rumah sakit	12,00%	100	473.736.167.163,00	454.597.263.573,00		
					A	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan dan Alat Non Kesehatan Serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Rumah Sakit	100%	100	35.974.341.335,00	35.511.262.523,00		
		Rumah Sakit Umum Daerah			1	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik	249,00 unit	249	8.887.375.000,00	8.755.631.842,00		
		Rumah Sakit Umum Daerah			2	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	11,00 Unit	11	27.086.966.335,00	26.755.630.681,00		
							Capaian IKM Pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Type B	82,00 Indeks					
					B	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Operasional BLUD	100%	100	437.761.825.828,00	419.086.001.050,00		
		Rumah Sakit Umum Daerah			1	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	2,00 Dokumen	2	437.761.825.828,00	419.086.001.050,00		
3	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Disperkimtan	Terwujudnya masyarakat Kota bekasi yang sehat	VIII		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Ketersediaan gedung RS Type D pada tahun 2023 dalam kondisi baik dan berfungsi	83,33%	100	22.852.464.870,00	21.941.869.012,00		
					A	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Pelayanan Obsterti Neonatal Emergency Dasar (Poned)	100%	100	22.852.464.870,00	21.941.869.012,00		
		Disperkimtan			1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	4,00 Unit	4	6.235.489.000,00	6.033.029.568,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Disperkimtan				2	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	4,00 Unit	4	15.172.475.870,00	14.570.011.037,00		
		Disperkimtan				3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1,00 Unit	1	694.500.000,00	659.599.000,00		
		Disperkimtan				4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	1,00 Unit	1	750.000.000,00	679.229.407,00		



3. Urusan Pekerjaan Umum

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Tata Ruang	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00%	91,87	18.223.756.215,00	16.004.561.163,00		
				A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100	3.000.000,00	1.705.200,00		
		Dinas Tata Ruang			1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,00 Laporan	4	3.000.000,00	1.705.200,00		
				B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrai Keuangan Perangkat Daerah	100%	89	16.299.531.000,00	14.264.629.666,00		
		Dinas Tata Ruang			1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.340,00 Orang/Bulan	1.825,00	16.296.531.000,00	14.262.019.666,00		
		Dinas Tata Ruang			2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,00 Laporan	1	3.000.000,00	2.610.000,00		
						Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,00%					
				C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	50	5.000.000,00	0		
		Dinas Tata Ruang			1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2,00 Orang	1	5.000.000,00	0		
						Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%					
				D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100	388.980.000,00	339.176.591,00		
		Dinas Tata Ruang			1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4,00 Paket	4	284.000.000,00	281.368.300,00		
		Dinas Tata Ruang			2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2,00 Paket	2	31.100.000,00	16.417.050,00		
		Dinas Tata Ruang			3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12,00 Dokumen	12	25.000.000,00	24.600.000,00		
		Dinas Tata Ruang			4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,00 Laporan	100	48.880.000,00	16.791.241,00		
				E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100%	83,33	242.747.000,00	202.925.000,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
							<i>Pemerintah Daerah</i>							
		Dinas Tata Ruang				1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20,00 Unit	20	100.812.000,00	100.085.000,00		
		Dinas Tata Ruang				2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10,00 Unit	5	136.365.000,00	97.740.000,00	3 Unit Printer dan 2 Unit Penghancur kertas dibatalkan dan dikembalikan ke penyedia dikarenakan barang tidak TKDN	Untuk memitigasi risiko yang akan datang, PPK dalam melakukan identifikasi kebutuhan dan penyusunan spesifikasi harus lebih memperhatikan TKDN dalam pengadaan barang
		Dinas Tata Ruang				3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20,00 Unit	20	5.570.000,00	5.100.000,00		
							Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%						
					F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100	1.027.922.215,00	994.329.403,00		
		Dinas Tata Ruang				1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00 Laporan	12	1.027.922.215,00	994.329.403,00		
							Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%						
					G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100	256.576.000,00	201.795.303,00		
		Dinas Tata Ruang				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5,00 Unit	5	131.576.000,00	90.238.503,00		
		Dinas Tata Ruang				2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30,00 Unit	30	100.000.000,00	90.206.800,00		
		Dinas Tata Ruang				3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30,00 Unit	30	25.000.000,00	21.350.000,00		
			Terwujudnya Kota Bekasi yang sehat, aman, ramah dan aksesibel didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas yang merata dan memenuhi standar	II	Program Penataan Bangunan Gedung		Persentase dokumen teknis penataan bangunan gedung yang diterbitkan	90, 00%	100	1.315.059.290,00	1.196.885.722,00			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
					A	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	100%	100	1.315.059.290,00	1.196.885.722,00	
		Dinas Tata Ruang			1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	2,00 Dokumen	2	1.215.059.290,00	1.097.954.472,00	
		Dinas Tata Ruang			2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	1,00 Dokumen	1	100.000.000,00	98.931.250,00	
			Terwujudnya Kota Bekasi yang sehat, aman, ramah dan aksesibel didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas yang merata dan memenuhi standar	III	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Rencana Pembangunan Infrastruktur Kota yang Sesuai dengan Tata Ruang Kota	1,00 Dokumen	87,5	6.490.808.623,00	5.692.085.115,00		
					A	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	100%	100	1.260.604.000,00	1.180.691.864,00	
		Dinas Tata Ruang			1	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	6,00 Dokumen	6	1.210.594.000,00	1.132.981.664,00	
		Dinas Tata Ruang			2	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	1,00 Dokumen	1	50.010.000,00	47.710.200,00	
						Jumlah Rencana Penataan Kawasan Strategis Kota yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota	1,00 Dokumen					
					B	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100%	50	888.640.000,00	712.035.225,00	
		Dinas Tata Ruang			1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	2,00 Dokumen	2	502.600.000,00	467.531.280,00	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Dinas Tata Ruang				2	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1,00 Dokumen	0	386.040.000,00	244.503.945,00	
								Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah atau kawasan perkotaan	19,00%				
					C		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100%	100	2.206.914.155,00	2.017.108.706,00	
		Dinas Tata Ruang				1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1,00 Dokumen	1	763.221.125,00	643.548.692,00	
		Dinas Tata Ruang				2	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	3,00 Dokumen	3	1.443.693.030,00	1.373.560.014,00	
								Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW	75,00%				
					D		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100%	100	2.134.650.468,00	1.782.249.320,00	
		Dinas Tata Ruang				1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	2,00 Dokumen	2	1.097.299.730,00	781.667.464,00	
		Dinas Tata Ruang				2	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1,00 Dokumen	1	1.037.350.738,00	1.000.581.856,00	
2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DBMSDA	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	IV	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%	100	35.864.296.115,00	31.691.900.605,00	
					A		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100	4.000.000,00	4.000.000,00	
		DBMSDA				1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9,00 Laporan	9	4.000.000,00	4.000.000,00	
								Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00%				
					B		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan Keuangan Perangkat Daerah	100%	100	27.388.185.000,00	23.703.877.244,00	
		DBMSDA				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.992,00 Orang/bulan	3.992,00	27.386.185.000,00	23.701.887.244,00	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		DBMSDA				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,00 Laporan	3	2.000.000,00	1.990.000,00		
								Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%					
					C	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100	857.480.000,00	741.133.310,00		
		DBMSDA				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00 Paket	1	25.000.000,00	25.000.000,00		
		DBMSDA				2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7,00 Paket	7	450.000.000,00	379.472.900,00		
		DBMSDA				3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3,00 Paket	3	160.000.000,00	151.492.492,00		
		DBMSDA				4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12,00 Dokumen	12	50.000.000,00	43.214.000,00		
		DBMSDA				5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4,00 Laporan	4	125.000.000,00	96.020.918,00		
		DBMSDA				6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.988,00 Dokumen	2.988,00	47.480.000,00	45.933.000,00		
					D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diadakan	100%	100	2.670.005.680,00	2.468.713.800,00		
		DBMSDA				1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	231,00 Unit	231	1.401.740.400,00	1.394.001.000,00		
		DBMSDA				2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	90,00 Unit	90	1.268.265.280,00	1.074.712.800,00		
								Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%					
					E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100	3.376.624.715,00	3.305.250.430,00		
		DBMSDA				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00 Laporan	12	885.000.000,00	853.314.185,00		
		DBMSDA				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00 Laporan	12	2.491.624.715,00	2.451.936.245,00		
								Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%					
					F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	100	1.568.000.720,00	1.468.925.821,00		
		DBMSDA				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6,00 Unit	6	204.350.720,00	181.643.423,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
									TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		DBMSDA				2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	117,00 Unit	117	843.500.000,00	788.514.446,00			
		DBMSDA				3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	187,00 Unit	187	120.150.000,00	107.660.000,00			
		DBMSDA				4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0,00 Unit	0	400.000.000,00	391.107.952,00			
								Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara /Direhabilitasi	1,00 Unit	1					
			Terwujudnya Kota Bekasi yang sehat, aman, ramah dan aksesibel didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas yang merata dan memenuhi standar	V	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)			Presentase Pembangunan Polder	71,37%	100	26.656.280.000,00	25.158.072.335,00			
					A	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Presentase Pembangunan Polder	100%	100	26.656.280.000,00	25.158.072.335,00		
		DBMSDA				1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	6,00 Dokumen	6	1.580.500.000,00	954.313.134,00			
		DBMSDA				2	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	3,36 KM	3,36	12.748.000.000,00	12.371.912.961,00			
		DBMSDA				3	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	20,00 Unit	20	2.557.000.000,00	2.493.846.160,00			
		DBMSDA				4	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	5,00 Unit	5	7.995.780.000,00	7.622.804.840,00			
						5		Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	1,00 Unit	1					
		DBMSDA				6	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	1,07 KM	1,07	1.775.000.000,00	1.715.195.240,00			
			Terwujudnya Kota Bekasi yang sehat, aman, ramah dan aksesibel didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas yang	VI	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase			Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	67,92%	100	280.479.108.274,00	273.107.169.410,00			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
			merata dan memenuhi standar									
				A	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	100%	100	280.479.108.274,00	273.107.169.410,00		
		DBMSDA			1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	22,00 Dokumen	22	7.500.000.000,00	7.308.856.300,00	
		DBMSDA			2	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	17.040,00 M	17.040,00	35.742.500.000,00	34.694.450.813,00	
							Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	43,00 M	43			
		DBMSDA			3	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	40.172,00 M	40.172,00	113.025.682.648,00	111.542.145.633,00	
							Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	2.747,60 M	2.747,60			
		DBMSDA			4	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	19.561,00 M	19.561,00	48.417.457.996,00	46.758.232.482,00	
							Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	308,00 M	308			
							Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	1.775,00 M	1.775,00			
		DBMSDA			5	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	49,00 Unit	49	25.353.201.630,00	23.300.894.196,00	
		DBMSDA			6	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	19.745,00 M	19.745,00	50.440.266.000,00	49.502.589.986,00	
			Terwujudnya Kota Bekasi yang sehat, aman, ramah dan aksesibel didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas yang merata dan memenuhi standar	VII	Program Pengembangan Permukiman	Persentase peningkatan pembangunan PJU Baru	53,30%	100	108.614.816.870,00	98.292.229.509,00		
				A	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah	Persentase Peningkatan Pembangunan PJU Baru	100%	100	108.614.816.870,00	98.292.229.509,00		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
						Kabupaten/Kota							
		DBMSDA			1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	86,00 Sistem Jaringan	86	11.494.908.000,00	10.944.765.054,00		
							Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	4,00 Sistem Jaringan	4				
		DBMSDA			2	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	10,00 Sistem Jaringan	10	97.119.908.870,00	87.347.464.455,00		
							Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1,00 Sistem Jaringan	1				
			Terwujudnya Kota Bekasi yang sehat, aman, ramah dan aksesibel didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas yang merata dan memenuhi standar	VIII	Program Penyelenggaraan Jalan		Persentase Jalan Kota Dalam Kondisi Baik (> 40km/jam)	97,20%	100	344.477.875.452,00	328.789.296.448,00		
					A	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Jalan Kota Dalam Kondisi Baik (>40km/jam)	100%	100	344.477.875.452,00	328.789.296.448,00		
		DBMSDA			1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	19,00 Dokumen	19	3.400.000.000,00	3.136.224.164,00		
		DBMSDA			2	Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	1,00 Dokumen	1	2.613.382.560,00	2.537.102.031,00		
		DBMSDA			3	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	3,06 KM	3,06	7.420.725.000,00	7.207.004.000,00		
							Panjang Jalan yang Dibangun	0,13 KM	0,13				
								100%					
		DBMSDA			4	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang dilakukan Pelebaran Jalan Menambah Lajur	0,00 KM	0	14.018.267.350,00	12.217.210.516,00		
							Panjang Jalan yang dilakukan Pelebaran Jalan Menambah Lajur	1,30 KM	1,3				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
							Persentase Jalan Kota Dalam Kondisi Baik (>40km/jam)	100%					
		DBMSDA				5	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	70,00 KM	70	167.669.372.107,00	160.475.914.039,00	
								Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	4,08 KM	4,08			
								Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	0,14 KM	0,14			
		DBMSDA				6	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	41,75 KM	41,75	36.074.890.000,00	34.684.085.135,00	
							Persentase Pemeliharaan Jembatan	100%					
		DBMSDA				7	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	21,50 KM	21,5	93.390.359.755,00	89.189.466.738,00	
							Persentase Jalan Kota Dalam Kondisi Baik (>40km/jam)	100%					
		DBMSDA				8	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	5,20 KM	5,2	14.498.048.000,00	14.233.405.000,00	
							Persentase Jalan yang memiliki Trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	100%					
		DBMSDA				9	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	20,00 M	20	570.000.000,00	538.976.000,00	
		DBMSDA				10	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	100,00 M	100	400.000.000,00	348.365.700,00	
		DBMSDA				11	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	50,00 M	50	2.187.204.680,00	2.073.883.455,00	
							Persentase Jalan Kota Dalam Kondisi Baik (>40km/jam)	100%					
		DBMSDA				12	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	5,00 Dokumen	5	1.234.106.000,00	1.192.287.240,00	
		DBMSDA				13	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	2,00 Dokumen	2	1.001.520.000,00	955.372.430,00	
			Terwujudnya Kota Bekasi yang sehat, aman, ramah dan aksesibel didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas yang merata dan memenuhi standar	IX	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		Persentase penataan dan pemeliharaan reklame	8,00 Buah	100	2.256.476.000,00	2.147.023.957,00		
					A	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Reklame dalam keadaan baik	100%	100	2.256.476.000,00	2.147.023.957,00	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		DBMSDA				1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	8,00 Dokumen	8	2.256.476.000,00	2.147.023.957,00		
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								100%	94,52	198.384.819.355,00	181.764.397.135,00		
			Terwujudnya Kota Bekasi yang sehat, aman, ramah dan aksesibel didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas yang merata dan memenuhi standar	X	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum			Persentase Penduduk Berakses Air Minum	30,27%	80	25.430.697.573,00	21.432.650.546,00		
					A	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			100%	80	25.430.697.573,00	21.432.650.546,00		
		Disperkimtan				1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	11,00 Dokumen	11	2.136.167.750,00	1.865.876.620,00		
		Disperkimtan				2	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM	2,00 Dokumen	0	200.000.000,00	0		
								Persentase Penduduk Berakses Air Minum	100%					
		Disperkimtan				3	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	3,00 Kelurahan	3	5.218.660.000,00	4.955.309.662,00		
		Disperkimtan				4	Pertuasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	1.541,00 SR	1.541,00	15.188.405.023,00	12.556.608.500,00		
		Disperkimtan				5	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	5,00 Unit	5	2.687.464.800,00	2.054.855.764,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN		
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI				
			Terwujudnya Kota Bekasi yang sehat, aman, ramah dan aksesibel didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas yang merata dan memenuhi standar	XI	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah		Cakupan luasan wilayah perumahan dan permukiman yang terlayani pengolahan air limbah domestik	17,02%	100	24.869.509.323,00	23.811.620.666,00			
					A	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		100%	100	24.869.509.323,00	23.811.620.666,00			
		Disperkimtan				1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	4,00 Dokumen	4	500.000.000,00	478.988.400,00		
								Cakupan Luasan Wilayah Perumahan dan Permukiman yang Terlayani Pengolahan Air Limbah Domestik	100%					
		Disperkimtan				2	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	1,00 Dokumen	1	350.000.000,00	273.591.000,00		
		Disperkimtan				3	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	100,00 Rumah Tangga	100	1.000.000.000,00	972.941.300,00		
		Disperkimtan					Sistem Jaringan	1,00 Jaringan	1					
		Disperkimtan				4	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	1.162,00 Rumah Tangga	1.162,00	9.577.460.400,00	9.361.538.000,00		
		Disperkimtan				5	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	100,00 Orang	100	50.000.000,00	0		
		Disperkimtan				6	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	12,00 Kelompok	12	50.000.000,00	45.000.000,00		
							Cakupan luasan wilayah perumahan dan permukiman yang terlayani pengolahan air limbah domestik	100%						

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		UPTD PALD				7	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Dioperasikan dan Dipelihara	1,00 Unit	1	13.062.048.923,00	12.458.541.660,00		
								Cakupan luasan wilayah perumahan dan permukiman yang terlayani pengolahan air limbah domestik	17,02%					
								Cakupan Luasan Wilayah Perumahan dan Permukiman yang Terlayani Pengolahan Air Limbah Domestik	100%					
		Disperkimtan				8	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dioperasikan dan dipelihara	4,00 unit	4	280.000.000,00	221.020.306,00		
			Terwujudnya Kota Bekasi yang sehat, aman, ramah dan aksesibel didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas yang merata dan memenuhi standar	XII	Program Pengembangan Permukiman		Persentase Luasan Permukiman yang tertata	9,80%	100	54.498.842.257,00	51.850.934.674,00			
					A	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Luasan Permukiman yang tertata	100%	100	54.498.842.257,00	51.850.934.674,00		
		Disperkimtan				1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	217,00 Sistem Jaringan	217	53.805.442.257,00	51.370.168.284,00		
		Disperkimtan				2	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	96,00 Sistem Jaringan	96	303.400.000,00	208.312.500,00		
		Disperkimtan				3	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Diawasi dan Dikendalikan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	96,00 Sistem Jaringan	96	390.000.000,00	272.453.890,00		
			Terwujudnya Kota Bekasi yang sehat, aman, ramah dan aksesibel didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas yang merata dan	XIII	Program Penataan Bangunan Gedung		Persentase ketersediaan gedung kantor dalam kondisi baik dan berfungsi	93,62%	97,92	93.585.770.202,00	84.669.191.249,00			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
			memenuhi standar										
					A	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Presentase ketersediaan Gedung kantor dalam kondisi baik dan berfungsi	100%	97,92	93.585.770.202,00	84.669.191.249,00		
		Disperkimtan				1	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	33,00 Dokumen	33	2.615.750.000,00	2.537.472.603,00		
		Disperkimtan				2	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	24,00 Unit	23	90.970.020.202,00	82.131.718.646,00	ada 1 kegiatan yang tidak terlaksana yaitu Pembangunan Sarana Olahraga Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi	Bangunan eksisting dilakukan penghapusan aset dahulu. Kemudian diusulkan untuk dilaksanakan di TA selanjutnya



4. Urusan Perumahan Rakyat

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
1	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Disperkimtan	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%	98,35	20.515.984.674,00	17.346.984.143,00			
					A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	100	3.000.000,00	3.000.000,00		
		Disperkimtan				1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50,00 Laporan	50	3.000.000,00	3.000.000,00		
							Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00%					
					B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang menerima Gaji ASN	100%	100	17.277.757.000,00	14.312.163.497,00		
		Disperkimtan				1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.246,00 Orang/bulan	1.246,00	17.274.757.000,00	14.309.163.497,00		
							Jumlah Orang yang menerima Tunjangan ASN	100%					
		Disperkimtan				2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0,00 Laporan	0	3.000.000,00	3.000.000,00		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60,00 Laporan	60				
							Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,00%					
					C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	78,57	223.958.000,00	110.000.000,00		
		Disperkimtan				1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	28,00 Orang	22	223.958.000,00	110.000.000,00		
							Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%					
					D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	100	515.025.000,00	481.618.100,00		
		Disperkimtan				1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3,00 Paket	3	310.025.000,00	300.009.100,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Disperkimtan			2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3,00 Paket	3	100.000.000,00	99.609.000,00	
		Disperkimtan			3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24,00 Dokumen	24	20.000.000,00	20.000.000,00	
		Disperkimtan			4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48,00 Laporan	48	75.000.000,00	52.100.000,00	
		Disperkimtan			5	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12,00 Dokumen	12	10.000.000,00	9.900.000,00	
				E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100	1.000.000.000,00	985.580.000,00	
		Disperkimtan			1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	51,00 Unit	51	1.000.000.000,00	985.580.000,00	
							Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%				
				F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100	1.286.244.674,00	1.254.177.746,00	
		Disperkimtan			1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	576,00 Laporan	576	1.286.244.674,00	1.254.177.746,00	
							Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%				
				G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	100	210.000.000,00	200.444.800,00	
		Disperkimtan			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	37,00 Unit	37	150.000.000,00	144.184.800,00	
		Disperkimtan			2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34,00 Unit	34	60.000.000,00	56.260.000,00	
			Terwujudnya Kota Bekasi yang sehat, aman, ramah dan aksesibel didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas yang merata dan memenuhi standar	II	Program Pengembangan Perumahan		Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni	59,85%	100	2.496.965.655,00	2.361.521.318,00	
				A	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		Cakupan Layanan Rumah Layak huni yang terjangkau	100%	100	2.496.965.655,00	2.361.521.318,00	
		Disperkimtan			1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1,00 Laporan	1	100.000.000,00	64.535.400,00	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
							Rumah Susun						
		Disperkimtan			2		Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1,00 Dokumen	1	2.396.965.655,00	2.296.985.918,00	
			Terwujudnya Kota Bekasi yang sehat, aman, ramah dan aksesibel didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas yang merata dan memenuhi standar	III	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh		Persentase Luasan Permukiman kumuh dikawasan perkotaan	84,41%	100	7.645.000.000,00	2.275.105.100,00		
				A	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Luasan Permukiman Kumuh Dikawasan Perkotaan	100%	100	7.645.000.000,00	2.275.105.100,00		
		Disperkimtan			1		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang Diperbaiki	95,00 Unit Rumah	95	7.645.000.000,00	2.275.105.100,00	
			Terwujudnya Kota Bekasi yang sehat, aman, ramah dan aksesibel didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas yang merata dan memenuhi standar	IV	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)		Cakupan Yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	36,71%	100	82.222.151.576,00	76.829.797.997,00		
				A	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Jumlah Ketersediaan Lahan Pemakaman Umum	100%	100	82.222.151.576,00	76.829.797.997,00		
		Disperkimtan			1		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	17,00 Dokumen	17	2.100.000.000,00	1.939.037.374,00	
							Cakupan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	100%					
		Disperkimtan			2		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	710,00 Lokasi	710	80.122.151.576,00	74.890.760.623,00	

5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00%	100	73.246.314.655,00	68.177.373.904,00		
				A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	100%	100	4.000.000,00	3.989.000,00		
		Satuan Polisi Pamong Praja			1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,00 Dokumen	5	2.000.000,00	1.992.500,00		
						Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%					
		Satuan Polisi Pamong Praja			2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12,00 Laporan	12	2.000.000,00	1.996.500,00		
				B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100%	100	37.274.314.000,00	33.724.556.742,00		
		Satuan Polisi Pamong Praja			1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	231,00 Orang/bulan	231	37.272.314.000,00	33.722.559.742,00		
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun SPKD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	100%					
		Satuan Polisi Pamong Praja			2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,00 Laporan	3	2.000.000,00	1.997.000,00		
						Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%					
				C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Kepegawaian Daerah	100%	100	500.000.000,00	477.180.000,00		
		Satuan Polisi Pamong Praja			1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1,00 Paket	1	500.000.000,00	477.180.000,00		
				D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100	680.917.400,00	601.004.563,00		
		Satuan Polisi Pamong Praja			1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00 Paket	1	75.000.000,00	70.056.000,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Satuan Polisi Pamong Praja				2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4,00 Paket	4	316.996.400,00	296.852.663,00	
		Satuan Polisi Pamong Praja				3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1,00 Paket	1	83.921.000,00	66.777.900,00	
		Satuan Polisi Pamong Praja				4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1,00 Dokumen	1	30.000.000,00	30.000.000,00	
		Satuan Polisi Pamong Praja				5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12,00 Laporan	12	50.000.000,00	30.825.000,00	
		Satuan Polisi Pamong Praja				6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00 Laporan	12	125.000.000,00	106.493.000,00	
							Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran		100,00%				
				E			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100	32.804.792.855,00	31.546.717.617,00	
		Satuan Polisi Pamong Praja				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	803,00 Laporan	803	850.000.000,00	780.781.596,00	
		Satuan Polisi Pamong Praja				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	495,00 Orang	495	31.954.792.855,00	30.765.936.021,00	
							Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100,00%				
				F			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100%	100	1.982.290.400,00	1.823.925.982,00	
		Satuan Polisi Pamong Praja				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6,00 Unit	6	119.590.400,00	102.789.171,00	
		Satuan Polisi Pamong Praja				2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52,00 Unit	52	1.499.700.000,00	1.359.754.021,00	
		Satuan Polisi Pamong Praja				3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	112,00 Unit	112	163.000.000,00	162.999.570,00	
		Satuan Polisi Pamong Praja				4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1,00 Unit	1	200.000.000,00	198.383.220,00	
			Terwujudnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	II			Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban. ketenteraman. keindahan)	100,00%	100	19.570.784.250,00	16.730.483.530,00	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
				A	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada Rasio Linmas di Tiap Kelurahan Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	100%	100	18.965.819.250,00	16.161.856.980,00		
		Satuan Polisi Pamong Praja			1 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	116,00 Kasus	116	1.347.078.000,00	818.042.000,00		
		Satuan Polisi Pamong Praja			2 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	163,00 Kasus	163	542.804.400,00	398.758.000,00		
		Satuan Polisi Pamong Praja			3 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	24,00 Dokumen	24	146.430.000,00	144.198.000,00		
		Satuan Polisi Pamong Praja			4 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12,00 Dokumen	12	15.209.612.050,00	13.546.897.900,00		
		Satuan Polisi Pamong Praja			5 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	310,00 Orang	310	475.070.000,00	464.710.000,00		
		Satuan Polisi Pamong Praja			6 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	53,00 Dokumen	53	706.770.800,00	532.329.080,00		
		Satuan Polisi Pamong Praja			7 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	665,00 Unit	665	433.054.000,00	256.922.000,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Satuan Polisi Pamong Praja				8	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1,00 Laporan	1	105.000.000,00	0	
						B	<i>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</i>	<i>Prosentase penegakan perda dan perkada</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	<i>430.785.000,00</i>	<i>414.606.550,00</i>	
		Satuan Polisi Pamong Praja				1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	1,00 Laporan	1	147.350.000,00	145.740.000,00	
		Satuan Polisi Pamong Praja				2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12,00 Laporan	12	120.985.000,00	119.884.050,00	
		Satuan Polisi Pamong Praja				3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12,00 Laporan	12	162.450.000,00	148.982.500,00	
						C	<i>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</i>	<i>Prosentase pembinaan PPNS Kabupaten/Kota</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	<i>174.180.000,00</i>	<i>154.020.000,00</i>	
		Satuan Polisi Pamong Praja				1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	2,00 Laporan	2	174.180.000,00	154.020.000,00	
2	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Dinas Pemadam Kebakaran	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	III	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%	99,21	51.269.857.105,00	27.825.381.297,00	
						A	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	<i>6.000.000,00</i>	<i>6.000.000,00</i>	
		Dinas Pemadam Kebakaran				1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6,00 Laporan	6	6.000.000,00	6.000.000,00	
						B	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan</i>	<i>100%</i>	<i>99,5</i>	<i>40.613.567.000,00</i>	<i>20.002.547.288,00</i>	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		Dinas Pemadam Kebakaran				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.872,00 Orang/bulan	3.833,00	40.610.567.000,00	19.999.547.288,00	secara teknis tercapai 100% karena semua aparatur menerima gaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun dikarenakan penentuan target output yang lebih besar daripada jumlah aparatur yang ada saat ini sehingga pada perhitungannya tidak mencapai target. Sedangkan banyaknya anggaran yang tidak diserap merupakan anggaran untuk gaji dan tunjangan PPPK selama 9 bulan.	Telah dilakukan koordinasi dengan pihak BPKAD dan Bapelitbangda melalui rapat TAPD karena penetapan pagu gaji PPPK dialokasikan untuk satu tahun anggaran 2023 yang berasal dari DAU
		Dinas Pemadam Kebakaran				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,00 Laporan	4	3.000.000,00	3.000.000,00		
					C	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100	1.009.644.000,00	887.540.415,00		
		Dinas Pemadam Kebakaran				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14,00 Paket	14	25.000.000,00	24.813.500,00		
									100%					
		Dinas Pemadam Kebakaran				2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	92,00 Paket	92	499.644.000,00	466.558.515,00		
		Dinas Pemadam Kebakaran				3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3,00 Paket	3	30.000.000,00	27.716.000,00		
		Dinas Pemadam Kebakaran				4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	16,00 Dokumen	16	25.000.000,00	24.235.000,00		
		Dinas Pemadam Kebakaran				5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4,00 Laporan	4	180.000.000,00	176.352.900,00		
		Dinas Pemadam Kebakaran				6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1,00 Dokumen	1	250.000.000,00	167.864.500,00		
								Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%					
					D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100	621.748.000,00	600.870.000,00		
		Dinas Pemadam Kebakaran				1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	21,00 Unit	21	110.561.000,00	105.840.000,00		
		Dinas Pemadam Kebakaran				2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	58,00 Unit	58	511.187.000,00	495.030.000,00		
								Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
				E	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	100%	100	6.520.898.105,00	5.698.718.671,00		
		Dinas Pemadam Kebakaran			1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00 Laporan	12	997.000.000,00	412.761.434,00		
		Dinas Pemadam Kebakaran			2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00 Laporan	12	5.523.898.105,00	5.285.957.237,00		
						<i>Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	100,00%					
				F	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	100%	96,87	2.498.000.000,00	629.704.923,00		
		Dinas Pemadam Kebakaran			1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21,00 Unit	21	350.000.000,00	313.776.100,00		
		Dinas Pemadam Kebakaran			2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33,00 Unit	33	99.000.000,00	2.556.000,00		
		Dinas Pemadam Kebakaran			3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	115,00 Unit	115	80.000.000,00	80.000.000,00		
		Dinas Pemadam Kebakaran			4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8,00 Unit	7	1.969.000.000,00	233.372.823,00	penataan ruang tidak dilaksanakan karena tidak cukup waktu, dan akan dilaksanakan pada tahun 2024	Telah berkoordinasi dengan BPKAD untuk penataan dan pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya dialihkan bagian anggaran Disperkintan tahun 2023 sebesar Rp 1.712.000.000
			Terwujudnya upaya dan kesiapsiagaan dalam mengurangi risiko bencana	IV	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase layanan respon cepat (respon time) penanggulangan kejadian kebakaran	80,00%	86,06	36.703.880.630,00	34.673.342.979,00		
				A	<i>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Layanan Respon Cepat (Response Time) Penanggulangan Kejadian Kebakaran</i>	100%	89,72	35.096.892.630,00	33.324.707.393,00		
		Dinas Pemadam Kebakaran			1 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1,00 Dokumen	1	99.000.000,00	58.100.000,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		Dinas Pemadam Kebakaran				2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12,00 Laporan	12	29.522.719.630,00	29.049.726.676,00		
		Dinas Pemadam Kebakaran				3	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	2,00 Dokumen	2	2.749.181.000,00	2.069.463.000,00		
		Dinas Pemadam Kebakaran				4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	107,00 Unit	41	1.240.312.000,00	663.723.717,00	ada beberapa produk yang belum memiliki nilai TKDN	Telah berkoordinasi dan konsultasi dengan ITKO, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa serta Kementerian Perindustrian
		Dinas Pemadam Kebakaran				5	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	95,00 Orang	95	1.435.680.000,00	1.435.680.000,00		
		Dinas Pemadam Kebakaran				6	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahun	56,00 Desa/Kelurahan	56	50.000.000,00	48.014.000,00		
								Persentase layanan pemeriksaan dan pengujian alat proteksi kebakaran	45,00%					
					B		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100%	100	54.832.000,00	28.457.586,00		
		Dinas Pemadam Kebakaran				1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkunga n yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	600,00 Dokumen	600	49.372.000,00	23.132.836,00		
		Dinas Pemadam Kebakaran				2	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkunga n yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	15,00 Dokumen	15	5.460.000,00	5.324.750,00		
								Persentase layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran (BALAKR)	70,00%					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
				C	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Meningkatkan Layanan Pemberdayaan Masyarakat / Relawan Kebakaran	100%	100	349.715.000,00	342.428.000,00		
		Dinas Pemadam Kebakaran			1 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	56,00 Desa/Kelurahan	56	250.000.000,00	246.782.000,00		
		Dinas Pemadam Kebakaran			2 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprasi Damkar	2,00 Dokumen	2	99.715.000,00	95.646.000,00		
						Persentase Layanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran serta non kebakaran	100,00%					
				D	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Meningkatkan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran serta Non Kebakaran	100%	8,33	1.202.441.000,00	977.750.000,00		
		Dinas Pemadam Kebakaran			1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	36,00 Unit	3	1.202.441.000,00	977.750.000,00	pengadaan mobil dan 2 set baju anti insect sudah selesai dilaksanakan. pengadaan alat-alat rescue lainnya tidak dapat dilaksanakan karena produk tidak mempunyai nilai TKDN	Telah berkoordinasi dan konsultasi dengan ITKO, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa serta Kementerian Perindustrian
3	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	BPBD	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	V	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%	100	4.681.669.195,00	4.223.230.844,00		
				A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100	4.000.000,00	4.000.000,00		
		BPBD			1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19,00 Laporan	19	4.000.000,00	4.000.000,00		
						Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00%					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
				B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100	3.038.491.000,00	2.751.360.832,00		
		BPBD			1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	424,00 Orang/bulan	424	3.036.491.000,00	2.749.360.832,00		
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%					
		BPBD			2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	24,00 Laporan	24	2.000.000,00	2.000.000,00		
						Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%					
				C	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Komponen yang tersedia	100%	100	319.789.250,00	282.565.915,00		
		BPBD			1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3,00 Paket	3	232.239.050,00	224.279.200,00		
		BPBD			2 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1,00 Paket	1	32.550.000,00	23.437.000,00		
		BPBD			3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12,00 Dokumen	12	25.000.000,00	5.830.000,00	Untuk fisik sudah terealisasi namun penyerapan rendah hanya 23,32% karena keterlambatan pihak penyedia	Untuk tahun berikut akan dilakukan kerjasama dengan penyedia bahan bacaan yang sudah di tetapkan oleh ppk dan pptk serta PA
		BPBD			4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7,00 Laporan	7	25.000.000,00	24.499.915,00		
		BPBD			5 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.600,00 Dokumen	1.600,00	5.000.200,00	4.519.800,00		
						Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%					
				D	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	100	1.143.560.945,00	1.031.412.397,00		
		BPBD			1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00 Laporan	12	50.362.500,00	6.016.500,00	untuk sub.kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ada beberapa yang tidak bisa serap dalam pelaksanaan kegiatan	akan dilakukan koordinasi baik dengan pemangku kepentingan dan staff perencanaan dalam pembuatan RKA/uraian Belanja pada tahun tahun berikutnya
		BPBD			2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00 Laporan	12	1.093.198.445,00	1.025.395.897,00		
						Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
				E	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpeliharaa	100%	100	175.828.000,00	153.891.700,00		
		BPBD			1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2,00 Unit	2	50.000.000,00	48.838.900,00		
		BPBD			2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8,00 Unit	8	80.000.000,00	70.345.300,00		
		BPBD			3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6,00 Unit	6	45.828.000,00	34.707.500,00		
			Terwujudnya upaya dan kesiapsiagaan dalam mengurangi risiko bencana	VI	Program Penanggulangan Bencana	Presentase warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100,00%	100	5.698.812.861,00	5.408.424.226,00		
				A	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana)	100%	100	80.160.000,00	79.165.200,00		
		BPBD			1 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Ting	112,00 Orang	112	80.160.000,00	79.165.200,00		
						persentase warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100,00%					
				B	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	100%	100	5.307.349.861,00	5.025.507.606,00		
		BPBD			1 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	120,00 Orang	120	56.050.000,00	55.487.900,00		
		BPBD			2 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12,00 Dokumen	12	4.961.941.861,00	4.687.681.606,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		BPBD				3	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC Penanggulangan Bencana Yang Dilatih Dasar Manajemen Bencana (DMB)	70,00 Orang	70	75.000.000,00	73.650.000,00		
		BPBD				4	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	650,00 Orang	650	100.000.000,00	97.991.500,00		
		BPBD				5	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	1,00 Dokumen	1	52.868.000,00	51.749.800,00	untuk dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang sudah Dilegalisasikan terealisasi sebanyak 1 dokumen	
		BPBD				6	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	80,00 Keluarga	80	61.490.000,00	58.946.800,00		
								persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100,00%					
					C	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			100%	100	257.127.000,00	250.139.800,00		
		BPBD				1	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	121,00 Orang	121	25.000.000,00	24.700.000,00		
		BPBD				2	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	250,00 Orang	250	232.127.000,00	225.439.800,00		
								Persentase program penanggulangan bencana dalam dokumen perencanaan	100,00%					
					D	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			100%	100	54.176.000,00	53.611.620,00		
		BPBD				1	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	4,00 Dokumen	4	54.176.000,00	53.611.620,00		

6. Urusan Sosial

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	Sosial	Dinas Sosial	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%	100	12.713.646.335,00	11.488.039.623,00		
				A Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	100	3.000.000,00	3.000.000,00		
		Dinas Sosial		1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,00 Laporan	4	3.000.000,00	3.000.000,00		
				B Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100	9.047.923.000,00	8.027.101.592,00		
		Dinas Sosial		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.036,00 Orang/bulan	1.036,00	9.044.923.000,00	8.024.101.592,00		
					Jumlah Laporan Keuangan Tahunan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	100%					
		Dinas Sosial		2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,00 Laporan	3	3.000.000,00	3.000.000,00		
				C Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	100	387.755.000,00	355.398.700,00		
		Dinas Sosial		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00 Paket	1	20.000.000,00	18.591.600,00		
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%					
		Dinas Sosial		2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7,00 Paket	7	177.045.000,00	158.152.400,00		
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100%					
		Dinas Sosial		3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1,00 Paket	1	44.300.000,00	43.939.000,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan yang Disediakan	100%					
		Dinas Sosial				4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.964,00 Eksemplar	1.964,00	20.000.000,00	19.800.000,00		
							Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	100%					
		Dinas Sosial				5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	67,00 Laporan	67	35.000.000,00	30.740.000,00		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%					
		Dinas Sosial				6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25,00 Laporan	25	67.000.000,00	65.688.000,00		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	100%					
		Dinas Sosial				7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2,00 Dokumen	2	24.410.000,00	18.487.700,00		
							Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%					
					D		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100	393.895.000,00	377.293.100,00		
		Dinas Sosial				1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40,00 Unit	40	393.895.000,00	377.293.100,00		
							Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,00%					
					E		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100	2.441.073.335,00	2.329.211.731,00		
		Dinas Sosial				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24,00 Laporan	24	180.000.000,00	166.646.752,00		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%					
		Dinas Sosial				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12,00 Laporan	12	2.261.073.335,00	2.162.564.979,00		
							Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
					F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	100	440.000.000,00	396.034.500,00	
		Dinas Sosial			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6,00 Unit	6	120.000.000,00	98.894.100,00	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%				
		Dinas Sosial			2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8,00 Unit	8	75.000.000,00	57.399.400,00	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%				
		Dinas Sosial			3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85,00 Unit	85	45.000.000,00	40.841.000,00	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%				
		Dinas Sosial			4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1,00 Paket	1	200.000.000,00	198.900.000,00	
			Meningkatnya kesejahteraan sosial dan keluarga	II	Program Pemberdayaan Sosial		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) ditangani oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dikelola oleh masyarakat	9,00%	100	3.266.735.000,00	2.816.187.400,00	
					A	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100	3.266.735.000,00	2.816.187.400,00	
		Dinas Sosial			1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	250,00 Orang	250	600.046.000,00	530.400.000,00	
							Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	100%				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
									TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		Dinas Sosial				2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12,00 Orang	12	65.800.000,00	65.517.500,00			
								Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100%						
		Dinas Sosial				3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	173,00 Keluarga	173	133.650.000,00	129.355.000,00			
								Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	100%						
		Dinas Sosial				4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5,00 Lembaga (PMI, Veteran, LLI, Karang Taruna dan LKS)	5	2.467.239.000,00	2.090.914.900,00			
								Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	250,00 Orang	250					
								Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12,00 Orang	12					
			Meningkatnya kesejahteraan sosial dan keluarga	III	Program Rehabilitasi Sosial			Persentase penyandang disabilitas telantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti	100,00%	100	7.650.364.300,00	6.627.934.073,00			
					A	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100	6.898.664.300,00	6.050.188.475,00		
		Dinas Sosial				1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	2.000,00 Orang	2.000,00	2.831.948.300,00	2.664.214.100,00			
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota	100%						

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		Dinas Sosial				2	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	141,00 Orang	141	1.000.000.000,00	749.082.000,00		
								Jumlah Pesert Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100%					
		Dinas Sosial				3	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	400,00 Orang	400	450.000.000,00	430.195.700,00		
								Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100%					
		Dinas Sosial				4	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	400,00 Orang	400	1.972.716.000,00	1.785.173.575,00		
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%					
		Dinas Sosial				5	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	150,00 Orang	150	164.000.000,00	0		
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%					
		Dinas Sosial				6	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	176,00 Orang	176	430.000.000,00	386.567.100,00		
								Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%					
		Dinas Sosial				7	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	150,00 Orang	150	50.000.000,00	34.956.000,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
				B	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100	751.700.000,00	577.745.598,00		
		Dinas Sosial		1	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	400,00 Orang	400	300.000.000,00	276.996.500,00		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100%					
		Dinas Sosial		2	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	400,00 Orang	400	451.700.000,00	300.749.098,00		
			Menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka	IV	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Prosentase Peningkatan Pendayagunaan data dan informasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	100,00%	100	4.628.963.084,00	3.626.936.260,00		
				A	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	100%	100	4.628.963.084,00	3.626.936.260,00		
		Dinas Sosial		1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	957.844,00 Orang	957.844,00	939.036.000,00	402.174.180,00		
						Jumlah Keluarga yang Mendaptkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	100%					
		Dinas Sosial		2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	38.661,00 Keluarga	38.661,00	3.131.000.084,00	2.708.012.080,00		
		Dinas Sosial		3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2.073,00 keluarga	2.073,00	558.927.000,00	516.750.000,00		
			Meningkatnya kesejahteraan sosial dan keluarga	V	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial	100,00%	92,29	3.211.657.000,00	2.324.516.984,00		
				A	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	88,44	2.760.748.000,00	1.897.668.569,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		Dinas Sosial				1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perumahan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	2.232,00 Orang	1.200,00	1.997.098.000,00	1.241.727.684,00		
		Dinas Sosial				2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	200,00 Orang	200	263.650.000,00	241.243.483,00		
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%					
		Dinas Sosial				3	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	300,00 Orang	300	300.000.000,00	236.113.350,00		
								Jumlah Korban Benca yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	100%					
		Dinas Sosial				4	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	400,00 Orang	400	200.000.000,00	178.584.052,00		
					B	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100	450.909.000,00	426.848.415,00		
		Dinas Sosial				1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2,00 Kampung	2	300.000.000,00	289.374.860,00		
								Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100%					
		Dinas Sosial				2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	49,00 Orang	49	150.909.000,00	137.473.555,00		
			Terwujudnya Daya Dukung Lingkungan Kota yang Berkelanjutan	VI	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan			Prosentase Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100,00%	100	548.525.000,00	532.617.501,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
				A	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	100%	100	548.525.000,00	532.617.501,00		
		Dinas Sosial			1 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	246,00 Makam	246	548.525.000,00	532.617.501,00		

3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
1. Urusan Tenaga Kerja

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00%	100	14.708.560.935,00	13.184.694.190,00		
				A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Ketersediaan Dokumen	100%	100	3.000.000,00	3.000.000,00		
		Dinas Tenaga Kerja			1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,00 Laporan	5	3.000.000,00	3.000.000,00		
				B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100	11.228.405.000,00	9.882.016.497,00		
		Dinas Tenaga Kerja			1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	882,00 Orang/bulan	882	11.225.405.000,00	9.879.016.497,00		
		Dinas Tenaga Kerja			2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5,00 Laporan	5	3.000.000,00	3.000.000,00		
						Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,00%					
				C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100	20.000.000,00	19.750.000,00		
		Dinas Tenaga Kerja			1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3,00 Orang	3	20.000.000,00	19.750.000,00		
						Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%					
				D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100	391.925.000,00	383.008.980,00		
		Dinas Tenaga Kerja			1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	319,00 Paket	319	10.000.000,00	10.000.000,00		
		Dinas Tenaga Kerja			2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14.526,00 Paket	14.526,00	324.925.000,00	323.013.000,00		
		Dinas Tenaga Kerja			3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	28.265,00 Paket	28.265,00	35.000.000,00	34.999.800,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Dinas Tenaga Kerja			4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,00 Laporan	1	22.000.000,00	14.996.180,00	
						Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran		100,00%				
				E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100	2.478.830.935,00	2.362.666.360,00	
		Dinas Tenaga Kerja			1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000,00 Laporan	1.000,00	15.000.000,00	8.610.000,00	
		Dinas Tenaga Kerja			2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48,00 Laporan	48	338.400.000,00	249.616.681,00	
		Dinas Tenaga Kerja			3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	416,00 Laporan	416	2.125.430.935,00	2.104.439.679,00	
						Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100,00%				
				F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara		100%	100	586.400.000,00	534.252.353,00	
		Dinas Tenaga Kerja			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9,00 Unit	9	135.400.000,00	127.801.053,00	
		Dinas Tenaga Kerja			2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3,00 Unit	3	26.000.000,00	21.624.800,00	
		Dinas Tenaga Kerja			3	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10,00 Unit	10	25.000.000,00	25.000.000,00	
		Dinas Tenaga Kerja			4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70,00 Unit	70	50.000.000,00	49.995.000,00	
		Dinas Tenaga Kerja			5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2,00 Unit	2	350.000.000,00	309.831.500,00	
				II	Program Perencanaan Tenaga Kerja			0	100	200.000.000,00	139.400.700,00	
				A	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase penyusunan rencana tenaga kerja (RTK)		100%	100	200.000.000,00	139.400.700,00	
		Dinas Tenaga Kerja			1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1,00 dokumen	1	200.000.000,00	139.400.700,00	
			Menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka	III	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan kompetensi bagi pencari kerja		20,00%	100	1.918.744.524,00	1.898.305.100,00	
				A	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi		100%	100	1.659.239.524,00	1.643.838.100,00	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Dinas Tenaga Kerja				1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	501,00 orang	501	1.659.239.524,00	1.643.838.100,00		
								Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja	100,00%					
					B	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja		Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	100%	100	19.455.000,00	18.082.000,00		
		Dinas Tenaga Kerja				1	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah sumber daya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi	20,00 Rekomendasi	20	19.455.000,00	18.082.000,00		
					C	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	100%	100	66.450.000,00	64.275.000,00		
		Dinas Tenaga Kerja				1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	0,00 Perusahaan	0	66.450.000,00	64.275.000,00		
								Jumlah perusahaan kecil yang mendapatkan konsultasi peningkatan produktivitas	50,00 Perusahaan kecil	50				
					D	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	100%	100	173.600.000,00	172.110.000,00		
		Dinas Tenaga Kerja				1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	2,00 Dokumen	2	173.600.000,00	172.110.000,00		
			Menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka	IV	Program Penempatan Tenaga Kerja			Persentase jumlah pencari kerja yang ditempatkan	61,78%	100	258.295.000,00	202.527.050,00		
					A	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase jumlah pencari kerja yang ditempatkan	100%	100	109.020.000,00	108.001.050,00		
		Dinas Tenaga Kerja				1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	80,00 Orang	80	109.020.000,00	108.001.050,00		
					B	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Persentase jumlah pencari kerja yang ditempatkan	100%	100	97.385.000,00	43.708.000,00		
		Dinas Tenaga Kerja				1	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	300,00 orang	300	97.385.000,00	43.708.000,00		
					C	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase jumlah pencari kerja yang ditempatkan	100%	100	51.890.000,00	50.818.000,00		
		Dinas Tenaga Kerja				1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	90,00 Orang	90	51.890.000,00	50.818.000,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
			Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	V	Program Hubungan Industrial	Persentase penanganan sengketa pengusaha dengan pekerja	100,00%	100	520.513.000,00	443.133.000,00		
				A	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab/Kota	100%	100	520.513.000,00	443.133.000,00		
		Dinas Tenaga Kerja			1 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	1,00 Perkara	1	322.019.000,00	288.025.000,00		
		Dinas Tenaga Kerja			2 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	100,00 Perkara	100	79.079.000,00	54.337.000,00		
		Dinas Tenaga Kerja			3 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1,00 Lembaga	1	119.415.000,00	100.771.000,00		

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN		
									TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI				
1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP3A	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00%	94,13	8.359.235.815,00	6.806.647.094,00			
					A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Terpenuhinya Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100	4.000.000,00	3.483.800,00		
		DP3A				1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,00 Laporan	5	4.000.000,00	3.483.800,00	Penyusunan laporan akhir tahun/TW 4	Efisiensi anggaran untuk fotokopi/penggandaan dokumen	
									Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%						
					B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100	6.742.811.000,00	5.321.331.542,00		
		DP3A				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	384,00 Orang/Bulan	384	6.740.811.000,00	5.319.567.542,00			
									Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%						
		DP3A				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5,00 Laporan	5	2.000.000,00	1.764.000,00	Penyusunan laporan akhir tahun	Efisiensi anggaran untuk fotokopi/penggandaan dokumen	
									Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,00%						
					C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100	50.000.000,00	49.934.000,00		
		DP3A				1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11,00 Orang	11	50.000.000,00	49.934.000,00			
									Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%						
					D	Administrasi Umum Perangkat Daerah				Terpenuhinya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	84,33	377.750.000,00	313.709.553,00		
		DP3A				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	5,00 Paket	5	12.000.000,00	11.518.000,00			
									Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0,00 Paket	0					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		DP3A				2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	38,00 Paket	38	85.750.000,00	81.458.000,00	
		DP3A				3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2,00 Paket	2	70.000.000,00	60.251.630,00	
		DP3A				4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4,00 Dokumen	4	40.000.000,00	20.478.000,00	
		DP3A				5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30,00 Laporan	16	20.000.000,00	19.341.000,00	
		DP3A				6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150,00 Laporan	79	150.000.000,00	120.662.923,00	
							Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,00%					
				E			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan sarana prasarana penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	100	50.000.000,00	49.875.000,00	
		DP3A				1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5,00 Unit	5	50.000.000,00	49.875.000,00	
							Optimalisasi Disiplin Aparatur	100,00%					
				F			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100	847.674.815,00	803.494.659,00	
		DP3A				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8,00 Laporan	8	40.000.000,00	13.120.492,00	
		DP3A				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14,00 Laporan	14	807.674.815,00	790.374.167,00	
							Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%					
				G			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100	287.000.000,00	264.818.540,00	
		DP3A				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60,00 Unit	60	150.000.000,00	149.114.470,00	
		DP3A				2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	156,00 Unit	156	107.000.000,00	85.704.070,00	
		DP3A				3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	64,00 Unit	64	30.000.000,00	30.000.000,00	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
			Meningkatnya kesejahteraan sosial dan keluarga	II	Program Pengarus Utama Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	49,90%	100	5.487.000.000,00	3.896.157.434,00		
				A	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Terselenggaranya rangkaian kegiatan pendukung APE	100%	100	150.000.000,00	147.367.500,00		
		DP3A			1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	44,00 Perangkat Daerah	44	150.000.000,00	147.367.500,00		
				B	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan partisipasi kegiatan pemberdayaan perempuan	100%	100	387.000.000,00	376.752.500,00		
		DP3A			1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	40,00 Organisasi	40	387.000.000,00	376.752.500,00		
				C	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		100%	100	4.950.000.000,00	3.372.037.434,00		
		DP3A			1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan	4,00 lembaga	4	3.850.000.000,00	2.302.108.400,00	Realisasi keuangan tidak tercapai karena kegiatan sosialisasi kader posyandu dan rapat pokjanal posyandu tidak diperkenankan dilaksanakan berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kota Bekasi Nomor : 900/7616/Bappelitbangda.AP4EP menindaklanjuti hasil verifikasi usulan penggunaan insentif fiskal tahun 2023 oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan	Pembinaan kader posyandu untuk peningkatan kinerjanya



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		DP3A			2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	100,00 Orang	100	850.000.000,00	824.617.034,00		
		DP3A			3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	6,00 Dokumen	6	250.000.000,00	245.312.000,00		
			Meningkatnya kesejahteraan sosial dan keluarga	III	Program Perlindungan Perempuan		Presentase Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	100,00%	100	605.000.000,00	555.695.280,00		
					A	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terselenggaranya kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	100%	100	25.000.000,00	22.906.000,00		
		DP3A			1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100,00 Perangkat Daerah	100	25.000.000,00	22.906.000,00		
					B	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan layanan kasus kekerasan terhadap perempuan	100%	100	380.000.000,00	355.459.250,00		
		DP3A			1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	85,00 Orang	85	380.000.000,00	355.459.250,00		
					C	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perlindungan perempuan	100%	100	200.000.000,00	177.330.030,00		
		DP3A			1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	4,00 Dokumen	4	200.000.000,00	177.330.030,00		
			Meningkatnya kesejahteraan sosial dan keluarga	IV	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)		Presentase Peningkatan Pemenuhan 5 Klaster KLA	76,00%	100	1.771.868.000,00	1.705.980.553,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
				A	<i>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase terseleenggaranya kegiatan pendukung KLA</i>	100%	100	1.071.868.000,00	1.026.819.128,00		
		DP3A		1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	290,00 Organisasi	290	1.071.868.000,00	1.026.819.128,00		
				B	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase pengadaan sarana prasarana pemenuhan hak anak</i>	100%	100	700.000.000,00	679.161.425,00		
		DP3A		1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2.364,00 Orang	2.364,00	540.000.000,00	523.485.000,00		
		DP3A		2	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	8,00 Dokumen	8	160.000.000,00	155.676.425,00		
			Meningkatnya kesejahteraan sosial dan keluarga	V	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak	100,00%	100	1.419.900.000,00	1.350.896.796,00		
				A	<i>Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase penyelenggaraan kegiatan perlindungan anak</i>	100%	100	254.400.000,00	249.062.500,00		
		DP3A		1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6,00 Perangkat Daerah	6	254.400.000,00	249.062.500,00		
				B	<i>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan</i>	<i>Persentase pemenuhan layanan perlindungan anak</i>	100%	100	765.500.000,00	701.834.296,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		DP3A				1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	405,00 Orang	405	565.500.000,00	505.728.625,00		
		DP3A				2	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2,00 Dokumen	2	200.000.000,00	196.105.671,00		
					C	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase operasional lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	100%	100	400.000.000,00	400.000.000,00		
		DP3A				1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	12,00 Dokumen	12	400.000.000,00	400.000.000,00		

3. Urusan Pangan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
1	PANGAN	DKPPP	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00%	100	17.093.150.302,00	13.826.992.264,00			
					A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100	3.000.000,00	2.961.100,00		
		DKPPP				1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11,00 Laporan	11	3.000.000,00	2.961.100,00		
					B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah	100%	100	13.640.204.000,00	10.601.046.941,00		
		DKPPP				1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.484,00 Orang/bulan	1.484,00	13.637.204.000,00	10.598.094.941,00		
		DKPPP				2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,00 Laporan	4	3.000.000,00	2.952.000,00		
					C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100	20.000.000,00	18.623.000,00		
		DKPPP				1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4,00 Orang	4	20.000.000,00	18.623.000,00		
							Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,00%					
					D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100	420.314.000,00	390.544.705,00		
		DKPPP				1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00 Paket	1	25.000.000,00	24.103.000,00		
		DKPPP				2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6,00 Paket	6	264.020.000,00	236.296.500,00		
		DKPPP				3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1,00 Paket	1	28.210.000,00	27.543.330,00		
		DKPPP				4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5,00 Dokumen	5	20.000.000,00	19.732.000,00		
		DKPPP				5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	70,00 Laporan	70	78.084.000,00	77.919.875,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
							SKPD						
		DKPPP			6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100,00 Dokumen	100	5.000.000,00	4.950.000,00		
							Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%					
				E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100%	100	2.363.232.302,00	2.193.876.918,00		
		DKPPP			1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60,00 Laporan	60	200.000.000,00	81.784.074,00		
		DKPPP			2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00 Laporan	12	2.163.232.302,00	2.112.092.844,00		
							Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%					
				F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100%	100	646.400.000,00	619.939.600,00		
		DKPPP			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	17,00 Unit	17	246.300.000,00	235.086.000,00		
		DKPPP			2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16,00 Unit	16	210.100.000,00	195.331.600,00		
		DKPPP			3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75,00 Unit	75	40.000.000,00	39.920.000,00		
		DKPPP			4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5,00 Unit	5	150.000.000,00	149.602.000,00		
			Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	II	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat		Stabilisasi harga pangan	5,00%	100	521.240.000,00	445.963.000,00		
				A	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	100%	100	133.670.000,00	133.670.000,00		
		DKPPP			1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1,00 Laporan	1	133.670.000,00	133.670.000,00		
							Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)	87,97%					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
				B	<i>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</i>	<i>Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i>	100%	100	387.570.000,00	312.293.000,00		
		DKPPP		1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1,00 Laporan	1	387.570.000,00	312.293.000,00		
			Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	III	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan kerawanan pangan	84,00%	100	1.240.000.000,00	1.052.705.600,00		
				A	<i>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</i>		100%	0	0	0		
		DKPPP		1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan		0	0	0	0		
				B	<i>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase Penanganan Kerawanan Pangan Daerah</i>	100%	100	1.240.000.000,00	1.052.705.600,00		
		DKPPP		1	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1,00 Dokumen	1	1.240.000.000,00	1.052.705.600,00		
			Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	IV	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	85,60%	100	379.045.000,00	349.972.000,00		
				A	<i>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota</i>	100%	100	379.045.000,00	349.972.000,00		
		DKPPP		1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1,00 Dokumen	1	379.045.000,00	349.972.000,00		
2	Kelautan dan Perikanan						100%	100	818.326.000,00	694.554.400,00		
			Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	V	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi ikan konsumsi	1.946,42 Ton	100	540.177.000,00	432.823.400,00		
				A	<i>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</i>	<i>Persentase Pembudidaya Ikan Kecil yang diberdayakan</i>	100%	100	540.177.000,00	432.823.400,00		
		DKPPP		1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	8,00 Kelompok	8	246.871.000,00	225.192.400,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		DKPPP			2	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5,00 Kelompok	5	293.306.000,00	207.631.000,00		
				VI	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan			0	100	278.149.000,00	261.731.000,00		
					A	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Pembinaan Mutu dan keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	100%	100	34.420.000,00	33.610.000,00		
		DKPPP			1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	50,00 Pelaku Usaha	50	34.420.000,00	33.610.000,00		
					B	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100	243.729.000,00	228.121.000,00		
		DKPPP			1	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	50,00 Pelaku Usaha	50	243.729.000,00	228.121.000,00		
3	Pertanian							100%	86,36	3.436.451.947,00	1.831.953.000,00		
			Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	VII	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian		Produksi komoditas pertanian	32.442,17 Ton	91,67	2.572.912.447,00	1.008.525.500,00		
					A	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Penggunaan Sarana Pertanian Yang Terawasi	100%	75	1.091.319.100,00	174.575.000,00		
		DKPPP			1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1,00 Laporan	1	130.000.000,00	80.000.000,00		
		DKPPP			2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2,00 Laporan	1	961.319.100,00	94.575.000,00		
							Jumlah produksi peternakan	10.877,00 Ton					
					B	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Yang Terkelola	100%	100	1.234.823.347,00	744.809.500,00		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		DKPPP			1	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1,00 Dokumen	1	827.373.500,00	744.809.500,00	
		DKPPP			2	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1,00 Dokumen	1	407.449.847,00	0	
				C	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	100%	100	147.320.000,00	57.132.000,00	
		DKPPP			1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1,00 Laporan	1	147.320.000,00	57.132.000,00	
				D	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer		Jumlah Pemeriksaan mutu khasiat dan keamanan obat hewan yang beredar	100%	100	99.450.000,00	32.009.000,00	
		DKPPP			1	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	1,00 Laporan	1	99.450.000,00	32.009.000,00	
			Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	VIII	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		Terkendalinya Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis	0,00 Kasus	100	863.539.500,00	823.427.500,00	
				A	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah wilayah pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	100%	100	245.446.500,00	239.775.500,00	
		DKPPP			1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1,00 Laporan	1	245.446.500,00	239.775.500,00	
				B	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100	110.000.000,00	92.746.000,00	
		DKPPP			1	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1,00 Laporan	1	110.000.000,00	92.746.000,00	
							Unit Usaha Peternakan Kesehatan dan Produk hewan yang bersertifikat teknis	70,00 unit				
				C	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Persentase Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner yang Diterapkan dan Terawasi	100%	100	508.093.000,00	490.906.000,00	
		DKPPP			1	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1,00 Laporan	1	133.093.000,00	120.598.000,00	
		DKPPP				Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Pemenuhan Persyaratan Teknis yang Ditetapkan	1,00 laporan	1	375.000.000,00	370.308.000,00	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
				IX	Program Penyuluhan Pertanian			0	0	0	0		
					A	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Produksi Komoditas Pertanian	100%	0	0	0		
		DKPPP				1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	100,00%	0	0	0		



4. Urusan Pertanahan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
I	Pertanahan	Disperkimtan	Terwujudnya Kota Bekasi yang sehat, aman, ramah dan aksesibel didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas yang merata dan memenuhi standar	I	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Pemenuhan pengadaan tanah	81,00%	78,26	180.657.527.570,00	131.484.056.562,00		
				A	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Pengadaan Tanah	100%	78,26	180.657.527.570,00	131.484.056.562,00		
		Disperkimtan		I	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	23,00 Dokumen	18	180.657.527.570,00	131.484.056.562,00	Tidak terpenuhinya administrasi pelaksanaan pengadaan tanah maupun administrasi kepemilikan tanah, serta adanya penolakan nilai pembebasan lahan oleh warga yang terkena pembebasan lahan sehingga pembuatan dokumen tidak mencapai target	Persiapan lebih intens, koordinasi ditingkatkan untuk terpenuhinya administrasi kegiatan maupun administrasi kepemilikan tanah. Dan dilakukan upaya persuasif kepada subjek pembebasan



5. Urusan Lingkungan Hidup

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	Lingkungan Hidup	DLH	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	I		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%	100	65.088.922.224,00	58.372.029.537,00		
					A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100	24.000.000,00	22.800.500,00		
		DLH				1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,00 Laporan	4	24.000.000,00	22.800.500,00		
							Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00%					
		DLH			B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100	55.462.111.000,00	51.496.391.539,00		
		DLH				1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9.288,00 Orang/bulan	9.288,00	55.440.111.000,00	51.474.799.539,00		
							Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%					
		DLH				2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,00 Dokumen	4	22.000.000,00	21.592.000,00		
							Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,00%					
					C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100	25.000.000,00	8.000.000,00		
		DLH				1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3,00 Orang	3	25.000.000,00	8.000.000,00		
							Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%					
					D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100	637.271.800,00	601.784.580,00		
		DLH				1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00 Paket	1	20.000.000,00	15.379.000,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		DLH				2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4,00 Paket	4	445.113.000,00	416.149.800,00	
		DLH				3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1,00 Paket	1	40.158.800,00	40.158.800,00	
		DLH				4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12,00 Dokumen	12	25.000.000,00	25.000.000,00	
		DLH				5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5,00 Laporan	5	7.000.000,00	5.200.000,00	
		DLH				6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20,00 Laporan	20	100.000.000,00	99.896.980,00	
					E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100	426.418.000,00	410.680.000,00	
		DLH				1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	25,00 Unit	25	326.418.000,00	316.390.000,00	
		DLH				2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	384,00 Unit	384	100.000.000,00	94.290.000,00	
					F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100	6.491.022.424,00	4.434.299.168,00	
		DLH				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00 Laporan	12	3.052.982.000,00	1.091.729.302,00	
		DLH				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00 Laporan	12	3.438.040.424,00	3.342.569.866,00	
					G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100	2.023.099.000,00	1.398.073.750,00	
		DLH				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16,00 Unit	16	90.000.000,00	82.857.300,00	
		DLH				2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40,00 Unit	40	260.000.000,00	248.080.100,00	
		DLH				3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	148,00 Unit	148	40.000.000,00	40.000.000,00	
		DLH				4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3,00 Unit	3	1.633.099.000,00	1.027.136.350,00	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
			Terwujudnya Daya Dukung Lingkungan Kota yang Berkelanjutan	II	Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks kualitas udara	84,20 Nilai	100	14.626.547.462,00	9.264.542.682,00		
				A	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Presentase pencegahan pencemaran lingkungan	100%	100	3.069.131.880,00	2.036.824.060,00		
		DLH			1 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	1,00 Dokumen	1	3.069.131.880,00	2.036.824.060,00		
						Indeks kualitas air	3,00 Nilai					
				B	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	100%	100	2.723.940.000,00	2.531.594.055,00		
		DLH			1 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	7,00 Laporan	7	2.723.940.000,00	2.531.594.055,00		
				C	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	100%	100	8.833.475.582,00	4.696.124.567,00		
		DLH			1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	3,00 Dokumen	3	8.833.475.582,00	4.696.124.567,00		
						Jumlah Jaring Apung Sampah Yang Terpasang	4,00 Titik	4				
						Beroperasinya IPAL Bersama	2,00 Unit	2				
			Terwujudnya Daya Dukung Lingkungan Kota yang Berkelanjutan	III	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca	1,00 Laporan	100	3.495.434.510,00	3.422.410.093,00		
				A	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH yang dikelola Lingkup Kab/Kota 135,97 Ha	100%	100	3.495.434.510,00	3.422.410.093,00		
		DLH			1 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	135,90 Ha	135,9	3.495.434.510,00	3.422.410.093,00		
			Terwujudnya Daya Dukung Lingkungan Kota yang Berkelanjutan	IV	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Usaha Kegiatan yang Memiliki TPS Limbah B3	60,00%	100	34.855.000,00	34.567.000,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
					A	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan	100%	100	34.855.000,00	34.567.000,00		
		DLH				1 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	60,00 Laporan	60	34.855.000,00	34.567.000,00		
			Terwujudnya Daya Dukung Lingkungan Kota yang Berkelanjutan	V		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan. izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	60,00%	100	13.466.987.200,00	12.054.320.000,00		
					A	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan TPST Bantargebang, Monev Bantuan Langsung Tunai dan Pengujian Kualitas Lingkungan disekitar TPST Bantargebang dan TPA Sumurbatu	100%	100	13.466.987.200,00	12.054.320.000,00		
		DLH				1 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Monitoring dan evaluasi pengelolaan TPST Bantargebang, Monev Bantuan Langsung Tunai dan Pengujian Kualitas Lingkungan disekitar TPST Bantargebang dan TPA Sumurbatu	3,00 dokumen	3	13.466.987.200,00	12.054.320.000,00		
			Terwujudnya Daya Dukung Lingkungan Kota yang Berkelanjutan	VI		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase institusi/kelompok masyarakat/lingkungan yang peduli lingkungan	60,00%	100	459.532.000,00	397.952.500,00		
					A	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya LH yang dilaksanakan	100%	100	459.532.000,00	397.952.500,00		
		DLH				1 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2,00 Dokumen	2	208.704.000,00	148.037.500,00		
		DLH				2 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	4.050,00 Orang	4.050,00	250.828.000,00	249.915.000,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
			Terwujudnya Kota Bekasi yang sehat, aman, ramah dan aksesibel didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas yang merata dan memenuhi standar	VII	Program Pengelolaan Persampahan		Persentase Cakupan Area Pelayanan	100,00%	100,01	423.452.889.231,00	356.277.108.609,00			
					A	Pengelolaan Sampah	Operasional/TPA/TPS3R/SPA	100%	100,01	423.452.889.231,00	356.277.108.609,00			
		DLH				1	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	8,00 Dokumen	8	6.273.674.000,00	3.451.311.850,00	sesuai konsultasi dgn DLH Provinsi Jabar kegiatan tersebut harus dilengkapi dengan dokumendokumen pendukung	melakukan koordinasi dengan Disperkimtan, Distaru, Bappelitbangda, Dinas Damkar, Dinas DBMSDA sekaligus mengurus rekomendasi teknis sebagai syarat pengajuan dokumen lingkungan serta Melakukan koordinasi dengan DLH Provinsi Jabar dan mengajukan rekomendasi teknis dokumen lingkungan
		DLH				2	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	7,00 Laporan	7	7.572.377.290,00	6.792.673.722,00		
								Terbangunnya TPS3R dan Sarana Pendukungnya	1,00 Unit	1				
								Jumlah Pengurangan Sampah Residu Melalui TPS 3R	2,00 Lokasi	2				
								Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Sampah di TPS	1,00 Laporan	1				
								Terlaksananya Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi TPS3R	10,00 Kandang Magot dan Sarana Pendukungnya	10				
		DLH				3	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	384,71 Ton	385	118.437.596.133,00	111.769.131.858,00		
		DLH				4	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Penerima Bantuan Sosial/BLT	27.671,00 KK	27.671,00	183.136.085.200,00	151.560.611.984,00		
								Jumlah Penerima Iuran Jaminan Kematian	161.953,00 Jiwa	161.953,00				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		DLH				5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1.315,00 Unit	1.315,00	108.033.156.608,00	82.703.379.195,00		
			Terwujudnya Daya Dukung Lingkungan Kota yang Berkelanjutan	VIII	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)			Presentase Pemeliharaan Taman	78,65%	100	26.514.399.880,00	22.815.253.503,00		
					A	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		jumlah pembangunan taman KEHATI	100%	100	26.514.399.880,00	22.815.253.503,00		
		DBMSDA				1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	2,00 Dokumen	2	200.000.000,00	199.264.000,00		
		DBMSDA				2	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0,80 Ha	0,8	19.651.717.880,00	17.635.346.523,00		
		DBMSDA				3	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	51,00 Unit	51	6.662.682.000,00	4.980.642.980,00		

6. Urusan Administrasi Kependudukan Dan Capil

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
1	Administrasi Kependudukan dan Capil	Disdukcapil	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%	93,75	24.455.170.606,00	22.879.463.824,00		
					A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100	7.000.000,00	6.999.900,00		
		Disdukcapil				1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,00 Laporan	5	7.000.000,00	6.999.900,00		
							Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00%					
					B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keuangan Perangkat Daerah	100%	100	14.530.518.000,00	13.521.264.735,00		
		Disdukcapil				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.009,00 Orang/bulan	2.009,00	14.523.518.000,00	13.514.264.735,00		
		Disdukcapil				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5,00 Laporan	5	7.000.000,00	7.000.000,00		
							Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,00%					
					C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	0	0	0		
		Disdukcapil				1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20,00 Orang	0	0	0	Perubahan Anggaran pada APBDP berpengaruh terhadap target kinerja	melakukan koordinasi dengan TAPD dan menyusun perencanaan pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan
					D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Aparatur	100%	100	724.520.000,00	687.258.534,00		
		Disdukcapil				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,00 Paket	1	15.000.000,00	14.804.000,00		
		Disdukcapil				2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1,00 Paket	1	391.980.000,00	363.535.800,00		
		Disdukcapil				3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5,00 Paket	5	91.040.000,00	87.228.905,00		
		Disdukcapil				4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.850,00 Dokumen	1.850,00	25.000.000,00	25.000.000,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Disdukcapil			5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50,00 Laporan	50	151.500.000,00	150.495.829,00	
		Disdukcapil			6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Pengeluaran Arsip Dinamis pada SKPD	1,00 Dokumen	1	50.000.000,00	46.194.000,00	
				E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100	8.612.740.606,00	8.100.546.955,00	
		Disdukcapil			1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00 Laporan	12	520.000.000,00	363.221.798,00	
		Disdukcapil			2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00 Laporan	12	8.092.740.606,00	7.737.325.157,00	
				F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100	580.392.000,00	563.393.700,00	
		Disdukcapil			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6,00 Unit	6	148.000.000,00	143.560.700,00	
		Disdukcapil			2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10,00 Unit	10	155.392.000,00	149.562.500,00	
		Disdukcapil			3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33,00 Unit	33	77.000.000,00	71.753.500,00	
		Disdukcapil			4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1,00 Unit	1	200.000.000,00	198.517.000,00	
			Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	II	Program Pendaftaran Penduduk		cakupan kepemilikan KTP el	94,82%	100	4.280.000.000,00	3.413.698.800,00	
				A	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Terselenggaranya Pelayanan Pencatatan Penduduk	100%	100	600.000.000,00	497.389.300,00	
		Disdukcapil			1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	2,00 Dokumen	2	500.000.000,00	414.505.800,00	
		Disdukcapil			2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	1,00 Dokumen	1	100.000.000,00	82.883.500,00	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
				B	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	100	3.680.000.000,00	2.916.309.500,00		
		Disdukcapil		1	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	2,00 Laporan	2	3.600.000.000,00	2.839.013.000,00		
		Disdukcapil		2	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1,00 Laporan	1	80.000.000,00	77.296.500,00		
			Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	III	Program Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan akte kelahiran	67,62%	100	400.000.000,00	346.687.865,00		
				A	Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Peristiwa Penting	100%	100	400.000.000,00	346.687.865,00		
		Disdukcapil		1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	100.000,00 Dokumen	100.000,00	300.000.000,00	255.039.000,00		
		Disdukcapil		2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan	3,00 Layanan	3	100.000.000,00	91.648.865,00		
			Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	IV	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	persentase ketersediaan data catatan sipil dan administrasi kependudukan yang lengkap dan terbaru	100,00%	100	4.077.339.608,00	3.631.645.400,00		
				A	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Tersedianya Data Kependudukan	100%	100	75.000.000,00	70.270.000,00		
		Disdukcapil		1	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	6,00 Dokumen	6	75.000.000,00	70.270.000,00		
				B	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Aplikasi Berbasis Informasi Teknologi	100%	100	4.002.339.608,00	3.561.375.400,00		
		Disdukcapil		1	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5,00 Laporan	5	3.837.339.608,00	3.413.535.700,00		
		Disdukcapil		2	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3,00 Laporan	3	165.000.000,00	147.839.700,00		
			Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	V	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Pemutakhiran profil kependudukan	100,00%	100	185.000.000,00	175.089.400,00		
				A	Penyusunan Profil Kependudukan	Tersedianya Data Profil Kependudukan	100%	100	185.000.000,00	175.089.400,00		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Disdukcapi				1	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	0,00 Dokumen	0	50.000.000,00	46.044.500,00		
								Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	3,00 dokumen	3				
								Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	100%					
		Disdukcapi				2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	3,00 Dokumen	3	135.000.000,00	129.044.900,00		

7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DPPKB	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00%	100,57	13.114.600.170,00	11.821.730.409,00		
				A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100	4.000.000,00	3.700.400,00		
		DPPKB			1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,00 Laporan	5	4.000.000,00	3.700.400,00		
				B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keuangan Perangkat Daerah	100%	104,59	10.881.357.000,00	9.784.733.044,00		
		DPPKB			1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	588,00 Orang/bulan	642	10.879.357.000,00	9.782.759.044,00		
		DPPKB			2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,00 Laporan	1	2.000.000,00	1.974.000,00		
						Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%					
				C	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100	341.967.300,00	310.413.874,00		
		DPPKB			1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,00 Paket	1	19.997.900,00	19.538.220,00		
		DPPKB			2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4,00 Paket	4	155.999.500,00	149.907.000,00		
		DPPKB			3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	365,00 Paket	365	44.519.900,00	28.834.500,00		
		DPPKB			4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12,00 Dokumen	12	20.000.000,00	18.900.000,00		
		DPPKB			5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1,00 Laporan	1	10.000.000,00	9.875.000,00		
		DPPKB			6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4,00 Laporan	4	81.450.000,00	73.796.120,00		
		DPPKB			7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50,00 Dokumen	50	10.000.000,00	9.563.034,00		
				D	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100	1.522.566.870,00	1.394.375.137,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		DPPKB				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00 Laporan	12	70.000.000,00	33.040.600,00	
		DPPKB				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	44,00 Laporan	44	1.452.566.870,00	1.361.334.537,00	
							Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%					
					E		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100	364.709.000,00	328.507.954,00	
		DPPKB				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5,00 Unit	5	75.000.000,00	74.135.200,00	
		DPPKB				2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	70,00 Unit	70	140.000.000,00	105.975.200,00	
		DPPKB				3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50,00 Unit	50	49.709.000,00	49.306.500,00	
		DPPKB				4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12,00 Unit	12	100.000.000,00	99.091.054,00	
			Meningkatnya kesejahteraan sosial dan keluarga	II	Program Pengendalian Penduduk		Presentase Cakupan Data Mikro Keluarga	80,00%	100	267.950.000,00	259.523.400,00		
				A	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Prosentase Cakupan Data Mikro 75,5%	100%	100	131.800.000,00	129.253.900,00		
		DPPKB				1	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1,00 Dokumen	1	131.800.000,00	129.253.900,00	
				B	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Cakupan Data Mikro 75,5%	100%	100	136.150.000,00	130.269.500,00		
		DPPKB				1	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Cakupan Laporan Program Bangga Kencana	100,00 persen	100	102.550.000,00	96.669.500,00	
		DPPKB				2	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12,00 Laporan	12	33.600.000,00	33.600.000,00	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
			Meningkatnya kesejahteraan sosial dan keluarga	III	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		Persentase pemakaian kontrasepsi/ CPR bagi perempuan Menikah	77,50%	100	7.877.728.000,00	6.019.029.733,00			
					A	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembanguna Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	100%	100	881.675.000,00	767.330.234,00		
		DPPKB				1	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	10,00 Kegiatan	10	232.475.000,00	230.431.000,00		
								Terlaksananya promosi dan KIE program bangga kencana (Pembangunan Keluarga,Kependudukan dan Keluarga Berencana Melalui media cetak dan elektronik sera media luar ruang	1,00 dokumen	1				
		DPPKB				2	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Banggakencana melalui rakor kecamatan,rakor desa dan minilock	12,00 Laporan	12	156.000.000,00	151.200.000,00		
		DPPKB				3	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Laporan hasil pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan bangga kencana	12,00 laporan	12	493.200.000,00	385.699.234,00		
					B	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Pencapaian Angka Pemakaian Kontrasepsi/ CPR 77 persen	100%	100	320.000.000,00	315.948.199,00		
		DPPKB				1	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Terlaksananya pergerakan pembinaan IMP	8,00 orang	8	8.000.000,00	8.000.000,00		
		DPPKB				2	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	56,00 Unit	56	100.000.000,00	97.927.199,00		
		DPPKB				3	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Cakupan Laporan Program Bangga Kencana	100,00 persen	100	212.000.000,00	210.021.000,00		
								Jumlah kader yang mengikuti pergerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)	560,00 orang	560				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
					C	<i>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi</i>	100%	100	5.916.053.000,00	4.200.005.300,00		
		DPPKB			1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12,00 Laporan	12	291.300.000,00	208.771.000,00		
		DPPKB			2	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	0,00 Orang	0	50.000.000,00	49.500.000,00		
							Jumlah Petugas yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	10,00 Orang	10				
		DPPKB			3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	6.212,00 Orang	6.212,00	2.447.123.000,00	1.507.588.300,00		
		DPPKB			4	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1,00 Dokumen	1	50.000.000,00	47.190.000,00		
		DPPKB			5	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	234,00 Unit	234	1.832.750.000,00	1.228.300.000,00		
		DPPKB			6	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah laporan hasil pembinaan pelayanan keluarga berencana kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	100,00 laporan	100	120.000.000,00	80.000.000,00		
		DPPKB			7	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	1.975,00 Orang	1.975,00	974.880.000,00	937.966.000,00		
		DPPKB			8	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	20,00 Orang	20	100.000.000,00	99.000.000,00		
		DPPKB			9	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	90,00 Orang	90	50.000.000,00	41.690.000,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
					D	<i>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</i>	<i>Pencapaian Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR 77 persen</i>	100%	100	760.000.000,00	735.746.000,00			
		DPPKB				1	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	25,00 Kampung	25	510.000.000,00	497.621.500,00		
		DPPKB				2	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	25,00 Laporan	25	250.000.000,00	238.124.500,00		
			Meningkatnya kesejahteraan sosial dan keluarga	IV		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		Persentase Cakupan anggota poktan yang ber KB	60,00%	100	13.772.300.000,00	12.206.659.200,00		
					A	<i>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>		<i>Jumlah PPKS Aktif 3di Kecamatan Perentase Cakupan Anggota Poktan ber-KB</i>	100%	100	13.772.300.000,00	12.206.659.200,00		
		DPPKB				1	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	18,00 Unit	18	360.000.000,00	231.800.000,00		
		DPPKB				2	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	500,00 Orang	500	12.966.700.000,00	11.568.982.600,00		
								<i>Jumlah PPKS Aktif di Kecamatan 3, Perentase Cakupan Anggota Poktan ber-KB 50%</i>	100%					
		DPPKB				3	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	24,00 Kelompok	24	96.000.000,00	90.723.100,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		DPPKB				4	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12,00 Laporan	12	249.600.000,00	231.158.500,00		
		DPPKB				5	Advokasi dan Promosi IPK	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	80,00 Orang	80	100.000.000,00	83.995.000,00		



8. Urusan Perhubungan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	Perhubungan	Dinas Perhubungan	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00%	100	50.730.757.835,00	48.556.209.939,00		
				A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100	8.000.000,00	6.000.000,00		
		Dinas Perhubungan			1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,00 Laporan	5	8.000.000,00	6.000.000,00		
				B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Laporan Keuangan SKPD yang Tersusun	100%	100	24.739.115.000,00	23.287.957.319,00		
		Dinas Perhubungan			1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.722,00 Orang/bulan	3.722,00	24.731.115.000,00	23.281.457.319,00	Pembayaran untuk 3 bulan Gaji ASN dan 4 Bulan Tunjangan ASN	Pembayaran untuk 3 bulan Gaji ASN dan 4 Bulan Tunjangan ASN bukan menjadi permasalahan, hanya sebagai keterangan rincian pembayaran gaji dan tunjangan pada triwulan ke 4 sesuai dengan arahan pada proses asistensi di Bidang Dalev Bapeltbangda
		Dinas Perhubungan			2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,00 Laporan	1	8.000.000,00	6.500.000,00		
						Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,00%					
				C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100	267.250.000,00	264.100.000,00		
		Dinas Perhubungan			1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1,00 Paket	1	150.000.000,00	149.100.000,00		
		Dinas Perhubungan			2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	46,00 Orang	46	117.250.000,00	115.000.000,00		
						Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%					
				D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100	710.740.000,00	616.310.560,00		
		Dinas Perhubungan			1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	0,00 Paket	0	0	0		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
							Bangunan Kantor	Disediakan					
		Dinas Perhubungan				2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4,00 Paket	4	435.700.000,00	417.756.700,00	
		Dinas Perhubungan				3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2,00 Paket	2	85.040.000,00	50.373.000,00	
		Dinas Perhubungan				4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1,00 Dokumen	1	30.000.000,00	29.400.000,00	
		Dinas Perhubungan				5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5,00 Laporan	5	160.000.000,00	118.780.860,00	
		Dinas Perhubungan				6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0,00 Dokumen	0	0	0	
							Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%					
				E			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100	23.831.652.835,00	23.242.580.224,00	
		Dinas Perhubungan				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00 Laporan	12	1.150.000.000,00	935.892.067,00	
		Dinas Perhubungan				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00 Laporan	12	22.681.652.835,00	22.306.688.157,00	
							Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%					
				F			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100	1.174.000.000,00	1.139.261.836,00	
		Dinas Perhubungan				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6,00 Unit	6	200.000.000,00	191.421.760,00	
		Dinas Perhubungan				2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	150,00 Unit	150	624.000.000,00	602.031.649,00	
		Dinas Perhubungan				3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	86,00 Unit	86	50.000.000,00	48.200.000,00	
		Dinas Perhubungan				4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1,00 Unit	1	300.000.000,00	297.608.427,00	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
			Terwujudnya Kota Bekasi yang sehat, aman, ramah dan aksesibel didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas yang merata dan memenuhi standar	II Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase ruas jalan yang memenuhi kelancaran jalan	91,00%	95,4	68.421.254.130,00	57.113.155.758,00		
				A Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Rencana Jaringan Jalan LLAJ di Kota Bekasi	100%	100	37.700.749.590,00	36.539.296.886,00		
		Dinas Perhubungan		1 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1,00 Laporan	1	37.700.749.590,00	36.539.296.886,00		
				B Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan yang tersedia	100%	100	7.393.208.940,00	6.414.580.306,00		
		Dinas Perhubungan		1 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	2,00 Unit	2	209.952.000,00	202.134.909,00		
		Dinas Perhubungan		2 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	25,00 Unit	25	3.983.256.940,00	3.419.382.800,00		
		Dinas Perhubungan		3 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	32,00 Unit	32	2.200.000.000,00	1.948.412.857,00		
		Dinas Perhubungan		4 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	6,00 Unit	6	1.000.000.000,00	844.649.740,00		
					Persentase peningkatan fasilitas prasarana penunjang transportasi	60,00%					
				C Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase pengelolaan termin di kota bekasi	100%	100	691.734.000,00	592.034.680,00		
		Dinas Perhubungan		1 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	637,00 Unit	637	691.734.000,00	592.034.680,00		
				D Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase manajemen dan rekayasa parkir	100%	100	613.426.000,00	575.505.000,00		
		Dinas Perhubungan		1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1,00 Laporan	1	613.426.000,00	575.505.000,00		
					persentase kendaraan yang wajib uji yang melakukan uji kendaraan bermotor	78,00%					
				E Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan yang lulus pengujian kendaraan bermotor	100%	100	5.040.803.600,00	4.673.793.754,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Dinas Perhubungan				1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	32,00 Unit	32	3.194.203.600,00	3.101.779.754,00	
		Dinas Perhubungan				2	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	45.000,00 Unit	45.000,00	196.600.000,00	188.670.000,00	
		Dinas Perhubungan				3	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1,00 Dokumen	1	1.250.000.000,00	1.000.000.000,00	
		Dinas Perhubungan				4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	19,00 Unit	19	400.000.000,00	383.344.000,00	
							Persentase penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas		10,60%				
					F		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas	100%	100	2.608.992.000,00	2.452.013.400,00	
		Dinas Perhubungan				1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1,00 Laporan	1	873.662.000,00	820.846.000,00	
		Dinas Perhubungan				2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	5,00 Unit	5	1.066.380.000,00	993.297.400,00	
		Dinas Perhubungan				3	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	2,00 Laporan	2	668.950.000,00	637.870.000,00	
					G		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase telaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	100%	0	0	0	
		Dinas Perhubungan				1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	0,00 Laporan	0	0	0	
							Persentase peningkatan layanan angkutan umum massal		60,00%				
					H		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Angkutan untuk jasa angkutan orang yang terselenggara	100%	31,03	14.372.340.000,00	5.865.931.732,00	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Dinas Perhubungan				1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	29,00 Unit	9	14.372.340.000,00	5.865.931.732,00	Pelaksanaan Subsidi 20 Bus dan Kegiatan Audit Tujuan Tertentu tidak dapat terserap sesuai dengan Surat Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Nomor 551.1/2134-Dishub.Angkutan	Adanya MOU dengan Badan Pengelola Transportasi Jalan dengan pemerintah Kota Bekasi untuk menyediakan BTS (<i>Buy The Service</i>) dengan rute yang sama dengan Subsidi Bus Transpatriot sedangkan pembiayaan BTS di laksanakan lakukan oleh APBN melalui BPTJ dan <i>BTS (Buy The Service)</i> tersebut telah beroperasi

9. Urusan Komunikasi dan Informatika

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
1	Komunikasi dan Informatika	Diskominfostandi	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%	99,75	21.173.451.050,00	19.195.398.873,00		
					A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100	10.000.000,00	9.454.000,00		
		Diskominfostandi			1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,00 Laporan	4	10.000.000,00	9.454.000,00		
							Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00%					
					B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keuangan Perangkat Daerah	100%	100	11.650.031.000,00	9.968.890.925,00		
		Diskominfostandi			1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.218,00 Orang/bulan	1.218,00	11.647.031.000,00	9.965.890.925,00		
		Diskominfostandi			2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16,00 Laporan	16	3.000.000,00	3.000.000,00		
							Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,00%					
					C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	98,33	320.390.000,00	314.140.000,00		
		Diskominfostandi			1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1,00 Paket	1	95.390.000,00	94.140.000,00		
		Diskominfostandi			2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30,00 Orang	29	225.000.000,00	220.000.000,00	Masih kurangnya Undangan/Penawaran Diklat/Bimtek yang dilaksanakan secara offline dan berbayar	Meningkatkan Koordinasi dengan Lembaga Pendidikan/Instansi Penyelenggara Diklat/Bimtek
							Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%					
					D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	99,81	532.572.150,00	502.266.265,00		
		Diskominfostandi			1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00 Paket	1	20.000.000,00	19.741.000,00		
		Diskominfostandi			2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5,00 Paket	5	239.480.000,00	236.840.500,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Diskominfostandi				3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2,00 Paket	2	81.342.150,00	61.810.550,00	
		Diskominfostandi				4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	388,00 Dokumen	388	40.000.000,00	40.000.000,00	
		Diskominfostandi				5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36,00 Laporan	36	10.000.000,00	10.000.000,00	
		Diskominfostandi				6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150,00 Laporan	148	135.000.000,00	127.124.215,00	
		Diskominfostandi				7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1,00 Dokumen	1	6.750.000,00	6.750.000,00	
					E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Optimalisasi Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	100%	100	297.450.000,00	285.400.000,00	
		Diskominfostandi				1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1,00 Unit	1	261.100.000,00	249.400.000,00	
		Diskominfostandi				2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	6,00 Unit	6	36.350.000,00	36.000.000,00	
							Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%					
					F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100	7.928.007.900,00	7.686.907.283,00	
		Diskominfostandi				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2,00 Laporan	2	4.822.000.000,00	4.635.409.362,00	
		Diskominfostandi				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00 Laporan	12	3.106.007.900,00	3.051.497.921,00	
							Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%					
					G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penunjang Urusan	100%	100	435.000.000,00	428.340.400,00	
		Diskominfostandi				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14,00 Unit	14	200.000.000,00	194.626.400,00	
		Diskominfostandi				2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51,00 Unit	51	35.000.000,00	35.000.000,00	
		Diskominfostandi				3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1,00 Unit	1	200.000.000,00	198.714.000,00	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
			Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	II	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan pengaduan dan informasi publik	4,33 Indeks	100	582.780.650,00	567.771.500,00		
				A	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	100%	100	582.780.650,00	567.771.500,00		
		Diskominfostandi			1 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1,00 Dokumen	1	195.950.000,00	190.350.000,00		
		Diskominfostandi			2 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1,00 Dokumen	1	73.110.000,00	73.058.000,00		
		Diskominfostandi			3 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2,00 Dokumen	2	73.900.000,00	72.800.000,00		
		Diskominfostandi			4 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	2,00 Dokumen	2	50.835.000,00	50.178.000,00		
		Diskominfostandi			5 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	120,00 Orang	120	13.125.000,00	13.120.500,00		
		Diskominfostandi			6 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	19,00 Unit	19	175.860.650,00	168.265.000,00		
			Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	III	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Pengelolaan sitem Layanan Publik Berbasis Digital	4,08 Indeks	100	12.280.018.381,00	11.326.998.492,00		
				A	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Infrastruktur Jaringan TIK, Pusat Data, dan Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital	100%	100	12.280.018.381,00	11.326.998.492,00		
		Diskominfostandi			1 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,00 Dokumen	3	270.000.000,00	268.260.000,00		
		Diskominfostandi			2 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1,00 Unit	1	338.517.451,00	322.906.543,00		
		Diskominfostandi			3 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2,00 Unit	2	246.000.000,00	228.300.000,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Diskominfostandi				4	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	13,00 Layanan	13	209.196.000,00	187.020.000,00		
		Diskominfostandi				5	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	6,00 Dokumen	6	1.382.796.741,00	706.268.930,00	Tidak terdapatnya CCTV yang memiliki nilai TKDN sesuai ketentuan sehingga berdasarkan pertimbangan bersama Tim TKDN bahwa pengadaan tidak dilaksanakan.	Pengadaan CCTV direncanakan kembali pada tahun berikutnya mengacu pada ketentuan yang ada
		Diskominfostandi				6	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	13,00 Dokumen	13	9.708.508.189,00	9.496.661.020,00		
		Diskominfostandi				7	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1,00 Dokumen	1	125.000.000,00	117.581.999,00		



10. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Diskop UKM	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%	100	9.234.188.720,00	7.623.789.399,00		
					A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100	3.000.000,00	2.680.000,00		
		Diskop UKM			1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,00 Laporan	3	3.000.000,00	2.680.000,00		
						Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00%					
					B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100	7.416.410.000,00	5.921.382.264,00		
		Diskop UKM			1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	776,00 Orang/Bulan	776	7.413.410.000,00	5.918.917.764,00		
		Diskop UKM			2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,00 Laporan	1	3.000.000,00	2.464.500,00		
						Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%					
					C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100	10.000.000,00	10.000.000,00		
		Diskop UKM			1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4,00 Orang	4	10.000.000,00	10.000.000,00		
					D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100	484.014.900,00	412.327.700,00		
		Diskop UKM			1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8,00 Paket	8	292.014.900,00	256.780.420,00		
		Diskop UKM			2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3,00 Paket	3	25.000.000,00	20.347.750,00		
		Diskop UKM			3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	120,00 Dokumen	120	25.000.000,00	24.120.000,00		
		Diskop UKM			4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25,00 Laporan	25	15.000.000,00	14.995.000,00		
		Diskop UKM			5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50,00 Laporan	50	117.000.000,00	86.316.530,00		
		Diskop UKM			6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	800,00 Dokumen	800	10.000.000,00	9.768.000,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
							Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%					
				E		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100	1.030.763.820,00	991.724.435,00		
		Diskop UKM			1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00 Laporan	12	1.030.763.820,00	991.724.435,00		
							Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%					
				F		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100%	100	290.000.000,00	285.675.000,00		
		Diskop UKM			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5,00 Unit	5	166.240.000,00	164.835.500,00		
		Diskop UKM			2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12,00 Unit	12	98.760.000,00	95.964.500,00		
		Diskop UKM			3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45,00 Unit	45	25.000.000,00	24.875.000,00		
			Meningkatnya nilai PDRB sektor ekonomi kreatif	II		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi yang memiliki Izin Simpan Pinjam	13,07%	76,67	74.360.000,00	62.493.000,00		
				A		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mendapat Izin Simpan Pinjam yang diterbitkan	100%	76,67	74.360.000,00	62.493.000,00		
		Diskop UKM			1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	150,00 Unit Usaha	115	74.360.000,00	62.493.000,00		
			Meningkatnya nilai PDRB sektor ekonomi kreatif	III		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Beroperasi sesuai dengan Peraturan Perkoperasian	100,00 Unit	100	11.555.000,00	5.078.000,00		
				A		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah	Jumlah Koperasi yang Telah dilakukan Pengawasan, Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100	11.555.000,00	5.078.000,00		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
						Kabupaten/ Kota						
		Diskop UKM			1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan, Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan kabupaten/Kota	100,00 Unit Usaha	100	11.555.000,00	5.078.000,00	
			Meningkatnya nilai PDRB sektor ekonomi kreatif	IV	Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi		Persentase Koperasi yang telah Tersertifikasi Kesehatannya	8,17%	100	190.852.000,00	178.558.500,00	
					A	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan Penilaian Kesehatan	100%	100	190.852.000,00	178.558.500,00	
		Diskop UKM			1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	50,00 Unit Usaha	50	66.862.000,00	60.426.000,00	
							Jumlah Koperasi yang mendapatkan Penghargaan Kesehatan	100%				
		Diskop UKM			2	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	10,00 Unit Usaha	10	123.990.000,00	118.132.500,00	
			Meningkatnya nilai PDRB sektor ekonomi kreatif	V	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian		Jumlah Pengurus Koperasi yang telah Mengikuti Pendidikan Perkoperasian	100,00 Orang	100	549.880.000,00	524.230.500,00	
					A	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Perkoperasian	100%	100	549.880.000,00	524.230.500,00	
		Diskop UKM			1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	600,00 Orang	600	549.880.000,00	524.230.500,00	
			Meningkatnya nilai PDRB sektor ekonomi kreatif	VI	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi		Peningkatan Skala Usaha Koperasi	2,00 Unit	87,73	314.957.000,00	245.927.000,00	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
					A	<i>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi kewenangan Kabupaten /Kota</i>	100%	87,73	314.957.000,00	245.927.000,00		
		Diskop UKM				1 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	163,00 Unit Usaha	143	314.957.000,00	245.927.000,00		
			Meningkatnya nilai PDRB sektor ekonomi kreatif	VII	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)		Persentase PKL yang Menempati Tempat yang telah Ditetapkan	15,00%	100	1.164.454.500,00	1.132.711.000,00		
					A	<i>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</i>	<i>Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro</i>	100%	100	1.164.454.500,00	1.132.711.000,00		
		Diskop UKM				1 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	75,00 unit usaha	75	227.850.000,00	223.162.500,00		
							<i>Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro</i>	100%					
		Diskop UKM				2 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	60,00 Orang	60	277.677.500,00	267.400.500,00		
		Diskop UKM				3 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	279,00 orang	279	658.927.000,00	642.148.000,00		
			Meningkatnya nilai PDRB sektor ekonomi kreatif	VIII	Program Pengembangan UMKM		Persentase peningkatan Skala Usaha Mikro menjadi usaha Kecil	1,00%	100	2.360.264.000,00	2.237.788.800,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
					A	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan Pemasaran SDM serta Desain dan Teknologi	100%	100	2.360.264.000,00	2.237.788.800,00		
		Diskop UKM				1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1.152,00 Unit Usaha	1.152,00	2.360.264.000,00	2.237.788.800,00		

11. Urusan Penanaman Modal

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
1	Penanaman Modal	DPMPTSP	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%	99,02	28.044.155.510,00	25.589.263.267,00		
					A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100	4.000.000,00	3.800.000,00		
		DPMPTSP				1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12,00 Laporan	12	4.000.000,00	3.800.000,00		
							Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00%					
					B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keuangan Perangkat Daerah	100%	100	14.818.799.000,00	13.150.067.434,00		
		DPMPTSP				1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.792,00 Orang/bulan	1.792,00	14.816.799.000,00	13.148.167.434,00		
		DPMPTSP				2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,00 Laporan	1	2.000.000,00	1.900.000,00		
							Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,00%					
					C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100	16.000.000,00	15.405.800,00		
		DPMPTSP				1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3,00 Orang	3	16.000.000,00	15.405.800,00		
							Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%					
					D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	97,62	875.000.000,00	773.801.548,00		
		DPMPTSP				1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00 Paket	1	10.000.000,00	9.935.000,00		
		DPMPTSP				2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1,00 Paket	1	414.400.000,00	404.414.200,00		
		DPMPTSP				3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1,00 Paket	1	210.600.000,00	200.621.000,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		DPMPTSP				4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12,00 Dokumen	10	20.000.000,00	18.000.000,00	MOU diawali pada Bulan Maret, karena terkait kelengkapan administrasi dari pihak ke 3	Dua dokumen tidak dapat terealisasi pada Bulan Januari dan Februari karena MOU diawali pada Bulan Maret
		DPMPTSP				5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12,00 Laporan	12	50.000.000,00	18.724.000,00		
		DPMPTSP				6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24,00 Laporan	24	160.000.000,00	112.315.348,00		
		DPMPTSP				7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	600,00 Dokumen	600	10.000.000,00	9.792.000,00		
							Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran		100,00%					
				E			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100	11.619.106.510,00	11.021.014.837,00		
		DPMPTSP				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00 Laporan	12	667.000.000,00	504.019.306,00		
		DPMPTSP				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00 Laporan	12	10.952.106.510,00	10.516.995.531,00		
							Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100,00%					
				F			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100	711.250.000,00	625.173.648,00		
		DPMPTSP				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7,00 Unit	7	225.000.000,00	189.031.210,00		
		DPMPTSP				2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7,00 Unit	7	75.000.000,00	49.549.872,00		
		DPMPTSP				3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	108,00 Unit	108	75.000.000,00	71.050.000,00		
		DPMPTSP				4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1,00 Unit	1	336.250.000,00	315.542.566,00		
			Meningkatnya Iklim Usaha dan Investasi	II			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Kenaikan Penanaman Modal berdasarkan LKPM	4,00%	100	178.113.000,00	106.914.792,00		
				A			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Diberang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	100%	100	178.113.000,00	106.914.792,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
									TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		DPMPTSP				1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1,00 Dokumen	1	178.113.000,00	106.914.792,00			
			Meningkatnya Iklim Usaha dan Investasi	III	Program Promosi Penanaman Modal			Jumlah izin terbit dan izin terbit dengan pemenuhan komitmen pada DPMPTSP	7.866,00 Jumlah	100	329.500.000,00	314.839.000,00			
					A	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			Persentase Izin terbit dan izinTerbit dengan Pemenuhan Komitmen pada DPMPTSP	100%	100	329.500.000,00	314.839.000,00		
		DPMPTSP				1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1,00 Dokumen	1	329.500.000,00	314.839.000,00			
			Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	IV	Program Pelayanan Penanaman Modal			Jumlah Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Mall Pelayanan Publik	110,00 Jumlah	100	4.754.597.500,00	4.430.223.179,00			
					A	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			Jumlah Jenis Layanan MPP/GPP	100%	100	4.754.597.500,00	4.430.223.179,00		
		DPMPTSP				1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10.000,00 Pelaku Usaha	10.000,00	4.607.577.500,00	4.385.200.179,00			
		DPMPTSP				2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	60,00 Kegiatan Usaha	60	147.020.000,00	45.023.000,00			
			Meningkatnya Iklim Usaha dan Investasi	V	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			Persentase Peningkatan Jumlah Perusahaan PMDN/PMA Yang Patuh Terhadap Kewajiban LKPM	26,00%	66,67	1.495.475.000,00	627.123.500,00			
					A	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			Persentase Perusahaan PMDN/PMA yang patuh Terhadap kewajiban LKPM	100%	66,67	1.495.475.000,00	627.123.500,00		
		DPMPTSP				1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	692,00 Pelaku Usaha	692	490.425.000,00	422.862.500,00			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		DPMPTSP				2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	6,00 Kegiatan Usaha	6	1.005.050.000,00	204.261.000,00	Berdasarkan amanat Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan No. 67 Tahun 2023 dan Surat Pemberitahuan No. 900/7616/Bappelitbangda.AP4EP, penyerapan anggaran dana insentif fiskal pada kegiatan ini tidak diperkenankan sehingga tidak ada realisasi pada indikator Jumlah Kendaraan Operasional Pelayanan Publik	Kegiatan tidak dilaksanakan berdasarkan amanat Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan No. 67 Tahun 2023 dan Surat Pemberitahuan No. 900/7616/Bappelitbangda.AP4EP, penyerapan anggaran dana insentif fiskal pada kegiatan ini tidak diperkenankan sehingga tidak ada realisasi pada indikator Jumlah Kendaraan Operasional Pelayanan Publik
								Jumlah Kendaraan Operasional Pelayanan Publik	1,00 unit	0				
			Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	VI	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal			Persentase Sistem Pelayanan Perizinan yang terintegrasi	100,00%	25	1.792.270.000,00	900.177.188,00		
				A	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Persentase sistem pelayanan perizinan online yang dikelola	100%	25	1.792.270.000,00	900.177.188,00		
		DPMPTSP				1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12,00 Dokumen	12	1.792.270.000,00	900.177.188,00	Berdasarkan amanat Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan No. 67 Tahun 2023 dan Surat Pemberitahuan No. 900/7616/Bappelitbangda.AP4EP, penyerapan anggaran dana insentif fiskal pada kegiatan ini tidak diperkenankan sehingga tidak ada realisasi pada indikator Jumlah Website Investasi, Jumlah Sarana dan Prasarana dan Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Website Investasi	Kegiatan tidak dilaksanakan berdasarkan amanat Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan No. 67 Tahun 2023 dan Surat Pemberitahuan No. 900/7616/Bappelitbangda.AP4EP, penyerapan anggaran dana insentif fiskal pada kegiatan ini tidak diperkenankan sehingga tidak ada realisasi pada indikatorJumlah Website Investasi, Jumlah Sarana dan Prasarana dan Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Website Investasi
								Jumlah Website Investasi	1,00 Aplikasi	0				
								Jumlah Sarana dan Prasarana	25,00 Unit	0				
								Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Website Investasi	54,00 orang	0				

12. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	Kepemudaan dan Olah Raga	Dispora	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00%	100	14.907.834.315,00	12.744.853.270,00		
				A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	100%	100	3.000.000,00	3.000.000,00		
		Dispora			1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12,00 Laporan	12	3.000.000,00	3.000.000,00		
				B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100	9.119.683.000,00	7.317.510.243,00		
		Dispora			1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.218,00 Orang/bulan	1.218,00	9.116.683.000,00	7.314.510.243,00		
		Dispora			2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,00 Laporan	1	3.000.000,00	3.000.000,00		
				C	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100	671.519.500,00	573.163.440,00		
		Dispora			1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2,00 Paket	2	30.000.000,00	29.362.000,00		
		Dispora			2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6,00 Paket	6	359.832.500,00	354.456.000,00		
		Dispora			3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4,00 Paket	4	99.375.000,00	94.291.000,00		
		Dispora			4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12,00 Dokumen	12	30.000.000,00	19.396.000,00		
		Dispora			5 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12,00 Laporan	12	10.000.000,00	4.996.000,00		
		Dispora			6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00 Laporan	12	132.312.000,00	60.875.940,00		
		Dispora			7 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12,00 Dokumen	12	10.000.000,00	9.786.500,00		
						Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
					D	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang	100%	100	4.598.631.815,00	4.360.600.287,00		
		Dispora				1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00 Laporan	12	455.100.000,00	229.273.677,00		
		Dispora				2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00 Laporan	12	4.143.531.815,00	4.131.326.610,00		
							Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%					
					E	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100	515.000.000,00	490.579.300,00		
		Dispora				1 Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8,00 Unit	8	165.000.000,00	142.774.700,00		
		Dispora				2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	149,00 Unit	149	50.000.000,00	49.930.000,00		
		Dispora				3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2,00 Unit	2	300.000.000,00	297.874.600,00		
			Meningkatnya partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	II	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		Persentase Komunitas Kreatif yang berperan dalam pembangunan	50,00%	100	4.637.210.000,00	4.279.406.099,00		
					A	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyadaran dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kab/Kota, Wirausaha Muda Pemuda dan Pemuda Kader Kab/Kota	100%	100	1.524.690.000,00	1.438.719.900,00		
		Dispora				1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	30,00 Orang	30	150.000.000,00	113.230.000,00		
		Dispora				2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Dokumen Hasil Penyadaran dan Pengembangan Pemuda	2,00 Dokumen	2	1.274.690.000,00	1.226.225.400,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Dispora				3	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strate	80,00 Orang	80	100.000.000,00	99.264.500,00		
								Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	90,00%					
					B		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kegiatan Penyadaran dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kab/Kota, Wirausaha Muda Pemuda dan Pemuda Kader Kab/Kota	100%	100	3.112.520.000,00	2.840.686.199,00		
		Dispora				1	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	3,00 Dokumen	3	3.112.520.000,00	2.840.686.199,00		
			Meningkatnya partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	III	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan			Cakupan Pembinaan Olahraga	75,00%	100	83.432.992.343,00	79.634.944.015,00		
					A	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Capaian Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan	100%	100	1.374.000.000,00	1.342.749.499,00		
		Dispora				1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Dunia Usaha Yang Dikembangkan	1,00 Unit	1	1.374.000.000,00	1.342.749.499,00		
					B	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Capaian Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	100%	100	3.751.426.000,00	3.643.872.705,00		
		Dispora				1	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	5,00 Dokumen	5	947.680.000,00	941.307.400,00		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Dispora				2	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	535,00 Orang	535	2.803.746.000,00	2.702.565.305,00	
								Persentase Pelatih Yang Bersertifikat	100,00%				
					C		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Capaian Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	100%	100	1.006.000.000,00	969.437.500,00	
		Dispora				1	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	203,00 Orang	203	1.000.000.000,00	969.437.500,00	
		Dispora				2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1,00 Dokumen	1	6.000.000,00	0	
					D		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Capaian Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	100%	100	53.120.165.000,00	51.079.318.000,00	
		Dispora				1	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2,00 Organisasi	2	53.000.000.000,00	50.973.377.500,00	
		Dispora				2	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	1,00 Dokumen	1	120.165.000,00	105.940.500,00	
								Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang Representatif	65,00%				
					E		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Capaian Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	100%	100	24.181.401.343,00	22.599.566.311,00	
		Dispora				1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	7,00 Dokumen	7	6.211.551.000,00	5.847.711.300,00	
		Dispora				2	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	10,00 Unit	10	17.969.850.343,00	16.751.855.011,00	
			Meningkatnya partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	IV			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Presentase Gugus Depan Aktif	60,00%	100	262.515.802,00	261.866.602,00	
					A		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	100%	100	262.515.802,00	261.866.602,00	
		Dispora				1	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1,00 Organisasi	1	262.515.802,00	261.866.602,00	

13. Urusan Statistik

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	Statistik		Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	I	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks ketersediaan data sektoral berbasis digital	4,00 Indeks	100	547.065.000,00	545.905.400,00		
				A	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Data Sektoral Pada Perangkat Daerah Berbasis Digital	100%	100	547.065.000,00	545.905.400,00		
		Diskominfostandi			1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1,00 Dokumen	1	298.450.000,00	297.825.400,00		
		Diskominfostandi			2 Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1,00 Dokumen	1	248.615.000,00	248.080.000,00		

14. Urusan Persandian

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	Persandian		Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	I	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks penyelenggaraan pengamanan informasi	5,00 Indeks	100	831.470.000,00	816.238.100,00		
				A	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Perangkat Daerah	100%	100	758.690.000,00	749.085.600,00		
		Diskominfostandi			1 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1,00 Dokumen	1	23.630.000,00	22.166.000,00		
		Diskominfostandi			2 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1,00 Laporan	1	112.180.000,00	106.149.000,00		
		Diskominfostandi			3 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	44,00 Perangkat Daerah	44	622.880.000,00	620.770.600,00		
				B	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	100%	100	72.780.000,00	67.152.500,00		
		Diskominfostandi			1 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	44,00 Perangkat Daerah	44	72.780.000,00	67.152.500,00		

15. Urusan Kebudayaan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	Kebudayaan	Disparbud	Meningkatnya nilai PDRB sektor ekonomi kreatif	I	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah Penyelenggaraan event bekasi kreatif	9,00 Event	100	800.176.500,00	616.909.000,00		
				A	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	100%	100	800.176.500,00	616.909.000,00		
		Disparbud			1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	60,00 Orang	60	103.320.000,00	102.948.000,00		
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	100%					
		Disparbud			2	Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	50,00 Sertifikat	50	223.700.000,00	52.220.000,00		
						Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100%					
		Disparbud			3	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	10,00 Lembaga	10	473.156.500,00	461.741.000,00		
			Meningkatnya nilai PDRB sektor ekonomi kreatif	II	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Benda. Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	4,00 Situs	100	663.600.000,00	657.448.083,00		
				A	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	100%	100	663.600.000,00	657.448.083,00		
		Disparbud			1	Pelindungan Cagar Budaya	5,00 Objek	5	350.000.000,00	346.377.183,00		
						Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	100%					
		Disparbud			2	Pengembangan Cagar Budaya	3,00 Objek	3	313.600.000,00	311.070.900,00		

16. Urusan Perpustakaan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	Perpustakaan	Disapusda	Terwujudnya masyarakat yang berpengetahuan tinggi, kreatif dan inovatif	I	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan Aktif	10,00%	87,5	1.465.519.000,00	911.785.545,00		
				A	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota	100%	100	915.353.000,00	620.702.545,00		
		Disapusda			1 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	1,00 Layanan	1	112.076.000,00	77.400.000,00		
		Disapusda			2 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	57,00 Perpustakaan	57	157.015.000,00	121.508.440,00		
		Disapusda			3 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	250,00 Perpustakaan	250	201.432.000,00	124.758.500,00		
		Disapusda			4 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	2.000,00 Eksemplar	2.000,00	340.160.000,00	192.717.605,00		
		Disapusda			5 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2,00 Dokumen	2	104.670.000,00	104.318.000,00		
				B	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ketersediaan Sarana Prasarana dan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/Kota	100%	66,67	550.166.000,00	291.083.000,00		
		Disapusda			1 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	7,00 Lokus	7	200.000.000,00	184.361.000,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Disapusda				2	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2,00 Perpustakaan	0	286.816.000,00	44.180.000,00	Pengerjaan Perpustakaan mini yang lokasinya sudah ditentukan tidak bisa dilaksanakan dikarenakan terjadi kesalahan kode rekening	Berkoordinasi dengan Bidang Aset BPKAD dan Bagian Pembangunan Setda terkait kode rekening rincian belanja dan diusulkan kembali pada Renja Tahun 2025
		Disapusda				3	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	2,00 Orang	2	63.350.000,00	62.542.000,00		



17. Urusan Kearsipan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	Kearsipan	Disarpusda	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%	100	14.542.433.185,00	12.119.715.414,00		
				A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100	3.000.000,00	3.000.000,00		
		Disarpusda			1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6,00 Laporan	6	3.000.000,00	3.000.000,00		
				B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Keuangan Perangkat Daerah	100%	100	12.167.752.000,00	10.085.996.381,00		
		Disarpusda			1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60,00 Orang/bulan	60	12.164.752.000,00	10.082.997.381,00		
		Disarpusda			2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20,00 Laporan	20	3.000.000,00	2.999.000,00		
				C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100	120.000.000,00	75.443.500,00		
		Disarpusda			1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10,00 Orang	10	120.000.000,00	75.443.500,00		
				D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100	372.920.000,00	337.246.700,00		
		Disarpusda			1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00 Paket	1	10.000.000,00	9.675.400,00		
		Disarpusda			2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6,00 Paket	6	139.820.000,00	135.578.300,00		
		Disarpusda			3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3,00 Paket	3	48.320.000,00	27.321.000,00		
		Disarpusda			4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12,00 Dokumen	12	30.000.000,00	30.000.000,00		
		Disarpusda			5 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	5,00 Laporan	5	15.000.000,00	8.294.000,00		
		Disarpusda			6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5,00 Laporan	5	124.780.000,00	121.678.000,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		Disarpusda				7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10,00 Dokumen	10	5.000.000,00	4.700.000,00		
					E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100	1.343.765.185,00	1.131.898.713,00		
		Disarpusda				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00 Laporan	12	300.000.000,00	149.344.059,00		
		Disarpusda				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00 Laporan	12	1.043.765.185,00	982.554.654,00		
					F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Aktivitas Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100	534.996.000,00	486.130.120,00		
		Disarpusda				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6,00 Unit	6	135.000.000,00	123.256.360,00		
		Disarpusda				2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23,00 Unit	23	209.996.000,00	173.954.060,00		
		Disarpusda				3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40,00 Unit	40	40.000.000,00	39.325.000,00		
		Disarpusda				4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1,00 Unit	1	150.000.000,00	149.594.700,00		
			Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	II	Program Pengelolaan Arsip			Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengelolaan Arsip Secara Tertib	70,00%	100	1.120.686.000,00	994.503.850,00		
					A	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Capaian kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis	100%	100	532.490.000,00	459.919.400,00		
		Disarpusda				1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	25,00 Berkas	25	179.035.000,00	133.190.000,00		
		Disarpusda				2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1,00 berkas	1	263.440.000,00	255.966.000,00		
		Disarpusda				3	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	2,00 Laporan	2	90.015.000,00	70.763.400,00		
					B	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis	100%	100	469.102.000,00	419.648.200,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		Disarpusda				1	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	14,00 Arsip	14	469.102.000,00	419.648.200,00		
					C		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan	100%	100	119.094.000,00	114.936.250,00		
		Disarpusda				1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	1,00 Pengguna	1	87.384.000,00	83.528.000,00		
		Disarpusda				2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	2,00 Laporan	2	31.710.000,00	31.408.250,00		
				III	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip				0	100	227.508.000,00	130.665.500,00		
					A		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun		100%	100	227.508.000,00	130.665.500,00		
		Disarpusda				1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi dibawah 10 (Sepuluh) Tahun	2.500,00 Arsip	2.500,00	227.508.000,00	130.665.500,00		

3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan
1. Urusan Kelautan dan Perikanan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	Kelautan dan Perikanan	DKPPP	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	I	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi ikan konsumsi	1.946,42 Ton	100	540.177.000,00	432.823.400,00		
				A	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase Pembudidaya Ikan Kecil yang diberdayakan	100%	100	540.177.000,00	432.823.400,00		
		DKPPP			1 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	8,00 Kelompok	8	246.871.000,00	225.192.400,00		
		DKPPP			2 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5,00 Kelompok	5	293.306.000,00	207.631.000,00		
				II	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan		0	100	278.149.000,00	261.731.000,00		
				A	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Pembinaan Mutu dan keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	100%	100	34.420.000,00	33.610.000,00		
		DKPPP			1 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	50,00 Pelaku Usaha	50	34.420.000,00	33.610.000,00		
				B	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100	243.729.000,00	228.121.000,00		
		DKPPP			1 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	50,00 Pelaku Usaha	50	243.729.000,00	228.121.000,00		

2. Urusan Pariwisata

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	Pariwisata	Disparbud	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00%	100	11.307.684.885,00	9.713.246.481,00		
				A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100	3.000.000,00	2.754.900,00		
		Disparbud			1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6,00 Laporan	6	3.000.000,00	2.754.900,00		
				B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah	100%	100	8.027.346.000,00	6.701.334.331,00		
		Disparbud			1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	817,00 Orang/bulan	817	8.024.346.000,00	6.698.459.431,00		
		Disparbud			2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,00 Laporan	4	3.000.000,00	2.874.900,00		
						Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%					
				C	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100	459.875.000,00	446.281.430,00		
		Disparbud			1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	19,00 Paket	19	30.000.000,00	29.866.000,00		
		Disparbud			2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6,00 Paket	6	224.375.000,00	220.362.750,00		
		Disparbud			3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7,00 Paket	7	50.000.000,00	49.583.400,00		
		Disparbud			4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60,00 Dokumen	60	25.000.000,00	24.956.000,00		
		Disparbud			5 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4,00 Laporan	4	10.500.000,00	10.420.000,00		
		Disparbud			6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00 Laporan	12	120.000.000,00	111.093.280,00		
				D	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100	2.399.963.885,00	2.149.186.627,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Disparbud				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36,00 Laporan	36	200.000.000,00	84.214.818,00	
		Disparbud				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00 Laporan	12	2.199.963.885,00	2.064.971.809,00	
								Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%				
					E		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara	100%	100	417.500.000,00	413.689.193,00	
		Disparbud				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7,00 Unit	7	237.500.000,00	234.680.400,00	
		Disparbud				2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	40,00 Unit	40	30.000.000,00	29.900.000,00	
		Disparbud				3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2,00 Unit	2	150.000.000,00	149.108.793,00	
			Meningkatnya nilai PDRB sektor ekonomi kreatif	II			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah kawasan wisata yang ditata	1,00 Lokasi	100	1.284.611.000,00	1.165.797.250,00	
					A		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	100%	100	724.936.000,00	614.490.750,00	
		Disparbud				1	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1,00 Lokasi	1	724.936.000,00	614.490.750,00	
					B		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	100%	100	460.000.000,00	452.381.500,00	
		Disparbud				1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1,00 Kawasan	1	110.000.000,00	107.470.000,00	
								Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	100%				
		Disparbud				2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1,00 Laporan	1	350.000.000,00	344.911.500,00	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
					C	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	100%	100	99.675.000,00	98.925.000,00		
		Disparbud				1 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	1,00 Laporan	1	99.675.000,00	98.925.000,00		
			Meningkatnya nilai PDRB sektor ekonomi kreatif	III	Program Pemasaran Pariwisata		Jumlah kunjungan wisatawan	982.553,00 Orang	100	657.406.000,00	652.380.000,00		
					A	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	100%	100	657.406.000,00	652.380.000,00		
		Disparbud				1 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1,00 Dokumen	1	189.890.000,00	186.230.000,00		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	100%					
		Disparbud				2 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1,00 Dokumen	1	166.300.000,00	165.800.000,00		
							Jumlah Dokumen Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	100%					
		Disparbud				3 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1,00 Dokumen	1	301.216.000,00	300.350.000,00		
			Meningkatnya nilai PDRB sektor ekonomi kreatif	IV	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif		Jumlah SDM yang ditingkatkan kopetensinya sesuai dengan perkembangan dan Tren Kepariwisataaan	150,00 Orang	100	232.110.000,00	220.390.000,00		
					A	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	100%	100	135.030.000,00	126.890.000,00		
		Disparbud				1 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	70,00 Orang	70	135.030.000,00	126.890.000,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
					B	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	100%	100	97.080.000,00	93.500.000,00		
		Disparbud				1 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	150,00 Orang	150	97.080.000,00	93.500.000,00		

3. Urusan Pertanian

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	Pertanian	DKPPP	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	I Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi komoditas pertanian	32.442,17 Ton	91,67	2.572.912.447,00	1.008.525.500,00		
				A Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Penggunaan Sarana Pertanian Yang Terawasi	100%	75	1.091.319.100,00	174.575.000,00		
		DKPPP		1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1,00 Laporan	1	130.000.000,00	80.000.000,00		
		DKPPP		2 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2,00 Laporan	1	961.319.100,00	94.575.000,00		
					Jumlah produksi peternakan	10.877,00 Ton					
				B Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Yang Terkelola	100%	100	1.234.823.347,00	744.809.500,00		
		DKPPP		1 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1,00 Dokumen	1	827.373.500,00	744.809.500,00		
		DKPPP		2 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1,00 Dokumen	1	407.449.847,00	0		
				C Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	100%	100	147.320.000,00	57.132.000,00		
		DKPPP		1 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1,00 Laporan	1	147.320.000,00	57.132.000,00		
				D Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah Pemeriksaan mutu khasiat dan keamanan obat hewan yang beredar	100%	100	99.450.000,00	32.009.000,00		
		DKPPP		1 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	1,00 Laporan	1	99.450.000,00	32.009.000,00		
			Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	II Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terkendalinya Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis	0,00 Kasus	100	863.539.500,00	823.427.500,00		
				A Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	100%	100	245.446.500,00	239.775.500,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		DKPPP				1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1,00 Laporan	1	245.446.500,00	239.775.500,00		
					B	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100	110.000.000,00	92.746.000,00		
		DKPPP				1	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1,00 Laporan	1	110.000.000,00	92.746.000,00		
								Unit Usaha Peternakan Kesehatan dan Produk hewan yang bersertifikat teknis	70,00 unit					
					C	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Persentase Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner yang Diterapkan dan Terawasi	100%	100	508.093.000,00	490.906.000,00		
		DKPPP				1	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1,00 Laporan	1	133.093.000,00	120.598.000,00		
		DKPPP					Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Pemenuhan Persyaratan Teknis yang Ditetapan	1,00 laporan	1	375.000.000,00	370.308.000,00		
				III	Program Penyuluhan Pertanian				0	0	0	0		
					A	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Produksi Komoditas Pertanian	100%	0	0	0		
		DKPPP				1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	100,00%	0	0	0		

4. Urusan Perdagangan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	Perdagangan	Disdagperin	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%	95	24.079.060.990,00	20.904.881.959,00		
				A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100	4.000.000,00	4.000.000,00		
		Disdagperin			1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,00 Laporan	3	4.000.000,00	4.000.000,00		
						Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00%					
				B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah	100%	100	20.527.136.800,00	17.709.966.402,00		
		Disdagperin			1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.584,00 Orang/bulan	3.584,00	20.525.137.000,00	17.707.966.602,00		
		Disdagperin			2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,00 Laporan	2	1.999.800,00	1.999.800,00		
						Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%					
				C	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	82,5	674.090.000,00	592.300.688,00		
		Disdagperin			1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9,00 Paket	9	534.100.000,00	476.745.500,00		
		Disdagperin			2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2,00 Paket	2	9.990.000,00	9.349.800,00		
		Disdagperin			3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200,00 dokumen	360	40.000.000,00	16.235.000,00	Pihak Penyedia Tidak Bisa Menyediakan Barang yang di pesan berupa surat kabar terhitung mulai Triwulan II s.d Triwulan IV	Akan dilakukan koordinasi yang lebih intensif dan tegas dengan Pihak Penyedia.
		Disdagperin			4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20,00 Laporan	20	90.000.000,00	89.970.388,00		
				D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Diadakan	100%	100	300.653.000,00	98.850.000,00		
		Disdagperin			1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35,00 Unit	35	300.653.000,00	98.850.000,00		
						Optimalisasi Pelayanan	100,00%					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
							Administrasi Perkantoran						
				E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100	2.218.183.190,00	2.147.143.113,00		
		Disdagperin			1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24,00 Laporan	24	108.000.000,00	79.219.131,00		
		Disdagperin				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00 Laporan	12	2.110.183.190,00	2.067.923.982,00		
							Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%					
				F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara	100%	100	354.998.000,00	352.621.756,00		
		Disdagperin			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15,00 Unit	15	120.000.000,00	119.327.000,00		
		Disdagperin			2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1,00 Unit	1	15.000.000,00	14.500.000,00		
		Disdagperin			3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50,00 Unit	50	19.998.000,00	19.900.000,00		
		Disdagperin			4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2,00 Unit	2	200.000.000,00	198.894.756,00		
			Menguatnya daya saing sektor perdagangan dan jasa	II	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah pasar rakyat bersih yang berbasis modern	9,00 Unit	100	6.270.858.845,00	5.424.497.494,00		
				A	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah sarana distribusi perdagangan	100%	100	1.804.455.000,00	1.507.714.935,00		
		Disdagperin			1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	635,00 Unit	635	127.490.000,00	124.852.500,00		
							Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	100%					
		Disdagperin			2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	70,00 Unit	70	1.676.965.000,00	1.382.862.435,00		
				B	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola sarana Distribusi Perdagangan	100%	100	4.466.403.845,00	3.916.782.559,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Disdagperin			1	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12,00 Dokumen	12	4.466.403.845,00	3.916.782.559,00	
			Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	III	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting		Laju inflasi kelompok pengeluaran bahan makanan	4,00%	100	736.117.500,00	717.577.875,00	
				A	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	100%	100	736.117.500,00	717.577.875,00	
		Disdagperin			1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1,00 Laporan	1	736.117.500,00	717.577.875,00	
			Menguatnya daya saing sektor perdagangan dan jasa	IV	Program Pengembangan Ekspor		Nilai ekspor Kota Bekasi	475.000.000,00 US Dollar	100	1.413.822.000,00	1.105.063.106,00	
				A	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	100%	100	1.413.822.000,00	1.105.063.106,00	
		Disdagperin			1	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	9,00 Pelaku Usaha	9	340.062.000,00	285.542.881,00	
							Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	100%				
		Disdagperin			2	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	50,00 Pelaku Usaha	50	1.000.000.000,00	747.360.225,00	
							Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	100%				
		Disdagperin			3	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	100,00 Pelaku Usaha	100	73.760.000,00	72.160.000,00	
			Menguatnya daya saing sektor perdagangan dan jasa	V	Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen		Persentase pertumbuhan alat UTP yang ditera/ tera ulang	5,00%	90,56	292.113.500,00	256.427.000,00	
				A	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan ditera ulang	100%	90,56	292.113.500,00	256.427.000,00	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Disdagperin				1	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	23.150,00 Unit	18.777,00	196.094.500,00	164.533.000,00	Realisasi kinerja tidak mencapai target dikarenakan pelaku usaha yang mengajukan alat UTTP untuk ditera/tera ulang masih sedikit, dan pelaku usaha juga bebas melakukan tera/tera ulang di mana saja.	Pelaksanaan tera/tera ulang akan lebih ditingkatkan ditunjang dengan adanya program "Pelayanan Tera/Tera Ulang Keliling" (Petarung Keling) yang diharapkan mampu meningkatkan jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang sesuai target.
								<i>Jumlah pelaku usaha di bidang metrologi legal yang dibina</i>	<i>100%</i>					
		Disdagperin				2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	100,00 Orang	100	96.019.000,00	91.894.000,00		



5. Urusan Perindustrian

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	Perindustrian	Disdagperin	Meningkatnya nilai PDRB sektor ekonomi kreatif	I	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase peningkatan fasilitas terhadap Industri kecil dan menengah	3,00%	66,67	1.338.698.000,00	1.149.026.000,00		
				A	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	100%	66,67	1.338.698.000,00	1.149.026.000,00		
		Disdagperin			1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1,00 Dokumen	1	447.280.000,00	443.550.000,00		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	100%					
		Disdagperin			2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1,00 Dokumen	0	163.660.000,00	0	kegiatan tidak dilaksanakan karena adanya Perubahan pada APBD-P, namun setelah APBD Perubahan estimasi waktu tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.	Perencanaan dan pengawasan kegiatan dilakukan lebih awal untuk menghindari kegagalan pelaksanaan kegiatan karena perbaikan dan keterbatasan waktu.
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	100%					
		Disdagperin			3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3,00 Dokumen	3	727.758.000,00	705.476.000,00		



3.1.4 Fungsi Penunjang Urusan
1. Urusan Administrasi Pemerintahan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah		I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		0	89,88	177.178.624.231,00	163.793.668.152,00		
				A Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	100	100.000.000,00	92.606.500,00		
		Sekretariat Daerah		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20,00 Dokumen	20	100.000.000,00	92.606.500,00		
				B Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan	100%	101,85	52.466.301.840,00	50.706.356.214,00		
		Sekretariat Daerah		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.474,00 Orang/bulan	5.677,00	52.416.301.840,00	50.658.866.214,00	tidak ada permasalahan	dilaksanakan sesuai rencana
		Sekretariat Daerah		2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14,00 Laporan	14	50.000.000,00	47.490.000,00		
				C Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100	175.000.000,00	128.079.000,00		
		Sekretariat Daerah		1 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4,00 Laporan	4	175.000.000,00	128.079.000,00		
					Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,00%					
				D Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	7,89	450.000.000,00	114.455.000,00		
		Sekretariat Daerah		1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	380,00 Orang	30	450.000.000,00	114.455.000,00	tidak ada permasalahan	melakukan sosialisasi penawaran diklat sejak triwulan pertama untuk satu tahun serta merekap dan menjadwalkan kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan bagi ASN yg sudah mendaftar diklat.
					Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%					
				E Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100	9.388.755.500,00	8.316.577.822,00		
		Sekretariat Daerah		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60,00 Paket	60	205.957.500,00	196.213.500,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Sekretariat Daerah			2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	37.879,00 Paket	37.879,00	5.882.500.000,00	5.233.189.400,00		
		Sekretariat Daerah			3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20.774,00 Paket	20.774,00	498.500.000,00	477.620.000,00		
		Sekretariat Daerah			4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2,00 Dokumen	2	100.000.000,00	80.000.000,00		
		Sekretariat Daerah			5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4,00 Laporan	4	500.000.000,00	448.810.000,00		
		Sekretariat Daerah			6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,00 Laporan	1	2.101.798.000,00	1.785.609.922,00		
		Sekretariat Daerah			7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1,00 Dokumen	1	100.000.000,00	95.135.000,00		
				F	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan	100%	99,66	45.511.857.866,00	41.067.189.420,00		
		Sekretariat Daerah			1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	76,00 unit	76	16.685.357.866,00	15.687.581.000,00		
		Sekretariat Daerah			2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7.780,00 unit	7.700,00	21.090.500.000,00	18.054.029.920,00		
		Sekretariat Daerah			3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	685,00 unit	685	7.736.000.000,00	7.325.578.500,00		
				G	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	100%	100	22.790.814.025,00	21.369.323.988,00		
		Sekretariat Daerah			1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,00 Laporan	1	5.000.000,00	0		
		Sekretariat Daerah			2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00 laporan	12	7.880.759.800,00	7.145.878.233,00		
		Sekretariat Daerah			3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12,00 laporan	12	1.200.000.000,00	884.047.335,00		
		Sekretariat Daerah			4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00 laporan	12	13.705.054.225,00	13.339.398.420,00		
				H	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tingkat Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	81	30.475.000.000,00	28.653.780.637,00		
		Sekretariat Daerah			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25,00 unit	25	1.400.000.000,00	1.282.979.631,00		
		Sekretariat Daerah			2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	143,00 unit	143	1.500.000.000,00	1.193.278.242,00		
		Sekretariat Daerah			3	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	200,00 unit	10	300.000.000,00	79.667.586,00	tidak ada permasalahan	dilaksanakan sesuai permohonan yang masuk



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Sekretariat Daerah				4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30,00 unit	30	24.900.000.000,00	23.794.944.115,00	
		Sekretariat Daerah				5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18,00 unit	18	2.375.000.000,00	2.302.911.063,00	
					I	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	56,25	5.491.657.000,00	4.671.663.342,00	
		Sekretariat Daerah				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24,00 Orang/bulan	12	648.649.000,00	405.964.667,00	
		Sekretariat Daerah				2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	54,00 Paket	54	150.000.000,00	146.967.800,00	
		Sekretariat Daerah				3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4,00 Orang	1	25.000.000,00	17.672.000,00	
		Sekretariat Daerah				4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24,00 Orang/bulan	12	4.668.008.000,00	4.101.058.875,00	
					J	Fasilitasi Kerumahaan Sekretariat Daerah		Tingkat Fasilitasi Kerumahaan Sekretariat Daerah	100%	91,67	2.967.220.000,00	2.319.595.714,00	
		Sekretariat Daerah				1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket *) Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12,00 Paket	12	1.005.100.000,00	812.714.853,00	
		Sekretariat Daerah				2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12,00 Paket	9	249.120.000,00	175.000.000,00	
		Sekretariat Daerah				3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12,00 Paket	12	1.713.000.000,00	1.331.880.861,00	
					K	Penataan Organisasi		Persentase keterlaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada pemerintah Kota Bekasi	100%	100	813.402.000,00	640.160.745,00	
		Sekretariat Daerah				1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2,00 Dokumen	2	263.402.000,00	202.641.866,00	
		Sekretariat Daerah				2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2,00 Laporan	2	250.000.000,00	220.441.291,00	
		Sekretariat Daerah				3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1,00 Dokumen	1	100.000.000,00	66.654.830,00	
								Persentase peningkatan pemahaman SAKIP Perangkat Daerah	100%				
		Sekretariat Daerah				4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1,00 Dokumen	1	200.000.000,00	150.422.758,00	
					L	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Persentase Pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	100%	100	6.548.616.000,00	5.713.879.770,00	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Sekretariat Daerah				1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1,00 laporan	1	618.616.000,00	583.970.000,00	
		Sekretariat Daerah				2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1,00 Laporan	1	1.930.000.000,00	1.390.890.000,00	
		Sekretariat Daerah				3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	6,00 laporan	6	4.000.000.000,00	3.739.019.770,00	
			Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	II	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat		Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan bidang pemerintahan	70,00%	100	53.539.716.852,00	50.306.198.677,00		
				A	Administrasi Tata Pemerintahan		Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan bidang pemerintahan	100%	100	18.920.480.996,00	17.738.674.361,00		
		Sekretariat Daerah				1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	5,00 Dokumen	5	4.436.683.796,00	4.114.477.121,00	
		Sekretariat Daerah				2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5,00 Dokumen	5	13.888.957.200,00	13.289.405.700,00	
		Sekretariat Daerah				3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3,00 Dokumen	3	594.840.000,00	334.791.540,00	
							Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kesejahteraan Sosial	100,00%					
				B	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kesejahteraan Sosial	100%	100	32.329.235.856,00	30.769.669.341,00		
		Sekretariat Daerah				1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	9,00 Dokumen	9	6.500.000.000,00	5.939.643.341,00	
		Sekretariat Daerah				2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Mas	1,00 Dokumen	1	8.118.000.000,00	7.651.526.000,00	
		Sekretariat Daerah				3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1,00 Dokumen	1	17.711.235.856,00	17.178.500.000,00	
							Persentase Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah yang diundangkan	100,00%					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
				C	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah yang diundangkan	100%	100	1.190.000.000,00	806.736.721,00		
		Sekretariat Daerah			1 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	8,00 Dokumen	8	750.000.000,00	600.223.571,00		
						Persentase penyelesaian perkara yang dihadapi pemerintah daerah	100%					
		Sekretariat Daerah			2 Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	8,00 Kasus	8	368.000.000,00	137.885.350,00		
						Persentase Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah yang diundangkan	100%					
		Sekretariat Daerah			3 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasi	3,00 Dokumen	3	72.000.000,00	68.627.800,00		
						Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kerjasama Pemerintah Daerah	100,00%					
				D	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kerjasama Pemerintah Daerah	100%	100	1.100.000.000,00	991.118.254,00		
		Sekretariat Daerah			1 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	4,00 Dokumen	4	1.000.000.000,00	908.647.654,00		
		Sekretariat Daerah			2 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1,00 Laporan	1	100.000.000,00	82.470.600,00		
			Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	III	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Ekonomi	100,00%	90,89	7.768.098.000,00	6.952.043.333,00		
				A	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Bidang Usaha BUMD	100%	100	1.065.920.000,00	773.476.488,00		
		Sekretariat Daerah			1 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	3,00 Dokumen	3	575.920.000,00	349.994.488,00		
						Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Ekonomi	100%					
		Sekretariat Daerah			2 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1,00 Laporan	1	150.000.000,00	148.175.000,00		
						Persentase Peningkatan Deviden BUMD	100%					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Sekretariat Daerah				3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1,00 Dokumen	1	340.000.000,00	275.307.000,00		
								Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Pembangunan	100,00%					
					B	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Pembangunan	100%	100	4.927.178.000,00	4.754.859.488,00		
		Sekretariat Daerah				1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2,00 Dokumen	2	200.000.000,00	184.872.518,00		
		Sekretariat Daerah				2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	13,00 Laporan	13	4.527.178.000,00	4.370.650.500,00		
		Sekretariat Daerah				3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	18,00 Laporan	18	200.000.000,00	199.336.470,00		
								Persentase fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	100,00%					
					C	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	72,68	1.775.000.000,00	1.423.707.357,00		
		Sekretariat Daerah				1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1,00 Dokumen	1	725.000.000,00	673.237.105,00		
		Sekretariat Daerah				2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1,00 Dokumen	1	700.000.000,00	495.423.252,00		
								Terlaksananya proses pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%					
		Sekretariat Daerah				3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	205,00 Orang	37	350.000.000,00	255.047.000,00	Sosialisasi untuk PPK tidak dilaksanakan karena regulasi terbaru belum disahkan	dibuat kembali anggaran sosialisasi untuk PPK di tahun 2024, dan sosialisasi telah dilaksanakan tanggal 7-8 maret 2024

2. Urusan Pengawasan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
1	Inspektorat	Inspektorat Kota	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00%	100	40.486.933.180,00	36.977.002.356,00			
					A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	100	15.000.000,00	6.400.000,00		
		Inspektorat Kota			1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12,00 Laporan	12	15.000.000,00	6.400.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Memakai Anggaran Rutin	Memaksimalkan penggunaan anggaran sesuai peruntukannya
					B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100	32.162.698.420,00	29.701.818.346,00		
		Inspektorat Kota			1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110,00 Orang/bulan	110	32.152.698.420,00	29.692.005.546,00		
		Inspektorat Kota			2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,00 Laporan	1	10.000.000,00	9.812.800,00		
							Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,00%					
					C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%	100	888.500.000,00	763.560.000,00		
		Inspektorat Kota			1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1,00 Paket	1	75.000.000,00	71.160.000,00		
		Inspektorat Kota			2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70,00 Orang	70	813.500.000,00	692.400.000,00		
							Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%					
					D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	100	2.048.290.000,00	1.721.987.358,00		
		Inspektorat Kota			1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00 Paket	1	20.000.000,00	19.916.000,00		
		Inspektorat Kota			2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4,00 Paket	4	309.987.000,00	299.190.000,00		
		Inspektorat Kota			3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2,00 Paket	2	250.000.000,00	243.880.000,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Inspektorat Kota				4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12,00 Dokumen	12	49.960.000,00	30.737.000,00		
		Inspektorat Kota				5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1,00 Laporan	1	150.000.000,00	134.723.000,00		
		Inspektorat Kota				6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400,00 Laporan	400	1.268.343.000,00	993.541.358,00		
								Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%					
					E		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100%	100	3.059.975.000,00	2.813.572.000,00		
		Inspektorat Kota				1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	381,00 Unit	381	958.550.000,00	775.550.000,00		
		Inspektorat Kota				2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	301,00 Unit	301	2.101.425.000,00	2.038.022.000,00		
								Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,00%					
					F		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	100	1.037.569.760,00	870.367.621,00		
		Inspektorat Kota				1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	165,00 Laporan	165	4.000.000,00	349.000,00	Banyak surat yang dikirimkan tidak menggunakan jasa pengiriman	Menyediakan anggaran sesuai kebutuhan
		Inspektorat Kota				2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36,00 Laporan	36	330.000.000,00	175.433.716,00	Penyerapan keuangan menyesuaikan dengan pemakaian dan tagihan januari - desember	Menyesuaikan kebutuhan anggaran agar tepat sasaran
		Inspektorat Kota				3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00 Laporan	12	703.569.760,00	694.584.905,00		
								Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%					
					G		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	100	1.274.900.000,00	1.099.297.031,00		
		Inspektorat Kota				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	42,00 Unit	42	250.000.000,00	227.810.581,00		
		Inspektorat Kota				2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100,00 Unit	100	349.900.000,00	271.049.600,00	1. Penyerapan BBM menyesuaikan dengan kebutuhan; 2. Oli salah masuk kode rekening, yang seharusnya masuk kode rekening BB	Memaksimalkan penyerapan dan menempatkan kode rekening yang benar
		Inspektorat Kota				3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	156,00 Unit	156	125.000.000,00	95.187.000,00		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
									TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		Inspektorat Kota				4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1,00 Unit	1	550.000.000,00	505.249.850,00			
			Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	II	Program Penyelenggaraan Pengawasan			Nilai SAKIP Inspektorat	84,30 Nilai	87,5	1.516.608.000,00	464.599.000,00			
					A	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	100%	83,33	1.125.268.000,00	297.935.000,00		
		Inspektorat Kota				1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1,00 Laporan	1	64.600.000,00	0	Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintahan Daerah Merupakan Kegiatan Mandatori sehingga tidak harus menggunakan anggaran	Memastikan anggaran digunakan dengan maksimal tepat sasaran	
		Inspektorat Kota				2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	4,00 Laporan	4	294.540.000,00	32.619.000,00	Belum terdapat proses pengawasan yang membutuhkan tenaga ahli eksternal dan kebutuhan penguji lab	Memastikan anggaran digunakan dengan maksimal tepat sasaran	
		Inspektorat Kota				3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	5,00 Laporan	5	136.000.000,00	44.100.000,00	Reviu laporan kinerja merupakan kegiatan mandatori, sehingga tidak harus menggunakan anggaran	Memastikan anggaran digunakan dengan maksimal tepat sasaran	
		Inspektorat Kota				4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2,00 Laporan	2	268.700.000,00	197.130.000,00			
		Inspektorat Kota				5	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1,00 Kesepakatan	0	315.000.000,00	0	1. Belum terdapat revisi perjanjian kerjasama (No.1152 tanggal 17 Juli 2018) yang mengatur teknis pengawasan internal bersama dengan pihak APH / Eksternal; 2. Kegiatan tidak mendesak untuk dilaksanakan, serta tidak ada pengaduan / laporan masyarakat sebagaimana Kategori kerjasama dalam PKS 1152; 3. Nomenklatur kode rekening tenaga ahli ASN tidak dapat digunakan untuk tenaga dari kepolisian.	- Memastikan anggaran yang disediakan digunakan dengan benar '- menempatkan posisi anggaran sesuai kebutuhan dengan kode rekening yang benar	
		Inspektorat Kota				6	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6,00 Dokumen	6	46.428.000,00	24.086.000,00			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
							Persentase Tindak Lanjut Temuan Internal	80,00%					
				B		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	100%	100	391.340.000,00	166.664.000,00		
		Inspektorat Kota			1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1,00 Laporan	1	133.830.000,00	50.776.000,00		
		Inspektorat Kota			2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	7,00 Laporan	7	257.510.000,00	115.888.000,00		
			Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	III		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Level kapabilitas APIP Inspektorat 3 keatas	3,00 Level	75	984.175.000,00	352.465.663,00		
				A		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100%	50	151.800.000,00	87.500.000,00		
		Inspektorat Kota			1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1,00 Rekomendasi	0	0	0	Waktu Pelaksanaan tidak mencukupi, sehingga anggaran dialihkan pada kegiatan yang lain yang mampu menunjang peningkatan Kinerja APIP	Memastikan bahwa anggaran yang disediakan pada tahun berikutnya digunakan dengan baik
		Inspektorat Kota			2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	2,00 Rekomendasi	2	151.800.000,00	87.500.000,00		
							Indeks Penerapan Manajaemen Resiko (MR)	1,97 Level					
				B		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100	832.375.000,00	264.965.663,00		
		Inspektorat Kota			1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	0,00 perangkat daerah	0	0	0		
		Inspektorat Kota			2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	44,00 perangkat daerah	44	100.000.000,00	62.034.000,00		
		Inspektorat Kota			3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2,00 Kegiatan	2	732.375.000,00	202.931.663,00	1. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan tetapi tidak menggunakan anggaran 2. pengurangan pembelian peralatan dan perlengkapan kantor saber pungli	Sudah dilakukan evaluasi atas besaran penyediaan anggaran khususnya Tim Saber Pungli, sehingga pada tahun berikutnya dipastikan anggaran berkurang dan penyerapan anggaran dapat maksimal

3. Urusan Perencanaan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN		
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI				
1	Perencanaan	Bappelitbangda	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00%	100	27.305.671.020,00	23.951.363.627,00				
					A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%	100	44.000.000,00	43.220.540,00			
		Bappelitbangda				1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,00 Dokumen	3	25.000.000,00	24.590.000,00		
		Bappelitbangda				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,00 Laporan	2	19.000.000,00	18.630.540,00		
					B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100	21.254.534.000,00	18.471.420.178,00			
		Bappelitbangda				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	2.100,00 orang/bulan	2.100,00	21.249.534.000,00	18.466.420.178,00		
		Bappelitbangda				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran/ dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5,00 Laporan	5	5.000.000,00	5.000.000,00		
							Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%						
					C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100	734.850.000,00	705.130.000,00			
		Bappelitbangda				1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3,00 Paket	3	412.350.000,00	410.120.000,00		
		Bappelitbangda				2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	20,00 Orang	20	122.500.000,00	98.500.000,00		
		Bappelitbangda				3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	109,00 Orang	109	200.000.000,00	196.510.000,00		
					D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100	1.245.000.000,00	1.028.915.734,00			
		Bappelitbangda				1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	7,00 paket	7	500.000.000,00	463.556.000,00		
		Bappelitbangda				2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2,00 Paket	2	50.000.000,00	44.681.050,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Bappelitbangda			3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2,00 Dokumen	2	30.000.000,00	30.000.000,00		
		Bappelitbangda			4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1,00 Laporan	1	30.000.000,00	23.040.000,00		
		Bappelitbangda			5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00 Laporan	12	635.000.000,00	467.638.684,00		
				E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100	389.100.000,00	380.105.000,00		
		Bappelitbangda			1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21,00 Unit	21	289.100.000,00	280.695.000,00		
		Bappelitbangda			2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15,00 Unit	15	100.000.000,00	99.410.000,00		
							Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%					
				F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100	3.043.187.020,00	2.926.642.432,00		
		Bappelitbangda			1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00 Laporan	12	60.000.000,00	41.259.817,00		
		Bappelitbangda			2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00 Laporan	12	2.983.187.020,00	2.885.382.615,00		
							Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%					
				G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100%	100	595.000.000,00	395.929.743,00		
		Bappelitbangda			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7,00 Unit	7	290.000.000,00	213.316.793,00		
		Bappelitbangda			2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36,00 Unit	36	280.000.000,00	157.612.950,00		
		Bappelitbangda			3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50,00 Unit	50	25.000.000,00	25.000.000,00		
			Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	II	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Persentase kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan	90,00%	100	4.614.351.000,00	3.843.906.243,00		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
					A	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%	100	2.549.271.000,00	1.975.765.077,00		
		Bappelitbangda			1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD	1,00 Dokumen	1	540.000.000,00	393.870.400,00		
		Bappelitbangda			2	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kota	1,00 Berita Acara	1	484.870.000,00	456.197.357,00		
		Bappelitbangda			3	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	4,00 Dokumen	4	1.524.401.000,00	1.125.697.320,00		
					B	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100	437.560.000,00	400.961.650,00		
		Bappelitbangda			1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	1,00 Masukan	1	437.560.000,00	400.961.650,00		
					C	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100	1.400.000.000,00	1.249.800.016,00		
		Bappelitbangda			1	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	13,00 Dokumen	13	1.400.000.000,00	1.249.800.016,00		
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	0,00 Laporan	0				
							Jumlah Laporan Tahunan Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta	1,00 Laporan	1				
							Laporan Maintenance Aplikasi Pengusulan Bantuan Keuangan DKI Jakarta	100,00%	100				
							Jumlah aparatur yang mengikuti Rakor	100,00 orang	100				
							Jumlah Rompi Petugas MONEV Bantuan Keuangan DKI Jakarta	47,00 buah	47				
					D	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan	100%	100	227.520.000,00	217.379.500,00		
		Bappelitbangda			1	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota	1,00 Dokumen	1	227.520.000,00	217.379.500,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN		
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI				
			Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	III	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah			Persentase kesesuaian antara capaian target pembangunan daerah dengan indikator kinerja utama Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	90,00%	100	1.181.819.000,00	1.072.632.425,00			
					A	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			Persentase capaian kegiatan koordinasi perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100	203.472.000,00	196.515.300,00		
		Bappelitbangda				1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1,00 Dokumen	1	100.000.000,00	97.996.050,00			
		Bappelitbangda				2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	27,00 Perangkat Daerah	27	53.472.000,00	52.140.950,00			
		Bappelitbangda				3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	27,00 Perangkat Daerah	27	50.000.000,00	46.378.300,00			
								Persentase kesesuaian antara capaian target pembangunan daerah dengan indikator kinerja utama Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	90,00%						
					B	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	100%	100	95.775.000,00	87.731.500,00		
		Bappelitbangda				1	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	8,00 Perangkat Daerah	8	55.350.000,00	54.347.750,00			
		Bappelitbangda				2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	8,00 Perangkat Daerah	8	40.425.000,00	33.383.750,00			
								Persentase kesesuaian antara capaian target pembangunan daerah dengan indikator kinerja utama Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	90,00%						



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
					C	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Monitoring Evaluasi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100%	100	882.572.000,00	788.385.625,00		
		Bappelitbangda				1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2,00 Dokumen	2	712.585.000,00	651.635.625,00		
		Bappelitbangda				2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	9,00 Perangkat Daerah	9	89.311.000,00	77.584.200,00		
		Bappelitbangda				3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	9,00 Perangkat Daerah	9	80.676.000,00	59.165.800,00		

4. Urusan Keuangan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	Keuangan	BPKAD	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00%	94,14	139.523.941.112,00	90.713.871.301,00		
				A Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100	15.000.000,00	12.068.500,00		
		BPKAD		1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,00 Laporan	4	15.000.000,00	12.068.500,00		
				B Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	100%	100	128.765.362.000,00	80.678.105.342,00		
		BPKAD		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.788,00 Orang/bulan	2.788,00	128.735.362.000,00	80.648.105.342,00		
		BPKAD		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD & Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1,00 Laporan	1	30.000.000,00	30.000.000,00		
					Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,00%					
				C Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Optimalisasi Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	73,84	602.485.000,00	433.441.000,00		
		BPKAD		1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	172,00 Paket	168	429.985.000,00	417.661.000,00		
		BPKAD		2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18,00 Orang	9	172.500.000,00	15.780.000,00		
					Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%					
				D Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	93,1	2.506.857.000,00	2.202.845.523,00		
		BPKAD		1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8,00 Paket	8	1.408.714.000,00	1.369.230.000,00		
		BPKAD		2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2,00 Paket	2	160.000.000,00	153.810.000,00		
		BPKAD		3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	9,00 Jenis	9	47.000.000,00	36.135.000,00		
		BPKAD		4 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	35,00 Laporan	24	50.000.000,00	13.250.000,00		
		BPKAD		5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	201,00 Laporan	181	448.638.000,00	278.712.923,00		
		BPKAD		6 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.888,00 Box	1.888,00	392.505.000,00	351.707.600,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
				E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100	611.517.000,00	597.250.000,00		
		BPKAD			1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang disediakan	46,00 Unit	46	611.517.000,00	597.250.000,00		
						Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%					
				F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100	5.862.960.055,00	5.773.669.233,00		
		BPKAD			1 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00 Laporan	12	5.862.960.055,00	5.773.669.233,00		
						Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%					
				G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100	1.159.760.057,00	1.016.491.703,00		
		BPKAD			1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0,00 Unit	0	448.320.500,00	390.859.900,00		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara dan dibayarkan pajaknya	21,00 Unit	21				
		BPKAD			2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0,00 Unit	0	200.000.000,00	133.734.500,00		
						Jumlah kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	69,00 Unit	69				
		BPKAD			3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	80,00 Unit	80	511.439.557,00	491.897.303,00		
			Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	II	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan Waktu Penetapan APBD	100,00%	100	94.362.376.387,00	56.856.597.623,00		
				A	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku	100%	100	1.485.824.600,00	1.272.085.970,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		BPKAD				1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2,00 Dokumen	2	85.440.000,00	61.784.125,00	
		BPKAD				2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2,00 Dokumen	2	65.700.000,00	55.246.250,00	
		BPKAD				3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1,00 Dokumen	1	46.160.000,00	38.071.900,00	
		BPKAD				4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1,00 Dokumen	1	50.000.000,00	17.712.000,00	
		BPKAD				5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	1,00 Dokumen	1	13.335.600,00	13.335.600,00	
		BPKAD				6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1,00 Dokumen	1	55.650.000,00	29.700.000,00	
		BPKAD				7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	4,00 Dokumen	4	146.550.000,00	121.418.335,00	
		BPKAD				8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	6,00 Dokumen	6	149.650.000,00	146.599.600,00	
		BPKAD				9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1,00 Dokumen	1	50.000.000,00	46.202.600,00	
		BPKAD				10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2,00 Dokumen	2	30.000.000,00	18.375.000,00	
		BPKAD				11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1,00 Dokumen	1	215.119.000,00	197.477.000,00	
		BPKAD				12	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	74,00 Orang	74	578.220.000,00	526.163.560,00	
								Persentase Kesesuaian Pelaporan Penerbitan SP2D dengan SPM yang Diterima	100,00%				
					B		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Penatausahaan Keuangan Daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku	100%	100	321.897.000,00	259.701.449,00	
		BPKAD				1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1,00 Dokumen	1	104.355.000,00	86.677.440,00	
		BPKAD				2	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1,00 Dokumen	1	48.200.000,00	33.958.784,00	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		BPKAD				3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan	1,00 Laporan	1	53.961.000,00	37.551.000,00		
							Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan P	0,00 Laporan	0				
		BPKAD				4	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	1,00 Dokumen	1	50.475.000,00	44.004.225,00		
		BPKAD				5	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	110,00 Orang	110	64.906.000,00	57.510.000,00		
							Persentase Kesesuaian Pelaporan Keuangan Dengan SAP dan tepat waktu	100,00%					
					C		Jumlah Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sesuai SAP	100%	100	1.179.180.000,00	1.092.673.159,00		
		BPKAD				1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4,00 Laporan	4	50.000.000,00	48.465.250,00		
		BPKAD				2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	4,00 Dokumen	4	43.200.000,00	39.930.800,00		
		BPKAD				3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	4,00 Laporan	4	119.175.000,00	117.455.425,00		
							Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	0,00 Laporan	0				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		BPKAD				4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2,00 Laporan	2	131.955.000,00	123.807.559,00		
		BPKAD				5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	2,00 Dokumen	2	141.290.000,00	121.131.000,00		
		BPKAD				6	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1,00 Dokumen	1	174.345.000,00	144.185.500,00		
		BPKAD				7	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	3,00 Dokumen	3	263.000.000,00	260.386.300,00		
		BPKAD				8	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	147,00 orang	147	214.815.000,00	203.056.500,00		
		BPKAD				9	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	53,00 Lembaga	53	41.400.000,00	34.254.825,00		
								Presentase OPD yang melaksanakan Administrasi Penatausahaan Keuangan dengan Tertib	100,00%					
					D	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	100%	100	91.375.474.787,00	54.232.137.045,00		
		BPKAD				1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan	1,00 Laporan	1	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00		
		BPKAD				2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1,00 Laporan	1	41.375.474.787,00	4.232.137.045,00		
			Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	III	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah			Jumlah Bidang tanah milik pemkot yang bersertifikat	554,00 Sertifikat	100	1.862.137.000,00	998.519.845,00		
					A	Pengelolaan Barang Milik Daerah			100%	100	1.862.137.000,00	998.519.845,00		
		BPKAD				1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1,00 Dokumen	1	186.924.000,00	165.296.500,00		
		BPKAD				2	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1,00 Laporan	1	50.863.000,00	23.943.000,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		BPKAD				3	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1,00 Laporan	1	112.900.000,00	68.964.445,00	
		BPKAD				4	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1,00 Laporan	1	804.650.000,00	513.450.000,00	
		BPKAD				5	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5,00 Dokumen	5	639.150.000,00	204.455.900,00	
		BPKAD				6	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	90,00 Orang	90	67.650.000,00	22.410.000,00	

5. Urusan Kepegawaian

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	Kepegawaian	BKPSDM	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00%	100	17.680.426.345,00	15.909.231.418,00		
				A Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100	3.000.000,00	3.000.000,00		
		BKPSDM		1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,00 Laporan	2	3.000.000,00	3.000.000,00		
				B Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100	15.787.062.000,00	14.280.214.413,00		
		BKPSDM		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.644,00 Orang/Bulan	1.644,00	15.784.062.000,00	14.277.414.413,00		
		BKPSDM		2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,00 Laporan	1	3.000.000,00	2.800.000,00		
					Optimalisasi Disiplin Aparatur	100,00%					
				C Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100	20.000.000,00	20.000.000,00		
		BKPSDM		1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4,00 Orang	4	20.000.000,00	20.000.000,00		
					Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%					
				D Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100	888.010.000,00	686.849.459,00		
		BKPSDM		1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4,00 Paket	4	400.000.000,00	306.158.500,00		
		BKPSDM		2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3,00 Paket	3	270.510.000,00	261.107.000,00		
		BKPSDM		3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10,00 Dokumen	10	20.000.000,00	19.412.500,00		
		BKPSDM		4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00 Laporan	12	197.500.000,00	100.171.459,00		
				E Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100	679.354.345,00	639.666.399,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		BKPSDM				1	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10,00 Laporan	10	40.000.000,00	40.000.000,00		
		BKPSDM				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00 Laporan	12	639.354.345,00	599.666.399,00		
							Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100,00%					
					F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100	303.000.000,00	279.501.147,00		
		BKPSDM				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5,00 Unit	5	187.500.000,00	170.137.647,00		
		BKPSDM				2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14,00 Unit	14	70.500.000,00	64.363.500,00		
		BKPSDM				3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	62,00 Unit	62	45.000.000,00	45.000.000,00		
			Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	II	Program Kepegawaian Daerah			Mutu Pelayanan Administrasi Kepegawaian Bemilai Baik	82,89 Nilai	100	7.613.758.000,00	6.318.380.257,00		
					A	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Persentase Capaian Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100%	100	413.760.000,00	268.539.752,00		
		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				1	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1,00 Dokumen	1	113.760.000,00	32.708.600,00		
		BKPSDM				2	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1,00 Dokumen	1	300.000.000,00	235.831.152,00		
					B	Mutasi dan Promosi ASN		Jumlah Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%	100	711.000.000,00	569.296.220,00		
		BKPSDM				1	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2,00 Dokumen	2	350.000.000,00	300.170.500,00		
		BKPSDM					Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1,00 Dokumen	1	361.000.000,00	269.125.720,00		
							Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	45,00%						

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
				C	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Capaian Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	100%	100	6.164.850.000,00	5.167.540.100,00		
		BKPSDM			1 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	88,00 Orang	88	150.000.000,00	121.763.900,00		
		BKPSDM			2 Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1,00 Dokumen	1	700.000.000,00	627.622.000,00		
		BKPSDM			3 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	10,00 Orang	10	452.750.000,00	367.659.800,00		
		BKPSDM			4 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1,00 Dokumen	1	4.862.100.000,00	4.050.494.400,00		
						Persentase Prestasi Kerja ASN bernilai Baik	93,50%					
				D	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Capaian Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100%	100	324.148.000,00	313.004.185,00		
		BKPSDM			1 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1,00 Dokumen	1	108.048.000,00	106.148.000,00		
		BKPSDM			2 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	570,00 Orang	570	108.050.000,00	106.906.555,00		
		BKPSDM			3 Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	200,00 Orang	200	108.050.000,00	99.949.630,00		

6. Urusan Penelitian dan Pengembangan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	Penelitian dan Pengembangan	Bappelitbangda	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	I	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Bidang Sosial dan Pemerintahan	40,00%	100	1.329.021.800,00	1.301.502.955,00		
					A	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100%	100	250.000.000,00	242.669.950,00		
		Bappelitbangda				1 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1,00 Laporan	1	250.000.000,00	242.669.950,00		
					B	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100%	100	250.000.000,00	244.219.550,00		
		Bappelitbangda				1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	2,00 Dokumen	2	250.000.000,00	244.219.550,00		
							Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	40,00%					
					C	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100%	100	250.000.000,00	245.147.400,00		
		Bappelitbangda				1 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1,00 Dokumen	1	250.000.000,00	245.147.400,00		
							Jumlah IPTEK dan Inovasi Daerah yang mendapatkan predikat	1,00 Jumlah					
					D	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Event Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100%	100	579.021.800,00	569.466.055,00		
		Bappelitbangda				1 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1,00 Laporan	1	249.613.000,00	247.867.525,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Bappelitbangda				2	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1,00 Laporan	1	329.408.800,00	321.598.530,00		



7. Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN		
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI				
1	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00%	97	96.951.819.660,00	89.068.318.565,00				
					A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100	80.000.000,00	27.606.900,00			
		Sekretariat DPRD				1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25,00 Dokumen	25	40.000.000,00	14.083.500,00	Anggaran bersifat persediaan dan penggunaan menyesuaikan kebutuhan	Akan dilakukan perbaikan perencanaan dan/atau penyesuaian baik dari segi target maupun anggaran sehingga realisasi fisik dan keuangan mencapai harapan yang diinginkan dan peningkatan kualitas/pemahaman pegawai terkait perencanaan baik dari level bawah s/d atas.
		Sekretariat DPRD				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,00 Laporan	3	40.000.000,00	13.523.400,00	Anggaran bersifat persediaan dan penggunaan menyesuaikan kebutuhan	Akan dilakukan perbaikan perencanaan dan/atau penyesuaian baik dari segi target maupun anggaran sehingga realisasi fisik dan keuangan mencapai harapan yang diinginkan
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00 Laporan	0					
					B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100	10.538.262.000,00	9.980.607.228,00			
		Sekretariat DPRD				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55,00 Orang/Bulan	55	10.498.262.000,00	9.952.742.228,00		
		Sekretariat DPRD				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,00 Laporan	1	40.000.000,00	27.865.000,00		
							Optimalisasi Disiplin Aparatur	100,00%						
					C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100	770.000.000,00	604.206.941,00			
		Sekretariat DPRD				1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	32,00 Orang	32	250.000.000,00	204.503.600,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		Sekretariat DPRD				2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	48,00 Orang	48	520.000.000,00	399.703.341,00		
								Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%					
					D	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya Kegiatan Pada Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100	5.997.329.562,00	5.059.785.500,00		
		Sekretariat DPRD				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00 Paket	1	150.000.000,00	148.274.950,00		
		Sekretariat DPRD				2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4,00 Paket	4	2.787.763.000,00	2.261.984.850,00		
		Sekretariat DPRD				3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4,00 Paket	4	1.029.116.562,00	955.135.000,00		
		Sekretariat DPRD				4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4,00 Dokumen	4	250.000.000,00	149.312.700,00		
		Sekretariat DPRD				5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1,00 Laporan	1	1.152.450.000,00	1.145.362.250,00		
		Sekretariat DPRD				6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,00 Laporan	1	628.000.000,00	399.715.750,00		
								Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%					
					E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100	6.051.916.614,00	6.000.039.290,00		
		Sekretariat DPRD				1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13,00 Paket	13	6.051.916.614,00	6.000.039.290,00		
								Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%					
					F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	91,67	6.778.044.920,00	6.377.131.246,00		
		Sekretariat DPRD				1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	750,00 Laporan / Surat	750	25.000.000,00	2.979.000,00	Anggaran bersifat persediaan dan penggunaan menyesuaikan kebutuhan	Akan dilakukan perbaikan perencanaan dan/atau penyesuaian baik dari segi target maupun anggaran sehingga realisasi fisik dan keuangan mencapai harapan yang diinginkan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Sekretariat DPRD			2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4,00 Paket	3	1.110.000.000,00	1.032.854.504,00	Anggaran bersifat persediaan dan penggunaan menyesuaikan kebutuhan	Akan dilakukan perbaikan perencanaan dan/atau penyesuaian baik dari segi target maupun anggaran sehingga realisasi fisik dan keuangan mencapai harapan yang diinginkan
		Sekretariat DPRD			3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.236,00 Orang/Bulan	1.236,00	5.643.044.920,00	5.341.297.742,00		
							Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%					
				G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100	7.728.316.564,00	7.136.400.651,00		
		Sekretariat DPRD			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1,00 Unit	1	150.000.000,00	67.419.500,00		
		Sekretariat DPRD			2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31,00 Unit	31	550.000.000,00	278.338.344,00		
		Sekretariat DPRD			3	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0,00 Unit	0	100.000.000,00	99.165.104,00		
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1,00 Paket	1				
		Sekretariat DPRD			4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11,00 Paket	11	400.000.000,00	371.293.740,00		
		Sekretariat DPRD			5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24.757,00 Meter Persegi	24.757,00	6.528.316.564,00	6.320.183.963,00		
							Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00%					
				H	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	83,33	58.007.950.000,00	53.148.084.007,00		
		Sekretariat DPRD			1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	600,00 Orang/Bulan	600	57.157.950.000,00	52.454.839.007,00		
		Sekretariat DPRD			2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5,00 Paket	5	700.000.000,00	625.000.000,00		
		Sekretariat DPRD			3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50,00 Orang	25	150.000.000,00	68.245.000,00	Dari 50 orang Dewan hanya 25 orang yang bersedia melakukan MCU sebab yang lain sudah melakukan MCU mandiri sebagai persyaratan mencalonkan lagi tahun 2024	Akan dilakukan perbaikan perencanaan dan/atau penyesuaian baik dari segi target maupun anggaran sehingga realisasi fisik dan keuangan mencapai harapan yang diinginkan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
							Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%					
				I	Layanan Administrasi DPRD		Tersedianya Laporan Administrasi DPRD	100%	100	1.000.000.000,00	734.456.802,00		
		Sekretariat DPRD			1	Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	40,00 Laporan	40	1.000.000.000,00	734.456.802,00		
			Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	II	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD		Persentase Tersfasilitasinya Proses Penyusunan dan Penetapan PERDA	100,00%	93,8	87.999.761.960,00	63.290.535.873,00		
				A	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Tersedianya Dokumen Propemperda, Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif dan Peraturan Daerah	100%	80	7.750.000.000,00	7.061.435.868,00		
		Sekretariat DPRD			1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2,00 Dokumen	2	500.000.000,00	446.033.500,00		
		Sekretariat DPRD			2	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	15,00 Dokumen	15	3.500.000.000,00	3.298.178.135,00		
		Sekretariat DPRD			3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	6,00 Dokumen	6	1.750.000.000,00	1.704.330.633,00		
		Sekretariat DPRD			4	Facilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5,00 Dokumen	5	2.000.000.000,00	1.612.893.600,00		
		Sekretariat DPRD			5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1,00 Dokumen	0	0	0	Anggaran bersifat persediaan dan penggunaan menyesuaikan kebutuhan	Akan dilakukan perbaikan perencanaan dan/atau penyesuaian baik dari segi target maupun anggaran sehingga realisasi fisik dan keuangan mencapai harapan yang diinginkan dan peningkatan kualitas/pemahaman pegawai terkait perencanaan baik dari level bawah s/d atas.
							Persentase Terpenuhinya Proses Penyusunan dan Penetapan APBD dan LAPBD	100,00%					
				B	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Tersedianya Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%	100	5.800.000.000,00	3.575.925.019,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		Sekretariat DPRD				1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1,00 Dokumen	1	1.050.000.000,00	801.694.311,00	Efisiensi anggaran namun target tercapai	Akan dilakukan perbaikan perencanaan dan/atau penyesuaian baik dari segi target maupun anggaran sehingga realisasi fisik dan keuangan mencapai harapan yang diinginkan dan peningkatan kualitas/pemahaman pegawai terkait perencanaan baik dari level bawah s/d atas.
		Sekretariat DPRD				2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1,00 Dokumen	1	1.050.000.000,00	622.035.598,00		
		Sekretariat DPRD				3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1,00 Dokumen	1	1.050.000.000,00	794.065.343,00	Efisiensi anggaran namun target tercapai	Akan dilakukan perbaikan perencanaan dan/atau penyesuaian baik dari segi target maupun anggaran sehingga realisasi fisik dan keuangan mencapai harapan yang diinginkan dan peningkatan kualitas/pemahaman pegawai terkait perencanaan baik dari level bawah s/d atas.
		Sekretariat DPRD				4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1,00 Dokumen	1	1.050.000.000,00	550.137.002,00		
		Sekretariat DPRD				5	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1,00 Dokumen	1	550.000.000,00	206.579.309,00		
								Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	0,00 Dokumen	0				
		Sekretariat DPRD				6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1,00 Dokumen	1	1.050.000.000,00	601.413.456,00		
								Persentase Terselenggaranya kegiatan DPRD	100,00%					
				C			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Tersedianya Laporan dan Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	100	22.345.241.960,00	18.595.478.430,00		
		Sekretariat DPRD				1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12,00 Laporan	12	4.398.347.240,00	3.897.507.201,00		
		Sekretariat DPRD				2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12,00 Laporan	12	4.398.347.240,00	3.682.041.520,00		
		Sekretariat DPRD				3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12,00 Laporan	12	4.398.347.240,00	3.637.563.453,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		Sekretariat DPRD				4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12,00 Laporan	12	4.398.347.240,00	3.684.949.350,00		
		Sekretariat DPRD				5	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1,00 Dokumen	1	1.000.600.000,00	689.405.905,00		
		Sekretariat DPRD				6	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1,00 Dokumen	1	2.694.265.000,00	2.233.087.956,00		
		Sekretariat DPRD				7	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1,00 Dokumen	1	1.056.988.000,00	770.923.045,00	Efisiensi anggaran namun target tercapai	Akan dilakukan perbaikan perencanaan dan/atau penyesuaian baik dari segi target maupun anggaran sehingga realisasi fisik dan keuangan mencapai harapan yang diinginkan dan peningkatan kualitas/pemahaman pegawai terkait perencanaan baik dari level bawah s/d atas.
					D	Peningkatan Kapasitas DPRD		Tersedianya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	101,57	24.410.900.000,00	14.446.168.871,00		
		Sekretariat DPRD				1	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	0,00 Dokumen	0	8.200.000.000,00	2.257.978.608,00	Penyesuaian Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 Pasal 14 ayat 2 paling banyak 6 kali dalam satu tahun anggaran sedangkan dianggarkan 13 kali	Akan dilakukan perbaikan perencanaan dan/atau penyesuaian baik dari segi target maupun anggaran sehingga realisasi fisik dan keuangan mencapai harapan yang diinginkan dan peningkatan kualitas/pemahaman pegawai terkait perencanaan baik dari level bawah s/d atas.
								Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	13,00 Dokumen	13				
		Sekretariat DPRD				2	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	204,00 Orang/bulan	204	2.341.612.000,00	1.661.630.000,00		
		Sekretariat DPRD				3	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	72,00 Orang	72	756.000.000,00	717.200.000,00		
								Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	0,00 Orang	0				
		Sekretariat DPRD				4	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	51,00 Dokumen	55	11.228.288.000,00	8.107.492.582,00	Efisiensi anggaran namun target tercapai	Akan dilakukan perbaikan perencanaan dan/atau penyesuaian baik dari segi target maupun anggaran sehingga realisasi fisik dan keuangan mencapai harapan yang diinginkan dan peningkatan kualitas/pemahaman pegawai terkait perencanaan baik dari level bawah s/d atas.
		Sekretariat DPRD				5	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	3,00 Dokumen	3	1.885.000.000,00	1.701.867.681,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
					E	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Tersedianya Laporan dan Dokumen Hasil Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%	88,89	12.447.800.000,00	10.630.983.618,00		
		Sekretariat DPRD				1 Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3,00 Laporan	3	405.975.000,00	258.310.000,00		
		Sekretariat DPRD				2 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	3,00 Dokumen	2	1.225.000.000,00	1.183.081.368,00		
		Sekretariat DPRD				3 Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3,00 Dokumen	3	10.816.825.000,00	9.189.592.250,00		
					F	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Tersedianya Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100%	100	700.000.000,00	631.616.307,00		
		Sekretariat DPRD				1 Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	12,00 Laporan	12	700.000.000,00	631.616.307,00		
					G	Fasilitasi Tugas DPRD	Tersedianya Laporan dan Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas DPRD	100%	83,33	14.545.820.000,00	8.348.927.760,00		
		Sekretariat DPRD				1 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12,00 Dokumen	4	6.745.820.000,00	1.813.654.160,00	Proses administrasi yang lama, adanya rechedule dan agenda Dewan yang padat sehingga kegiatan tidak/belum terlaksana	Akan dilakukan perbaikan dalam proses administrasi sehingga dapat terjadwalkan dengan baik, serta membangun komitmen dan sinergitas yang baik dengan dewan, perbaikan perencanaan dan/atau penyesuaian baik dari segi target maupun anggaran sehingga realisasi fisik dan keuangan mencapai harapan yang diinginkan dan peningkatan kualitas/ pemahaman pegawai terkait perencanaan baik dari level bawah s/d atas.
		Sekretariat DPRD				2 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	0,00 Laporan	0	1.000.000.000,00	718.751.627,00	Penghematan atau efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan	Akan dilakukan perbaikan perencanaan dan/atau penyesuaian baik dari segi target maupun anggaran sehingga realisasi fisik dan keuangan mencapai harapan yang diinginkan dan peningkatan kualitas/ pemahaman pegawai terkait perencanaan baik dari level bawah s/d atas.
							Jumlah Laporan Kinerja DPRD yang Disusun	2,00 Laporan	2				
		Sekretariat DPRD				3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	3,00 Dokumen	3	5.500.000.000,00	4.755.935.323,00		
		Sekretariat DPRD				4 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	36,00 Dokumen	36	1.300.000.000,00	1.060.586.650,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
								Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	0,00 Dokumen	0				

8. Urusan Administrasi Kewilayahan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	Kecamatan Bekasi Timur	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00%	100	20.704.692.170,00	19.597.643.432,00		
				A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100	3.000.000,00	3.000.000,00		
		Kecamatan Bekasi Timur			1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8,00 Laporan	8	3.000.000,00	3.000.000,00		
						Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,00%					
				B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100	10.659.933.400,00	9.926.259.367,00		
		Kecamatan Bekasi Timur			1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.569,00 Orang/bulan	1.569,00	10.656.933.400,00	9.923.259.367,00		
		Kecamatan Bekasi Timur			2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,00 Laporan	1	3.000.000,00	3.000.000,00		
				C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100	10.000.000,00	9.600.000,00		
		Kecamatan Bekasi Timur			1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2,00 Orang	2	10.000.000,00	9.600.000,00		
				D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100	442.020.000,00	435.089.976,00		
		Kecamatan Bekasi Timur			1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,00 Paket	5	20.000.000,00	18.050.376,00		
		Kecamatan Bekasi Timur			2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4,00 Paket	4	222.020.000,00	219.233.600,00	-	
		Kecamatan Bekasi Timur			3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2,00 Paket	2	50.000.000,00	49.900.000,00		
		Kecamatan Bekasi Timur			4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12,00 Dokumen	12	20.000.000,00	18.075.000,00		
		Kecamatan Bekasi Timur			5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12,00 Laporan	12	10.000.000,00	9.917.000,00	-	
		Kecamatan Bekasi Timur			6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00 Laporan	12	115.000.000,00	114.965.000,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Kecamatan Bekasi Timur				7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5,00 Dokumen	5	5.000.000,00	4.949.000,00	-	
								Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%					
					E		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100	9.264.738.770,00	8.916.123.815,00		
		Kecamatan Bekasi Timur				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00 Laporan	12	375.000.000,00	290.938.197,00	Salah satu persentase realisasi keuangan terkecil ada di sub kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan jasa komunikasi dan listrik dikarenakan anggaran yang digunakan sesuai kebutuhan tahun berjalan	Melakukan skema kebutuhan anggaran terkait penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang ada di kantor kecamatan dan kelurahan untuk tahun 2024 dst.
		Kecamatan Bekasi Timur				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00 Laporan	12	8.889.738.770,00	8.625.185.618,00		
								Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%					
					F		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100	325.000.000,00	307.570.274,00		
		Kecamatan Bekasi Timur				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2,00 Unit	2	35.000.000,00	32.907.843,00		
		Kecamatan Bekasi Timur				2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14,00 Unit	14	120.000.000,00	105.242.631,00		
		Kecamatan Bekasi Timur				3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51,00 Unit	51	20.000.000,00	19.900.000,00		
		Kecamatan Bekasi Timur				4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3,00 Unit	3	150.000.000,00	149.519.800,00		
			Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	II			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat	100,00%	100	250.000.000,00	239.267.035,00		
					A		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	100	150.000.000,00	142.279.435,00		
		Kecamatan Bekasi Timur				1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,00 Dokumen	12	30.000.000,00	28.200.000,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		Kelurahan Margahayu				2	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,00 Dokumen	12	30.000.000,00	25.602.773,00		
		Kelurahan Durenjaya				3	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,00 Dokumen	12	30.000.000,00	29.145.000,00		
		Kelurahan Bekasijaya				4	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,00 DOKUMEN	12	30.000.000,00	29.904.008,00		
		Kelurahan Arenjaya				5	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,00 Dokumen	12	30.000.000,00	29.427.654,00		
					B	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kecamatan	100%	100	100.000.000,00	96.987.600,00		
		Kecamatan Bekasi Timur					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1,00 Laporan	1	100.000.000,00	96.987.600,00		
			Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif	100,00%	100	10.179.096.800,00	9.937.841.597,00			
					A	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	100	9.819.096.800,00	9.607.730.097,00		
		Kecamatan Bekasi Timur				1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18,00 Lembaga Kemasyarakatan	18	100.000.000,00	98.255.000,00		
		Kelurahan Margahayu				2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1,00 Unit	1	200.000.000,00	200.000.000,00		
		Kelurahan Durenjaya				3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1,00 paket	1	200.000.000,00	200.000.000,00		
		Kelurahan Bekasijaya				4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2,00 Unit	2	200.000.000,00	200.000.000,00		
		Kelurahan Arenjaya				5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1,00 Unit	1	200.000.000,00	200.000.000,00		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Kecamatan Bekasi Timur				6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14,00 Pokmas / Ormas	14	500.000.000,00	489.212.500,00	
		Kelurahan Margahayu				7	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7,00 Pokmas / Ormas	7	2.127.839.200,00	2.101.756.199,00	
		Kelurahan Durenjaya				8	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7,00 Pokmas / Ormas	7	2.211.540.800,00	2.162.730.200,00	
		Kelurahan Bekasijaya				9	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7,00 Pokmas / Ormas	7	1.919.823.200,00	1.847.854.000,00	
		Kelurahan Arenjaya				10	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7,00 Pokmas / Ormas	7	2.109.893.600,00	2.058.198.198,00	
		Kecamatan Bekasi Timur				11	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4,00 Laporan	4	50.000.000,00	49.724.000,00	
						B	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat	100%	100	360.000.000,00	330.111.500,00	
		Kelurahan Margahayu				1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00 Kegiatan	2	70.000.000,00	55.955.000,00	
		Kelurahan Durenjaya				2	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00 Lembaga Kemasyarakatan	2	70.000.000,00	59.200.000,00	
		Kelurahan Bekasijaya				3	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00 Kegiatan	2	70.000.000,00	69.800.000,00	
		Kelurahan Arenjaya				4	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00 Lembaga Kemasyarakatan	2	70.000.000,00	68.200.000,00	
		Kecamatan Bekasi Timur				5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12,00 Laporan	12	80.000.000,00	76.956.500,00	
			Terwujudnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	IV	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum			Persentase wilayah tertib K3	100,00%	75	50.000.000,00	47.656.000,00	
						A	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah Tertib K3	100%	75	50.000.000,00	47.656.000,00	
		Kecamatan Bekasi Timur				1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12,00 Laporan	9	50.000.000,00	47.656.000,00	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
			Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat	100,00%	100	40.000.000,00	41.263.500,00		
				A	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat	100%	100	40.000.000,00	41.263.500,00		
		Kecamatan Bekasi Timur			1 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12,00 Dokumen	12	40.000.000,00	41.263.500,00		
2	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	Kecamatan Bekasi Barat	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00%	101,56	21.777.632.590,00	20.363.735.887,00		
				A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	125	3.000.000,00	3.000.000,00		
		Kecamatan Bekasi Barat			1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,00 Laporan	5	3.000.000,00	3.000.000,00		
				B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keuangan Perangkat Daerah	100%	100	11.911.494.000,00	10.870.480.038,00		
		Kecamatan Bekasi Barat			1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.648,00 Orang/Bulan	1.648,00	11.908.494.000,00	10.867.480.038,00		
		Kecamatan Bekasi Barat			2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,00 Laporan	1	3.000.000,00	3.000.000,00		
						Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,00%					
				C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100	10.000.000,00	10.000.000,00		
		Kecamatan Bekasi Barat			1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4,00 Orang	4	10.000.000,00	10.000.000,00		
						Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%					
				D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	95,83	460.000.000,00	436.362.000,00		
		Kecamatan Bekasi Barat			1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00 Paket	1	20.000.000,00	20.000.000,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Kecamatan Bekasi Barat				2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3,00 Paket	3	240.000.000,00	233.876.000,00	
		Kecamatan Bekasi Barat				3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1,00 Paket	1	60.000.000,00	59.000.000,00	
		Kecamatan Bekasi Barat				4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12,00 Dokumen	12	20.000.000,00	10.950.000,00	
		Kecamatan Bekasi Barat				5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00 Laporan	9	115.000.000,00	107.640.000,00	
		Kecamatan Bekasi Barat				6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1,00 Dokumen	1	5.000.000,00	4.896.000,00	
							Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%					
				E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	112,5	9.038.138.590,00	8.721.113.782,00		
		Kecamatan Bekasi Barat				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00 Laporan	15	404.600.000,00	308.361.435,00	
		Kecamatan Bekasi Barat				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00 Laporan	12	8.633.538.590,00	8.412.752.347,00	
							Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%					
				F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100	355.000.000,00	322.780.067,00		
		Kecamatan Bekasi Barat				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2,00 Unit	2	35.000.000,00	34.870.600,00	
		Kecamatan Bekasi Barat				2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35,00 Unit	35	150.000.000,00	119.073.167,00	
		Kecamatan Bekasi Barat				3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30,00 Unit	30	20.000.000,00	19.540.000,00	
		Kecamatan Bekasi Barat				4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6,00 Unit	6	150.000.000,00	149.296.300,00	
			Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat	100,00%	82,14	180.000.000,00	158.476.500,00		
				A	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			100%	79,17	130.000.000,00	126.685.500,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Kelurahan Jakasampurna				1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,00 Dokumen	9	20.000.000,00	19.740.000,00		
								Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%					
		Kecamatan Bekasi Barat				2	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,00 Dokumen	12	30.000.000,00	30.000.000,00		
		Kelurahan Kotabaru				3	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,00 Dokumen	9	20.000.000,00	19.600.000,00		
		Kelurahan Kranji				4	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,00 Dokumen	9	20.000.000,00	18.643.500,00		
		Kelurahan Bintara				5	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,00 Dokumen	9	20.000.000,00	18.972.000,00		
		Kelurahan Bintarajaya				6	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,00 Dokumen	9	20.000.000,00	19.730.000,00		
					B	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kecamatan	100%	100	50.000.000,00	31.791.000,00		
		Kecamatan Bekasi Barat				1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1,00 Dokumen	1	50.000.000,00	31.791.000,00		
			Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif	100,00%	88,89	10.397.318.600,00	10.237.102.164,00		
					A	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	84,62	10.047.318.600,00	9.892.872.164,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		Kecamatan Bekasi Barat				1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5,00 Lembaga Kemasyarakatan	5	120.000.000,00	118.220.000,00		
		Kelurahan Jakasampurna				2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1,00 Unit	1	200.000.000,00	200.000.000,00		
		Kelurahan Kotabaru				3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1,00 Unit	0	200.000.000,00	200.000.000,00		
		Kelurahan Kranji				4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1,00 Unit	0	200.000.000,00	200.000.000,00		
		Kelurahan Bintara				5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3,00 Unit	3	200.000.000,00	200.000.000,00		
		Kelurahan Bintarajaya				6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1,00 Unit	1	200.000.000,00	200.000.000,00		
		Kecamatan Bekasi Barat				7	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4,00 Pokmas / Ormas	4	403.156.000,00	390.933.598,00		
		Kelurahan Jakasampurna				8	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9,00 Pokmas / Ormas	9	2.122.735.600,00	2.075.354.397,00		
		Kelurahan Kotabaru				9	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9,00 Pokmas / Ormas	9	1.923.404.400,00	1.884.503.778,00		
		Kelurahan Kranji				10	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9,00 Pokmas / Ormas	9	1.289.424.000,00	1.267.530.396,00		
		Kelurahan Bintara				11	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9,00 Pokmas / Ormas	9	1.717.816.200,00	1.696.355.998,00		
		Kelurahan Bintarajaya				12	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8,00 Pokmas / Ormas	8	1.420.782.400,00	1.411.093.997,00		
		Kecamatan Bekasi Barat				13	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5,00 Laporan	5	50.000.000,00	48.880.000,00		
					B	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat	100%	100	350.000.000,00	344.230.000,00		
		Kelurahan Jakasampurna				1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00 Lembaga Kemasyarakatan	2	70.000.000,00	70.000.000,00		
		Kelurahan Kotabaru				2	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00 Lembaga Kemasyarakatan	2	70.000.000,00	66.400.000,00		
		Kelurahan Kranji				3	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00 Lembaga Kemasyarakatan	2	70.000.000,00	70.000.000,00		
		Kelurahan Bintara				4	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00 Lembaga Kemasyarakatan	2	70.000.000,00	69.630.000,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Kelurahan Bintarajaya				5	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00 Lembaga Kemasyarakatan	2	70.000.000,00	68.200.000,00	
			Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	IV	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum		Persentase wilayah tertib K3	100,00%	100	50.000.000,00	49.900.000,00		
					A	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100	50.000.000,00	49.900.000,00	
		Kecamatan Bekasi Barat				1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12,00 Laporan	12	50.000.000,00	49.900.000,00	
			Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Presentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat	100,00%	100	40.000.000,00	40.000.000,00		
					A	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kecamatan	100%	100	40.000.000,00	40.000.000,00	
		Kecamatan Bekasi Barat				1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12,00 Dokumen	12	40.000.000,00	40.000.000,00	
3	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	Kecamatan Bekasi Utara	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00%	100	28.385.530.480,00	26.844.322.564,00		
					A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100	3.000.000,00	1.564.000,00	
		Kecamatan Bekasi Utara				1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,00 Laporan	5	3.000.000,00	1.564.000,00	
					B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Keuangan Perangkat Daerah	100%	100	13.998.603.000,00	13.245.012.784,00	
		Kecamatan Bekasi Utara				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.110,00 Orang/bulan	2.110,00	13.995.603.000,00	13.243.017.784,00	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Kecamatan Bekasi Utara			2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12,00 Laporan	12	3.000.000,00	1.995.000,00		
							Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,00%					
				C		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100	10.000.000,00	10.000.000,00		
		Kecamatan Bekasi Utara			1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2,00 Orang	2	10.000.000,00	10.000.000,00		
							Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%					
				D		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100	500.050.000,00	431.984.050,00		
		Kecamatan Bekasi Utara			1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00 Paket	1	20.000.000,00	19.219.650,00		
		Kecamatan Bekasi Utara			2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60,00 Paket	60	270.050.000,00	240.100.200,00		
		Kecamatan Bekasi Utara			3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2,00 Paket	2	60.000.000,00	36.124.400,00		
		Kecamatan Bekasi Utara			4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	190,00 Dokumen	190	20.000.000,00	17.350.000,00		
		Kecamatan Bekasi Utara			5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12,00 Laporan	12	10.000.000,00	9.825.000,00		
		Kecamatan Bekasi Utara			6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150,00 Laporan	150	115.000.000,00	104.445.000,00		
		Kecamatan Bekasi Utara			7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12,00 Dokumen	12	5.000.000,00	4.919.800,00		
				E		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100	13.508.877.480,00	12.833.801.880,00		
		Kecamatan Bekasi Utara			1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00 Laporan	12	636.000.000,00	419.628.409,00		
		Kecamatan Bekasi Utara			2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00 Laporan	12	12.872.877.480,00	12.414.173.471,00		
							Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%					
				F		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100	365.000.000,00	321.959.850,00		
		Kecamatan Bekasi Utara			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2,00 Unit	2	35.000.000,00	34.665.200,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		Kecamatan Bekasi Utara				2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	56,00 Unit	56	100.000.000,00	58.494.600,00		
		Kecamatan Bekasi Utara				3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42,00 Unit	42	30.000.000,00	29.545.000,00		
		Kecamatan Bekasi Utara				4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7,00 Unit	7	200.000.000,00	199.255.050,00		
			Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat	100,00%	100	200.000.000,00	196.053.406,00			
				A	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	100	150.000.000,00	146.717.026,00			
		Kecamatan Bekasi Utara				1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,00 Dokumen	12	30.000.000,00	29.565.480,00		
		Kelurahan Telukpucung				2	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	11,00 Dokumen	11	20.000.000,00	19.490.565,00		
		Kelurahan Perwira				3	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	10,00 Dokumen	10	20.000.000,00	19.483.242,00		
		Kelurahan Kaliabang Tengah				4	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	10,00 Dokumen	10	20.000.000,00	19.688.140,00		
		Kelurahan Harapanjaya				5	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	11,00 Dokumen	11	20.000.000,00	19.508.469,00		
		Kelurahan Harapanbaru				6	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	11,00 Dokumen	11	20.000.000,00	19.490.565,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		Kelurahan Margamulya				7	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	11,00 Dokumen	11	20.000.000,00	19.490.565,00		
					B	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat	100%	100	50.000.000,00	49.336.380,00		
		Kecamatan Bekasi Utara				1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12,00 Laporan	12	50.000.000,00	49.336.380,00		
			Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif	100,00%	100	14.362.735.400,00	13.816.382.934,00		
					A	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Bekasi Utara	100%	100	13.942.735.400,00	13.416.302.934,00		
		Kecamatan Bekasi Utara				1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7,00 Lembaga Kemasyarakatan	7	140.000.000,00	131.772.000,00		
								Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat	100%					
		Kelurahan Telukpucung				2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1,00 Unit	1	200.000.000,00	200.000.000,00		
		Kelurahan Perwira				3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1,00 Unit	1	200.000.000,00	200.000.000,00		
		Kelurahan Kaliabang Tengah				4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2,00 Unit	2	200.000.000,00	200.000.000,00		
		Kelurahan Harapanjaya				5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2,00 Unit	2	200.000.000,00	200.000.000,00		
		Kelurahan Harapanbaru				6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1,00 Unit	1	200.000.000,00	200.000.000,00		
		Kelurahan Margamulya				7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1,00 Unit	1	200.000.000,00	200.000.000,00		
		Kelurahan Telukpucung				8	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	357,00 Pokmas / Ormas	357	2.812.960.400,00	2.749.719.929,00		
		Kelurahan Perwira				9	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	156,00 Pokmas / Ormas	156	1.340.782.400,00	1.311.136.759,00		
		Kelurahan Kaliabang Tengah				10	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	355,00 Pokmas / Ormas	355	2.873.114.400,00	2.797.393.412,00		
		Kelurahan Harapanjaya				11	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	376,00 Pokmas / Ormas	376	2.712.500.000,00	2.650.806.395,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Kelurahan Harapanbaru				12	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	153,00 Pokmas / Ormas	153	1.261.804.000,00	1.209.149.240,00	
		Kelurahan Margamulya				13	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	102,00 Pokmas / Ormas	102	920.863.200,00	859.699.399,00	
							Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Bekasi Utara	100%					
		Kecamatan Bekasi Utara				14	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	194,00 Pokmas / Ormas	194	630.711.000,00	506.625.800,00	
							Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	100%					
		Kecamatan Bekasi Utara				15	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12,00 Laporan	12	50.000.000,00	0	
					B		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat	100%	100	420.000.000,00	400.080.000,00	
		Kelurahan Telukpucung				1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00 Lembaga Kemasyarakatan	2	70.000.000,00	69.950.000,00	
		Kelurahan Perwira				2	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00 Lembaga Kemasyarakatan	2	70.000.000,00	65.780.000,00	
		Kelurahan Kaliabang Tengah				3	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00 Lembaga Kemasyarakatan	2	70.000.000,00	60.950.000,00	
		Kelurahan Harapanjaya				4	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00 Lembaga Kemasyarakatan	2	70.000.000,00	65.450.000,00	
		Kelurahan Harapanbaru				5	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00 Lembaga Kemasyarakatan	2	70.000.000,00	68.000.000,00	
		Kelurahan Margamulya				6	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00 Lembaga Kemasyarakatan	2	70.000.000,00	69.950.000,00	
			Terwujudnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	IV	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum			Persentase wilayah tertib K3	100,00%	100	50.000.000,00	39.801.000,00	
					A		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%	100	50.000.000,00	39.801.000,00	
		Kecamatan Bekasi Utara				1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	12,00 Laporan	12	50.000.000,00	39.801.000,00	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
									TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
							Kecamatan	Vertikal di Wilayah Kecamatan							
			Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			Presentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat	100,00%	100	40.000.000,00	36.704.000,00			
					A	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100	40.000.000,00	36.704.000,00		
		Kecamatan Bekasi Utara				1	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12,00 Laporan	12	40.000.000,00	36.704.000,00			
4	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	Kecamatan Bekasi Selatan	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00%	93,75	21.906.619.545,00	20.938.369.250,00			
					A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100	3.000.000,00	3.000.000,00		
		Kecamatan Bekasi Selatan				1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,00 Laporan	4	3.000.000,00	3.000.000,00			
					B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100	11.015.698.000,00	10.405.504.060,00		
		Kecamatan Bekasi Selatan				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.550,00 orangbulan	1.550,00	11.012.698.000,00	10.402.504.060,00			
		Kecamatan Bekasi Selatan				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,00 Laporan	2	3.000.000,00	3.000.000,00			
								Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,00%						
					C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	0	10.000.000,00	0		
		Kecamatan Bekasi Selatan				1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1,00 Orang	0	10.000.000,00	0			
								Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%						

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
				D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100	482.500.000,00	466.476.003,00		
		Kecamatan Bekasi Selatan			1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00 paket	1	20.000.000,00	16.414.000,00		
		Kecamatan Bekasi Selatan			2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3,00 paket	3	262.500.000,00	258.676.400,00		
		Kecamatan Bekasi Selatan			3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2,00 Paket	2	60.000.000,00	59.679.700,00		
		Kecamatan Bekasi Selatan			4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12,00 Dokumen	12	20.000.000,00	15.504.000,00		
		Kecamatan Bekasi Selatan			5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00 Laporan	12	115.000.000,00	111.485.903,00		
		Kecamatan Bekasi Selatan			6 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50,00 dokumen	50	5.000.000,00	4.716.000,00		
				E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100	9.990.421.545,00	9.707.280.055,00		
		Kecamatan Bekasi Selatan			1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00 Laporan	12	330.148.600,00	215.684.571,00		
		Kecamatan Bekasi Selatan			2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00 Laporan	12	9.660.272.945,00	9.491.595.484,00		
						Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%					
				F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100	405.000.000,00	356.109.132,00		
		Kecamatan Bekasi Selatan			1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2,00 Unit	2	35.000.000,00	30.668.126,00		
		Kecamatan Bekasi Selatan			2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	43,00 unit	43	200.000.000,00	156.918.896,00		
		Kecamatan Bekasi Selatan			3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50,00 unit	50	20.000.000,00	19.748.000,00		
		Kecamatan Bekasi Selatan			4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1,00 Unit	1	150.000.000,00	148.774.110,00		
			Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat	100,00%	100	180.000.000,00	160.494.950,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
				A	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	100	130.000.000,00	113.574.950,00		
		Kecamatan Bekasi Selatan			1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,00 Dokumen	12	30.000.000,00	28.750.000,00		
		Kelurahan Jakasetia			2 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,00 Dokumen	12	20.000.000,00	18.688.500,00		
		Kelurahan Jakamulya			3 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,00 Dokumen	12	20.000.000,00	13.466.500,00		
		Kelurahan Pekayonjaya			4 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,00 Dokumen	12	20.000.000,00	18.458.700,00		
		Kelurahan Kayuringinjaya			5 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,00 Dokumen	12	20.000.000,00	15.310.000,00		
		Kelurahan Margajaya			6 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,00 Dokumen	12	20.000.000,00	18.901.250,00		
				B	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100	50.000.000,00	46.920.000,00		
		Kecamatan Bekasi Selatan			1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2,00 Laporan	2	50.000.000,00	46.920.000,00		
			Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif	100,00%	100	9.445.143.600,00	9.206.323.019,00		
				A	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%	100	9.015.143.600,00	8.801.105.019,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Kecamatan Bekasi Selatan				1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6,00 Lembaga Kemasyarakatan	6	120.000.000,00	97.431.000,00	
		Kelurahan Jakasetia				2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1,00 Unit	1	200.000.000,00	200.000.000,00	
		Kelurahan Jakamulya				3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1,00 Unit	1	200.000.000,00	200.000.000,00	
		Kelurahan Pekayonjaya				4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1,00 Unit	1	200.000.000,00	200.000.000,00	
		Kelurahan Kayuringinjaya				5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1,00 Unit	1	200.000.000,00	200.000.000,00	
		Kelurahan Margajaya				6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1,00 Unit	1	200.000.000,00	200.000.000,00	
		Kecamatan Bekasi Selatan				7	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5,00 Pokmas/Ormas	5	392.710.600,00	335.202.150,00	
		Kelurahan Jakasetia				8	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	229,00 Pokmas/Ormas	229	1.476.181.600,00	1.448.756.498,00	
		Kelurahan Jakamulya				9	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	189,00 Pokmas / Ormas	189	1.278.680.000,00	1.254.947.679,00	
		Kelurahan Pekayonjaya				10	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0,00 Pokmas / Ormas	0	1.908.980.600,00	1.878.699.197,00	
		Kelurahan Kayuringinjaya				11	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	348,00 Pokmas/Ormas	348	2.185.646.800,00	2.150.720.800,00	
		Kelurahan Margajaya				12	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	92,00 Pokmas / Ormas/BKM	92	602.944.000,00	586.047.695,00	
		Kelurahan Pekayonjaya				13	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas, Ormas dan BKM yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	267,00 Pokmas / Ormas/BKM	267	1.908.980.600,00	1.878.699.197,00	
		Kecamatan Bekasi Selatan				14	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	6,00 Laporan	6	50.000.000,00	49.300.000,00	
					B	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat	100%	100	430.000.000,00	405.218.000,00	
		Kelurahan Jakasetia				1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00 Lembaga Kemasyarakatan	2	70.000.000,00	69.924.000,00	
		Kelurahan Jakamulya				2	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00 Lembaga Kemasyarakatan	2	70.000.000,00	69.804.000,00	
		Kelurahan Pekayonjaya				3	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00 Lembaga Kemasyarakatan	2	70.000.000,00	70.000.000,00	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN		
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI				
		Kelurahan Kayuringinjaya				4	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00 Lembaga Kemasyarakatan	2	70.000.000,00	63.500.000,00			
		Kelurahan Margajaya				5	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	0,00 Lembaga Kemasyarakatan	0	70.000.000,00	65.440.000,00			
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2,00 Lembaga Kemasyarakatan	2					
		Kecamatan Bekasi Selatan				6	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1,00 Laporan	1	80.000.000,00	66.550.000,00			
			Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	IV	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum			Persentase wilayah tertib K3	100,00%	100	50.000.000,00	49.461.000,00			
					A	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100	50.000.000,00	49.461.000,00		
		Kecamatan Bekasi Selatan				1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12,00 Laporan	12	50.000.000,00	49.461.000,00			
			Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			Presentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat	100,00%	100	40.000.000,00	39.395.000,00			
					A	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100	40.000.000,00	39.395.000,00		
		Kecamatan Bekasi Selatan				1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12,00 Dokumen	12	40.000.000,00	39.395.000,00			
5	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	Kecamatan Medansatria	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%	99,56	18.416.582.890,00	17.202.991.794,00			
					A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100	3.000.000,00	2.984.800,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		Kecamatan Medansatria				1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,00 Laporan	4	3.000.000,00	2.984.800,00		
					B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	96,22	9.048.381.000,00	8.365.850.965,00		
		Kecamatan Medansatria				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.152,00 Orang/Bulan	1.065,00	9.045.381.000,00	8.362.861.065,00		
		Kecamatan Medansatria				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,00 Laporan	2	3.000.000,00	2.989.900,00		
					C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100	10.000.000,00	10.000.000,00		
		Kecamatan Medansatria				1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4,00 Orang	4	10.000.000,00	10.000.000,00		
					D	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100	587.050.000,00	543.669.500,00		
		Kecamatan Medansatria				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2,00 Paket	2	30.000.000,00	28.744.000,00		
		Kecamatan Medansatria				2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0,00 Paket	0	342.050.000,00	333.573.800,00		
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8,00 Paket	8				
		Kecamatan Medansatria				3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12,00 Dokumen	12	75.000.000,00	49.925.700,00		
		Kecamatan Medansatria				4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2,00 Dokumen	2	20.000.000,00	19.916.000,00		
		Kecamatan Medansatria				5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00 Laporan	12	115.000.000,00	106.730.000,00		
		Kecamatan Medansatria				6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12,00 Dokumen	12	5.000.000,00	4.780.000,00		
					E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100	100.000.000,00	94.305.000,00		
		Kecamatan Medansatria				1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Tersediakan	57,00 Unit	57	100.000.000,00	94.305.000,00		
					F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100	8.133.151.890,00	7.714.137.659,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Kecamatan Medansatria				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	12,00 Laporan	12	400.000.000,00	277.613.757,00	
		Kecamatan Medansatria				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00 Laporan	12	7.733.151.890,00	7.436.523.902,00	
					G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100	535.000.000,00	472.043.870,00	
		Kecamatan Medansatria				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2,00 Unit	2	65.000.000,00	42.888.680,00	
		Kecamatan Medansatria				2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33,00 Unit	33	190.000.000,00	152.851.090,00	
		Kecamatan Medansatria				3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52,00 Unit	52	50.000.000,00	49.180.000,00	
		Kecamatan Medansatria				4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4,00 Unit	4	230.000.000,00	227.124.100,00	
			Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat	100,00%	100	210.000.000,00	203.544.800,00		
					A	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	100	150.000.000,00	143.964.800,00	
		Kecamatan Medansatria				1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,00 Dokumen	12	30.000.000,00	29.449.800,00	
		Kelurahan Pejuang				2	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,00 Dokumen	12	30.000.000,00	29.945.000,00	
		Kelurahan Medansatria				3	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,00 Dokumen	12	30.000.000,00	25.326.500,00	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Kelurahan Kalibaru				4	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,00 Dokumen	12	30.000.000,00	29.963.500,00		
		Kelurahan Harapanmulya				6	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,00 Dokumen	12	30.000.000,00	29.280.000,00		
					B	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100%	100	60.000.000,00	59.580.000,00		
		Kecamatan Medansatria				1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	10,00 Laporan	10	60.000.000,00	59.580.000,00		
			Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif	100,00%	100	7.607.617.100,00	7.447.554.535,00		
					A	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Dokumen Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	100	7.327.617.100,00	7.180.928.035,00		
		Kecamatan Medansatria				1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6,00 Lembaga Kemasyarakatan	6	120.000.000,00	119.890.000,00		
		Kelurahan Pejuang				2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1,00 Unit	1	200.000.000,00	200.000.000,00		
		Kelurahan Medansatria				3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1,00 Unit	1	200.000.000,00	200.000.000,00		
		Kelurahan Kalibaru				4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1,00 Unit	1	200.000.000,00	200.000.000,00		
		Kelurahan Harapanmulya				5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1,00 Unit	1	200.000.000,00	200.000.000,00		
		Kelurahan Pejuang				6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	371,00 Pokmas / Ormas	371	2.780.653.500,00	2.765.729.442,00		
		Kelurahan Medansatria				7	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	111,00 Pokmas / Ormas	111	957.546.700,00	939.122.697,00		
		Kelurahan Kalibaru				8	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	137,00 Pokmas / Ormas	137	1.011.959.500,00	1.003.027.100,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Kelurahan Harapanmulya				9	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	137,00 Pokmas / Ormas	137	1.149.507.400,00	1.058.732.598,00	
							Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100%				
		Kecamatan Medansatria				10	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	118,00 Pokmas / Ormas	118	457.950.000,00	444.917.998,00	
		Kecamatan Medansatria				11	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1,00 Laporan	1	50.000.000,00	49.508.200,00	
					B		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat	100%	100	280.000.000,00	266.626.500,00	
		Kelurahan Pejuang				1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00 Lembaga Kemasyarakatan	2	70.000.000,00	60.905.000,00	
		Kelurahan Medansatria				2	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00 Lembaga	2	70.000.000,00	65.967.500,00	
		Kelurahan Kalibaru				3	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00 Lembaga Kemasyarakatan	2	70.000.000,00	69.984.000,00	
		Kelurahan Harapanmulya				4	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00 Lembaga Kemasyarakatan	2	70.000.000,00	69.770.000,00	
			Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	IV	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum		Persentase wilayah tertib K3	100,00%	100	110.000.000,00	99.421.100,00		
					A		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%	100	110.000.000,00	99.421.100,00	
		Kecamatan Medansatria				1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12,00 Laporan	12	110.000.000,00	99.421.100,00	
			Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Presentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat	100,00%	100	100.000.000,00	98.878.500,00		
					A		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Forum Koordinasi 3 Pilar Tk. Kecamatan dan Kelurahan	100%	100	100.000.000,00	98.878.500,00	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Kecamatan Medansatria				1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12,00 Dokumen	12	100.000.000,00	98.878.500,00	
6	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	Kecamatan Rawalumbu	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00%	97,93	21.046.220.605,00	19.423.098.826,00		
					A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100	3.000.000,00	2.437.600,00	
		Kecamatan Rawalumbu				1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,00 Laporan	4	3.000.000,00	2.437.600,00	
					B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Prosentase Capaian Keuangan Perangkat Daerah	100%	87,61	10.105.029.000,00	9.422.369.909,00	
		Kecamatan Rawalumbu				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.441,00 Orang/bulan	1.084,00	10.102.029.000,00	9.419.369.909,00	
		Kecamatan Rawalumbu				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5,00 Laporan	5	3.000.000,00	3.000.000,00	
							Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,00%					
					C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100	10.000.000,00	10.000.000,00	
		Kecamatan Rawalumbu				1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2,00 Orang	2	10.000.000,00	10.000.000,00	
							Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%					
					D	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Prosentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100	436.000.000,00	347.540.300,00	
		Kecamatan Rawalumbu				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00 Paket	1	20.000.000,00	18.625.000,00	
		Kecamatan Rawalumbu				2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3,00 Paket	3	226.000.000,00	217.959.400,00	
		Kecamatan Rawalumbu				3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1,00 Paket	1	50.000.000,00	19.199.900,00	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Kecamatan Rawalumbu				4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12,00 Dokumen	12	20.000.000,00	16.800.000,00	
		Kecamatan Rawalumbu				5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00 Laporan	12	115.000.000,00	70.341.000,00	
		Kecamatan Rawalumbu				6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	250,00 Dokumen	250	5.000.000,00	4.615.000,00	
							Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%					
				E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	95,83	10.124.231.605,00	9.370.243.696,00		
		Kecamatan Rawalumbu				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00 Laporan	12	320.000.000,00	234.345.272,00	
		Kecamatan Rawalumbu				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00 Laporan	11	9.804.231.605,00	9.135.898.424,00	
							Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%					
				F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100	367.960.000,00	270.507.321,00		
		Kecamatan Rawalumbu				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2,00 Unit	2	35.000.000,00	16.381.148,00	
		Kecamatan Rawalumbu				2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42,00 Unit	42	162.960.000,00	104.349.173,00	
		Kecamatan Rawalumbu				3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29,00 Unit	29	20.000.000,00	0	
		Kecamatan Rawalumbu				4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1,00 Unit	1	150.000.000,00	149.777.000,00	
			Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat	100,00%	100	150.000.000,00	131.778.200,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
				A	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100%	100	100.000.000,00	86.578.200,00		
		Kecamatan Rawalumbu			1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,00 Dokumen	12	20.000.000,00	19.767.300,00		
		Kelurahan Pengasinan			2 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,00 Dokumen	12	20.000.000,00	15.361.000,00		
		Kelurahan Bojong Rawalumbu			3 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	0,00 Dokumen	0	20.000.000,00	12.681.000,00		
		Kelurahan Sepanjangjaya			4 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,00 Dokumen	12	20.000.000,00	19.144.400,00		
		Kelurahan Bojongmenteng			5 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,00 Dokumen	12	20.000.000,00	19.624.500,00		
		Kelurahan Bojong Rawalumbu			6 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,00 Laporan	12	20.000.000,00	12.681.000,00		
				B	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100%	100	50.000.000,00	45.200.000,00		
		Kecamatan Rawalumbu			1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2,00 Laporan	2	50.000.000,00	45.200.000,00	untuk kegiatan ada yang belum terlaksana yaitu Survey Kepuasan Masyarakat di Semester 2	Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat pada Semester 2 telah dilaksanakan dengan hasil 84,06 yang telah diasistensikan dengan Bagian Organisasi Setda Kota Bekasi



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
			Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif	100,00%	100	9.300.826.400,00	9.005.175.043,00		
				A	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	100	9.020.826.400,00	8.726.532.043,00		
		Kecamatan Rawalumbu			1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10,00 Lembaga Masyarakat	10	100.000.000,00	98.418.000,00		
		Kelurahan Pengasinan			2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,00 Unit	1	200.000.000,00	200.000.000,00		
		Kelurahan Bojong Rawalumbu			3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4,00 Unit	4	200.000.000,00	200.000.000,00		
		Kelurahan Sepanjangjaya			4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2,00 Unit	2	200.000.000,00	200.000.000,00		
		Kelurahan Bojongmenteng			5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2,00 Unit	2	200.000.000,00	200.000.000,00		
		Kecamatan Rawalumbu			6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2,00 Pokmas / Ormas	2	409.766.000,00	380.048.349,00		
		Kelurahan Pengasinan			7	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	298,00 Pokmas / Ormas	298	2.176.029.600,00	2.107.963.399,00		
		Kelurahan Bojong Rawalumbu			8	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	450,00 Pokmas / Ormas	450	3.263.814.000,00	3.136.300.798,00		
		Kelurahan Sepanjangjaya			9	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	156,00 Pokmas / Ormas	156	1.070.276.800,00	1.060.607.798,00		
		Kelurahan Bojongmenteng			10	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	171,00 Pokmas / Ormas	171	1.150.940.000,00	1.111.877.699,00		
		Kecamatan Rawalumbu			11	Evaluasi Kelurahan	1,00 Laporan	1	50.000.000,00	31.316.000,00		
				B	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat	100%	100	280.000.000,00	278.643.000,00		
		Kelurahan Pengasinan			1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	2,00 Lembaga Masyarakat	2	70.000.000,00	69.908.000,00		
		Kelurahan Bojong Rawalumbu			2	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	2,00 Lembaga Masyarakat	2	70.000.000,00	69.011.000,00		
		Kelurahan Sepanjangjaya			3	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	2,00 Lembaga Masyarakat	2	70.000.000,00	69.908.000,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Kelurahan Bojongmenteng				4	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00 Lembaga Masyarakat	2	70.000.000,00	69.816.000,00	
			Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	IV	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum		Persentase wilayah tertib K3	100,00%	100	50.000.000,00	44.384.000,00		
					A	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Mewujudkan Ketertiban dan Keamanan Lingkungan di Wilayah Kecamatan	100%	100	50.000.000,00	44.384.000,00	
		Kecamatan Rawalumbu				1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12,00 Laporan	12	50.000.000,00	44.384.000,00	
			Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Presentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat	100,00%	100	40.000.000,00	33.528.000,00		
					A	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100%	100	40.000.000,00	33.528.000,00	
		Kecamatan Rawalumbu				1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12,00 Dokumen	12	40.000.000,00	33.528.000,00	
7	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	Kecamatan Bantargebang	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,00%	100	16.297.142.800,00	15.490.666.793,00		
					A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100	3.000.000,00	2.622.500,00	
		Kecamatan Bantargebang				1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,00 Laporan	4	3.000.000,00	2.622.500,00	
							Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00%					
					B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Keuangan Perangkat Daerah	100%	100	9.696.267.000,00	9.344.454.820,00	
		Kecamatan Bantargebang				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.389,00 Orang/bulan	1.389,00	9.693.267.000,00	9.342.099.820,00	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		Kecamatan Bantargebang				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12,00 Laporan	12	3.000.000,00	2.355.000,00		
								Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,00%					
					C		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100	10.000.000,00	8.750.000,00		
		Kecamatan Bantargebang				1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2,00 Orang	2	10.000.000,00	8.750.000,00		
					D		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100	450.000.000,00	425.576.290,00		
		Kecamatan Bantargebang				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00 Paket	1	20.000.000,00	19.106.000,00		
		Kecamatan Bantargebang				2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4,00 Paket	4	240.000.000,00	233.769.750,00		
		Kecamatan Bantargebang				3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3,00 Paket	3	50.000.000,00	48.621.500,00		
		Kecamatan Bantargebang				4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12,00 Dokumen	12	20.000.000,00	17.370.000,00		
		Kecamatan Bantargebang				5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00 Laporan	12	115.000.000,00	101.829.040,00		
		Kecamatan Bantargebang				6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	175,00 Dokumen	175	5.000.000,00	4.880.000,00		
								Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%					
					D		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100	5.782.875.800,00	5.396.211.430,00		
		Kecamatan Bantargebang				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00 Laporan	12	400.000.000,00	228.430.150,00		
		Kecamatan Bantargebang				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00 Laporan	12	5.382.875.800,00	5.167.781.280,00		
								Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%					
					E		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100	355.000.000,00	313.051.753,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		Kecamatan Bantargebang				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2,00 Unit	2	35.000.000,00	33.666.500,00		
		Kecamatan Bantargebang				2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34,00 Unit	34	150.000.000,00	111.002.653,00		
		Kecamatan Bantargebang				3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40,00 Unit	40	20.000.000,00	19.977.000,00		
		Kecamatan Bantargebang				4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5,00 Unit	5	150.000.000,00	148.405.600,00		
			Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik			Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat	100,00%	100	160.000.000,00	153.606.225,00		
					A	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			100%	100	110.000.000,00	103.946.225,00		
		Kecamatan Bantargebang				1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,00 Dokumen	12	30.000.000,00	29.273.925,00		
		Kelurahan Cikiwul				2	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,00 Dokumen	12	20.000.000,00	18.941.500,00		
		Kelurahan Sumurbatu				3	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,00 Dokumen	12	20.000.000,00	18.167.000,00		
		Kelurahan Bantargebang				4	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,00 Dokumen	12	20.000.000,00	17.995.000,00		
		Kelurahan Ciketingudik				5	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,00 Dokumen	12	20.000.000,00	19.568.800,00		
					B	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			100%	100	50.000.000,00	49.660.000,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN		
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI				
		Kecamatan Bantargebang				1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1,00 Laporan	1	50.000.000,00	49.660.000,00			
			Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif	100,00%	90	4.313.302.400,00	4.097.096.295,00			
					A	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	86,36	4.033.302.400,00	3.843.506.295,00		
		Kecamatan Bantargebang				1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	47,00 Lembaga Kemasyarakatan	47	100.000.000,00	96.250.000,00			
		Kelurahan Cikiwul				2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2,00 Unit	0	0	0			
		Kelurahan Sumurbatu				3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2,00 Unit	2	200.000.000,00	200.000.000,00			
		Kelurahan Bantargebang				4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2,00 Unit	1	200.000.000,00	100.000.000,00	terlaksana hanya 1 unit taman karna terkendala kuarangnya lahan fasos fasum	Mencari Lahan yang statusnya sudah menjadi lahan Fasos Fasum	
		Kelurahan Ciketingudik				5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2,00 Unit	2	200.000.000,00	200.000.000,00			
		Kecamatan Bantargebang				6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7,00 Pokmas / Ormas	7	311.590.000,00	270.332.200,00			
		Kelurahan Cikiwul				7	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50,00 Pokmas / Ormas	50	742.457.400,00	733.254.798,00			
		Kelurahan Sumurbatu				8	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	108,00 Pokmas / Ormas	108	971.335.200,00	955.531.900,00			
		Kelurahan Bantargebang				9	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	58,00 Pokmas / Ormas	58	587.746.400,00	581.510.400,00			
		Kelurahan Ciketingudik				10	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	72,00 Pokmas / Ormas	72	690.173.400,00	679.648.997,00			
		Kecamatan Bantargebang				11	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1,00 Laporan	1	30.000.000,00	26.978.000,00			
					B	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat	100%	100	280.000.000,00	253.590.000,00		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Kelurahan Cikiwul				1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00 Lembaga Kemasyarakatan	2	70.000.000,00	65.930.000,00	
		Kelurahan Sumurbatu				2	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00 Lembaga Kemasyarakatan	2	70.000.000,00	62.510.000,00	
		Kelurahan Bantargebang				3	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00 Lembaga Kemasyarakatan	2	70.000.000,00	62.510.000,00	
		Kelurahan Ciketingudik				4	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00 Lembaga Kemasyarakatan	2	70.000.000,00	62.640.000,00	
			Terwujudnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	IV	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum			Persentase wilayah tertib K3	100,00%	100	50.000.000,00	42.055.000,00	
					A	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			100%	100	50.000.000,00	42.055.000,00	
		Kecamatan Bantargebang				1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12,00 Laporan	12	50.000.000,00	42.055.000,00	
			Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			Presentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat	100,00%	100	40.000.000,00	32.115.400,00	
					A	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			100%	100	40.000.000,00	32.115.400,00	
		Kecamatan Bantargebang				1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12,00 Dokumen	12	40.000.000,00	32.115.400,00	
8	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	Kecamatan Mustikajaya	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00%	99,84	18.046.339.750,00	16.919.008.014,00	
					A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%	100	3.000.000,00	1.206.200,00	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		Kecamatan Mustikajaya				1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,00 Laporan	1	3.000.000,00	1.206.200,00		
					B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase layanan Keuangan Perangkat Daerah	100%	100	9.465.095.000,00	8.973.798.190,00		
		Kecamatan Mustikajaya				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	658,00 Orang/bulan	658	9.462.095.000,00	8.970.798.190,00		
		Kecamatan Mustikajaya				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12,00 Laporan	12	3.000.000,00	3.000.000,00		
								Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,00%					
					C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100	10.000.000,00	10.000.000,00		
		Kecamatan Mustikajaya				1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2,00 Orang	2	10.000.000,00	10.000.000,00		
								Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%					
					D	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	99,51	445.000.000,00	366.817.250,00		
		Kecamatan Mustikajaya				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00 Paket	1	20.000.000,00	19.576.850,00		
		Kecamatan Mustikajaya				2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6,00 Paket	6	242.210.000,00	233.726.400,00		
		Kecamatan Mustikajaya				3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1,00 Paket	1	47.790.000,00	39.694.000,00		
		Kecamatan Mustikajaya				4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4.000,00 Dokumen	3.901,00	20.000.000,00	19.800.000,00		
		Kecamatan Mustikajaya				5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00 Laporan	12	115.000.000,00	54.020.000,00		
					E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	100	7.813.244.750,00	7.305.854.204,00		
		Kecamatan Mustikajaya				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00 Laporan	12	350.000.000,00	161.998.802,00		
		Kecamatan Mustikajaya				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00 Laporan	12	7.463.244.750,00	7.143.855.402,00		
								Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%					
					F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	100	310.000.000,00	261.332.170,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Kecamatan Mustikajaya				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2,00 Unit	2	35.000.000,00	33.694.080,00	
		Kecamatan Mustikajaya				2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41,00 Unit	41	150.000.000,00	104.138.090,00	
		Kecamatan Mustikajaya				3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42,00 Unit	42	25.000.000,00	24.500.000,00	
		Kecamatan Mustikajaya				4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5,00 Unit	5	100.000.000,00	99.000.000,00	
			Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat	100,00%	100	150.000.000,00	144.462.500,00		
					A	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100%	100	100.000.000,00	96.762.500,00	
		Kecamatan Mustikajaya				1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,00 dokumen	12	20.000.000,00	19.400.000,00	
		Kelurahan Mustikajaya				2	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,00 Dokumen	12	20.000.000,00	19.725.000,00	
		Kelurahan Mustikasari				3	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,00 Dokumen	12	20.000.000,00	19.687.500,00	
		Kelurahan Cimuning				4	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,00 Dokumen	12	20.000.000,00	18.225.000,00	
		Kelurahan Padurenan				5	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,00 Dokumen	12	20.000.000,00	19.725.000,00	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
					B	Pelaksanaan <i>Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	<i>Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	100%	100	50.000.000,00	47.700.000,00		
		Kecamatan Mustikajaya				1 Pelaksanaan <i>Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12,00 Laporan	12	50.000.000,00	47.700.000,00		
			Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	III	Program <i>Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</i>		Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif	100,00%	100	8.856.793.600,00	8.638.498.389,00		
					A	Kegiatan <i>Pemberdayaan Kelurahan</i>	<i>Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan</i>	100%	100	8.576.793.600,00	8.373.623.389,00		
		Kecamatan Mustikajaya				1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen Usulan Musrembang Kecamatan dan Kelurahan	5,00 dokumen	5	100.000.000,00	55.050.000,00		
							Jumlah Kegiatan Musrembang Kecamatan dan Kelurahan	5,00 kegiatan	5				
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0,00 Lembaga Kemasyarakatan	0				
		Kelurahan Mustikajaya				2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2,00 paket	2	200.000.000,00	200.000.000,00		
		Kelurahan Mustikasari				3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1,00 paket	1	200.000.000,00	199.650.000,00		
		Kelurahan Cimuning				4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1,00 paket	1	200.000.000,00	199.650.000,00		
		Kelurahan Padurenan				5 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1,00 paket	1	200.000.000,00	199.650.000,00		
		Kecamatan Mustikajaya				6 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8,00 Pokmas / Ormas	8	471.296.000,00	352.842.000,00		
		Kelurahan Mustikajaya				7 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	360,00 Pokmas / Ormas	360	2.299.863.200,00	2.296.896.198,00		
		Kelurahan Mustikasari				8 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	294,00 Pokmas / Ormas	294	1.016.664.800,00	1.005.684.593,00		
		Kelurahan Cimuning				9 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	243,00 Pokmas / Ormas	243	1.948.265.600,00	1.945.921.399,00		
		Kelurahan Padurenan				10 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	291,00 Pokmas / Ormas	291	1.910.704.000,00	1.907.359.199,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
							Kelurahan						
		Kecamatan Mustikajaya			11	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Kegiatan Lomba Kinerja Kelurahan	1,00 kegiatan	1	30.000.000,00	10.920.000,00		
				B	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat	100%	100	280.000.000,00	264.875.000,00		
		Kelurahan Mustikajaya			1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00 Lembaga Kemasyarakatan	2	70.000.000,00	68.945.000,00		
		Kelurahan Mustikasari			2	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00 Lembaga Kemasyarakatan	2	70.000.000,00	66.200.000,00		
		Kelurahan Cimuning			3	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00 Lembaga Kemasyarakatan	2	70.000.000,00	67.580.000,00		
		Kelurahan Padurenan			4	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00 Lembaga Kemasyarakatan	2	70.000.000,00	62.150.000,00		
			Terwujudnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	IV	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum		Persentase wilayah tertib K3	100,00%	100	50.000.000,00	30.401.000,00		
				A	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%	100	50.000.000,00	30.401.000,00		
		Kecamatan Mustikajaya			1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12,00 Laporan	12	50.000.000,00	30.401.000,00		
				V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Presentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat	100,00%	100	40.000.000,00	21.514.000,00		
				A	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi	100%	100	40.000.000,00	21.514.000,00		
		Kecamatan Mustikajaya			1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12,00 laporan	12	40.000.000,00	21.514.000,00		
9	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	Kecamatan Jatiasih	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00%	100	24.129.803.580,00	22.296.880.313,00		
				A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan	100%	100	7.000.000,00	7.000.000,00		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		Kecamatan Jatiasih				1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12,00 Laporan	12	7.000.000,00	7.000.000,00		
					B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan	100%	100	14.242.020.000,00	12.911.554.136,00		
		Kecamatan Jatiasih				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.071,00 Orang/bulan	2.071,00	14.235.020.000,00	12.904.554.136,00		
		Kecamatan Jatiasih				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,00 Laporan	4	7.000.000,00	7.000.000,00		
								Optimalisasi Disiplin Aparatur	100,00%					
					C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Pegawai	100%	100	10.000.000,00	10.000.000,00		
		Kecamatan Jatiasih				1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2,00 Orang	2	10.000.000,00	10.000.000,00		
								Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%					
					D	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Cetakan	100%	100	507.650.000,00	473.371.000,00		
		Kecamatan Jatiasih				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00 Paket	1	20.000.000,00	18.894.000,00		
		Kecamatan Jatiasih				2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3,00 Paket	3	269.050.000,00	262.362.500,00		
		Kecamatan Jatiasih				3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2,00 Paket	2	75.000.000,00	74.970.000,00		
		Kecamatan Jatiasih				4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4,00 Dokumen	4	18.600.000,00	18.551.000,00		
		Kecamatan Jatiasih				5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45,00 Laporan	45	120.000.000,00	93.593.500,00		
		Kecamatan Jatiasih				6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1,00 Dokumen	1	5.000.000,00	5.000.000,00		
								Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%					
					E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	100	9.014.733.580,00	8.559.007.907,00		
		Kecamatan Jatiasih				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00 Laporan	12	430.000.000,00	246.632.347,00		
		Kecamatan Jatiasih				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00 Laporan	12	8.584.733.580,00	8.312.375.560,00		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
								Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%					
					F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	100%	100	348.400.000,00	335.947.270,00		
		Kecamatan Jatiasih				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2,00 Unit	2	35.000.000,00	27.014.670,00		
		Kecamatan Jatiasih				2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24,00 Unit	24	83.400.000,00	83.159.600,00		
		Kecamatan Jatiasih				3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120,00 Unit	120	30.000.000,00	27.300.000,00		
		Kecamatan Jatiasih				4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3,00 Unit	3	200.000.000,00	198.473.000,00		
			Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik			Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat	100,00%	100	209.000.000,00	204.029.900,00		
					A	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	0	0	0		
		Kelurahan Jatikramat				1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0,00 Dokumen	0	0	0		
		Kelurahan Jatirasa				2	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Dokumen Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan / Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	0,00 Dokumen	0	0	0		
		Kelurahan Jatikramat				3	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	0,00 Laporan	0	0	0		
		Kelurahan Jatirasa				4	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0,00 Laporan	0	0	0		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
					B	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		100%	100	140.000.000,00	137.479.900,00		
		Kelurahan Jatikramat			1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1,00 Dokumen	1	20.000.000,00	19.748.000,00		
							Jumlah Laporan Kegiatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100%					
		Kecamatan Jatiasih			2	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,00 Dukumen	12	20.000.000,00	19.382.400,00		
		Kelurahan Jatiasih			3	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1,00 Dokumen	1	20.000.000,00	18.739.000,00		
		Kelurahan Jatisari			4	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,00 Dokumen	12	20.000.000,00	19.990.000,00		
		Kelurahan Jatimekar			5	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,00 Dokumen	12	20.000.000,00	19.825.500,00		
		Kelurahan Jatiluhur			6	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,00 Dokumen	12	20.000.000,00	20.000.000,00		
		Kelurahan Jatirasa			7	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Junlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instnsi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	5,00 Dokumen	5	20.000.000,00	19.795.000,00		
					C	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	100%	100	69.000.000,00	66.550.000,00		
		Kecamatan Jatiasih			1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0,00 Laporan	0	69.000.000,00	66.550.000,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
									TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3,00 Laporan	3					
			Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif	100,00%	100	10.488.580.600,00	10.152.785.507,00			
					A	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	100	10.068.580.600,00	9.748.169.507,00		
		Kecamatan Jatiasih				1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7,00 Lembaga Kemasyarakatan	7	120.000.000,00	109.004.000,00			
		Kelurahan Jatiasih				2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1,00 Unit	1	200.000.000,00	200.000.000,00			
		Kelurahan Jatisari				3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1,00 Unit	1	200.000.000,00	200.000.000,00			
		Kelurahan Jatikramat				4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1,00 Unit	1	200.000.000,00	200.000.000,00			
		Kelurahan Jatimekar				5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1,00 Unit	1	200.000.000,00	200.000.000,00			
		Kelurahan Jatiluhur				6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1,00 Unit	1	200.000.000,00	200.000.000,00			
		Kelurahan Jatirasa				7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2,00 Unit	2	200.000.000,00	200.000.000,00			
		Kecamatan Jatiasih				8	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12,00 Laporan	12	306.296.000,00	296.124.999,00			
		Kelurahan Jatiasih				9	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	175,00 Pokmas / Ormas	175	1.198.836.000,00	1.175.487.200,00			
		Kelurahan Jatisari				10	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3,00 Pokmas / Ormas	3	1.723.778.800,00	1.669.566.197,00			
		Kelurahan Jatikramat				11	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	175,00 Pokmas / Ormas	175	1.445.571.200,00	1.429.218.697,00			
		Kelurahan Jatimekar				12	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	175,00 Pokmas / Ormas	175	1.316.064.800,00	1.272.331.198,00			
		Kelurahan Jatiluhur				13	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	108,00 Pokmas / Ormas	108	1.104.832.200,00	1.098.895.298,00			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Kelurahan Jatirasa				14	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	230,00 Pokmas / Ormas	230	1.603.201.600,00	1.457.388.918,00	
		Kecamatan Jatiasih				15	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0,00 Pokmas / Ormas	0	306.296.000,00	296.124.999,00	
		Kecamatan Jatiasih				16	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi	1,00 Laporan	1	50.000.000,00	40.153.000,00	
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	0,00 Laporan	0				
					B	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%	100	420.000.000,00	404.616.000,00	
		Kelurahan Jatiasih				1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00 Lembaga Kemasyarakatan	2	70.000.000,00	68.650.000,00	
		Kelurahan Jatisari				2	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00 Lembaga Kemasyarakatan	2	70.000.000,00	66.200.000,00	
		Kelurahan Jatikramat				3	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00 Lembaga Kemasyarakatan	2	70.000.000,00	68.000.000,00	
		Kelurahan Jatimekar				4	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00 Lembaga Kemasyarakatan	2	70.000.000,00	67.166.000,00	
		Kelurahan Jatiluhur				5	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00 Lembaga Kemasyarakatan	2	70.000.000,00	70.000.000,00	
		Kelurahan Jatirasa				6	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00 Lembaga Kemasyarakatan	2	70.000.000,00	64.600.000,00	
			Terwujudnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	IV	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum		Persentase wilayah tertib K3	100,00%	100	50.000.000,00	50.000.000,00		
					A	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%	100	50.000.000,00	50.000.000,00	
		Kecamatan Jatiasih				1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12,00 Laporan	12	50.000.000,00	50.000.000,00	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
			Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat	100,00%	100	40.000.000,00	40.000.000,00		
				A	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penanganan Konflik/Perselisihan Masyarakat	100%	100	40.000.000,00	40.000.000,00		
		Kecamatan Jatiasih			1 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12,00 Laporan	12	40.000.000,00	40.000.000,00		
10	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	Kecamatan Pondokgede	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00%	99,02	20.768.640.588,00	18.496.347.655,00		
				A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100	3.000.000,00	2.869.000,00		
		Kecamatan Pondokgede			1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6,00 Laporan	6	3.000.000,00	2.869.000,00		
				B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan Keuangan Perangkat Daerah	100%	100	11.846.321.000,00	10.022.287.126,00		
		Kecamatan Pondokgede			1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.403,00 Orang/ bulan	1.403,00	11.843.321.000,00	10.019.470.126,00		
		Kecamatan Pondokgede			2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,00 Laporan	1	3.000.000,00	2.817.000,00		
						Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,00%					
				C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100	10.000.000,00	10.000.000,00		
		Kecamatan Pondokgede			1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2,00 Orang	2	10.000.000,00	10.000.000,00		
						Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%					
				D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	97,62	490.000.000,00	414.132.197,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Kecamatan Pondokgede				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00 Paket	1	20.000.000,00	18.320.328,00	
		Kecamatan Pondokgede				2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4,00 Paket	4	245.000.000,00	211.737.000,00	
		Kecamatan Pondokgede				3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3,00 Paket	3	75.000.000,00	68.982.900,00	
		Kecamatan Pondokgede				4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12,00 Dokumen	12	20.000.000,00	19.275.000,00	
		Kecamatan Pondokgede				5	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12,00 Laporan	10	10.000.000,00	4.535.000,00	
		Kecamatan Pondokgede				6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00 Laporan	12	115.000.000,00	86.366.969,00	
		Kecamatan Pondokgede				7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	120,00 Dokumen	120	5.000.000,00	4.915.000,00	
					E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100	8.063.583.588,00	7.790.757.568,00	
		Kecamatan Pondokgede				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00 Laporan	12	422.000.000,00	238.725.499,00	
		Kecamatan Pondokgede				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00 Laporan	12	7.641.583.588,00	7.552.032.069,00	
							Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%					
					F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	100	355.736.000,00	256.301.764,00	
		Kecamatan Pondokgede				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2,00 Unit	2	35.000.000,00	34.535.500,00	
		Kecamatan Pondokgede				2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36,00 Unit	36	150.736.000,00	68.902.809,00	
		Kecamatan Pondokgede				3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38,00 Unit	38	20.000.000,00	9.840.000,00	
		Kecamatan Pondokgede				4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5,00 Unit	5	150.000.000,00	143.023.455,00	
			Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat	100,00%	100	180.000.000,00	170.754.000,00		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
				A	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Pondokgede	100%	100	130.000.000,00	126.765.000,00		
		Kecamatan Pondokgede			1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,00 Dokumen	12	30.000.000,00	29.245.000,00		
		Kelurahan Jatiwaringin			2 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,00 Dokumen	12	20.000.000,00	19.520.000,00		
		Kelurahan Jatimakmur			3 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,00 Dokumen	12	20.000.000,00	19.520.000,00		
		Kelurahan Jatibening			4 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,00 Dokumen	12	20.000.000,00	19.440.000,00		
		Kelurahan Jaticempaka			5 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,00 Dokumen	12	20.000.000,00	19.520.000,00		
		Kelurahan Jatibening Baru			6 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,00 Dokumen	12	20.000.000,00	19.520.000,00		
				B	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat	100%	100	50.000.000,00	43.989.000,00		
		Kecamatan Pondokgede			1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1,00 Laporan	1	50.000.000,00	43.989.000,00		
			Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif	100,00%	97,37	7.774.895.000,00	7.617.374.033,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
					A	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Pondokgede	100%	96,15	7.344.895.000,00	7.210.208.033,00			
		Kecamatan Pondokgede				1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyarawah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	731,00 Lembaga	731	120.000.000,00	109.764.250,00		
		Kelurahan Jatiwaringin				2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1,00 Unit	1	200.000.000,00	200.000.000,00		
		Kelurahan Jatimakmur				3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1,00 Unit	1	200.000.000,00	200.000.000,00		
		Kelurahan Jatibening				4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1,00 Unit	1	200.000.000,00	200.000.000,00		
		Kelurahan Jaticempaka				5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2,00 Unit	1	200.000.000,00	200.000.000,00		
		Kelurahan Jatibening Baru				6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1,00 Unit	1	200.000.000,00	200.000.000,00		
		Kecamatan Pondokgede				7	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	165,00 Pokmas/Ormas	165	187.441.000,00	172.784.199,00		
		Kelurahan Jatiwaringin				8	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	165,00 Pokmas/Ormas	165	1.209.437.600,00	1.205.114.598,00		
		Kelurahan Jatimakmur				9	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Keluraha	223,00 Pokmas/Ormas	223	1.615.396.800,00	1.544.008.998,00		
		Kelurahan Jatibening				10	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	153,00 Pokmas/Ormas	153	1.124.504.000,00	1.121.908.798,00		
		Kelurahan Jaticempaka				11	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	162,00 Pokmas/Ormas	162	1.184.744.400,00	1.170.807.394,00		
		Kelurahan Jatibening Baru				12	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	112,00 Pokmas/Ormas	112	853.371.200,00	849.644.796,00		
		Kecamatan Pondokgede				13	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1,00 Laporan	1	50.000.000,00	36.175.000,00		
					B	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat	100%	100	430.000.000,00	407.166.000,00			
		Kelurahan Jatiwaringin				1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00 Lembaga Kemasyarakatan	2	70.000.000,00	62.600.000,00		
		Kelurahan Jatimakmur				2	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00 Lembaga Kemasyarakatan	2	70.000.000,00	64.850.000,00		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
									TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		Kelurahan Jatibening				3	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00 Lembaga Kemasyarakatan	2	70.000.000,00	69.800.000,00			
		Kelurahan Jaticempaka				4	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00 Lembaga Kemasyarakatan	2	70.000.000,00	63.500.000,00			
		Kelurahan Jatibening Baru				5	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00 Lembaga Kemasyarakatan	2	70.000.000,00	68.900.000,00			
		Kecamatan Pondokgede				6	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12,00 Laporan	12	80.000.000,00	77.516.000,00			
			Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	IV	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum			Persentase wilayah tertib K3	100,00%	100	1.332.845.400,00	1.190.874.200,00			
					A	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Pondokgede	100%	100	1.332.845.400,00	1.190.874.200,00		
		Kecamatan Pondokgede				1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12,00 Laporan	12	50.000.000,00	48.542.500,00			
								Persentase Wilayah Tertib K3 di Kecamatan Pondokgede	100%						
		Kelurahan Jatiwaringin				2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12,00 Laporan	12	156.400.000,00	150.000.000,00			
		Kelurahan Jatimakmur				3	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12,00 Laporan	12	192.400.000,00	192.000.000,00			
		Kelurahan Jatibening				4	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12,00 Laporan	12	144.400.000,00	144.000.000,00			
		Kelurahan Jaticempaka				5	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12,00 Laporan	12	198.400.000,00	198.000.000,00			
		Kelurahan Jatibening Baru				6	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12,00 Laporan	12	144.400.000,00	144.000.000,00			
								Persentase wilayah tertib K3	100,00%						



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
								<i>Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Pondokgede</i>	100%					
		Kecamatan Pondokgede				7	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12,00 Laporan	12	446.845.400,00	314.331.700,00		
			Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			Presentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat	100,00%	100	40.000.000,00	36.632.500,00		
					A	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		<i>Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kecamatan Pondokgede</i>	100%	100	40.000.000,00	36.632.500,00		
		Kecamatan Pondokgede				1	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12,00 Laporan	12	40.000.000,00	36.632.500,00		
11	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	Kecamatan Jatisampurna	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00%	100	18.982.875.985,00	17.899.216.300,00		
					A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		<i>Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100%	100	3.000.000,00	2.970.000,00		
		Kecamatan Jatisampurna				1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14,00 Laporan	14	3.000.000,00	2.970.000,00		
					B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		<i>Persentase Keuangan Perangkat Daerah</i>	100%	100	11.716.921.000,00	10.966.991.664,00		
		Kecamatan Jatisampurna				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	888,00 Orang/bulan	888	11.713.921.000,00	10.963.991.964,00		
		Kecamatan Jatisampurna				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,00 Laporan	1	3.000.000,00	2.999.700,00		
								Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,00%					
					C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		<i>Persentase Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	100%	100	10.000.000,00	10.000.000,00		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		Kecamatan Jatisampurna				1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2,00 Orang	2	10.000.000,00	10.000.000,00		
								Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%					
					D	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100	485.000.000,00	400.069.050,00		
		Kecamatan Jatisampurna				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.060,00 Paket	1.060,00	20.000.000,00	19.840.000,00		
		Kecamatan Jatisampurna				2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40,00 Paket	40	250.000.000,00	227.693.500,00	belanja natura dan pakan natura di setiap bulan	Mempercepat proses pada tahun anggaran berikutnya
		Kecamatan Jatisampurna				3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6,00 Paket	6	75.000.000,00	65.476.300,00		
		Kecamatan Jatisampurna				4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	192,00 Dokumen	192	20.000.000,00	19.080.000,00		
		Kecamatan Jatisampurna				5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00 Laporan	12	115.000.000,00	63.779.250,00		
		Kecamatan Jatisampurna				6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip yang ditata/dikelola	84,00 Box	84	5.000.000,00	4.200.000,00		
								Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12,00 Dokumen	12				
								Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%					
					E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100	6.328.954.985,00	6.165.359.320,00		
		Kecamatan Jatisampurna				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00 Laporan	12	187.338.000,00	174.607.743,00		
		Kecamatan Jatisampurna				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00 Laporan	12	6.141.616.985,00	5.990.751.577,00		
					F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100	439.000.000,00	353.826.266,00		
		Kecamatan Jatisampurna				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7,00 Unit	7	65.000.000,00	49.628.350,00		
		Kecamatan Jatisampurna				2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33,00 Unit	33	125.000.000,00	59.028.916,00		
		Kecamatan Jatisampurna				3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6,00 Unit	6	49.000.000,00	46.380.000,00		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Kecamatan Jatisampurna				4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1,00 Unit	1	200.000.000,00	198.789.000,00	
			Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat		100,00%	100	190.992.000,00	185.624.600,00	
					A	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Jatisampurna	100%	100	120.000.000,00	116.651.600,00	
		Kecamatan Jatisampurna				1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,00 Dokumen	12	20.000.000,00	19.422.500,00	
		Kelurahan Jatisampurna				2	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,00 Dokumen	12	20.000.000,00	18.381.500,00	
		Kelurahan Jatikarya				3	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,00 Dokumen	12	20.000.000,00	19.600.000,00	
		Kelurahan Jatiranggon				4	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,00 Dokumen	12	20.000.000,00	19.830.000,00	
		Kelurahan Jatirangga				5	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,00 Dokumen	12	20.000.000,00	19.530.600,00	
		Kelurahan Jatiraden				6	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait	12,00 Dokumen	12	20.000.000,00	19.887.000,00	
					B	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat	100%	100	70.992.000,00	68.973.000,00	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
									TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		Kecamatan Jatisampurna				1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12,00 Laporan	12	70.992.000,00	68.973.000,00			
			Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif	100,00%	100	6.676.563.400,00	6.470.664.299,00			
					A	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			Persentase Jumlah Kelembagaan Masyarakat yang aktif	100%	100	6.326.563.400,00	6.144.019.299,00		
		Kecamatan Jatisampurna				1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6,00 Lembaga Kemasyarakatan	6	120.000.000,00	106.477.000,00			
		Kelurahan Jatisampurna				2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1,00 Unit	1	200.000.000,00	200.000.000,00			
		Kelurahan Jatikarya				3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2,00 Unit	2	200.000.000,00	200.000.000,00			
		Kelurahan Jatiranggon				4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1,00 Unit	1	200.000.000,00	199.650.000,00			
		Kelurahan Jatirangga				5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1,00 Unit	1	200.000.000,00	200.000.000,00			
		Kelurahan Jatiraden				6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1,00 Unit	1	200.000.000,00	200.000.000,00			
		Kecamatan Jatisampurna				7	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4,00 Pokmas / Ormas	4	370.201.000,00	347.724.800,00			
		Kelurahan Jatisampurna				8	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	182,00 Pokmas / Ormas	182	1.363.455.200,00	1.322.373.800,00			
		Kelurahan Jatikarya				9	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	91,00 Pokmas / Ormas	91	823.236.000,00	760.903.100,00			
		Kelurahan Jatiranggon				10	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	113,00 Pokmas / Ormas	113	1.023.318.400,00	1.014.823.400,00			
		Kelurahan Jatirangga				11	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	83,00 Pokmas / Ormas	83	796.600.000,00	787.335.199,00			
		Kelurahan Jatiraden				12	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	82,00 Pokmas / Ormas	82	789.752.800,00	777.727.000,00			
		Kecamatan Jatisampurna				13	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1,00 Laporan	1	40.000.000,00	27.005.000,00			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
				B	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat	100%	100	350.000.000,00	326.645.000,00		
		Kelurahan Jatisampurna			1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00 Lembaga Kemasyarakatan	2	70.000.000,00	68.420.000,00		
		Kelurahan Jatikarya			2 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00 Lembaga Kemasyarakatan	2	70.000.000,00	60.800.000,00		
		Kelurahan Jatiranggon			3 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00 Lembaga Kemasyarakatan	2	70.000.000,00	67.000.000,00		
		Kelurahan Jatirangga			4 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00 Lembaga Kemasyarakatan	2	70.000.000,00	62.600.000,00		
		Kelurahan Jatiraden			5 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00 Lembaga Kemasyarakatan	2	70.000.000,00	67.825.000,00		
			Terwujudnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	IV	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase wilayah tertib K3	100,00%	100	50.000.000,00	39.856.000,00		
				A	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Pondokgede	100%	100	50.000.000,00	39.856.000,00		
		Kecamatan Jatisampurna			1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12,00 Laporan	12	50.000.000,00	39.856.000,00		
			Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat	100,00%	100	40.000.000,00	31.090.000,00		
				A	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100%	100	40.000.000,00	31.090.000,00		
		Kecamatan Jatisampurna			1 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12,00 Dokumen	12	40.000.000,00	31.090.000,00		
12	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	Kecamatan Pondokmelati	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00%	93,79	16.402.968.200,00	14.856.653.443,00		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
				A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100	3.000.000,00	0		
		Kecamatan Pondokmelati		1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,00 Laporan	1	3.000.000,00	0		
				B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan Keuangan Perangkat Daerah	100%	87,68	9.459.936.000,00	8.671.100.237,00		
		Kecamatan Pondokmelati		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.278,00 Orang bulan	963	9.456.936.000,00	8.671.100.237,00		
		Kecamatan Pondokmelati		2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,00 Laporan	1	3.000.000,00	0		
						Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,00%					
				C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	90	10.000.000,00	0		
		Kecamatan Pondokmelati		1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10,00 Orang	9	10.000.000,00	0		
						Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%					
				D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100	420.000.000,00	383.587.000,00		
		Kecamatan Pondokmelati		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2,00 Paket	2	20.000.000,00	19.501.500,00		
		Kecamatan Pondokmelati		2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4,00 Paket	4	221.125.000,00	212.925.500,00		
		Kecamatan Pondokmelati		3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2,00 Paket	2	38.875.000,00	29.658.000,00		
		Kecamatan Pondokmelati		4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1,00 Dokumen	1	20.000.000,00	19.200.000,00		
		Kecamatan Pondokmelati		5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00 Laporan	12	115.000.000,00	97.596.000,00		
		Kecamatan Pondokmelati		6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1,00 Dokumen	1	5.000.000,00	4.706.000,00		
				E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100	6.076.030.200,00	5.447.007.899,00		
		Kecamatan Pondokmelati		1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00 Laporan	12	350.000.000,00	164.573.106,00		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Kecamatan Pondokmelati				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00 Laporan	12	5.726.030.200,00	5.282.434.793,00	
							Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100,00%				
					F		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	83,82	434.002.000,00	354.958.307,00	
		Kecamatan Pondokmelati				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2,00 Unit	2	19.002.000,00	15.272.800,00	
		Kecamatan Pondokmelati				2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34,00 Unit	12	195.000.000,00	132.255.507,00	
		Kecamatan Pondokmelati				3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29,00 Unit	29	20.000.000,00	10.619.000,00	
		Kecamatan Pondokmelati				4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7,00 Unit	7	200.000.000,00	196.811.000,00	
			Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik			Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat	100,00%	100	150.000.000,00	131.306.000,00	
					A		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terpeliharanya Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	100	100.000.000,00	87.806.000,00	
		Kelurahan Jatimurni				1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,00 Dokumen	12	20.000.000,00	19.386.000,00	
		Kelurahan Jatirahayu				2	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,00 Dokumen	12	20.000.000,00	16.295.000,00	
		Kelurahan Jatiwarna				3	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,00 Dokumen	12	20.000.000,00	19.030.000,00	
		Kelurahan Jatimelati				4	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,00 Dokumen	12	20.000.000,00	13.459.000,00	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
								<i>Presentase Kegiatan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum</i>	100%					
		Kecamatan Pondokmelati				5	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,00 Dokumen	12	20.000.000,00	19.636.000,00		
					B	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>		<i>Presentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	100%	100	50.000.000,00	43.500.000,00		
		Kecamatan Pondokmelati				1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1,00 Laporan	1	50.000.000,00	43.500.000,00		
			Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif	100,00%	90	7.436.027.400,00	6.310.118.994,00		
					A	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>		<i>Presentase Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	100%	86,36	7.156.027.400,00	6.054.468.994,00		
		Kecamatan Pondokmelati				1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15,00 Lembaga Kemasyarakatan	15	50.000.000,00	46.899.000,00		
								<i>Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat</i>	100%					
		Kelurahan Jatimurni				2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1,00 Unit	1	200.000.000,00	200.000.000,00		
		Kelurahan Jatirahayu				3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3,00 Unit	3	200.000.000,00	200.000.000,00		
		Kelurahan Jatiwarna				4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2,00 Unit	0	200.000.000,00	0		
		Kelurahan Jatimelati				5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2,00 Unit	1	200.000.000,00	200.000.000,00		
		Kelurahan Jatimurni				6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	90,00 Pokmas/Ormas	90	1.100.797.200,00	986.890.198,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Kelurahan Jatirahayu				7	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	263,00 Pokmas / Ormas	263	2.418.899.200,00	2.030.973.398,00	
		Kelurahan Jatiwarna				8	Pemberdayaan Masyarakat dKelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	108,00 Pokmas / Ormas	108	1.024.684.000,00	894.183.600,00	
		Kelurahan Jatimelati				9	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	124,00 Pokmas / Ormas	124	1.426.647.000,00	1.210.782.798,00	
							Presentase Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%					
		Kecamatan Pondokmelati				10	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4,00 Pokmas / Ormas	4	295.000.000,00	259.674.000,00	
		Kecamatan Pondokmelati				11	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1,00 Laporan	1	40.000.000,00	25.066.000,00	
					B		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat	100%	100	280.000.000,00	255.650.000,00	
		Kelurahan Jatimurni				1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00 Lembaga Kemasyarakatan	2	70.000.000,00	68.000.000,00	
		Kelurahan Jatirahayu				2	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00 Lembaga Kemasyarakatan	2	70.000.000,00	59.000.000,00	
		Kelurahan Jatiwarna				3	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00 Lembaga Kemasyarakatan	2	70.000.000,00	64.250.000,00	
		Kelurahan Jatimelati				4	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00 Lembaga Kemasyarakatan	2	70.000.000,00	64.400.000,00	
			Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	VI	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum			Persentase wilayah tertib K3	100,00%	100	50.000.000,00	37.220.000,00	
					A		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Pondokmelati	100%	100	50.000.000,00	37.220.000,00	
		Kecamatan Pondokmelati				1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12,00 Laporan	12	50.000.000,00	37.220.000,00	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
			Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat	100,00%	100	50.000.000,00	23.436.000,00		
				A	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100%	100	50.000.000,00	23.436.000,00		
		Kecamatan Pondokmelati			1 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12,00 Dokumen	12	50.000.000,00	23.436.000,00		

9. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00%	99,2	10.079.397.613,00	9.078.207.469,00		
				A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100	3.000.000,00	2.960.000,00		
		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik			1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,00 Laporan	1	3.000.000,00	2.960.000,00		
				B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keuangan Perangkat Daerah	100%	95,19	8.897.620.000,00	7.946.269.130,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.080,00 Orang/bulan	976	8.894.620.000,00	7.943.269.130,00	Pada tahun 2023, terdapat pengurangan jumlah aparatur Badan Kesbangpol dikarenakan adanya yang memasuki masa purna dan meninggal dunia sehingga target yang ditetapkan tidak teralisasi 100 % untuk pembayaran gaji aparatur kesbangpol.	Untuk tahun selanjutnya, Badan Kesbangpol akan menyediakan Gaji dan Tunjangan ASN berdasarkan data existing tahun 2024.
		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18,00 Laporan	18	3.000.000,00	3.000.000,00		
								Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,00%					
					C		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100	20.000.000,00	20.000.000,00		
		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik				1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8,00 Orang	8	20.000.000,00	20.000.000,00		
								Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%					
					D		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100	330.000.000,00	303.345.751,00		
		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik				1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3,00 Paket	3	170.000.000,00	152.289.000,00		
		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik				2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2,00 Paket	2	30.000.000,00	30.000.000,00		
		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik				3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3,00 Dokumen	3	20.000.000,00	18.370.000,00		
		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik				4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00 Laporan	12	100.000.000,00	92.866.751,00		
		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik				5	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	250,00 Dokumen	250	10.000.000,00	9.820.000,00		
					E		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100	548.777.613,00	540.381.590,00		
		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik				1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00 Laporan	12	548.777.613,00	540.381.590,00		
								Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
				F	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%	100	280.000.000,00	265.250.998,00		
		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22,00 Unit	22	250.000.000,00	235.250.998,00		
		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25,00 Unit	25	30.000.000,00	30.000.000,00		
			Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	II	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	30,00%	100	2.611.580.860,00	2.373.801.860,00		
				A	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di Masyarakat Kota Bekasi	100%	100	2.611.580.860,00	2.373.801.860,00		
		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	840,00 Orang	840	2.611.580.860,00	2.373.801.860,00		
			Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	III	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Pembinaan Politik Daerah	5,00%	100	61.148.826.000,00	55.674.496.589,00		
				A	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Jumlah Masyarakat yang mendapat Pembinaan Politik di Kota Bekasi	100%	100	61.148.826.000,00	55.674.496.589,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik			1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Da	11,00 Dokumen	11	59.867.790.000,00	54.930.051.189,00		
		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik			2	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Pol	2.260,00 Orang	2.260,00	1.246.880.000,00	744.445.400,00	Berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan oleh Badan Kesbangpol pada tahun 2023, telah terealisasi 100%. Terkait dengan penyerapan realisasi anggaran tidak mempengaruhi target kinerja yang telah ditetapkan. Badan Kesbangpol lebih mengutamakan prinsip efektif dan efisien tanpa mengurangi target capaian kinerja.	Berkenaan dengan sub kegiatan ini pada tahun 2024, akan kembali dianggarkan oleh Badan Kesbangpol dengan memperhatikan substansi pelaksanaan kegiatan dalam bentuk kegiatan pendidikan daerah pemilu serentak pada tahun 2024.
		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik			3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Peman	12,00 Laporan	12	34.156.000,00	0	Sub Kegiatan ini pada tahun 2023 mengakomodir pelaksanaan movev pra pemilu, dengan capaian output 100%. Terkait dengan realisasi penyerapan anggaran tidak terserap dikarenakan Badan Kesbangpol lebih memaksimalkan kerjasama antar stakeholder terkait pelaksanaan monitoring tanpa penggunaan anggaran.	Pada tahun 2024 akan kembali dianggarkan dengan output berupa laporan hasil penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pemilu serentak.
			Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	IV	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Persentase jumlah organisasi kemasyarakatan yang dibina	100,00%	96,15	9.255.000.000,00	8.740.230.000,00		
				A	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan tertiba administrasi di Kota Bekasi	100%	96,15	9.255.000.000,00	8.740.230.000,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik				1	Penyusunan Program Kerja di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	26,00 Dokumen	24	8.955.000.000,00	8.605.000.000,00	Dalam pemberian hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang difasilitasi Badan Kesbangpol, terdapat 2 Ormas yang tidak memenuhi persyaratan dalam administrasi penerima hibah (Adanya konflik internal Ormas calon penerima hibah)	Badan Kesbangpol akan tetap memfasilitasi kembali kepada ormas yang telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapatkan bantuan hibah sesuai dengan peraturan perundang - undangan dan ketentuan yang berlaku
		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik				2	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300,00 Orang	300	300.000.000,00	135.230.000,00		
			Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	V	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya			Cakupan Masyarakat yang mebnapat pembinaan peningkatan pengembangan ketahanan ekonomi. sosial. budaya	0,17%	100	800.000.000,00	661.083.000,00		
				A	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			Jumlah Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kota Bekasi	100%	100	800.000.000,00	661.083.000,00		
		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik				1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.250,00 Orang	1.250,00	800.000.000,00	661.083.000,00		
			Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	VI	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial			Persentase penanganan konflik yang disebabkan oleh suku, ras dan antar golongan	100,00%	100	1.495.200.000,00	1.335.081.000,00		
				A	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			Persentase Penanganan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di Kota Bekasi	100%	100	1.495.200.000,00	1.335.081.000,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik				1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanga	400,00 Orang	400	845.200.000,00	748.731.000,00		
		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik				2	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta P	12,00 Laporan	12	650.000.000,00	586.350.000,00		

Sumber : Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2023

Berdasarkan tabel tersebut terdapat 6 urusan wajib pelayanan dasar, 17 urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 5 urusan pilihan dan 9 fungsi penunjang urusan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi berdasarkan Kewenangan dari masing-masing Perangkat Daerah.

3.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Kebijakan strategis yang dilaksanakan Pemerintah Kota Bekasi pada Tahun Anggaran 2023 meliputi Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota yang telah ditetapkan pada tahun Anggaran 2023 ini seperti terlihat pada **Tabel 3.4** dan **Tabel 3.5** berikut ini :

Tabel 3.4

Peraturan Daerah Kota Bekasi yang Ditetapkan Tahun 2023

NO	NOMOR	JUDUL PERDA	PERANGKAT DAERAH	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
1.	1 Tahun 2023/ 9 Januari 2023	Pembentukan Dana Cadangan Untuk Membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024	Kesbangpol	Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk membiayai kegiatan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
2.	2 Tahun 2023/ 7 Juli 2023	Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Satpol PP	a. dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat yang berkeadilan, berkepastian hukum sekaligus untuk mewujudkan tata kehidupan yang tertib, tenteram, nyaman, bersih, dan indah serta melindungi kehidupan dan tata nilai bersama. b. memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat di Kota Bekasi secara berkeadilan, berkepastian hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat
3.	3 Tahun 2023/17 Juli 2023	Perlindungan Anak	DPPPA	Dalam rangka Perlindungan anak sebagai generasi penerus bangsa dan dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang harus dipertanggungjawabkan keberadaannya, sehingga perlu dilakukan upaya terarah dan sistematis untuk menghormati, melindungi serta menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan terhadap Anak

NO	NOMOR	JUDUL PERDA	PERANGKAT DAERAH	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
4.	4 Tahun 2023/28 Juli 2023	Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	DPPPA	a. menjamin terpenuhinya hak perempuan agar dapat hidup dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; b. memberikan keadilan dan kesetaraan gender; c. meningkatkan kualitas hidup perempuan; d. melakukan pemberdayaan kepada perempuan baik secara individual maupun kelompok sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan hidup sosial kemasyarakatan; e. mencegah dan menangani resiko dari kerentanan perempuan agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal f. memberikan perlindungan dan memberi rasa aman bagi perempuan korban kekerasan dan diskriminasi, termasuk tindak pidana perdagangan orang; g. mencegah dan menghapus segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi terhadap perempuan; h. memberikan pelayanan kepada perempuan korban tindak kekerasan, pelapor dan saksi; i. melakukan pemulihan terhadap perempuan korban kekerasan; dan j. memfasilitasi dan melakukan mediasi terhadap sengketa rumah tangga untuk mewujudkan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera
5.	5 Tahun 2023/22 Agustus 2023	Pemajuan Kebudayaan Daerah	Disparbud	a. haluan dalam upaya pembangunan Kebudayaan Daerah. b. memperkuat jati diri bangsa, martabat dan pembangunan identitas kedaerahan yang berlandaskan pada nilai kearifan lokal, etika dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan
6.	6 Tahun 2023/29 Agustus 2023	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022	BPKAD	untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
7.	7 Tahun 2023/19 September 2023	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha	DPMPTSP	a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah; b. menciptakan lapangan kerja; c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; d. meningkatkan kemampuan daya

NO	NOMOR	JUDUL PERDA	PERANGKAT DAERAH	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
				saing dunia usaha Daerah; e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah; f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan penggunaan dana yang berasal dari dalam maupun luar negeri dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat dalam rangka melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari; dan h. meningkatkan kesejahteraan rakyat
8.	8 Tahun 2023/27 Oktober 2023	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023	BPKAD	menyesuaikan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mengakibatkan terjadi pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.
9.	9 Tahun 2023/21 Desember 2023	Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Kesbangpol	a. menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara; b. mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air; c. terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia; dan d. mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat
10.	10 Tahun 2023/27 Desember 2023	Pengendalian Pencemaran Air	Dinas Lingkungan Hidup	a. menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Air; b. menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, dalam upaya konservasi Air dan Sumber Air; c. mengendalikan Daya Rusak Air secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan; dan d. peningkatan kualitas air permukaan yang berada di Kota Bekasi.
11.	11 Tahun 2023/29 Desember 2023	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan	Dinas Pendidikan	a. untuk berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga masyarakat yang cerdas, demokratis, serta bertanggung jawab; b. dalam rangka Akses atas pelayanan pendidikan yang

NO	NOMOR	JUDUL PERDA	PERANGKAT DAERAH	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
				mencukupi, merata, dan terjangkau; c. dalam rangka daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan /atau kondisi masyarakat, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan Pendidikan.
12.	12 Tahun 2023/29 Desember 2023	Penyelenggaraan Rumah Potong Hewan	DKPPP	a. memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan RPH; b. meningkatkan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat; c. mewujudkan kesehatan masyarakat melalui penyediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal; dan d. mewujudkan kesejahteraan hewan dengan penerapan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan di RPH.
13.	13 Tahun 2023/29 Desember 2023	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	BPKAD	Perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
14.	14 Tahun 2023/29 Desember 2023	Penyelenggaraan Penanaman Modal	DPMPTSP	a. meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah; b. meningkatkan pengembangan penanaman modal; c. menciptakan lapangan kerja; d. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; e. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah; f. menjalin kerja sama dengan para pelaku usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah; g. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah h. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; i. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan j. meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sumber:Bagian Hukum SETDA Kota Bekasi 2023

Adapun daftar Peraturan Walikota Bekasi selama Tahun 2023 sebagaimana **Tabel 3.5** berikut :

Tabel 3.5
Peraturan Wali Kota Bekasi Yang Ditetapkan Tahun 2023

NO	NOMOR /TANGGAL PENETAPAN	JUDUL PERWAL	PERANGKAT DAERAH	TUJUAN /MASALAH YANG DISELESAIKAN
1.	1 Tahun 2023/20 Januari 2023	Pedoman Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi	BKPSDM	untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, mengoptimalkan kapasitas organisasi dan mempercepat pencapaian tujuan strategis daerah
2.	1.A Tahun 2023/20 20 Januari 2023	Insentif pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D	Dinas Kesehatan	dalam rangka menindaklanjuti Pasal 91 Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi, BLUD RSUD Kelas D dapat memberikan tunjangan tetap, Insentif, bonus atau prestasi, pesangon dan/atau pensiun kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD Kelas D
3.	2 Tahun 2023 /20 Januari 2023	Tata Cara Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi	BKPSDM	untuk menyelenggarakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas yang objektif, kompetitif, dan akuntabel sehingga diperoleh pejabat yang sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja
4.	3 Tahun 2023/20 Januari 2023	Tata Cara Promosi dan Mutasi Melalui Talent Pool dan Rencana Suksesi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi	BKPSDM	terselenggaranya proses promosi dan mutasi pejabat pimpinan tinggi pratama, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional pada Pemerintah Kota Bekasi secara objektif, kompetitif, dan akuntabel
5.	4 Tahun 2023/20 Januari 2023	Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi	BKPSDM	melaksanakan ketentuan Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6.	5 Tahun 2023/20 Januari 2023	Pedoman Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi	BKPSDM	a. memberikan kejelasan dan kepastian Karier kepada PNS; b. menyelaraskan antara pengembangan Karier PNS dan kebutuhan Pemerintah Kota; c. meningkatkan kompetensi dan kinerja PNS; d. mendorong peningkatan profesionalitas PNS; dan



NO	NOMOR /TANGGAL PENETAPAN	JUDUL PERWAL	PERANGKAT DAERAH	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
				e. iklim kerja yang kondusif dan transparan.
7.	6 Tahun 2023/20 Januari 2023	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 31.A Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi	Bagian Organisasi Setda	rangka meningkatkan kedisiplinan, wibawa dan keseragaman berpakaian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
8.	7 Tahun 2023/6 Februari 2023	Pedoman Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Diskominfostandi	dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5), Pasal 10 ayat (4), Pasal 16 ayat (4), Pasal 20 ayat (9), Pasal 22 ayat (5), Pasal 23 ayat (3), Pasal 26 ayat (13), Pasal 27 ayat (4), Pasal 33 ayat (4), Pasal 34 ayat (4), Pasal 35 ayat (4), Pasal 37 ayat (4), Pasal 38 ayat (4), Pasal 39 ayat (4), Pasal 40 ayat (4), Pasal 41 ayat (7), Pasal 42 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota
9.	8 Tahun 2023/10 Februari 2023	Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi UPTD pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi	Bagian Organisasi Setda	dalam rangka mewujudkan pusat kesehatan masyarakat yang efektif, efisien dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tingkat pertama
10.	9 Tahun 2023/13 Februari 2023	Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026	Bappelitbangda	dalam rangka menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
11.	10 Tahun 2023/13 Februari 2023	Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu di Kota Bekasi	DBMSDA	memberikan kepastian hukum dan pedoman kepada masyarakat dan Aparatur Pemerintah Kota Bekasi dalam penyelenggaraan infrastruktur Jaringan Utilitas Telekomunikasi di Kota Bekasi berlandaskan kemanfaatan, keselamatan, dan menjaga ruang kota tetap berkualitas sesuai dengan rencana Kota
12.	11 Tahun 2023/13 Februari 2023	Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 64 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Kota Bekasi	BPKAD	dalam rangka memenuhi kondisi dan permasalahan teknis dalam pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Bekasi
13.	12 Tahun 2023/14 Februari 2023	Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi	BPKAD	dalam rangka memenuhi kondisi dan permasalahan teknis dalam pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Bekasi
14.	13 Tahun 2023/22 Februari 2023	Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Bekasi	Bagian Organisasi	dalam rangka pelaksanaan kebijakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
15.	14 Tahun 2023/28 Februari 2023	Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun	Bappelitbangda	untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1)

NO	NOMOR /TANGGAL PENETAPAN	JUDUL PERWAL	PERANGKAT DAERAH	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		2024-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah
16.	15 Tahun 2023/6 Maret 2023	Penugasan Perseroan Daerah Mitra Patriot Sebagai Pengelola Kawasan Pedagang Kaki Lima dan Tempat Parkir pada Lokasi Pilot Project di Kota Bekasi	Bagian Perekonomian	a. menindaklanjuti Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Mitra Patriot dan Pasal 108 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah b. dalam rangka pemenuhan fungsi penataan Kota Bekasi khususnya pemanfaatan ruang untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) dan tempat parkir serta guna meningkatkan perekonomian daerah dengan menggali potensi ekonomi melalui upaya intensifikasi penerimaan dari sumber pendapatan daerah
17.	16 Tahun 2023/10 Maret 2023	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren	Bagian Kessos Setda	untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (4), dan Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren
18.	17 Tahun 2023/15 Maret 2023	Pedoman Penggunaan dan Pengelolaan Nama Domain, Sub Domain dan E-mail Resmi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota	Diskominfostandi	menunjang pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dalam rangka pengembangan <i>electronic government</i>
19.	18 Tahun 2023/18 Maret 2023	Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023	BPKAD	Menindak lanjuti Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan



NO	NOMOR /TANGGAL PENETAPAN	JUDUL PERWAL	PERANGKAT DAERAH	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
20.	19 Tahun 2023/28 Maret 2023	Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi	BKPSDM	dalam rangka mendukung pengelolaan manajemen sumber daya manusia melalui penilaian kompetensi
21.	20 Tahun 2023/4 April 2023	Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Daerah Kota Bekasi Tahun 2021-2040	Bappelitbangda	untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, perlu dibuat Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
22.	21 Tahun 2023/4 April 2023	Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari APBD Tahun 2023	BPKAD	untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023
23.	22 Tahun 2023/6 April 2023	Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Kota Bekasi	Dinas Kesehatan	acuan bagi RSUD Kelas D yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bekasi
24.	23 Tahun 2023/10 April 2023	Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023	BPKAD	Menindak lanjuti Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan
25.	24 Tahun 2023/10 April 2023	Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi	BPKAD	untuk meningkatkan kualitas hasil rekonsiliasi yang akuntabel dalam proses penyusunan laporan keuangan
26.	25 Tahun 2023/3 Mei 2023	Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah Kota Bekasi Tahun 2022-2026	Bagian Tata Pemerintahan Setda	melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka Pemerintah Kota Bekasi perlu menyusun rencana aksi daerah standar pelayanan minimal
27.	26 Tahun 2023/3 Mei 2023	Percepatan Penurunan Stunting	DPPKB	untuk melaksanakan program Nasional penurunan <i>Stunting</i> di Daerah dan dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas dan produktif di Kota Bekasi



NO	NOMOR /TANGGAL PENETAPAN	JUDUL PERWAL	PERANGKAT DAERAH	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
28.	28 Tahun 2023/30 Mei 2023	Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi	Disapurda	1. untuk melaksanakan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Arsip Terjaga perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Pengelolaan Arsip Terjaga 2. dalam rangka tertib Pengelolaan Arsip Terjaga di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi
29.	29 Tahun 2023/30 Mei 2023	Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, ASN dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi	Bagian Pembangunan Setda	dalam rangka optimalisasi dan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah mengenai pelaksanaan perjalanan dinas bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Aparatur Sipil Negara yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
30.	30 Tahun 2023/30 Mei 2023	Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 32 Tahun 2019 tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi	Bagian Humas Setda	untuk lebih mewujudkan pelaksanaan penyebarluasan informasi yang lebih baik dan terarah
31.	31 Tahun 2023/7 Juni 2023	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023	BPKAD	Menindak lanjuti Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan
32.	32 Tahun 2023/7 Juni 2023	Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi	ITKO	untuk memberikan panduan dalam mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah
33.	33 Tahun 2023/14 Juni 2023	Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan	dalam rangka pengelolaan penerimaan peserta didik baru yang transparan, objektif, dan akuntabel, dengan memperhatikan akses pelayanan pendidikan bagi calon peserta didik agar lebih baik, serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan dunia pendidikan saat ini.



NO	NOMOR /TANGGAL PENETAPAN	JUDUL PERWAL	PERANGKAT DAERAH	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
34.	34 Tahun 2023/19 Juni 2023	Strategi Pengelolaan Sampah Melalui Pemanfaatan Ulang Sampah (PUASA) dengan Pembangunan Sorting Centre dan Eco System Advance Recycling (So Cesar) di Kota Bekasi	Dinas Lingkungan Hidup	Sebagai Pedoman dalam proses pengelolaan sampah dilaksanakan secara tepat guna, bertanggungjawab dan berkelanjutan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
35.	35 Tahun 2023/26 Juni 2023	Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan APBD	BPKAD	sebagai tindaklanjut Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
36.	36 Tahun 2023/6 Juli 2023	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2024	Bappelitbangda	Sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Pelafon Anggaran Sementara serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
37.	37 Tahun 2023/6 Juli 2023	Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Untuk Penyederhanaan Birokrasi	Bagian Organisasi Setda	a. mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien; b. memastikan pencapaian tujuan, strategi, dan kinerja organisasi; c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia; dan; d. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
38.	38 Tahun 2023/17 Juli 2023	Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota	BKPSDM	a. peningkatan kualitas dan kapasitas pegawai; b. penguatan peran pimpinan; dan c. penguatan kolaborasi antara Pimpinan dengan Pegawai, antar-pegawai, dan antara Pegawai dengan pemangku kepentingan lainnya.
39.	40 Tahun 2023/24 Juli 2023	Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 02.A Tahun 2021 tentang Tata Cara Perencanaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD	Bappelitbangda	dalam rangka menyesuaikan periode perubahan perencanaan pembangunan daerah
40.	41 Tahun 2023/3 Agustus 2023	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2023	Bappelitbangda	Melaksanakan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
41.	42 Tahun 2023/3 Agustus 2023	Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijasah Bagian Pegawai Negeri Sipil	BKPSDM	a. memberikan motivasi bagi peningkatan kinerja, pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan



NO	NOMOR /TANGGAL PENETAPAN	JUDUL PERWAL	PERANGKAT DAERAH	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
				kepribadian profesional Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier; b. meningkatkan kompetensi PNS melalui jalur pendidikan untuk menjawab tantangan yang selalu berubah dalam pencapaian visi dan misi pembangunan; c. memberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi dalam pengembangan diri melalui pendidikan.
42.	43 Tahun 2023/7 Agustus 2023	Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Veteran Republik Indonesia, Perintis Kemerdekaan, Mantan Wali Kota Bekasi dan Mantan Wakil Wali Kota Bekasi, Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia, Purnawirawan Kepolisian republik Indonesia dan Pensiunan Aparatur Sipil Negara Tahun 2023	Bapenda	sebagai bentuk penghargaan Pemerintah Daerah atas pengabdian dan jasa pada bangsa dan negara kepada Veteran Republik Indonesia, Perintis Kemerdekaan, Mantan Wali Kota Bekasi, Mantan Wakil Wali Kota Bekasi, Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia, Purnawirawan Kepolisian Republik Indonesia dan Pensiunan Aparatur Sipil Negara
43.	44 Tahun 2023/8 Agustus 2023	Penyelenggaraan Satuan Perlindungan Masyarakat di Daerah Kota Bekasi	SatpolPP	mewujudkan pemberdayaan potensi Satlinmas dalam mendukung penanggulangan bencana dan penanggulangan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam masyarakat
44.	45 Tahun 2023/18 Agustus 2023	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi	Bagian Organisasi Setda	Tindakanlajut Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi
45.	46 Tahun 2023/22 Agustus 2023	Pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera	DPPPA	a. meningkatkan status kesehatan perempuan; b. meningkatkan status pendidikan perempuan; c. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perempuan dalam usaha ekonomi produktif dan koperasi; d. meningkatkan partisipasi perempuan dalam pelestarian nilai-nilai sosial budaya dan lingkungan hidup; e. meningkatkan peran aktif perempuan dalam pengembangan masyarakat; f. meningkatkan peran aktif perempuan dalam pemahaman wawasan kebangsaan; dan g. meningkatkan kesejahteraan sosial perempuan.
46.	47 Tahun 2023/22 Agustus 2023	Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi	Bappelitbangda	untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

NO	NOMOR /TANGGAL PENETAPAN	JUDUL PERWAL	PERANGKAT DAERAH	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
				Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah
47.	48 Tahun 2023/22 Agustus 2023	Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi	Bagian Organisasi Setda	a. meneguhkan jiwa korps dan kode etik Pegawai; b. meningkatkan pemantapan tata kelola organisasi; c. mendorong peningkatan profesionalitas Pegawai sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawabnya; dan d. memperkuat corak pemerintahan daerah bersendikan karakter budaya local.
48.	49 Tahun 2023/29 Agustus 2023	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	BPKAD	melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, maka perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
49.	50 Tahun 2023/4 September 2023	Grand Design pembangunan Kependudukan Kota Bekasi Tahun 2023-2048	DPPKB	dalam rangka menentukan arah kebijakan pembangunan kependudukan dalam jangka waktu tertentu agar terarah, efektif, dan terukur, guna mencapai hasil optimal bagi kesejahteraan masyarakat di daerah
50.	51 Tahun 2023/4 September 2023	Kampung Keluarga Berkualitas	DPPKB	meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat melalui Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang terintegrasi dengan sektor pembangunan lainnya
51.	52 Tahun 2023/7 September 2023	Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 146 Tahun 2020 tentang Biaya Penunjang Operasional Wali Kota Bekasi dan Wakil Wali Kota Bekasi	Bagian Tata Usaha Setda	rangka optimalisasi dan tertib administrasi pemberian biaya penunjang operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi
52.	53 Tahun 2023/13 September 2023	Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	rangka tertib pengelolaan keuangan daerah perlu mengatur sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
53.	54 Tahun 2023/15 September 2023	Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi dalam Upaya Pengelolaan Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan	Disarpusda	dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan untuk mendukung sistem pemerintah berbasis elektronik, agar setiap informasi kearsipan terekam dengan baik



NO	NOMOR /TANGGAL PENETAPAN	JUDUL PERWAL	PERANGKAT DAERAH	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		Pemerintah Daerah Kota Bekasi		dan menjadi bukti akuntabilitas dan memori kolektif bangsa
54.	55 Tahun 2023/15 September 2023	Peraturan Internal (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pondokgede Daerah Kota Bekasi.	Dinas Kesehatan	a. tercapainya kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah Kota Bekasi, pejabat pengelola dan staf medis; b. meningkatkan profesionalisme pelayanan kesehatan agar lebih efektif, efisien, fleksibel dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi serta akuntabel dalam pengelolaan dana; dan c. meningkatkan harmonisasi tata kerja, prosedur kerja, tugas dan fungsi serta sumber daya manusia pada BLUD RSUD Kelas D
55.	56 Tahun 2023/15 September 2023	Peraturan Internal (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Jatisampurna Daerah Kota Bekasi.	Dinas Kesehatan	a. tercapainya kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah Kota Bekasi, pejabat pengelola dan staf medis; b. meningkatkan profesionalisme pelayanan kesehatan agar lebih efektif, efisien, fleksibel dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi serta akuntabel dalam pengelolaan dana; dan c. meningkatkan harmonisasi tata kerja, prosedur kerja, tugas dan fungsi serta sumber daya manusia pada BLUD RSUD Kelas D.
56.	57 Tahun 2023/15 September 2023	Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Bagian Kerjasama Setda	terselenggaranya kerja sama daerah, sesuai dengan tata cara yang tepat dan benar serta mengedepankan kepastian hukum, keadilan, persamaan kedudukan, saling menguntungkan dan mengutamakan kepentingan nasional
57.	58 Tahun 2023/18 September 2023	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Disdukcapil	a. memberikan kepastian syarat dan jenis layanan penerbitan Dokumen Kependudukan yang diterbitkan oleh Dinas; b. memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi, dan status hukum penduduk; dan c. mewujudkan tertib administrasi kependudukan bagi Penduduk Daerah Kota.
58.	59 Tahun 2023/18 September 2023	Perubahan Keenam Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 64 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Kota Bekasi	BPKAD	menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
59.	60 Tahun 2023/19 September 2023	Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi.	RSUD CAM	a. sebagai imbalan atas penyediaan layanan kepada masyarakat. b. menutup seluruh biaya penyelenggaraan layanan dengan mempertimbangkan



NO	NOMOR /TANGGAL PENETAPAN	JUDUL PERWAL	PERANGKAT DAERAH	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
				kemampuan masyarakat
60.	61 Tahun 2023/19 September 2023	Tata Kelola Pendapatan dan Belanja Daerah yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah	BPKAD	untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf j dan Pasal 120 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Umum melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah
61.	62 Tahun 2023/19 September 2023	Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Keterangan Belajar dan/atau Keterangan Memiliki/Memperoleh Pendidikan Lebih Tinggi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi	BKPSDM	menciptakan standarisasi tertib administrasi pengelolaan pengembangan kompetensi PNS melalui jalur pendidikan dalam rangka mewujudkan manajemen kepegawaian yang sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria
62.	63 Tahun 2023/19 September 2023	Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi	BKPSDM	1. Melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pengelolaan kinerja Pegawai dilaksanakan melalui aplikasi kinerja Pegawai 2. Melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota, hasil penilaian kinerja pegawai digunakan untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan ASN dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pemberian tunjangan dan sanksi
63.	64 Tahun 2023/19 September 2023	Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bansos yang Bersumber dari APBD	BPKAD	dalam rangka upaya peningkatan tertib administrasi dalam pengelolaan dan pelaporan atas penggunaan dana hibah dan bantuan sosial di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
64.	65 Tahun 2023/19 September 2023	Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi	BKPSDM	dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi pengembangan karier, peningkatan profesionalisme, dan tertib administrasi jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional



NO	NOMOR /TANGGAL PENETAPAN	JUDUL PERWAL	PERANGKAT DAERAH	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
65.	66 Tahun 2023/19 September 2023	Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi	Disarpusda	a. sebagai pedoman bagi pencipta arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi untuk menciptakan keseragaman penggunaan Kode Klasifikasi Arsip dalam pengelolaan arsip dinamis; b. mewujudkan Kode Klasifikasi Arsip sebagai upaya untuk sinkronisasi informasi kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi dalam implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik; c. mewujudkan tertib arsip sesuai dengan tugas dan fungsi kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi; dan d. menunjang kelancaran penataan berkas dalam penemuan kembali arsip
66.	67 Tahun 2023/27 Oktober 2023	Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023	BPKAD	untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
67.	68 Tahun 2023/7 November 2023	Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, ASN dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi	Bagian Pembangunan Setda	Melaksanakan Ketentuan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi
68.	69 Tahun 2023/17 November 2023	Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023	BPKAD	pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dan adanya penyesuaian atas situasi dan kondisi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang berdampak pada pergeseran anggaran antar objek belanja yang mendesak untuk dilakukan
69.	70 Tahun 2023/17 November 2023	Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 146 Tahun 2020 tentang Biaya Penunjang Operasional Wali Kota Bekasi dan Wakil Wali Kota Bekasi	Bagian Tata Usaha	untuk mewujudkan tertib administrasi, kepastian hukum serta untuk menunjang kinerja dan kelancaran pelaksanaan tugas Wali Kota Bekasi dan Wakil Wali Kota Bekasi
70.	71 Tahun 2023/8 Desember 2023	Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja	BPKAD	melaksanakan ketentuan Lampiran Bab II huruf D.5.d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,



NO	NOMOR /TANGGAL PENETAPAN	JUDUL PERWAL	PERANGKAT DAERAH	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		Daerah		Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
71.	72 Tahun 2023/18 Desember 2023	Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023	BPKAD	dalam rangka penyesuaian atas situasi dan kondisi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang berdampak pada pergeseran anggaran antar objek belanja yang mendesak untuk dilakukan
72.	73 Tahun 2023/29 Desember 2023	Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi	BPKAD	dalam rangka melengkapi kebijakan akuntansi pemerintah daerah Kota Bekasi dengan menambahkan kebijakan akuntansi perjanjian konsesi jasa dan kebijakan akuntansi properti investasi
73.	74 Tahun 2023/29 Desember 2023	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	BPKAD	dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024,

Sumber:Bagian Hukum SETDA Kota Bekasi 2023

Berdasarkan tabel tersebut selama Tahun 2023 telah ditetapkan sebanyak 14 Peraturan Daerah dan 73 Peraturan Walikota sebagai penetapan kebijakan strategis Perangkat Daerah dalam rangka mencapai tujuan dari setiap permasalahan yang ditemui oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Kota Bekasi.

3.3. TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi tahun sebelumnya, tindaklanjut dan Tujuan dan masalah yang diselesaikan sebagaimana terdapat dalam Tabel 3.6 sebagai berikut:

Tabel 3.6
Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2023

No	Kondisi	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tujuan/Masalah yang diselesaikan	Tindak Lanjut
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tidak tercapainya nilai AKIP yang ditargetkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 65,48 dari target nilai sebesar 75 (tujuh puluh lima) atau hanya tercapai 87,31% yang disebabkan masih lemahnya: 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi atas AKIP	1. Melakukan Evaluasi Capaian AKIP setiap Triwulan, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah percepatan pencapaian target kinerja oleh Bagian Organisasi Setda Kota Bekasi. 2. Meningkatkan peran Inspektorat Kota Bekasi sebagai pelaksana supervisi terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Inspektorat Kota Bekasi. 3. Mengevaluasi kembali penyebab ketidaktercapaian Nilai AKIP pada Perangkat Daerah dan menerapkan <i>reward and punishment</i> sesuai tanggungjawabnya, dilakukan oleh Inspektorat dan Bagian Organisasi.	- Menetapkan target nilai dalam RPJMD terlalu tinggi - Adanya penurunan nilai SAKIP dari Tahun 2020 ke 2021 karena pada Tahun 2021 ada kasus OTT Kota Bekasi - Tahun 2020: 67,07 - Tahun 2021: 66,95 - Penurunan nilai karena adanya perubahan Permenpan No. 88/2021 dari 5 indikator menjadi 4 indikator ITKO telah melakukan perannya sesuai dengan Tupoksi, hanya saja perlu penguatan dan intensivitas dengan OPD dan juga dengan Pimpinan Daerah untuk menyampaikan Rekomendasi baik, LHR, LHA, LHE. serta tindak lanjutnya Berdasarkan Surat dari Kemenpan RB Nomor B/992/AA.05/2022 tanggal 6 Desember 2022 tentang Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022 yang mengacu pada Permenpan-RB Nomor 88 tahun 2021 tentang AKIP Terdapat perubahan komponen dan sub komponen serta Kriteria Penilaiannya Tidak adanya reward dan punishment bagi Perangkat Daerah	- Melakukan penyesuaian target nilai SAKIP pada RPJMD yang akan datang - Melakukan penguatan Tim SAKIP Kota Bekasi dengan adanya rapat koordinasi dan komitmen pimpinan - Bimbingan Teknis bagi pegawai yang melaksanakan penyusunan SAKIP tingkat kota dan OPD Koordinasi dan komunikasi lanjutan dengan OPD, melakukan evaluasi, pendampingan dan Konsulting Inspektorat Kota Bekasi akan melakukan penyesuaian terhadap Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 dalam hal Reviu, pendampingan, Konsulting dan Quality Assurance atas AKIP OPD 1. Penguatan Tim SAKIP 2. Memberikan penghargaan bagi OPD dengan nilai SAKIP terbaik 3. Adanya komitmen pimpinan terhadap capaian nilai SAKIP

No	Kondisi	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tujuan/Masalah yang diselesaikan	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5
		4. Menyusun Rencana Kebijakan Penguatan SAKIP Pemerintah Daerah, dilakukan oleh Bappelitbangda, Inspektorat, Bagian Organisasi.	Keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renja dan Renstra) dengan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah (RKPD dan RPJMD)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (Renja dan Renstra)
			masih ditemukan ketidakselarasan antara Renstra, renja, Program dan kegiatan OPD	Melakukan Reviu atas renstra dan Renja OPD dan Kota Bekasi
			Penguatan komitmen pimpinan dan Tim SAKIP Kota	1. Penguatan Tim SAKIP 2. Memberikan penghargaan bagi OPD dengan nilai SAKIP terbaik 3. Adanya komitmen pimpinan terhadap capaian nilai SAKIP
2	Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (opini BPK terhadap laporan Keuangan) Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2022 yaitu predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini menunjukkan masih adanya kelemahan dalam pelaporan keuangan Pemerintah Daerah yang menyebabkan ketidakefektifan kinerja keuangan Pemerintah Kota Bekasi. Faktor yang menjadi penyebab Pengecualian dalam kewajaran laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi adalah : 1. Potensi kehilangan hak kepemilikan bangunan hasil Revitalisasi Pasar Pondok Gede untuk Hak Pengelolaan 439 unit bangunan dan penjaminan bangunan ke	1. Pemerintah Kota Bekasi Agar melakukan <i>Early Warning System</i> (EWS) terhadap program-program Pemerintah Daerah, oleh Inspektorat Kota Bekasi. 2. Pemerintah Kota Bekasi harus mentaati Peraturan Perundang undangan dalam pembayaran setiap Program Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh BPKAD	lemahnya Komitmen OPD untuk menjalankan Manajemen risiko, lemahnya SPIP OPD dan pengendalian internal Dalam melakukan pembayaran program, Pemerintah Kota Bekasi sudah mentaati peraturan perundang-undangan antara lain: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.	Penguatan fungsi APIP sebagai Early Warning Sistem, konsulting dan Penjamin mutu (quality assurance) 1. Pemerintah Kota Bekasi melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan pembinaan pengelolaan keuangan daerah kepada para pengelola keuangan dan pengelola kegiatan di seluruh Perangkat Daerah; 2. Membuat Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

No	Kondisi	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tujuan/Masalah yang diselesaikan	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5
	Bank BTN oleh pihak ketiga. 2. Kasus pengadaan tanah SDN Bojong Rawalumbu I dan VIII Tahun 2021 yang belum menghasilkan putusan Pengadilan lebih tinggi.	3. Mendorong langkah-langkah optimal terkait dengan penyelesaian masalah di luar kewenangan Pemerintah Kota Bekasi yang berdampak langsung pada Pemerintah Daerah dilakukan oleh Inspektorat dan BPKAD.	1. Pasar Pondokgede 1. PT. Kitita Alami Propertindo selaku pihak yang melakukan revitalisasi dan pengelolaan Pasar Atrium Pondok Gede telah menjaminkan/mengagunkan Sertifikat HGB di atas HPL Pemerintah Kota Bekasi ke Bank BTN. Berdasarkan informasi Bank BTN, PT. Kitita Alami Propertindo merupakan debitur yang bermasalah/kredit macet. 2. PT. Kitita Alami Propertindo memiliki tunggakan sebagai berikut: a. PBB pokok dari Tahun 2014 s.d. 2022 sebesar Rp.5.336.545.746,00 dan denda sebesar Rp.1.490.961.275,00. b. Kontribusi sejak Tahun 2019 s.d. Juli 2022 sebesar Rp.4.015.042.750,00. 3. Pemerintah Kota Bekasi telah memberikan teguran sebagai berikut: a. Teguran I melalui surat Sekretaris Daerah Kota Bekasi Nomor 134.4/3457/SETDA.Ks tanggal 30 April 2021. b. Teguran II melalui surat Sekretaris Daerah Kota Bekasi Nomor 134.4/4534/SETDA.Ks tanggal 17 Juni 2021. c. Teguran III melalui surat Sekretaris Daerah Kota Bekasi Nomor 134.4/6902/SETDA.Ks tanggal 17 September 2021. 4. Disdagperin Kota Bekasi melalui surat Nomor 511.2/1240/Disdagperin.Pasar tanggal 29 Juli 2022 hal Evaluasi Teknis Terhadap PT. Kitita Alami Propertindo, berdasarkan evaluasi dan analisa teknis pengelolaan atas teguran III untuk segera dilakukan pengambilalihan pengelolaan Pasar Pondokgede untuk menyelamatkan kontribusi/retribusi berjalan. Disdagperin bersedia melakukan pengambilalihan Pasar Pondokgede dan kewajiban tunggakan serta hal-hal lain yang menjadi tanggung jawab PT. Kitita Alami Propertindo diselesaikan secara musyawarah maupun proses hukum.	1. Melakukan penilaian aset bangunan Pasar Pondokgede. 2. Melakukan pengamanan aset melalui pemasangan plang aset milik Pemerintah Kota Bekasi. 3. Melakukan pengamanan dengan mendaftarkan bidang Lahan SDN Bojong Rawalumbu I untuk proses pensertifikatan dan VIII melalui pemasangan plang aset milik Pemerintah Kota Bekasi



No	Kondisi	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tujuan/Masalah yang diselesaikan	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5
			I.SDN Bojong Rawalumbu I dan VIII Proses Hukum yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Bekasi telah melalui 2 tahapan yaitu : 1. Pengadilan Negeri dengan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Bks tanggal 25 Mei 2021 Pengadilan Tinggi Bandung putusan Nomor 455/PDT/PT.BDG tanggal 29 September 2021 Terdapat masalah yang di luar kewenangan Pemerintah Kota Bekasi namun berdampak langsung pada Pemerintah Daerah antara lain masalah yang menjadi pengecualian dalam opini LKPD yang harus dikonsultasikan kepada pihak yang berkompeten	BPKAD telah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan bersurat kepada Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dengan Nomor surat 900/3391/BPKAD.AKUN Tanggal 10 Mei 2023 perihal Permohonan Pendapat LHP, dan telah mendapatkan jawaban dari KSAP dengan Nomor surat S-40/K.1/KSAP/VI/2023 Tanggal 9 Juni 2023 dengan hasil sebagai berikut: 1. Terkait potensi kehilangan hak kepemilikan bangunan hasil Revitalisasi Pasar Pondok Gede, sehubungan telah terbit PSAP No.16 terkait Aset Konsesi Jasa: maka Pemerintah Kota Bekasi dapat memedomani PSAP 16 Aset Konsesi Jasa sebagai dasar pencatatan aset kemitraan terkait. 2. Terhadap Kasus pengadaan tanah yang belum menghasilkan putusan Pengadilan lebih tinggi, Pemerintah Kota Bekasi agar supaya menyajikan aset tetap tanah sesuai dengan harga perolehannya, dan sesuai dengan paragraf 30 PSAP 10 Pemerintah Kota Bekasi dapat melakukan pembetulan pada akun aset dan akun ekuitas jika terjadi kamahalan harga, serta perlu mengungkapkan aset tanah yang masih dalam proses hukum ke dalam Catatan atas Laporan Keuangan secara jelas dan terperinci. Atas Tanggapan KSAP tersebut, Bidang Akuntansi telah menindaklanjuti saran dari KSAP.



No	Kondisi	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tujuan/Masalah yang diselesaikan	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5
		4.Perangkat Daerah agar meningkatkan kompetensi terutama yang berkaitan dengan pemecahan masalah (<i>problem solving</i>) sehingga dapat menghentikan temuan audit yang berulang dilakukan oleh Inspektorat dan BKPSDM.	Lemahnya komitmen Manajemen OPD, khususnya jajaran pengambil keputusan untuk tidak mengulangi kejadian yang sama	Koordinasi dengan OPD, melakukan pendampingan dan tindak lanjut hasil temuan pada beberapa hal dilakukan audit dengan tujuan tertentu
			Telah dilaksanakan pelatihan <i>Problem Solving</i> yang dilaksanakan bekerja sama dengan Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) yang merupakan bagian dari Pelatihan <i>Soft Skill</i> Manajemen ASN. Pelatihan dilaksanakan secara daring setiap hari Jumat sebagai bagian dari PNS Belajar.dan dilaksanakan dari bulan Agustus 2022 sampai dengan Desember 2022 dan diikuti oleh 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) orang. Kegiatan ini tidak berbayar dan merupakan tindak lanjut dari kerjasama Pemerintah Kota Bekasi dan GNIK dalam meningkatkan kompetensi ASN	1.Akan dilaksanakan koordinasi dengan Inspektorat dan BPKP Perwakilan Jawa Barat atau pihak lain dalam pelaksanaan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan penyelesaian hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi. 2.Pelatihan yang terkait <i>Problem Solving</i> (merupakan materi dalam Pelatihan <i>Soft Skill</i> ASN) akan dilaksanakan melalui metode LMS (<i>Learning Mobile System</i>) bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan memanfaatkan Sista Praja yang dapat diakses oleh seluruh PNS Pemerintah Kota Bekasi sebagai sarana pembelajaran mandiri pada Tahun 2023.
3	Persentase Peningkatan PAD Pada Komponen Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2022 tercapai sebesar Rp. 2.598.627.911.358 atau mencapai sebesar 95,83% dari target, dengan asumsi pencapaian Persentase Pertumbuhan Peningkatan PAD sebesar 5% (lima persen) per tahun yang tidak sesuai dengan RPJMD yang telah ditetapkan.	1.Melakukan revieu atas penyesuaian antara target pertumbuhan peningkatan PAD yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan penetapan APBD sebesar 10% (sepuluh persen), sehingga menghasilkan data pertumbuhan yang real dalam perencanaan pertumbuhan ekonomi daerah yang dilakukan oleh Bapenda.	Ketidaksesuaian antara target yang sudah ditetapkan didalam Renstra dengan penetapan APBD yang tidak dilakukan reviu (penyesuaian) target di dalam Renstra sebagai kekeliruan.	Bapenda Kota Bekasi akan melakukan evaluasi dan perbaikan Dalam Rangka mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan kesesuaian target yang telah ditetapkan, berdasarkan hasil mitigasi, yakni: 1.Melaksanakan Pendataan potensi pajak daerah secara berkala. 2.Melaksanakan evaluasi dan klarifikasi piutang pajak lancar dan tidak lancar. 3.Mengintegrasikan sistem antara Bapenda dan OPD Pengelola untuk memonitoring data Retribusi Daerah. 4.Mengoptimalkan fungsi koordinasi sebagai koordinator pengelola PAD terhadap OPD Penghasil dilingkungan Pemkot Bekasi 5.Melaksanakan reviu target antara Target Perencanaan Renstra dengan Target APBD tahun berjalan.



No	Kondisi	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tujuan/Masalah yang diselesaikan	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5
4	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Masih terdapat 69% Unit Pelayanan Publik (dari 95 UPP) yang belum memenuhi target yang mayoritas disebabkan oleh sarana dan prasarana yang kurang memadai.	1.Pemerintah Kota Bekasi diharapkan terus mendorong peningkatan sarana prasarana pelayanan publik, baik yang dibiayai dengan APBD Kota Bekasi atau melalui sumber pendanaan lain, seperti CSR, bantuan keuangan Pemerintah Provinsi dan kegiatan dari Kementerian/Lembaga serta sumber lain yang sah, dan pelaksanaannya didasarkan hasil kajian Bapelitbangda.	Usulan-usulan kegiatan pembangunan banyak yang masih belum dilengkapi oleh data dan dokumen perencanaan yang memadai	1. Melakukan penajaman analisis terhadap kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan 2. Melakukan analisa terhadap data dan informasi pembangunan 3. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
		2.Pemerintah Kota Bekasi agar membuat Pilot Project model Pelayanan Terpadu pada setiap jenis Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang terintegrasi dengan semua layanan Publik	Seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan (95 UPP) menyusun Standar Pelayanan dan Maklumat Layanan sbg pedoman dlm pemberian pelayanan publik sesuai harapan masyarakat dan kemampuan Unit Penyelenggara Pelayanan.	Memfasilitasi penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Layanan pada 95 Unit Penyelenggara Pelayanan.
			Integrasi aplikasi Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi yang semula memiliki 2 aplikasi perizinan (SILAT dan Simyandu) diintegrasikan ke dalam 1 aplikasi yaitu aplikasi SILAT.	Penyempurnaan aplikasi SILAT



No	Kondisi	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tujuan/Masalah yang diselesaikan	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5
		3.Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik harus didukung dengan sumber daya manusia (SDM) yang handal, serta ketersediaan sarana dan prasarana termasuk dukungan Teknologi Informasi (IT). Oleh karena itu, SDM pelayanan sebagai kunci keberhasilan kinerja pelayanan publik harus mendapatkan perhatian utama dalam perbaikan kualitas dan kapasitas pelayanan khususnya di kecamatan dan kelurahan-kelurahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah dan pelaksanaan peningkatan kualitas dan kapasitas melalui BKPSDM	Pengembangan Kompetensi Aparatur dalam bidang Teknologi Informasi dan Pelayanan Publik. a. Pemerintah Kota Bekasi telah melaksanakan pengembangan SDM terkait dengan perkembangan teknologi dalam peningkatan pelayanan masyarakat antara lain melalui pelatihan yang dilaksanakan bekerjasama dengan pihak lain antara lain dengan Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan secara klasikal (tatap muka) dan non klasikal (daring) dan diikuti oleh aparatur Pemerintah Kota Bekasi. Untuk pelatihan non klasikal telah dilaksanakan Pelatihan <i>Government Transformation Academy</i> (GTA) dengan peserta 1.394 (seribu tiga ratus sembilan puluh empat) orang dan Pelatihan Penerapan Data Analisis untuk <i>Data Driven Government</i> bagi ASN yang dilaksanakan secara klasikal telah dilaksanakan Pelatihan peserta sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang. Pelatihan ini tidak berbayar dan didanai oleh Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam rangka Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik telah dilaksanakan Pelatihan Teknologi Informasi <i>Fundamental Cyber Security</i> oleh Diskominfo Sandi dengan jumlah peserta adalah 9 (sembilan) orang. b. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat telah dilaksanakan Pelatihan <i>Public Excelet</i> dengan peserta berasal dari seluruh OPD berjumlah 183 (seratus delapan puluh tiga) orang. Pelatihan ini tidak berbayar dan merupakan tindak lanjut dari kerjasama dengan Perguruan Tinggi STIAMl.	Akan dilaksanakan Pelatihan <i>Publik Speaking</i> untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan publik yang ditujukan bagi seluruh aparatur Pemerintah Kota Bekasi. Program ini merupakan implementasi ruang lingkup perjanjian kerja sama antara BKPSDM Kota Bekasi dengan Institut STIAMl.



No	Kondisi	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tujuan/Masalah yang diselesaikan	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5
5	Indeks Perumahan, Permukiman Pertanian Nilai Indeks Perumahan, Permukiman Pertanian Kota Bekasi pada Tahun 2022 mencapai 95,40% dari target. Masih tidak optimalnya pencapaian Indeks Perumahan, Permukiman Pertanian memerlukan adanya evaluasi terutama yang terkait dengan penataan dan penanganan kawasan kumuh yang ada di Kota Bekasi. Selain itu ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena waktu pelaksanaan yang tidak cukup, tender dinyatakan gagal dan lahan yang belum siap bangun	1.Pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanian (Disperkimtan) agar lebih cermat dalam hal pengadaan / tender terkait kecukupan waktu pelaksanaan dan <i>clearance</i> permasalahan pengadaan lahan agar pembangunan dapat segera terealisasi	Bahwa proses pengadaan Dokumen Perencanaan dan Pengadaan Konstruksi dilakukan pada tahun yang sama.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanian Kota Bekasi telah melaksanakan proses pengadaan Dokumen Perencanaan setahun sebelum proses pembangunan sehingga proses pengadaan konstruksi dapat lebih maksimal. Pengadaan Konstruksi dilaksanakan pada awal tahun sehingga waktu pelaksanaan tercukupi. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanian Kota Bekasi dimulai pada tahun 2022 telah melaksanakan proses perencanaan pada tahun n-1, untuk kegiatan-kegiatan yang memenuhi durasi kegiatan masa panjang dan memiliki pagu anggaran yang besar sehingga diharapkan proses pelelangan konstruksi akan dilakukan pada awal tahun berjalan sehingga waktu pelaksanaan dapat memiliki rentang yang cukup
		2.DPRD mendorong Pemerintah Kota Bekasi melalui BPKAD mempercepat sertifikasi aset yang belum bersertifikat agar secara legalitas menjadi lebih aman dan mendorong pendataan asset agar terus dilakukan dan bekerjasama dengan dinas-dinas terkait salah satunya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanian.	Proses penyampaian data dan dokumen hasil pengadaan/pembebasan Lahan serta proses Serah Terima ke BPKAD dengan BAST, dapat dilakukan pada Tahun berjalan (apabila bidang tanah/lahan yg dibebaskan sedikit, bidang tanah terbebaskan secara keseluruhan, tdk ada sisa lahan dan tidak dilakukan Splitzing atau pemecahan Bukti Kepemilikan di BPN/Kantor Pertanian Kota Bekasi) Apabila Bidang Tanah/Lahan jumlahnya banyak, bidang2 tanah/lahan yg dibebaskan tdk terkena keseluruhan, perlu dilakukan proses Splitsing ke BPN/Kantah Kota Bekasi, maka Serah Terima Data dan Dokumen pengadaan lahan dengan BAST ke BPKAD dilakukan tahun selanjutnya setelah proses pengadaan/pembebasan tanah selesai dilakukan dan selesai proses Splitsing di BPN/Kantah Kota Bekasi.	Dalam proses percepatan sertifikasi oleh BPKAD khususnya terkait dengan aset2 berupa lahan dari hasil pengadaan/pembebasan lahan (Sejak berdirinya Disperkimtan Thn 2017), Dinas Perkimtan akan menyampaikan data dan dokumen serta Berita Acara Serah Terima (BAST) hasil pengadaan/pembebasan lahan yg sdh selesai dilaksanakan secara keseluruhan. Dalam pelaksanaan pengadaan/ pembebasan lahan, Disperkimtan Kota Bekasi Memohon dan Mendapat pendampingan dari Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri Kota Bekasi Untuk beberapa kegiatan yg dianggap penting dan rentan permasalahan.



No	Kondisi	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tujuan/Masalah yang diselesaikan	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5
			Pemerintah Kota Bekasi telah menandatangani MoU dengan Kantor BPN Nomor : 91 Tahun 20192/SKB-32.75.HP.01.04/IV/2019 Tanggal 29-04-2019 - Pendampingan oleh Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dalam rangka percepatan proses sertifikasi beserta penyelesaian permasalahan pensertifikatan. - Output sertifikat dalam proses sertifikasi sangat tergantung kepada Kantor ATR/BPN.	- Pendaftaran bidang tanah untuk proses Sertifikasi - Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan proses sertifikasi.
6	Gini Ratio Gini Ratio atau tingkat ketimpangan ekonomi pada masyarakat Kota Bekasi selama tahun 2022 masih mengalami kegagalan pencapaian target. Tidak tercapainya Gini Ratio yang ditargetkan pada tahun 2022 menggambarkan bahwa masih diperlukannya upaya-upaya komprehensif dalam mewujudkan pemerataan ekonomi yang menjadi salah satu visi Kota Bekasi yaitu Sejahtera	1.Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Tenaga Kerja agar membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, terutama industri padat karya baik skala UMKM, sedang maupun besar.	memberikan pelatihan kepada pencari kerja guna menekan angka pengangguran	Mengadakan kegiatan berbasis kompetensi
			Memberikan fasilitasi dalam bentuk sertifikasi kepada pelaku usaha	Telah dilaksanakan kegiatan Fasilitasi terhadap IKM melalui kegiatan Sosialisasi dan Sertifikasi (ISO 9001 205) dan akan bdilaksanakan juga di tahun 2023
		2.Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Koperasi dan UMKM agar membuka peluang, dan memberi akses usaha serta membina UMKM guna peningkatan ekonomi masyarakat.	dalam rangka untuk membuka lapangan pekerjaan akan dilakukan pelatihan Kewirausahaan. sebanyak 110 unit usaha baru	Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan telah dilakukan
			Kurangnya promosi pelaku usaha dalam pengembangan produk	Fasilitasi Promosi Dagang
			belum meratanya umkm mendapatkan fasilitas pembangunan dan pengembangan	telah dilakukan kegiatan - kegiatan untuk memfasilitasi umkm berupa pelatihan, bantuan penguatan pemberian legalitas, dan pemasaran
		3.Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Sosial agar memiliki data yang valid terkait masyarakat miskin sehingga dapat memberikan akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi bisa dinikmati secara merata oleh semua lapisan masyarakat	1.Kurangnya SDM dalam melakukan Verifikasi dan Validasi Data. 2.Kurangnya Sarana Prasarana Pendukung baik secara Informasi Teknologi maupun Teknikal 3.Kurangnya Koordinasi dengan Instansi-Instansi terkait dalam melakukan Verifikasi dan Validasi Data	1. Penggunaan Tenaga Kerja Sosial bersertifikasi dalam melakukan Pendataan 2. Mengajukan Permohonan pengadaan Sarana Prasarana guna mendukung Pendataan 3. Membangun Konsolidasi dan Koordinasi yang kuat guna mendapatkan Data yang Valid dengan Instansi-instansi Terkait



No	Kondisi	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tujuan/Masalah yang diselesaikan	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5
		4.Pemerintah Kota Bekasi melalui Bagian Ekonomi agar melakukan Optimalisasi Data dari berbagai instansi yang terkait dengan penanganan Gini Ratio untuk bahan kebijakan.	Capaian Gini Ratio sebesar 0,414 hasil perhitungan dari Badan Pusat Statistik (BPS), namun dengan nilai demikian Indeks Gini di Kota Bekasi masih pada level ketimpangan sedang	Bagian Perekonomian Kota Bekasi akan melakukan optimalisasi data melalui koordinasi dengan BPS dan Perangkat Daerah terkait dengan Penanganan Gini Ratio
7	Tingkat Pengangguran Terbuka Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja di Kota Bekasi pada tahun 2022 menunjukan angka 8,40 dari target sebesar 8,81 atau mencapai 95,35% dari target. Pencapaian ini dirasa sudah cukup baik, terutama hal ini tercapai dalam masa pemulihan ekonomi setelah pandemi. Ketidaktercapaian target tersebut dikarenakan masih kurangnya lapangan pekerjaan, keahlian tenaga kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja dan kualitas tenaga kerja relatif masih rendah ternyata menjadi penyebab lainnya yang berdampak signifikan	1.Pemerintah Kota Bekasi melalui DPMPSTSP agar lebih progresif dalam upaya meningkatkan investasi di Kota Bekasi, mengembangkan sektor UMKM dan ekonomi kreatif agar dapat menyerap tenaga kerja lokal 2.Mendorong Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Tenaga Kerja untuk menumbuhkan pusat pusat Pelatihan Tenaga Kerja dan mengadakan Job Fair di Kota Bekasi 3.Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Tenaga Kerja agar menyusun roadmap yang terintegrasi dengan program-program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi melalui program pemerataan kesempatan pekerjaan, khususnya Program Vokasi atau Pemagangan bagi pencari kerja.	Pelaksanaan Kemitraan antara PMA/PMDN dengan UMKM merupakan suatu kewajiban bagi para pelaku usaha (PMA/PMDN) dalam pelaksanaan perizinan berusaha 1.Tingkat keahlian/ keterampilan masih rendah; 2.Tingginya pencari kerja yang tidak sebanding dengan lowongan pekerjaan yang tersedia Kemampuan/daya serap perusahaan yang kecil dalam menyerap peserta magang	1.Menyusun Perda Penanaman Modal yang mengatur Kemitraan dengan UMKM; 2.Membuat pernyataan kesanggupan kemitraan dengan UMKM; 3.Merancang MoU Kemitraan dengan UMKM. 1.Melakukan banyak kerjasama dengan Pusat pelatihan swasta guna mengakomodir calon tenaga kerja untuk upskilling; 2.Sudah melaksanakan Job fair akan tetapi jumlah pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lowongan pekerjaan Menggalakkan sosialisasi (pembekalan) kepada HRD perusahaan mengenai pemahaman Permenaker Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemagangan Dalam Negeri
8	Peningkatan Pengeluaran Perkapita Indikator Kinerja Utama terkait Peningkatan Pengeluaran Per Kapita rumah tangga di Kota Bekasi selama tahun 2022 masih belum sesuai harapan. Hal ini menunjukan masih	1.Mendorong Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Perdagangan dan Industri untuk meningkatkan program-program yang berdampak langsung terhadap	- terbatasnya kegiatan promosi yang dilakukan - Kurangnya promosi dan publikasi bagi pelaku usaha	mengikuti kegiatan pameran luar daerah melalui dinas terkait dan kegiatan - kegiatan bazar yang dilaksanakan oleh pemerintah dan bekerjasama dengan swasta untuk mendukung ekonomi umkm melalui :

No	Kondisi	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tujuan/Masalah yang diselesaikan	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5
	diperlukannya upaya Pemerintah Kota Bekasi untuk menumbuhkan kinerja ekonomi daerah melalui program-program Peningkatan Ekonomi Masyarakat, terutama yang berkaitan dengan tingkat konsumsi masyarakat yang bertujuan agar jalannya roda perekonomian daerah.	konsumsi dan roda ekonomi daerah seperti event-event promosi belanja.		- Melaksanakan Pameran Dagang Lokal bersamaan dengan Event Bekasi Fair 2023 - Pendampingan bersama 9 Pelaku Usaha IKM/UMKM pada Kegiatan Pameran Dagang Nasional di Batam - Pendampingan bersama 9 Pelaku Usaha IKM/UMKM pada Kegiatan Pameran Dagang Nasional di Bali
		2.Mendorong Dinas Koperasi dan UMKM untuk memperbanyak pembangunan sentra-sentra UMKM yang strategis dan promotif.	Jumlah sentra umkm masih terbatas	bertambahnya jumlah sentra UMKM salah satunya bertempat di Samsat Kota Bekasi dari yang ada sebelumnya. 1. Pemda Kota Bekasi, 2. Antik Unik, 3. Blue Plaza, 4. pusat sentra UMKM kuliner galaxy, 5. dan Bekasi Mart, sentra UMKM kuliner duta harapan
9	Laju Inflasi Laju Inflasi di Kota Bekasi pada tahun 2022 yaitu sebesar 5,37 dari target nilai sebesar 3,21 atau hanya tercapai 59,78%. Hal ini karena Kota Bekasi merupakan Kota Jasa dan Perdagangan, sehingga Kota Bekasi memiliki tingkat ketergantungan harga yang cukup tinggi dari daerah penghasil.	1.Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) untuk melakukan upaya-upaya pengendalian Laju Inflasi di Kota Bekasi yang dipengaruhi oleh faktor distribusi, cuaca dan Indeks Harga Konsumen bersama sama dengan TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah).	Fluktuasi harga Bahan Pokok tergantung kepada suplay dan demand serta iklim/cuaca	- Operasi Pasar dan Sidak Pasar dalam rangka memonitoring harga dan ketersediaan stok bahan pokok - Memberikan laporan secara day by day melalui aplikasi
			Stok/ketersediaan bahan pokok tergantung daerah penghasil yang mempengaruhi ketahanan pangan Kota Bekasi	- Kegiatan monitoring Stok/ketersediaan bahan pokok di pasar tradisional dan ritel/swalayan - Melaporkan laporan melalui aplikasi - Menyalurkan bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) kepada masyarakat kurang mampu, balita gizi kurang dan korban bencana - Memberikan bantuan bibit cabai dan bibit lele - Operasi Pasar dan Sidak ke Distributor bahan pokok
		2.Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) agar melakukan kerja sama antar daerah (KAD) terutama untuk daerah surplus/defisit dalam menjaga	Belum terbentuk BUMD yang menangani ketersediaan suplay komoditas pangan	Operasi Pasar Murah Bersubsidi di 2 Kecamatan (Bekasi Barat dan Bekasi Selatan) yang diselenggarakan oleh Disperindag Prop. Jawa Barat bekerjasama dengan BUMD AGRO Jabar



No	Kondisi	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tujuan/Masalah yang diselesaikan	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5
		ketersediaan suplai komoditas.	Belum terbentuknya Kerjasama Antar Daerah (KAD)	Sedang proses Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan Pemerintah Daerah Kab. Bogor dan Distributor Bahan Pokok
		3.Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) agar melakukan Operasi Pasar berkala untuk menjaga kestabilan harga komoditas yang rentan mengalami inflasi	Terjadinya fluktuasi harga terutama pada Hari Besar Keagamaan dan Tahun Ajaran Baru	- Melaksanakan Kegiatan Operasi Pasar OPPA BEKEN menjelang NATARU (Natal 2022 dan Tahun Baru 2023) - Melaksanakan Kegiatan Operasi Pasar menjelang Hari Raya Idul Fitri 2022 dan 2023
			Keterbatasan Stok/Ketersediaan Bahan Pokok menjelang HBKN	- Melaksanakan Gelar Pangan Murag (GPM) bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Prov. Jawa Barat dan BAPANAS
10	Indeks Pembangunan Gender Realisasi kinerja Indeks Pembangunan Gender Kota Bekasi pada tahun 2022 sebesar 99,21% dari target . Atas pencapaian ini DPRD Kota Bekasi mengapresiasi hal tersebut. Meskipun target IPG Tahun 2022 tidak mencapai target namun, realisasi kinerjanya naik sebesar 0.17 dibanding tahun 2021. Ketidaktercapaian target yang telah ditentukan dikarenakan masih adanya efek pandemi wabah Covid-19 yang secara langsung berdampak bagi perempuan yang banyak berperan pada sektor jasa seperti restoran, akomodasi, hotel, dan pekerja rumahan	1.Mendorong Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar menyiapkan roadmap Indeks Pembangunan Gender di Kota Bekasi secara Faktual.	Kurangnya sinergitas dengan OPD lain yang berkaitan dengan indikator utama pendukung Indeks Pembangunan Gender, yaitu : indikator kesehatan, tingkat pendidikan dan indikator ekonomi dimana tingginya tingkat kesejahteraan diukur melalui komponen dimensi daya beli (pendapatan), pendidikan, dan kesehatan masyarakat antara laki-laki dan perempuan	Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Bekasi, DPPP Kota Bekasi akan melakukan : 1.Workshop Keterampilan Dasar dan Wirausaha bagi perempuan pelaku usaha bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM dalam penyediaan peserta workshop; 2.Pelatihan Keterampilan bagi KK Binaan, kader P2WKSS, dan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) untuk meningkatkan perekonomian keluarga; 3.Pembinaan PKK, dan Pokjanal Posyandu untuk meningkatkan kesehatan keluarga; 4.Pembinaan DWP dan GOW serta seminar-seminar politik untuk meningkatkan partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan legislative; 5.Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan kepada masyarakat, pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan oleh Tim Pendamping, Psikolog, Pengacara serta pemberian fasilitas visum bagi korban kekerasan dan pemenuhan perlindungan terhadap perempuan dengan fasilitas rumah aman sinergitas dengan Kecamatan, Kelurahan, OPD terkait dan para stakeholders; 6.Bimbingan Teknis Konvensi Hak Anak,

No	Kondisi	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tujuan/Masalah yang diselesaikan	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5
				sosialisasi dan monev Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Kelurahan dan Kecamatan Layak Anak, pembuatan profil anak bersinergi dengan OPD terkait dan para stakeholders; 7. Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak, pendampingan kasus kekerasan terhadap anak oleh Tim Pendamping, Psikolog, pengacara dan penyediaan fasilitas visum bagi korban kekerasan serta pemenuhan perlindungan terhadap anak dengan adanya Telepon sahabat perempuan dan anak sebagai salah satu cara agar anak-anak dapat melaporkan dan/atau melakukan konsultasi/konseling terkait permasalahan anak sinergitas dengan OPD terkait dan para stakeholders.
11	Jumlah Prestasi Pemuda Tingkat Provinsi, Nasional Dan Internasional Realisasi Jumlah prestasi pemuda tingkat provinsi, nasional dan internasional di Kota Bekasi pada tahun 2022 adalah 30% dari target. Hal ini cukup rendah padahal jumlah pemuda di Kota Bekasi cukup banyak akan tetapi target prestasi yang diharapkan masih jauh. Pemuda sebagai penerus masa depan bangsa selayaknya mendapat kesempatan untuk berprestasi melalui pembinaan dari usia dini dan berkesinambungan.	1. Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga agar melakukan pembinaan generasi muda secara konsisten dan masif melalui organisasi yang ada di sekolah, organisasi intra kampus, dan organisasi kepemudaan yang ada untuk mengembangkan kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda di Kota Bekasi 2. Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga memperbanyak wadah dan pelaksanaan even bagi kreativitas pemuda	Belum terjangkaunya pembinaan pemuda yang berstatus Sekolah dan Mahasiswa Benar bahwa wadah dan pelaksanaan even bagi kreativitas pemuda masih sangat terbatas oleh karena kegiatannya belum teranggarkan dalam APBD	Akan melakukan pembinaan ke sekolah melalui OSIS dan Organisasi kampus se-Kota Bekasi tentang Mengembangkan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda di Kota Bekasi Dalam renja 2024 sudah masuk dalam dokumen perencanaan dalam bentuk kegiatan : 1. Festival Pemuda 2. Jambore Pemuda 3. Pemilihan dan Pembinaan Pemuda Pelopor 4. Kegiatan Kewirausahaan
12	Indeks Penanggulangan Kebakaran Prosentase Capaian IKU Indeks Penanggulangan Kebakaran tahun 2022 di Kota Bekasi sudah cukup baik yaitu sebesar	1. Melanjutkan dan meningkatkan pembentukan dan pelatihan Masyarakat / Relawan Pemadam Kebakaran di setiap Kelurahan	masih kurangnya minat dan pengetahuan masyarakat terhadap Relawan Pemadam Kebakaran	melakukan edukasi serta penyuluhan terhadap masyarakat khususnya masyarakat Kota Bekasi tentang Relawan Pemadam Kebakaran

No	Kondisi	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tujuan/Masalah yang diselesaikan	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5
	99,83% terhadap target. Ketidaktercapaian tersebut dipengaruhi oleh capaian indikator Layanan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Kebakaran serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran.	2.Melakukan pengadaan Mobil Damkar, APD dan alat alat lain yang menunjang fungsi kebakaran dan penyelamatan	belum optimalnya sarana Pemadam Kebakaran untuk mendukung kinerja Pemadam Kebakaran dalam melayani Masyarakat Kota Bekasi	pengadaan Mobil Damkar, APD dan alat alat lain yang menunjang fungsi kebakaran dan penyelamatan
		3.Membuat Pos Sektor Damkar pada setiap kecamatan.	pembangunan Pos Sektor Pemadam Kebakaran belum menyeluruh di 12 Kecamatan yang ada di Kota Bekasi (baru terbangun 8 Pos Sektor Pemadam Kebakaran)	pembangunan Pos Sektor Pemadam Kebakaran di Kecamatan yang belum tersedia Pos Sektor Pemadam Kebakaran
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bekasi pada tahun 2022 mencapai sebesar 75,29% dari target. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Bekasi agar bertanggungjawab untuk menjaga kualitas lingkungan hidup yang cukup memadai bagi 2 juta lebih warganya. Indeks Kualitas LH yang terdiri dari Indeks Kualitas Air, Kualitas Udara dan Kualitas Lahan menjadi peringatan kita semua agar perlu memperhatikan lingkungan hidup yang seimbang dengan pembangunan.	1.Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Lingkungan Hidup agar menyusun roadmap untuk mencapai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang meningkat setiap tahunnya 2.Menegakan aturan dan sanksi yang lebih keras terhadap semua pelanggaran pada aspek lingkungan hidup, terutama yang menyangkut kualitas udara, air dan lahan 3.Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Tata Ruang untuk mewujudkan komitmen dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau	Untuk Target dan capaian IKLH 2022 Target IKU = 84,20, capaian IKU = 66,40 Target IKA = 54,43, capaian IKA = 37,60 Target IKL = 33,60, capaian IKL = 25,60 Target IKLH = 61,93, capaian IKLH = 46,63 Jadi, IKLH yang tidak tercapai adalah semua indikator baik IKA, IKU dan IKL. 1.Kurang patuhnya pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pengelolaan lingkungan hidup 2.Keterbatasan Jabatan Fungsional Pengawas 1.Memaksimalkan pemeliharaan Hutan Kota dan Alun-alun di Kota Bekasi 2.Fasilitasi gerakan penanaman pohon 1.Perlunya penegakan pemenuhan proporsi Koefisien Dasar Hijau (KDH) dalam perizinan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan proporsi KDH dalam RDTR 2.Keterbatasan anggaran APBD untuk pengadaan lahan RTH	Terkait roadmap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, bahwa target IKLH pada Dinas lingkungan mengacu pada RPJMD Perubahan Kota Bekasi tahun 2018-2023 dan RPD Kota Bekasi tahun 2024-2026 a. Penegakan hukum untuk pelaku usaha yang melakukan pelanggaran sesuai peraturan yang berlaku b. Melakukan pembinaan bagi pelaku usaha c. Mengusulkan penambahan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pengawasan ketersediaan RTH berdasarkan dokumen lingkungan 1. Mengoptimalkan pemenuhan proporsi Koefisien Dasar Hijau (KDH) dalam perizinan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan proporsi KDH dalam RDTR; 2. Perwujudan Rencana Pola Ruang RTH dalam RTRW/RDTR Kota Bekasi melalui mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai tahun perencanaan RTRW/RDTR Kota Bekasi



No	Kondisi	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tujuan/Masalah yang diselesaikan	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5
1	Pendapatan Pada Komponen Realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2022 tercapai sebesar Rp. 5.862.698.337.689 atau mencapai sebesar 98,96% dari target. Meskipun realisasi pendapatan sudah termasuk kategori tinggi akan tetapi dapat kami sampaikan beberapa hal yang dapat ditingkatkan untuk perbaikan. Karena itu DPRD Kota Bekasi memberi rekomendasi:	1.Pemerintah Kota Bekasi melalui BPKAD untuk lebih cermat dalam perencanaan pendapatan terkait proyeksi pendapatan dari dana Transfer, baik dari Transfer Pemerintah Pusat maupun Transfer antar Daerah sehingga menyebabkan beberapa kali perubahan penjabaran APBD. 2.Pemerintah Kota Bekasi melalui Bapenda melakukan Pengembangan Layanan Online Pajak dan Retribusi Daerah dengan Aplikasi Mobile yang memudahkan pelayanan bagi masyarakat.	1.Pendapatan transfer direncanakan berdasarkan penetapan Peraturan Perundang-undangan atau informasi resmi melalui portal Kemenkeu Keuangan. Dalam hal penetapan dimaksud dilakukan setelah penetapan APBD Kota Bekasi, maka proyeksi pendapatan transfer pemerintah pusat dianggarkan pada perubahan penjabaran APBD. 2.Pendapatan transfer direncanakan berdasarkan Perda tentang APBD Pemerintah Daerah yang mengatur tentang Bantuan Keuangan, dalam hal ini Pemprov Jawa Barat dan Pemprov DKI Jakarta yang selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Gubernur Pemda dimaksud. Penetapan dilakukan setelah penetapan APBD Kota Bekasi, maka proyeksi pendapatan transfer antar Daerah dianggarkan pada <u>perubahan penjabaran APBD.</u> Proses pelayanan, pembayaran pajak dan retribusi daerah pada Bapenda Kota Bekasi sudah online, yaitu: a. Pelaporan pajak daerah lainnya ; b. Pembayaran PBB yang telah menggunakan chanel pembayaran e-wallet dan mini market; c. Pembayaran Pajak Daerah lainnya (Self Assesment) selain dengan Kode Bayar dapat juga dilakukan dengan menggunakan “Virtual Account”; d. Pembayaran Retribusi pasar dengan menggunakan <i>Quick Response Code Indonesian Standard</i> (QRIS).	Transfer Pemerintah Pusat maupun Transfer antar Daerah memiliki persyaratan yang harus dipenuhi sebelum dana tersebut ditransfer yang diatur sesuai dengan jenis dana2 tersebut. Terkait hal tersebut kami selalu berkoordinasi dengan pihak terkait dana2 tersebut, baik dengan Kementerian keuangan maupun dengan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta. 1. Pengembangan Pembayaran pajak daerah lainnya menggunakan ecommerce dan minimarket serta Virtual Account (Official Assesment); 2. Pengembangan pembayaran Rertibusi Daerah dengan menggunakan QRIS dan Virtual Account; 3. Penambahan Channel pembayaran PBB untuk memudahkan masyarakat.



No	Kondisi	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tujuan/Masalah yang diselesaikan	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5
		3. Pemerintah Kota Bekasi melalui Bapenda dan Dinas Perhubungan agar melakukan inventarisasi lahan parkir privat yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah melalui pola kerjasama yang saling menguntungkan.	Dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 tahun 2019 tentang Pajak Daerah belum adanya aturan yang mengatur tentang lahan parkir privat	Bapenda melaksanakan kajian secara intensif tentang lahan parkir privat yang memungkinkan menjadi potensi pajak parkir. a. Dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 tahun 2019 tentang Pajak Daerah Bagian Ketujuh Pasal 45 ayat (2) disebutkan Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, penyelenggaraan parkir insidentil. b. Dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 tahun 2019 tentang Pajak Daerah Bagian Ketujuh Pasal 47 ayat (4) Dalam hal penyelenggaraan tempat parkir tidak memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir, maka dasar pengenaan pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan memperhatikan luas area parkir, jumlah rata-rata kendaraan yang diparkir setiap hari, jumlah hari operasional tempat penyelenggaraan tempat parkir dalam 1 (satu) bulan dan jenis tarif sewa parkir tetap
			1. Parkir liar 2. Penertiban penitipan parkir motor yang tidak berizin 3. penertiban jukir liar 4. revitaliasi lahan parkir	1. Sinergitas antara Dishub, Satpol PP dan aparat TNI POLRI 2. Pembenahan lahan parkir, pemarkaan jalan dan rambu-rambu titik parkir 3. Tinjauan lapangan untuk mendata potensi lahan parkir yang belum dikelola oleh dinas terkait.
2	Belanja Capaian Realisasi Belanja Daerah sebesar 85,65% dari target belanja menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan, sehingga membuat pembangunan di Kota Bekasi tidak optimal seperti yang diharapkan, dengan ini Pansus 40 mendorong kepada Pemerintah Kota Bekasi untuk lebih cermat dalam perencanaan belanja	1. Pemerintah Kota Bekasi melalui BPKAD dan BKPSDM untuk melakukan review Belanja Pegawai pada APBD TA 2022 telah melebihi 30% dari APBD. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan	Kota Bekasi saat ini menganggarkan belanja pegawai masih melebihi 30% dari total belanja APBD dikarenakan adanya penambahan PPPK dan adanya pemindahan jabatan Struktural ke jabatan Fungsional/Sub Koor sehingga mengakibatkan Tunjangan Jabatan meningkat.	Kota Bekasi dalam menganggarkan Belanja Pegawai akan secara bertahap memenuhi ketentuan dimaksud dengan mengoptimalkan target PAD dan tidak menganggarkan honorarium ASN di luar gaji dan TPP.



No	Kondisi	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tujuan/Masalah yang diselesaikan	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5
	sesuai regulasi yang ada agar dapat terserap secara optimal. Selain itu Pansus 40 juga memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Bekasi antara lain:	antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diamanatkan besaran belanja pegawai tidak melebihi 30% dari APBD dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun sejak ketentuan tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bekasi agar melakukan perhitungan secara cermat terhadap kebutuhan anggaran ASN baik PNS dan PPPK atau melakukan upaya peningkatan PAD guna mengurangi besaran persentasi belanja pegawai.	Formasi PPPK khususnya Guru sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang sebelumnya telah dilakukan tes terhadap Calon PPPK	Rencana akan menerapkan Moratorium atau Pemberlakuan <i>Zero Growth</i> terhadap Pengangkatan dan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional diluar Guru dan Tenaga Kesehatan
		2.Pemerintah Kota Bekasi melalui BKPSDM mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi ASN yang telah memenuhi ketentuan anggaran minimal sebesar 0,16% dari total belanja APBD, sehingga berdampak terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bekasi	Jumlah alokasi anggaran pengembangan kompetensi pada seluruh perangkat daerah yang bersumber biaya APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022 adalah Rp16.581.855.287,00 (enam belas miliar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dari jumlah APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.674.930.904.273,00 (enam triliun enam ratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus empat ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau 0,16 % dari pagu APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022. Jumlah target sasaran peserta kegiatan pengembangan kompetensi pada seluruh perangkat daerah yang bersumber biaya APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022 sebanyak 6.957 (enam ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) orang.	Penyusunan perencanaan pelatihan melalui penyusunan Human Capital Development Plan (HCDP) sehingga hak ASN untuk mendapatkan pelatihan 20 JP per tahun dapat terpenuhi.



No	Kondisi	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tujuan/Masalah yang diselesaikan	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5
		3.Pemerintah Kota Bekasi mendorong Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki capaian realisasi fisik dan realisasi keuangan yang masih rendah. Agar memperhatikan tahapan-tahapan penyerapan anggaran sehingga persentase capaian realisasi bisa lebih baik dan tidak terjadi SILPA yang begitu tinggi	Kegiatan surveillance (paket data) untuk Kader TPK (Tim Pendamping Keluarga) yaitu alokasi Anggaran dari dana APBN Senilai Rp. 12.869.000.000,- (Dua Belas Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah) bisa dicairkan hanya 4 bulan yaitu dari bulan September s.d Desember 2022.Dikarenakan terkendala pada pelaporan elsimil. Kegiatan MKJP dari dana APBN senilai Rp.3.789.807.200 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah) Terkendala di Target Akseptor MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) sebanyak 10.784 Akseptor meningkat lima kali lipat dibanding dengan target Tahun 2021 sebanyak 2.112 Akseptor sehingga penyerapan tidak tercapai dengan baik.	Membuat pelatihan untuk Kader TPK dalam tata cara mengisi elsimil untuk pelaporan pendukung kegiatan Surveillance. Akan dikoordinasikan dengan BKKBN sebelum adanya Kegiatan MKPJP untuk persamaan Data Akseptor yang ada di Kota Bekasi.
		4.Masing-masing Organisasi Perangkat Daerah agar lebih cermat dalam mengajukan alokasi anggaran, sehingga jika dana yang dialokasikan dinilai tidak bisa diserap maka dana tersebut dapat dialokasikan untuk kepentingan lain yang lebih memerlukan, khususnya untuk pembangunan infrastruktur.	Target Akseptor yang ditentukan oleh BKKBN terlalu tinggi pada Tahun 2022, dibanding Tahun 2021. Sosialisasi mengenai Aplikasi Elsimil kurang maksimal.	DPPKB Kota Bekasi akan membuat persamaan Data Kader dan Akseptor setiap Tahunnya, sehingga BKKBN tidak lagi untuk membuat Target yang terlalu besar. Membuat Pelatihan Elsimil Setiap Tahunnya, Karena pada setiap tahunnya data Kader akan berbeda.
	BUMD Panitia Khusus 40 DPRD Kota Bekasi merekomendasikan kepada BUMD antara lain:	1.Perumda dalam menjalankan usahanya, diharapkan dapat berjalan secara profesional dengan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.	Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (<i>good corporate governance</i>), melalui penetapan SOP pada internal Perumda Tirta Patriot	Pelaksanaan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (<i>good corporate governance</i>) dimulai dari tahapan pemilihan pengurus pada Perumda Tirta Patriot melalui tahapan seleksi secara terbuka

No	Kondisi	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tujuan/Masalah yang diselesaikan	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5
		2.Pemerintah Kota Bekasi agar membuat payung hukum yang lebih luas untuk mempercepat pergerakan Perumda	Penyelesaian cakupan wilayah layanan PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi	Dalam rangka mendukung pelaksanaan peningkatan wilayah layanan air bersih oleh Perumda Tirta Patriot, Pemerintah Kota Bekasi telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut: 1. Mengikutsertakan Perumda Tirta Patriot dalam Program Strategis Nasional SPAM Regional Jatiluhur I, hal ini didukung dengan penetapan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penugasan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patriot sebagai Offtakers atau Pembeli Air Curah SPAM Jatiluhur I; 2. Upaya penyelesaian proses Pemisahan Wilayah Layanan PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi di Wilayah Kota Bekasi, dimana pada saat ini Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menyerahkan 3 (tiga) wilayah layanan yaitu Cabang Pembantu Pondokgede, Cabang Wisma Asri dan Cabang Pembantu Harapan Baru dengan total pelanggan aktif yang diserahkan sebanyak 18.738; 3. Penyerahan sebagaimana dimaksud poin 2 di atas, dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan Pemerintah Kota Bekasi Nomor tentang Penyerahan Wilayah Layanan PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi kepada Pemerintah Kota Bekasi.

Sumber: Diolah Tahun 2023





**PEMERINTAH
KOTA BEKASI**



 www.bekasikota.go.id

 [@pemkot_bekasi](https://www.instagram.com/pemkot_bekasi)

 [@pemkotbekasi](https://twitter.com/pemkotbekasi)

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS-PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan yang diterima adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah Pusat kepada daerah, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi penugasan.

Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah akan lebih efisien dan efektif.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten/kota meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten/kota dan sebagian tugas pemerintahan di bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota. Upaya pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang bermuara kepada kesejahteraan rakyat semakin meningkat. Penyerahan wewenang urusan pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem



desentralisasi merupakan salah satu upaya untuk mempercepat proses pembangunan di daerah.

Pendanaan dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan melalui Kementerian/Lembaga Negara kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota) atas beban APBN yang dialokasikan melalui anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) maupun dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota atas beban APBD Daerah Provinsi.

4.1.1. IDENTIFIKASI TUGAS PEMBANTUAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITERIMA DARI PEMERINTAHAN TINGKAT ATASNYA

Pada tahun 2023 Pemerintah Kota Bekasi melalui Perangkat Daerah terkait melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat yang berasal dari berbagai Kementerian/Lembaga Negara yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan Kota Bekasi memperoleh tugas pembantuan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi memperoleh tugas pembantuan dari Kementerian Koperasi dan UMKM;
3. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi memperoleh tugas pembantuan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi memperoleh tugas pembantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Hasil identifikasi dari seluruh perangkat daerah di Kota Bekasi pada Tahun 2023 tidak ada yang menerima tugas pembantuan yang berasal dari Provinsi Jawa Barat sehingga untuk lebih jelasnya deskripsi mengenai target pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima dari pemerintahan tingkat atasnya pada tahun 2023 sebagai berikut:



**4.1.1.1. TARGET KINERJA TUGAS PEMBANTUAN PEMERINTAHAN
DARI PEMERINTAHAN TINGKAT ATASNYA**

Target Kinerja dalam pelaksanaan tugas pembantuan adalah target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang dibiayai oleh Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) sebagai berikut:

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
2. Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia;
3. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

Adapun target kinerja atas pelaksanaan tugas pembantuan dapat dilihat pada **Tabel 4.1** berikut:

Tabel 4.1
Target Kinerja Tugas Pembantuan Pemerintah Pusat
Tahun 2023

NO	KEMENTERIAN/LPNK	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
1	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Dinas Pendidikan Kota Bekasi	A. Program Pengelolaan Pendidikan		
			1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
			a. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	sekolah	Terselenggaranya bantuan operasional sekolah melalui BOS Reguler sebanyak 315 sekolah
			2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
			a. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	sekolah	Terselenggaranya jumlah siswa yang menerima bantuan Pendidikan BOS Pusat sebanyak 62 sekolah
2	Kementerian Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi	A. Program Pengembangan UMKM	%	Terselenggaranya Program Pengembangan UMKM)
			1. Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi usaha kecil	%	Terselenggaranya Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi Peningkatan Skala Usaha
			a. Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta Design dan Teknologi	Unit usaha	Terselenggaranya Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta Design dan Teknologi



NO	KEMENTERIAN/LPNK	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
3	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi	A. Program Pengendalian Penduduk		
			1. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
			a. Penyediaan data dan Informasi Keluarga	Dokumen	Tersedianya data dan informasi keluarga
			b. Pencatatan dan Pengumpulan data keluarga	Dokumen	Terlaksananya pencatatan dan pengumpulan data keluarga
			B. Program Pembinaan Keluarga Berencana		
			1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pengendalian Penduduk dan KB		
			a. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana melalui media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
			2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	%	Terlaksananya Pergerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan
			a. Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Organisasi	Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
			b. Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Unit	Tersedianya Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB



NO	KEMENTERIAN/LPNK	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
			c. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	Terlaksananya operasional pelaksanaan pemutakhiran data oleh kader di wilayah kerjanya
			C. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		
			1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
			a. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	Tersedianya Kader Pengelola dan Pelaksana
			b. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unit	Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
4	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi	A. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah		
			1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		
			a. Pembangunan/penyediaan sub sistem pengelolaan setempat	Orang/ Kelompok/ Rumah Tangga	Tersedianya Sub Sistem Pengelolaan setempat
			b. Pembinaan Teknik Pengelolaan Air	Orang	Terlaksananya Pembinaan Teknik



NO	KEMENTERIAN/LPNK	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
			Limbah Domestik		Pengelolaan Air Limbah Domestik
			c. Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok	Terlaksananya Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyediaan Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik
			d. Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Dokumen	Terlaksananya Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
			e. Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Dokumen	Terlaksananya Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
			f. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
			B. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		
			1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		
			a. Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	SR Paket Orang/Bulan Kegiatan Frekuensi	Tersedianya Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan

Sumber : Diolah Tahun 2023

Berdasarkan tabel tersebut diketahui Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat yaitu Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) pada 4 Perangkat Daerah yang terdiri dari 7 Program, 9 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan.

4.1.1.2. REALISASI TUGAS PEMBANTUAN PEMERINTAH PUSAT

Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan target yang sudah dijelaskan diatas selanjutnya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berdasarkan pembagian urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah sehingga dalam pelaksanaan sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Bekasi pada tahun anggaran 2023 sebagai upaya dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum.

Pendanaan Tugas Pembantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimana pola pertanggungjawaban dalam tugas pembantuan ini pada prinsipnya adalah penerima tugas pembantuan harus bertanggungjawab kepada pemberi penugasan. Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dialokasikan setelah adanya penugasan Pemerintah melalui kementerian/lembaga kepada Pemerintah Kota Bekasi. Rencana alokasi dan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan ditugaskan disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan di daerah, dan kebutuhan pembangunan daerah dimana dana tugas pembantuan merupakan bagian anggaran pemerintah pusat yang dialokasikan untuk Pemerintah Kota Bekasi berdasarkan beban dan jenis penugasan yang diberikan.

Adapun realisasi dari pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Kota Bekasi dari Pemerintah Pusat pada Tahun 2023 dapat dilihat pada **Tabel 4.2** berikut:



Tabel 4.2
Realisasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat Tahun 2023

No	KEMENTERIAN/ LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA TUGAS PEMBANTUAN	KINERJA		CAPAIAN KINERJA (%)	ANGGARAN (Rp,-)		REALISASI ANGGARAN (%)	KETERANGAN
						TARGET	REALISASI I		TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	A. Program Pengelolaan Pendidikan	Kota Bekasi	Dinas Pendidikan Kota Bekasi							
			1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Bekasi	Dinas Pendidikan Kota Bekasi							
			a. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Bekasi	Dinas Pendidikan Kota Bekasi	315 sekolah	315 sekolah	100%	208.107.908.453	162.848.574.660	78,25%	Terselenggaranya bantuan operasional sekolah melalui BOS Reguler sebanyak 315 sekolah
			2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Bekasi	Dinas Pendidikan Kota Bekasi							
			a. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Bekasi	Dinas Pendidikan Kota Bekasi	62 sekolah	62 sekolah	100%	107.419.760.513	80.549.206.491	74.99%	Terselenggaranya jumlah siswa yang menerima bantuan Pendidikan BOS Pusat sebanyak 62 sekolah
2	Kementerian Koperasi dan UKM	Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Petunjuk teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil	A. Program Pengembangan UMKM	Kota Bekasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi							

No	KEMENTERIAN/ LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA TUGAS PEMBANTUAN	KINERJA		CAPAIAN KINERJA (%)	ANGGARAN (Rp,-)		REALISASI ANGGARAN (%)	KETERANGAN
						TARGET	REALISASI I		TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1. Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi usaha kecil	Kota Bekasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi							
			a. Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta Design dan Teknologi.	Kota Bekasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi	155 Unit Usaha	155 Unit Usaha	100%	318.370.000	312.881.735	98.28%	Terselenggaranya Pelatihan Kewirausahaan sebanyak 35 Unit usaha, terselenggaranya pelatihan e-commerce sebanyak 35 Unit usaha, terselenggaranya leatihan manajemen keuangan sebanyak 35 unit usaha
3	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Peraturan BKKBN RI Nomor 13 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023	A. Program Pengendalian Penduduk		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
			1. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12 Laporan	12 Laporan	100%				
			a. Penyediaan data dan Informasi Keluarga	Kota Bekasi	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12 Laporan	12 Laporan	100%	102.550.000	96.669.500	95,68%	Efisiensi
			b. Pencatatan dan pengumpulan data keluarga	Kota Bekasi	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12 Laporan	12 Laporan	100%	33.600.000	33.600.000	100%	



No	KEMENTERIAN/ LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA TUGAS PEMBANTUAN	KINERJA		CAPAIAN KINERJA (%)	ANGGARAN (Rp,-)		REALISASI ANGGARAN (%)	KETERANGAN
						TARGET	REALISASI I		TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			B. Program Pembinaan Keluarga Berencana									
			1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan Budaya Lokal	Kota Bekasi	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Dokumen	1 Dokumen	100%				
			a. Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kota Bekasi	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	232.475.000	230.431.000	99,12%	Efisiensi
			2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB	Kota Bekasi	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100%	100%	100%				
			a. Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kota Bekasi	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100%	100%	100%	8.000.000	8.000.000	100%	
			b. Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Kota Bekasi	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	56 Unit	56 Unit	100%	100.000.000	97.927.199	97,93%	Efisiensi
			c. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kota Bekasi	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	560 Orang	560 Orang	100%	212.000.000	210.021.000	99,07%	Efisiensi
			C. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)									



No	KEMENTERIAN/ LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA TUGAS PEMBANTUAN	KINERJA		CAPAIAN KINERJA (%)	ANGGARAN (Rp,-)		REALISASI ANGGARAN (%)	KETERANGAN
						TARGET	REALISASI I		TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Bekasi	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
			a. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Bekasi	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.877 Kader	5727 Kader	97,44%	12.966.700.000	11.568.982.600	89,22	Terlaksananya Pembangunan Keluarga
			b. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Bekasi	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	20 Unit BKB Kit Stunting	20 Unit BKB Kit Stunting	100%	360.000.000	231.800.000	64,39%	Penyerapan sesuai harga dari provinsi
4	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Air Limbah Domestik	A. Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah	Kota Bekasi	Disperkimtan Kota Bekasi							
			1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dana Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Disperkimtan Kota Bekasi							
			a. Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan setempat	Kota Bekasi	Disperkimtan Kota Bekasi	1158 Unit	1158 Unit	100%	9.577.460.400	9.361.538.000	98%	Terlaksananya Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan setempat



No	KEMENTERIAN/ LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA TUGAS PEMBANTUAN	KINERJA		CAPAIAN KINERJA (%)	ANGGARAN (Rp,-)		REALISASI ANGGARAN (%)	KETERANGAN
						TARGET	REALISASI I		TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			b. Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kota Bekasi	Disperkimtan Kota Bekasi	100 orang	-	-	50.000.000	-	-	Sedang dilakukan pendataan dan verifikasi untuk KSM yang msih aktif dalam mengelola IPAL Komunal di Kota Bekasi
			c. Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kota Bekasi	Disperkimtan Kota Bekasi	12 Kelompok	12 Kelurahan	100%	50.000.000	45.000.000	90%	Terlaksananya Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
			d. Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Kota Bekasi	Disperkimtan Kota Bekasi	100 Rumah tangga dan 1 jaringan	100 Rumah tangga dan 1 jaringan	100%	1.000.000.000	972.941.300	97%	Terlaksananya Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
			e. Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Kota Bekasi	Disperkimtan Kota Bekasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	350.000.000	273.591.000	78%	Terlaksananya Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
			f. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Disperkimtan Kota Bekasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	500.000.000	478.988.400	96%	Terlaksananya Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
			B. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum									



No	KEMENTERIAN/ LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA TUGAS PEMBANTUAN	KINERJA		CAPAIAN KINERJA (%)	ANGGARAN (Rp,-)		REALISASI ANGGARAN (%)	KETERANGAN
						TARGET	REALISASI I		TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1. Pengelolaan dan Pengembangan sistem Penyedia Air Minum di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Disperkimtan Kota Bekasi							
			a. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di kawasan perkotaan	Kota Bekasi	Disperkimtan Kota Bekasi	950 SR	712 SR	75%	18.412.205.773	16.644.665.064	85%	Terlaksananya Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di kawasan perkotaan

Sumber : Diolah Tahun 2023

Berdasarkan tabel tersebut terdapat capaian kinerja yang tidak terealisasi karena tidak diserap pada tahun anggaran 2023 untuk sub kegiatan Pembinaan teknik Pengelolaan Air limbah Domestik untuk 100 orang yang berlokasi di Kota Bekasi.

4.1.2. IDENTIFIKASI TUGAS PEMBANTUAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIBERIKAN KEPADA TINGKATAN PEMERINTAH DIBAWAHNYA

Pemerintah Kota Bekasi tidak memberikan tugas Pembantuan pelaksanaan urusan pemerintahan kepada tingkatan pemerintahan dibawahnya, karena pemerintah kota Bekasi tidak memiliki desa sebagai daerah otonom pelaksanaan tugas pembantuan.

4.2. HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN

Dalam melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan tugas pembantuan tahun 2023 di Kota Bekasi, terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah diantaranya:

1. Hambatan Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah terhadap lingkungan salah satunya adalah :
 - a. Penentuan lokasi untuk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat skala permukiman belum adanya Feasibility Studi, Amdal dan DED, untuk yang black water di perlukan lahan yang luas dan bebas dari permukiman, sedang untuk grey water bisa di permukiman namun perlu kajian khusus. Kurangnya tenaga ahli dan memerlukan pembiyaan yang cukup besar, serta dimungkinkan terjadi penolakan;
 - b. Permasalahan yang sering terjadi adalah data yang kurang lengkap dan akurat. Serta adanya Penolakan dari warga. Untuk mencapai target nasional dibutuhkan dukungan dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik dari Pemerintah Pusat.
2. Adanya bangunan eksisting yang masih belum dibongkar dan dihapuskan sehingga pekerjaan belum bisa dilaksanakan;



3. Tugas Pembantuan dan Penugasan yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi memerlukan konfirmasi dari Perangkat Daerah penerima tugas pembantuan untuk capaian realisasi keuangan dan kinerja dikarenakan alokasinya berasal langsung dari APBN untuk pemerintah Pusat dan APBD Provinsi untuk yang berasal dari Provinsi Jawa Barat dan langsung dilaksanakan oleh Perangkat Daerah serta bukan melalui dana bantuan yang berasal dari APBN maupun APBD Provinsi yang ditransfer melalui APBD Kota Bekasi tahun berjalan sehingga tidak termonitoring dalam aplikasi keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan atau Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan di Kota Bekasi dimaksud, kami menyampaikan beberapa saran upaya penyelesaian hambatan/permasalahan diatas sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan dan penyuluhan untuk peningkatan kesadaran warga atas kesehatan lingkungan;
2. Mengusulkan kembali kegiatan untuk dilaksanakan di tahun anggaran selanjutnya;
3. Perlu dilakukan sinkronisasi keuangan dan kinerja tugas pembantuan dan penugasan baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi yang dilakukan oleh perangkat daerah penerima tugas pembantuan dan penugasan ke dalam aplikasi monitoring dan evaluasi keuangan yang dikelola oleh pemerintah Kota Bekasi sebagai bentuk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bekasi.





**PEMERINTAH
KOTA BEKASI**



 www.bekasikota.go.id

 [@pemkot_bekasi](https://www.instagram.com/pemkot_bekasi)

 [@pemkotbekasi](https://twitter.com/pemkotbekasi)

BAB V PENUTUP

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota, merupakan tindak lanjut atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimana memuat laporan tentang arah kebijakan umum pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah secara makro termasuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023 sekiranya dapat disikapi dan ditindaklanjuti secara bijaksana dan komperensif sejalan dengan perkembangan situasi dan kondisi Kota Bekasi yang dinamis selama tahun anggran tahun 2023. Situasi dan kondisi tersebut cukup berpengaruh dalam pelaksanaan tugas-tugas yang diamanatkan kepada Pemerintah Kota Bekasi, selama kurun waktu berjalan, perubahan paradigma pemerintahan dan peraturan perundang-undangan turut pula mempengaruhi kebijakan daerah dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Namun berkat kemauan, kerja keras dan loyalitas aparatur penyelenggara pemerintahan Kota Bekasi dan didukung peran serta seluruh komponen masyarakat, para wakil rakyat, instansi vertikal terkait, berbagai program, kegiatan, dan sub kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan diharapkan menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat.

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 merupakan pencerminan dari RPJMD perubahan Kota Bekasi tahun 2018-2023. Berbagai program prioritas dilaksanakan dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Bekasi dengan mengakomodir berbagai



aspirasi dan kepentingan masyarakat melalui proses perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai tambahan perlu di informasikan selama Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kota Bekasi mendapatkan apresiasi dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui prestasi atau Raihan berbagai penghargaan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut berikut:

Tabel 5.1
Data Penghargaan/Prestasi Kinerja Pemerintah Kota Bekasi
Tahun 2023

No	Tanggal	Uraian	Ditujukan	Kategori	Penghargaan	Foto
1	2	3	4	5	6	7
1	2 Januari 2023	Penghargaan Ucapan Terima Kasih atas terlaksananya Perayaan & Misa Natal 24-25 Desember 2022 serta malam Tahun Baru 2023 dengan Aman, tentram dan Nyaman di Kota Bekasi	Wali Kota Bekasi	Swasta	Forum Komunikasi Kristiani Kota Bekasi	
2	9 Februari 2023	Penghargaan Laporan Keuangan anaudited terbaik kategori OPD Menengah Tahun 2022	Wali Kota Bekasi (Disdukcapil)	Kabupaten / Kota	Wali Kota Bekasi	
3	15 Februari 2023	Penghargaan Radar Bekasi Award Tahun 2023 untuk tokoh di Kota dan Kabupaten Bekasi "Kepala Dinas Inovatif"	Wali Kota Bekasi (Disdukcapil)	Kabupaten / Kota	Radar Bekasi	
4	21 Februari 2023	Penghargaan Predikat Eliminasi Penyakit Gajah	Wali Kota Bekasi (Dinkes)	Nasional	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	

No	Tanggal	Uraian	Ditujukan	Kategori	Penghargaan	Foto
1	2	3	4	5	6	7
5	13 Maret 2023	Penghargaan atas peran percepatan penurunan Stunting	Wali Kota Bekasi (Dinkes)	Nasional	Gubernur Jawa Barat	
6	14 Maret 2023	Kota Bekasi Raih Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) JKN-KIS 97%	Wali Kota Bekasi (Dinkes)	Nasional	Wapres (BPJS)	
7	15 Maret 2023	Penghargaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Wali Kota Bekasi	Nasional	Presiden RI (Joko Widodo)	
8	15 Maret 2023	Penghargaan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022	Walikota Bekasi	Nasional	Ombudsman RI	
9	06 April 2023	Penghargaan Kota Bekasi Raih Peringkat 3 Indeks Kota Toleran Setara Institute	Walikota Bekasi	Swasta	Setara Institute	
10	20 Mei 2023	Predikat Pupuhu Pangaping di Hari Pers Nasional Jawa Barat	Walikota Bekasi	Swasta	Persatuan Wartawan Indonesia	



No	Tanggal	Uraian	Ditujukan	Kategori	Penghargaan	Foto
1	2	3	4	5	6	7
11	30 Mei 2023	Sertifikat Penghargaan dari BPJS Kesehatan Atas Kontribusi Terselenggaranya Jaminan Kesehatan Nasional	Wali Kota Bekasi (Disdukcapil)	Kabupaten / Kota	BPJS Kesehatan	
12	1 Juni 2023	Penghargaan Anugerah Paralegal Justice Award 2023	Lurah Kota Baru	Nasional	Kemenkumham RI	
13	1 Juni 2023	Anugerah sasana desa/kelurahan 2023	Lurah Harapan Jaya	Nasional	Kemenkumham RI	
14	5 Juni 2023	Juara III Kategori POSYANTEK Desa Berprestasi Lomba Teknologi Tepat Guna Nusantara XXIV Tingkat Nasional Tahun 2023	Posyantek 12 Provinsi Jawa Barat (Kelurahan Margamulya)	Nasional	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI	
15	5 Juni 2023	Lencana Bakti Inovasi Desa atas Kontribusi dan kerja keras dalam membina pengembangan teknologi tepat guna desa	Walikota Bekasi	Nasional	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI	
16	19 Juni 2023	Lomba Video Multiple Injection Suntikan Ganda dalam Pekan Imunisasi Nasional	Puskesmas Pondok Gede	Nasional	Dinkes Prov Jabar	

No	Tanggal	Uraian	Ditujukan	Kategori	Penghargaan	Foto
1	2	3	4	5	6	7
17	19 Juni 2023	RS Darurat Stadion Patriot Candrabhaga	Dinas Kesehatan Kota Bekasi	Nasional	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	
18	19 Juni 2023	Puskesmas dengan pengelolaan Vaksinasi Covid-19 Terbaik di Prov Jabar	Puskesmas Perumnas II Kota Bekasi	Nasional	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	
19	9 Juli 2023	Juara Favorit Karya Kreatif Jawa Barat Lomba Helaran Kabupaten Kota Provinsi Jawa Barat 2023	Wali Kota Bekasi (Disparbud)	Nasional	Gubernur Jawa Barat	
20	17 Juli 2023	Kerjasama dan dedikasinya telah berkontribusi dalam pencegahan, penyebaran paham intoleransi dan radikalisme di Kota Bekasi Jabar	Pemerintah Kota Bekasi	Nasional	Densus 88	
21	20 Juli 2023	Penghargaan Kepatuhan Pelayanan Adminduk Ombudsman RI NILAI 91,86	Wali Kota Bekasi (Disdukcapil)	Nasional	Ombudsman RI	
22	24 Juli 2023	Kategori Penyelesaian Pemutakhiran Data Mandiri dan Anomali Data	Pemerintah Kota Bekasi (BKPSDM)	Nasional	BKN	



No	Tanggal	Uraian	Ditujukan	Kategori	Penghargaan	Foto
1	2	3	4	5	6	7
23	24 Juli 2023	Peringkat ke-3 Capaian Penerapan Pemanfaatan Data - Sistem Informasi dan CAT	Pemerintah Kota Bekasi (BKPSDM)	Nasional	BKN	
24	24 Juli 2023	Peringkat ke-3 Capaian Penerapan Pemanfaatan Data - Sistem Informasi dan CAT	Pemerintah Kota Bekasi (BKPSDM)	Nasional	BKN	
25	23 Agustus 2023	Pemerintah Kota Bekasi Raih Penghargaan Dalam Ajang Adminduk Juara Tahun 2023 Tingkat Jawa Barat	Pemerintah Kota Bekasi (Disdukcapil)	Nasional	Disdukcapil Jabar	
26	24 Agustus 2023	Piagam Penghargaan atas dukungan pada kegiatan Roadshow Bus KPK - Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi 2023	Wali Kota Bekasi	Nasional	KPK	
27	3 September 2023	Tokoh Literasi Digital Daerah Jabar Saber Hoaks Awards 2023	Wali Kota Bekasi	Nasional	Gubernur Jawa Barat	
28	11 September 2023	Penghargaan Bunda Paud Kota Bekasi dengan Kenaikan APK tertinggi antara tahun 2021 dan 2022 mencapai 15,15	Wali Kota Bekasi	Nasional	Bunda Paud Prov Jabar	



No	Tanggal	Uraian	Ditujukan	Kategori	Penghargaan	Foto
1	2	3	4	5	6	7
29	11 September 2023	Penghargaan sebagai Kota dengan Stunting Terendah 6 Poin	Wali Kota Bekasi	Nasional	Bunda Paud Prov Jabar	
30	26 September dan 12 Oktober 2023	Paparan dan Penilaian Lapangan Inovative Government (IGA) Award Tahun 2023 dengan Inovasi MANTEL GADIS (Perekaman KTP El Bagi Pemula Di Sekolah)	Pemerintah Kota Bekasi (Disdukcapil)	Nasional	Kementerian Dalam Negeri	
31	2 Oktober 2023	Juara III inovator ANDUK BANG BEK (Pelayanan Kependudukan Bagi Yang Berkebutuhan Khusus)	Pemerintah Kota Bekasi (Disdukcapil)	Provinsi	Pj. Gubernur Jawa Barat	
32	3 Oktober 2023	Aplikasi Anduk Bang Bek Penghargaan KIJB (Kompetisi Inovasi Jabar) 2023	Pj. Wali Kota Bekasi (Disdukcapil)	Nasional	Prov Jabar	
33	6 November 2023	Penghargaan Sebagai Satuan Kerja dengan Nilai Indeks Pembangunan Statistik 2,64 (Baik) Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Program Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral 2023	Diskominfo andi Kota Bekasi	Nasional	BPS Pusat	
34	6 November 2023	Penghargaan Pengakuan Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi	Pemerintah Kota Bekasi (BKPSDM)	Nasional	BKN	



No	Tanggal	Uraian	Ditujukan	Kategori	Penghargaan	Foto
1	2	3	4	5	6	7
35	30 November 2023	Penghargaan Sebagai Badan Publik Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota Informatif Dalam E-Monev Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Jawa Barat Tahun 2023	Pj. Wali Kota Bekasi (Humas Setda)	Prov. Jabar	KI Prov Jabar	
36	30 November 2023	Inovasi Duduk Mesra pada Aplikasi E-OPen melalui PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) pada bagian Humas Pemerintah Kota Bekasi meraih predikat Badan Publik Informatif Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota se- Jawa Barat selama 5 (lima) tahun berturut.	Pemerintah Kota Bekasi (Disdukcapil)	Provinsi	Provinsi Jawa Barat	
37	1 Desember 2023	Penghargaan Penerapan Sistem Merit dari KASN	Pemerintah Kota Bekasi	Nasional	Komisi Aparatur Sipil Negara	
38	27 Desember 2023	Penghargaan sebagai Pembina Wajib Pajak Pribadi dan Badan/Perusahaan Teladan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Pj. Wali Kota Bekasi (Bapenda)	Prov. Jabar	Bapenda Prov Jabar	

Sumber : Bagian Humas Setda Kota Bekasi Tahun 2023



**PEMERINTAH
KOTA BEKASI**



 www.bekasikota.go.id

 [@pemkot_bekasi](https://www.instagram.com/pemkot_bekasi)

 [@pemkotbekasi](https://twitter.com/pemkotbekasi)

**LAMPIRAN -
LAMPIRAN**



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 100.1.6.1/Kep.51-Tapem/I/2024
TENTANG

TIM PENYUSUN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KOTA BEKASI TAHUN 2023

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kota Bekasi Tahun 2023, dipandang perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kota Bekasi Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
- 7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Persiapan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 100/851.1/SETDA.Tapem, tanggal 23 November 2023.

MEMUTUSKAN :

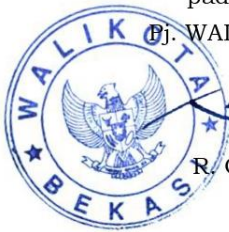
- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kota Bekasi Tahun 2023.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
 - 2. menghimpun dan mengolah data LPPD dan LKPJ serta pengisian Indikator Kinerja Kunci (IKK);
 - 3. terlibat aktif dalam melaksanakan pengolahan data dari unit kerja masing-masing;
 - 4. menyusun dan menyampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD);
 - 5. melaksanakan pembahasan narasi dan materi LPPD dan LKPJ;

- 6. mengikuti Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD);
 - 7. menjawab tindaklanjut dan menyusun rencana aksi terhadap rekomendasi Pansus LKPJ.
- KEEMPAT : Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah LPPD dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 4 Januari 2024

WALI KOTA BEKASI,

R. GANI MUHAMAD



Tembusan Yth :
1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Inspektur Kota Bekasi.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR :100.1.6.1/Kep.51-Tapem/I/2024
TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN KOTA
BEKASI TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KOTA BEKASI TAHUN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/INSTANSI
I.	Pengarah	: Pj. Wali Kota Bekasi
II.	Ketua	: Sekretaris Daerah Kota Bekasi
III.	Wakil Ketua	: Assiten Pemerintahan Setda Kota Bekasi
IV.	Sekretaris	: Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bekasi
V.	Anggota	: 1 Staff Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan Setda Kota Bekasi
		2 Inspektur Kota Bekasi
		3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kota Bekasi
		4 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi
		5 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi
		6 Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi
		7 Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Bekasi
VI.	Tim Teknis	: 1 Perencanaan Ahli Muda Bagian TU Setda Kota Bekasi
		2 Kepala Sub Bagian Pengelola Barang/Jasa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Bekasi
		3 Perencanaan Ahli Muda pada Inspektorat Kota Bekasi
		4 Perencanaan Ahli Muda pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi
		5 Perencanaan Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kota Bekasi
		6 Kepala Sub Bidang Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Anggaran Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi
		7 Perencanaan Ahli Muda pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi
		8 Kepala Sub Bagian TU pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kota Bekasi
		9 Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi
		10 Perencanaan Ahli Muda Dinas Kesehatan Kota Bekasi



NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/INSTANSI
		11 Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi
		12 Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi
		13 Perencanaan Ahli Muda pada Dinas Sosial Kota Bekasi
		14 Perencanaan Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi
		15 Perencanaan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi
		16 Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi
		17 Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi
		18 Perencanaan Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi
		19 Perencanaan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi
		20 Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Bekasi
		21 Perencanaan Ahli Muda pada Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi
		22 Perencanaan Ahli Muda pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi
		23 Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi
		24 Sekretaris pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
		25 Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi
		26 Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi
		27 Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi
		28 Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi
		29 Perencanaan Ahli Muda pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi
		30 Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi
		31 Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi
		32 Perencanaan Ahli Muda pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi
		33 Perencanaan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi



NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/INSTANSI
		34 Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi
		35 Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
		36 Kepala Sub Bagian TU pada Kecamatan Bekasi Timur
		37 Kepala Sub Bagian TU pada Kecamatan Bekasi Barat
		38 Kepala Sub Bagian TU pada Kecamatan Bekasi Utara
		39 Kepala Sub Bagian TU pada Kecamatan Bekasi Selatan
		40 Kepala Sub Bagian TU pada Kecamatan Rawalumbu
		41 Kepala Sub Bagian TU pada Kecamatan Pondokmelati
		42 Kepala Sub Bagian TU pada Kecamatan Medan Satria
		43 Kepala Sub Bagian TU pada Kecamatan Bantargebang
		44 Kepala Sub Bagian TU pada Kecamatan Pondokgede
		45 Kepala Sub Bagian TU pada Kecamatan Jatiasih
		46 Kepala Sub Bagian TU pada Kecamatan Jatisampurna
		47 Kepala Sub Bagian TU pada Kecamatan Mustikajaya

Pj WALI KOTA BEKASI,

R. GANI MUHAMAD





 www.bekasikota.go.id

 [@pemkot_bekasi](https://www.instagram.com/pemkot_bekasi)

 [@pemkotbekasi](https://twitter.com/pemkotbekasi)

PEMERINTAH KOTA BEKASI

